

PERCIK PEMIKIRAN TOKOH MUHAMMADIYAH UNTUK INDONESIA BERKEMAJUAN

Majelis Pustaka dan Informasi
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERCIK PEMIKIRAN
TOKOH MUHAMMADIYAH
UNTUK INDONESIA BERKEMAJUAN

**PERCIK PEMIKIRAN
TOKOH MUHAMMADIYAH
UNTUK INDONESIA BERKEMAJUAN**

Tim Penyusun:

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. (Penasehat)
Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si. (Penasehat)
Dr. H. Muchlas, M.T. (Penanggung jawab)
Widiyastuti, S.S., M.Hum. (Koordinator), Lasa Hs., Roni Tabroni, M.Si.,
Drs. Imron Nasri, Riswinarno, S.S., M.M., David Efendi, M.A.
Sri Lestari Linawati, M.S.I., Amir Nashiruddin, S.H.I.
Rekho Adriadi, M.I.P., Arief Budiman Ch.

Rancang Grafis:

adimpaknala@gmail.com

Manajemen dan Produksi:

M. Purwana, Iwan Setiawan,
Rizky Taruna, Sarikin Busman

IT & Support System:

Aisy R. Syam, Rizky Taruna

Diterbitkan oleh:

Majelis Pustaka dan Informasi
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jl. KHA. Dahlan 103 Yogyakarta 55262
Telp. +62-276-375025, Fax. +62-274-381031
email: mpi@muhammadiyah.id, mpippmuhammadiyah@yahoo.com
website: www.muhammadiyah.or.id

Cetakan pertama, Oktober 2018.

Dicetak oleh:

GRAMASURYA
Jalan Pendidikan No.88, Sonosewu,
Ngestiharjo, Kasihan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Tel. (0274) 413364
email: gramasurya@gmail.com
website: gramasurya.com

Kata Pengantar

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah SWT, atas rahmatnya, persyarikatan Muhammadiyah dapat terus berlangsung hingga saat ini dan sudah mencapai umur satu abad lebih. Keberlangsungan Muhammadiyah hingga mencapai satu abad ini bisa terjadi, selain tentu saja karena ridha Allah, juga karena sejak awal KHA Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah sudah memperhatikan pentingnya kaderisasi para pemimpin yang menggerakkan organisasi Muhammadiyah. Tokoh-tokoh Muhammadiyah mulai dari generasi awal, generasi kedua dan seterusnya bermunculan silih berganti, berkiprah dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dari zaman penjajahan Belanda, Jepang, pada masa awal kemerdekaan, masa pemerintahan Orde Baru, hingga saat ini pada masa pasca reformasi.

Murid-murid atau santri-santri dan kawan-kawan KHA Dahlan, tidak hanya terdiri dari kaum lelaki saja, juga kaum perempuan, terutama para remaja putri dari kampung Kauman, yang belum lama ini telah dibuat filmnya berjudul 9 Putri Sejati oleh LSBO PP Muhammadiyah, adalah termasuk golongan pertama para pendukung pergerakan Muhammadiyah. Dapat disebutkan beberapa nama, misalnya H.M. Syuja adalah santri dan kawan dekat KHA Dahlan yang merintis Bagian Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) yang menginisiasi pendirian rumah sakit dan balai pengobatan, panti asuhan anak yatim dan santunan sosial lainnya. H.M. Hisyam yang merintis pengembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah dalam manajemen Bestuur Muhammadiyah Bahagian Sekolahan. H.M. Fachroedin yang menjadi Ketua Bestuur Muhammadiyah Bahagian Tabligh. H.M. Mokhtar yang menjadi Ketua Bahagian Taman Pustaka. H.M. Sangidu, yang kemudian menjadi HoofdPanghulu Karaton Yogyakarta, adalah salah pendukung KHA Dahlan dan memberikan fasilitas penggunaan nDalem Pengulon untuk kegiatan-kegiatan Muhammadiyah seperti Tabligh dan Frobel atau Taman Kanak-kanak Aisyiyah. Dan masih banyak lagi nama-nama. Diantara kaum putri, bisa disebut misalnya, Siti Bariyah, Siti Munjiyah, Siti Umniyah, Siti Badilah, Siti Aisyah anak KHA Dahlan sendiri dan tak ketinggalan Siti Walidah atau kita kenal Nyai Ahmad Dahlan, adalah tokoh-

tokoh perempuan Muhammadiyah (Aisyiyah) generasi pertama. Siti Bariyah menjadi ketua Aisyiyah yang pertama. Siti Umniyah dan Hayyinah terlibat dalam kepanitiaan Kongres Perempuan pertama 22-25 Desember 1928. Siti Umniyah menyampaikan orasi berjudul Derajat Perempuan, tentang konsep perempuan Islam berkemajuan.

Majelis Pustaka dan Informasi, pada bulan November 2014 telah menerbitkan buku 100 Tokoh Muhammadiyah yang Menginspirasi, berisi tentang profil para tokoh Muhammadiyah dan kiprahnya dalam persyarikatan Muhammadiyah dan kehidupan kebangsaan Indonesia. Pada kesempatan ini, MPI PP Muhammadiyah kembali menerbitkan sebuah buku dengan judul Percik Pemikiran Tokoh Muhammadiyah untuk Indonesia Berkemajuan. Buku yang secara khusus dimaksudkan untuk mendokumentasikan percik-percik pemikiran para tokoh Muhammadiyah, baik berupa pikiran-pikiran pribadi maupun pikiran-pikiran dalam upaya pengembangan Muhammadiyah dan khususnya pemikiran-pemikiran sebagai sumbangsih Muhammadiyah kepada kehidupan kebangsaan Indonesia. Buku ini menjadi pelengkap dari buku sebelumnya yang sudah disebutkan di atas. Memang apa yang sudah dikumpulkan oleh MPI ini belum lengkap, karena baru memuat sebagian kecil dari banyak pemikiran yang sudah berkembang di kalangan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Mudah-mudahan dapat disempurnakan lagi di kemudian hari.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan penghargaan atas jerih payah yang sudah dilakukan oleh Majelis Pustaka dan Informasi yang sudah menyusun buku ini. Yang demikian ini adalah sebuah tradisi baik yang sudah dilakukan oleh Majelis Pustaka sejak jaman dahulu. Kepada Tim Penyusun dan berbagai pihak yang membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penerbitan buku ini diucapkan banyak terima kasih. Nasrun Minallah wa fathun qarib.

Yogyakarta, Februari 2019

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.
Ketua (Bidang Pustaka dan Informasi)

Kata Pengantar

Majelis Pustaka dan Informasi

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid yang dinamis, kreatif dan inovatif, pada dirinya telah menyatu kata-kata reformis dan modernis, sebagai simbol jati diri yang modern dan berwawasan masa depan. Dari kata-kata reformis dan modernis itu dapat dipahami bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi pertama sebagai pelopor dalam mengaktualisasikan ajaran Islam secara murni, ikhlas dan mutaba'ah, yang kemudian secara bertahap menyebar dengan pesatnya di Indonesia. Bahkan, di abad kedua perjalanan gerak dakwah perjuangan Muhammadiyah merambah sampai ke luar negeri dengan berdirinya Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah di berbagai negara.

Sebagai kekuatan nasional, sejak awal berdirinya pada tanggal 08 Dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan 18 Nopember 1912 M, Muhammadiyah telah berjuang dalam pergerakan kemerdekaan dan para tokoh serta warganya terlibat aktif dalam proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamlirkan pada 17 Agustus 1945. Muhammadiyah memiliki komitmen dan tanggung jawab tinggi untuk memajukan bangsa dan Negara sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. Para tokoh Muhammadiyah sejak era K.H. Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan hingga sesudahnya mengambil peran aktif dalam usaha-usaha kebangkitan nasional dan perjuangan meraih kemerdekaan.

Muhammadiyah, dalam kehidupan kebangsaan maupun kemanusiaan universal berdasarkan pada pandangan Islam berkemajuan, menegaskan komitmen untuk terus berkiprah menyemai benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran dan keutamaan hidup (*rahmatan lil alamnin*) secara dinamis menuju peradaban yang utama. Islam ditegakkan untuk menjunjung tinggi kemanusiaan baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam yang menggelorakan misi anti-perang, anti-terorisme, anti-penindasan, anti-keterbelakangan, dan anti terhadap segala

bentuk perusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemungkaran yang menghancurkan kehidupan.

Di dalam Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Khittah Denpasar), hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 2002, Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya, sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup. Selain itu, Khittah Perjuangan Muhammadiyah juga menjadi acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mewujudkan "*Baldatun Thoyyibatun Warabbun Ghafuur*".

Banyak pemikiran para tokoh Muhammadiyah dalam bingkai kebangsaan yang belum terangkum dan diketahui oleh para kader Persyarikatan maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah mempunyai gagasan untuk menyusun sebuah buku yang mengumpulkan pemikiran-pemikiran para tokoh Muhammadiyah tersebut, mulai dari masa awal berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah hingga saat ini. Buku ini diberi judul "*Percik Pemikiran Tokoh Muhammadiyah untuk Indonesia Berkemajuan*".

Buku ini disusun terdiri dari tiga bagian, pertama memuat deskripsi sekilas tentang peranan dan kontribusi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bagian ini, ditampilkan dua buah tulisan, yakni: *Etos Berkemajuan Muhammadiyah dan Daya Transformasi Memajukan Indonesia dan Muhammadiyah Mengawal Perjalanan Bangsa*.

Bagian kedua memuat tentang percik pemikiran para tokoh Muhammadiyah berupa artikel, makalah dan tulisan ilmiah, sebagai sumbangsih pemikiran bagi upaya pembangunan Indonesia dengan mencermati permasalahan kehidupan yang dihadapi bangsa Indonesia. Di bagian ini ditampilkan enam tulisan, yakni: 1). *Jalan Persatuan Para Pemimpin* (merupakan bagian pemikiran KHA Dahlan yang disampaikan sebagai pidato dalam Rapat Tahunan ke-11 tahun 1922, di masa akhir kehidupan dan kepemimpinan beliau. Transkrip lengkap pidato ini dimuat di buku Album Tahun 1923 terbitan Hofdbestuur

Moehammadijah Bahagian Taman Poestaka dengan judul *Tali Pengikat Hidup Manusia*, dimuat ulang di dalam buku Perkembangan Pemikiran Muhammadiyah Dari Masa Ke Masa, terbitan PD Dua Dimensi, tahun 1985. Di dalam jejaring internet dapat dicari dengan kata kunci: Tali Pengikat Hidup Manusia); 2). *Muhammadiyah, Nasionalisme, dan Indonesia Masa Depan* (Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif); 3). *Bhinneka Tunggal Ika, Kemajemukan Budaya Indonesia* (Prof. Dr. Dadang Kahmad); 4). *Gerakan Filantropi Muhammadiyah untuk Indonesia Berkemajuan* (Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.); 5). *Ekoteologi Pertanian untuk Mengatasi Masalah dan Pertanian Ramah Lingkungan* (Dr. Said Tuhuleley, M.M.); dan 6). *Memahami Bencana di Indonesia dan Paradigma Penanggulangan Bencana* (Rahmawati Husein, Ph.D.).

Bagian ketiga mencoba merekam berbagai pengalaman, pandangan dan gagasan sejumlah tokoh Muhammadiyah. Dalam proses penyusunannya, telah didaftar ratusan nama, namun, keterbatasan referensi dan waktu membuat bagian ini hanya dapat ditampilkan sebanyak 60 nama tokoh dan percik pemikirannya. Disusun secara urut alfabetik mulai dari tokoh berawalan nama huruf A yakni Ahmad Badawi, sampai tokoh berawalan nama huruf Z yakni Zainuddin Fananie. Harapannya, ke depan akan dapat dikumpulkan lebih banyak lagi.

Akhirnya, mudah-mudahan usaha penyusunan buku ini memberi manfaat bagi kita semua dalam usaha memahami sejarah dan perjuangan kehidupan Bangsa Indonesia, khususnya kaitannya dengan keberadaan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan Bangsa Indonesia.

Kepada segenap Tim Penyusun, Tim Manajemen dan Produksi, serta Tim IT & Support System, kami ucapkan terima kasih atas segala jerih payahnya dalam menghadirkan buku ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak sponsor yang memberi dukungan penuh bagi penerbitan buku ini, demikian juga pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Semoga karya ini menjadi amal shaleh dan amal jariyah kita semua. Amin.

Yogyakarta, Shafar 1440 H./November 2018 M.

**Majelis Pustaka dan Informasi
Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

**SUSUNAN ANGGOTA PIMPINAN
MAJELIS PUSTAKA DAN INFORMASI
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
PERIODE 2015-2020**

Ketua : Dr. H. Muchlas, M.T.
WakilKetua : A. Najib Burhani, M.A., M.Sc., Ph.D.
Wakil Ketua : Hj. Widiyastuti, S.S., M.Hum.
Wakil Ketua : Afan Kurniawan, S.T., M.T.
Wakil Ketua : Drs. Imron Nasri
Wakil Ketua : Edy Kuscahyanto
WakilKetua : Roni Tabroni, S.Sos., M.Si.
Sekretaris : Iwan Setiawan
Wakil Sekretaris : Dinan Hasbuddin Apip, S.Ag.
Bendahara : Drs. H. Purwana, M.A.
Wakil Bendahara : Ariati Dina Puspitasari, M.Pd.

I. DIVISI MUSEUM DAN KEARSIPAN:

1. Dr. Ir. H. Gunawan Budiyanto, M.P.
2. M. Faqih Asyikin, S.T.
3. Dr. Hj. Eny Winaryati, M.Pd.
4. David Efendi, S.IP., M.A.
5. Muarif

II. DIVISI PENDAYAGUNAAN IT:

1. Ir. Suyatno, M.Si.
2. Tawar, S.Si., M.Kom.
3. Arif Rahman, S.Kom., M.T.
4. Dr. H. Imam Riadi, M.Kom.
5. Dr. Fathul Wahid
6. Dr. Rusdi Umar, M.T.
7. Gunawan Ariyanto, M.T., Ph.D

III. DIVISI PENGUATAN JURNALISTIK:

1. Drs. H. Banjar Chaeruddin, M.M.
2. H. Zulkifli Gani Ottoh, S.H.
3. Nurcholis MA. Basyari
4. Drs. Siswanto, M.Sc.
5. Imam Prihadiyoko
6. Wahyudi Pratama
7. Abdul Jalil

IV. DIVISI BROADCASTING DAN INFORMASI PUBLIK:

1. Dr. Hj. Retno Intani ZA., M.Sc.
2. Mustofa B. Nahrawardaya
3. Arif Nurrahman, S.E.
4. Husni Tamrin, M.T., Ph.D.
5. Khoiri Ahmadi
6. Kawiyan
7. Abdul Rasyid
8. Rommy Fibri
9. Heri Ruslan
10. Iu Rusliana
11. Ichwan Situmeang
12. Makroen Sanjaya

V. DIVISI PUBLIKASI DAN KERJASAMA:

1. Dr. Andre Ikhsano, M.Si.
2. Dr. Anam Sutopo, M.Hum.
3. Dr. Toni Toharudin, M.Sc.
4. Yoriss Karebet
5. Rifki Mubarok

VI. DIVISI PUSTAKA DAN PENERBITAN:

1. Drs. H. Lasa Hs., M.Si.
2. M. Amir Nashiruddin, S.HI.
3. Arief Budiman Ch.
4. Irfan Amalee, S.Ag., M Sc.
5. M. Abdullah Darraz, S.SI., M.A.
6. Andri Yana, M.Pd.

Disalin dari Lampiran SK PP Muhammadiyah
Nomor : 226/KEP/I.0/D/2018
Tanggal : 17 Muharram 1440 H/27 September 2018 M
Tentang: Perubahan Anggota Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020

Daftar Isi

Prolog: Memaknai Keindonesiaan Mentransformasikan Kepemimpinan Bangsa Oleh Dr. Haedar Nashir, M.Si. - 1

Bagian Pertama:

Etos Berkemajuan Muhammadiyah dan Daya Transformasi Memajukan Indonesia - 15

Muhammadiyah Mengawal Perjalanan Bangsa - 28

Bagian Kedua: Percik-Percik Pemikiran untuk Indonesia Berkemajuan

K.H. Ahmad Dahlan - Jalan Persatuan Para Pemimpin - 39

Ahmad Syafii Maarif - Muhammadiyah, Nasionalisme, dan Indonesia Masa Depan - 44

Dadang Kahmad - Bhinneka Tunggal Ika, Kemajemukan Budaya Indonesia - 51

Hajriyanto Y. Thohari - Gerakan Filantropi Muhammadiyah untuk Indonesia Berkemajuan - 58

Said Tuhuleley - Ekoteologi Pertanian untuk Mengatasi Masalah dan Pertanian Ramah Lingkungan - 67

Rahmawati Husein, Ph.D. - Memahami Bencana di Indonesia dan Paradigma Penanggulangan Bencana - 82

Bagian Ketiga: Diantara Tokoh Muhammadiyah untuk Indonesia Berkemajuan

Ahmad Badawi - Politik dan Agama untuk Kebahagiaan Dunia-Akhirat - 91

AR Fachruddin - Menjelaskan Asas Pancasila Secara Sederhana dan Bijaksana - 95

Ahmad Azhar Basyir - Ijtihad, Berpikir Maksimal untuk Mendapatkan Ketentuan Hukum Syara' - 99

Ahmad Adaby Darban - Memahami Sejarah, Memahami Realitas Sosial, Merangkai Harmoni - 102

Abdul Bari Sho'im - Konsepsi Filantropi Muhammadiyah - 105

A.M. Fatwa - Saya Menghayati dan Mengamalkan Pancasila Justru Saya Seorang Muslim - 108

Abdul Hadi WM - Menafasi Kebudayaan Indonesia dengan Puitika Sufistik - 111

Abdul Kahar Muzakkir - Menggagas Perguruan Tinggi untuk Kaum Perempuan	- 114
Abdul Mu'ti - Dialog Antar Agama Untuk Kedamaian Sejati	- 117
Abdul Karim Amrullah - Umat Islam Harus Dicerdaskan dan Diberi Pendidikan yang Maju	- 120
Abdullah Tjan Hoatseng - Dakwah untuk Menentang Penjajah	- 123
AR Sutan Mansur	- 126
Asjmun Abdurrahman	- 129
Ki Bagus Hadikusumo - Masyarakat Islam Memberi Perlindungan dan Jaminan Kemerdekaan Beragama	- 131
Bakri Syahid - Membumikan Islam dengan Tafsir Bahasa Jawa	- 136
Dauzan Farook - Pahlawan Literasi di Atas Putaran Roda Sepeda	- 139
Djoeanda Kartawidjaja - Meletakkan Dasar Wawasan Nusantara	- 142
Din Syamsuddin - Dialog Antar Agama dan Peradaban	- 145
Farid Ma'ruf	- 149
Faqih Usman	- 153
K. R.H. Hadjid - Kaderisasi Ulama Muhammadiyah	- 157
K.H. Hisyam	- 160
K.H. Ibrahim - Agama Islam itu Agama yang Mengajak Persatuan	- 163
Ismail Thaib - Ahli Tafsir, Sang Zuhud dari Samudera Pasai	- 166
Kasman Singodimejo - Jalan pemimpin itu bukan jalan yang mudah. Memimpin itu jalan menderita	- 168
Kuntowijoyo - Humanisasi - Liberasi - Transendensi	- 171
Lasa Hs. - Menggerakkan Kepustakawanan Muhammadiyah	- 174
Lukman Harun	- 177
Mas Mansoer - Menyatukan Pemahaman Masalah Hukum Islam	- 190
M. Amin Abdullah - Integrasi-Interkoneksi Islam dan Sains	- 185
M. Busyro Muqoddas - Mengendalikan Krisis Moral dan Etika	- 189
M. Dawam Rahardjo - Membangun Ekonomi Islam Institusional	- 193
Muhammad Djamhari - Dari Muhammadiyah Untuk Ummat dan Bangsa	- 197
M Dasron Hamid - Berkhidmat Mengelola Muhammadiyah	- 200
Muhammad Khalil Kamaludiningrat (Sangidu) - Menjadi HoofdPenghulu yang Mengayomi	- 203
Mohammad Djazman - Menumbuhkan Benih Muslim Intelektual di PTM	- 206
M. Hasbi Ash Shiddieqy - Memelopori Fiqh Indonesia Autentik	- 210
Muchlas Abror - Menjadi Muballigh dan Sekaligus Wartawan Muhammadiyah	- 213
M. Rasjidi - Islam Menentang Komunisme	- 217
Wardan Diponingrat - Wujud al-Hilal untuk Menentukan Bulan Baru Kamariah	- 220

M. Yunus Anis	- 223
Rusydi Hamka - Teladan Dunia Pers Peduli Nasib Bangsa	- 226
Said Tuhuleley - Selama Rakyat Masih Menderita, Tak Ada Kata Istirahat	- 229
Siti Aisyah Hilal - Meletakkan Dasar Kaderisasi Aisyiyah	- 232
Siti Baroroh Baried - Hidup Saya Harus Menuntut ilmu	- 235
Siti Bariyah - Muhammadiyah Mengajarkan Agama Islam Melalui Sekolah	- 238
Siti Badilah Zuber - Konsep Kemitraan dalam Rumah Tangga	- 241
Siti Chamamah Soeratno - Aisyiyah Pelopori Perempuan Indonesia Mengenyam Pendidikan	- 244
Elyda Djazman - Kritis dan Proaktif Membangun Kesetaraan	- 248
Siti Hayinah Mawardi - Dari Aisyiyah untuk Pergerakan Perempuan Indonesia	- 252
Siti Munjiyah - Menggagas Perubahan Pandangan tentang Kaum Perempuan	- 255
Siti Noordjannah Djohantini - Aisyiyah Berfikir dan Berhikmat Darmabakti untuk Bangsa	- 258
Siti Umniyah - Mempelopori Pelembagaan PAUD	- 262
Siti Walidah (Nyai A. Dahlan) - Pelopor Gerakan Perempuan	- 265
Soedirman - Jihad Mempertahankan Kemerdekaan RI	- 269
Soekarno - Islam itu Kemajuan	- 272
Sumodirjo - Membina Gerakan Kepemudaan Muhammadiyah	- 277
Susiknan Azhari - Usaha Menyatukan Kalender Islam	- 280
Usman Yatim - Uji Kompetensi Wartawan untuk Membangun Kualitas dan Idealisme	- 283
KH R Zainuddin Fananie - Meletakkan Dasar Pendidikan Pesantren Moderen	- 285
Daftar Bacaan	- 290



Prolog

MEMAKNAI KEINDONESIAAN MENTRANSFORMASIKAN KEPEMIMPINAN BANGSA^{*)}

Oleh Dr. Haedar Nashir, M.Si.^{**)}

Indonesia adalah anugerah Allah termahal di muka bumi ini. Negara kepulauan ini terbentang luas antara benua Australia dan Asia dalam gugusan terpanjang, yang iklimnya sangat ditentukan oleh angin musim. Sejarawan Bernard Vlekke menuliskan ketakjubannya, betapa luas wilayah Indonesia, suatu kawasan kepulauan setengah juta kilometer persegi lebih luas dibanding tanah yang membentuk Amerika Serikat kontinental tanpa Alaska. Semua pulau dipersatukan oleh lautan, yang jarak antar pulau layaknya lintasan antarnegara.

Kekayaan alam Indonesia sungguh luar biasa dan merupakan bentangan nikmat Tuhan yang tak berbilang. Gugusan kepulauan ini telah memikat hati seorang Eduard Douwes Dekker, yang melukiskan Indonesia bagaikan untaian Zamrud di Khatulistiwa. Dalam nyanyian kesyukuran seniman kondang Koes Ploes, di negeri ini tongkat dan batu pun jadi tanaman. Suatu metafora tentang Indonesia yang kaya untuk disyukuri dan tidak boleh disia-siakan oleh seluruh anak negeri.

^{*)} Naskah ini telah dibaca sebagai Pidato Kebangsaan dengan tema "Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan yang Berkemajuan Menuju Indonesia Emas" dalam rangkaian Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 Tahun 2018, bertempat di Universitas Muhammadiyah Malang, 12 Agustus 2018.

^{**)} Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020.

Karenanya, ketika negeri ini merayakan HUT ke 73 pada 17 Agustus 2018 beberapa hari ke depan, sungguh layak semua elite dan warga bangsa berefleksi secara mendalam tentang maka keindonesiaan. Seraya bertanya pada diri sendiri, hendak diapakan dan dibawa ke mana kepulauan anugerah Tuhan ini oleh seluruh elite dan warga bangsa menuju cita-cita negara idaman, negeri Gemah Ripah Lohjinawi. Segenap elite dan warga bangsa wajib dituntut tanggung jawabnya dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara-bangsa yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, maju, adil, dan makmur sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Lebih-lebih bagi para pemimpin bangsa selaku pemangku amanat utama bangsa dan negara!

Indonesia dan Keindonesiaan

Indonesia lahir di pentas sejarah melalui jalan panjang sarat dinamika. Kepulauan yang luas ini terbentuk di zaman Glacial terakhir pada rentang tiga sampai sepuluh juta tahun yang lalu hingga dihuni oleh penduduk setempat dan kemudian menjadi suatu negara-bangsa yang bernama INDONESIA. Hatta untuk sebuah nama, Indonesia lahir dalam pilihan yang tidak mudah. James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl tahun 1847 dan 1850 yang silam lebih menggunakan nama “Melayunesia” ketimbang “Indunesia” yang mulai populer kala itu.

Adalah Adolf Bastian seorang etnolog pada Universitas Berlin tahun 1884 memilih dan kemudian mempopulerkan nama INDONESIA. Satu abad kemudian, para pejuang kemerdekaan di era kebangkitan nasional berketetapan hati memilih nama Indonesia di antara nama-nama Nusantara, Dwipantara, Swarnadwipa, Insulinda, dan Melayunesia. Pada saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan kemudian penetapan konstitusi dasar dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 akhirnya nama INDONESIA dipilih menjadi satu-satunya nama resmi untuk Negara Kesatuan ini. Proses pergumukan yang panjang itu merupakan keputusan dan takdir sejarah untuk sebuah nama Indonesia yang di dalamnya terkandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur akan hadirnya sebuah bangsa dan negara yang besar.

Jumlah pulau di Indonesia pun tak berbilang banyaknya. Menurut catatan Deputy Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, bahwa total pulau Inronesia ialah 17.504, dengan 16.056 pulau pada tahun 2017 terdaftar dibakukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Pusat Survei dan Pemetaan ABRI/TNI tahun 1987 jumlah pulau Indonesia 17.503, sebanyak

5.707 telah bernama, termasuk 337 nama pulau di kawasan sungai. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tahun 2002 melaporkan data lebih besar, yaitu 18.306 pulau. Sementara Departemen Dalam Negeri tahun 2004 menyampaikan data jumlah pulau di negeri ini 17.504, dengan rincian 7.870 pulau telah memiliki nama, sementara 9.634 tidak bernama. Dari ribuan pulau tersebut sekitar 6.000 yang berpenghuni (*Wikipedia Indonesia*, 2018).

Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan berdasar prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*). Dalam Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dinyatakan, bahwa laut Indonesia, termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa penjajahan berdasar Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939, bahwa pulau-pulau di Indonesia dipisahkan oleh laut, serta laut di sekitar dan di antara pulau bukanlah bagian dari kepulauan Indonesia, kecuali sekeliling 3 mil dari garis pantai. Setelah perjuangan politik yang panjang akhirnya Deklarasi Djuanda 1957 tersebut diakui dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982, yang kemudian dipertegas tahun 1985 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Dalam konteks perjuangan kebangsaan, Indonesia adalah sebuah identitas dan energi politik perlawanan terhadap kaum penjajah yang nista. Ketika Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) dan Mohammad Hatta berjuang di negeri Belanda dengan membawa nama Indonesia. Sementara di dalam negeri hadir sosok-sosok dr Soetomo, dr Wahidin Soedirohoesodo, HOS Tjokroaminoto, Ahmad Dahlan, Agus Salim, Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, Sutardjo Kartohadikusumo, Soekarno, Muhammad Hatta, dan seluruh anak bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Semua arus pergerakan itu hadir untuk dan atas nama INDONESIA yang bercita-cita untuk menjadi bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang dalam referensi kaum Muslimin menjadi negeri Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.

Indonesia ratusan tahun dijajah Belanda, yang sebelumnya dijajah Portugis, yang menghasilkan nestapa panjang dalam sejarah rakyat di kepulauan ini yang bekasnya masih terasa hingga saat ini. Para pendiri bangsa memahami sepenuhnya penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan yang panjang dan pentingnya arti kemerdekaan, sehingga spirit perjuangan kemerdekaan itu diabadikan dalam alinea Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut: *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,*

maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Indonesia sebagai negara-bangsa bukan hanya merdeka dan berdiri di atas perjuangan rakyat yang penuh pergumulan, tetapi juga menetapkan fondasi ideologi dan konstitusi dasar yang kokoh serta fundamental yaitu “*suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*” Selain itu ditetapkan pula tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yakni untuk “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.*”

Hal-hal yang mendasar sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 itu merupakan nilai-nilai dan landasan konstitusional yang harus menjadi pijakan, bingkai, dan orientasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sekaligus dan seluruh komponen bangsa sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut jelas dasar, arah, dan cita-citanya untuk menjadi misi dan visi nasional sepanjang masa. Sehingga Indonesia itu bukan sekadar ragad-fisik, tetapi menurut Soepomo “bernyawa” atau mempunyai nyawa serta menurut Soekarno memiliki “*filosofisch grondslag*” yaitu fundamen, filosofi, pemikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, dan hasrat yang sedalam-dalamnya di mana di atasnya diletakkan bangunan Indonesia yang kekal dan abadi.

Indonesia adalah identitas sebuah bangsa yang majemuk, yang dalam kepusparagamannya telah membentuk diri menjadi satu: Bhineka Tunggal Ika. Putra-putri generasi bangsa ketika behimpun dalam Sumpah Pemuda 1928 dengan penuh gelora telah menjadikan Indonesia sebagai titik temu untuk “Bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu” yakni Indonesia.

Puncaknya pada 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atasnama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, yang diikuti dengan penetapan Konstitusi Dasar UUD 1945 yang di dalamnya terkandung Pancasila sebagai fondasi dasar dan utama kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar masyarakat majemuk atau *plural society* justru non-komplementer ibaratbair dan minyak. Bagi Furnivall (1967), masyarakat majemuk terdiri dari dua atau lebih tatanan sosial yang berbeda, hidup sejajar dalam satu entitas politik tanpa banyak bercampur aduk satu sama lain. Menurut antropolog Clifford Geertz (1968; 1976), masyarakat majemuk terdiri atas subsistem-subsistem yang lebih kurang berdiri sendiri dan dipersatukan oleh ikatan-ikatan primordial, sehingga sering terkategorisasi secara sosial. Karenanya merupakan suatu anugerah Allah serta kearifan para tokoh dan warganya manakala masyarakat Indonesia yang majemuk ini bersatu dalam satu ikatan Negara Keeatuan Republik Indonesia.

Di tengah kemajemukan yang terus berproses itu Indonesia membentuk diri sebagai bangsa yang toleran, damai, dan dewasa itu komitmen dan peran umat Islam sebagai mayoritas sungguh besar, yang oleh antropolog Kontjaraningrat dan sejarawan Sartono Kartodirdjo disebut sebagai kekuatan perekat integrasi bangsa. Menjadi naif dan merupakan pembelokkan sejarah jika ada satu golongan atau siapapun yang gemar mengklaim diri paling berkontribusi dalam tegak dan bersatunya NKRI di negeri tercinta ini. Integrasi nasional di negeri ini hasil konsensus dan kearifan sosial seluruh komponen bangsa dan umat Islam secara keseluruhan, yang memiliki andil besar dalam sejarah keindonesiaan yang penting itu.

Bangsa Indonesia selaian berideologi Pancasila, juga tidak dapat lepas dari agama sebagai ajaran Ilahi yang menyatu di tubuh bangsa ini dan membentuk watak keindonesiaan. Nilai-nilai agama merupakan pandangan hidup yang kokoh dan menjadi bagian terpenting dari denyut-nadi kehidupan bangsa Indonesia. Agama dan umat beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga keberadaannya menyatu dengan jatidiri Indonesia. Siapa menjauhkan agama dari kehidupan bangsa ini sama dengan mengingkari jatidiri keindonesiaan. Para pendiri bangsa Indonesia menyadari pentingnya agama dan kehadiran Tuhan dalam perjuangan kebangsaan, sehingga dalam paragraf Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Dalam pasal 29 UUD 1945 bahkan secara tegas dicantumkan tentang eksistensi dan kemenyatuan bangsa Indonesia dengan agama sebagai sistem keyakinan dan kepercayaan. Agama merupakan ajaran yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Agama sebagai sumber nilai utama yang fundamental berfungsi sebagai kekuatan transendental yang luhur dan mulia bagi kehidupan bangsa. Nilai-nilai instrinsik keagamaan telah memberi inspirasi bagi para pendiri bangsa dan perumus cita-cita negara dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang berbasis pada ajaran agama. Nilai-nilai agama bahkan tercermin dalam Pancasila sebagai ideologi negara.

Agama manapun bukan hanya kumpulan tuntunan ritual ibadah dan doktrin moral yang terkandung dalam ajaran kitab suci. Lebih dari itu, agama merupakan model perilaku yang tercermin dalam tindakan nyata yang mendorong penganutnya memiliki watak jujur dan dipercaya, dinamis, kreatif, dan berke-majuan. Dalam pandangan Islam, Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah yang Maha Pencipta (*habl min Allah*), tetapi juga mengatur dan memberi arah kehidupan dalam hubungan antar umat manusia (*habl min al-nas*) yang membentuk peradaban hidup yang utama. Di sinilah letak esensi agama dalam kehidupan umat manusia.

Karenanya, agama bagi kehidupan bangsa Indonesia dapat dijadikan sebagai sumber nilai pedoman hidup, panduan moral, dan etos kemajuan. Nilai-nilai agama dapat menumbuhkan etos keilmuan, orientasi pada perubahan, kesadaran akan masa depan yang lebih baik, pendayagunaan sumberdaya alam secara cerdas dan bertanggung jawab, inovasi atau pembaruan, kebersamaan dan toleransi, disiplin hidup, kemandirian, serta hal-hal lain yang membawa pada kemajuan hidup bangsa. Nilai-nilai agama juga dapat mengembangkan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang adil tanpa diskrimansi, serta hubungan antarumat manusia yang berkeadaban mulia. Dengan nilai-nilai agama itu, bangsa Indonesia dapat menjalani kehidupan di abad moderen yang membawa pada keselamatan dunia dan akhirat.

Agama dalam kontek berbangsa dan bernegara tentu harus menyatu dalam jiwa, pikiran, dan praktik hidup elite dan warga. Para elite negeri di manapun berada, termasuk di legislatif, eksekutif, dan yudikatif mesti menghayati setiap agama yang dipeluknya sekaligus menjadikan agama sebagai fondasi nilai yang esensial dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa harus dihantui oleh paham sekularisme negara. Sebab Indonesia memang bukan negara agama, tetapi agama menjad sumber nilai penting, sekaligus

tidak boleh menjadikan negeri ini menjadi sekuler. Berbagai macam krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk merebaknya korupsi, kemaksiatan, dan ketidakadilan antara lain karena lepasnya nilai agama dari kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Agama dan umat beragama sungguh berperan penting dalam kehidupan kebangsaan di negeri ini. Karenanya agama dan institusi keagamaan jangan direduksi oleh satu atribut dan golongan primordial tertentu, seolah mereka mewakili seluruh umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya. Lebih-lebih manakala klaim golongan keagamaan itu hanya dijadikan alat meraih kekuasaan politik dan memperlalat negara untuk memenuhi kepentingan golongan sendiri dalam hasrat ananiyah-hizbiyah yang menyala-nyala.

Dalam kehidupan kebangsaan saat banyak krisis terjadi, justru jadikan agama sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mencerahkan. Jadikan agama sebagai *Din at-Tanwir*, ajaran yang mencerahkan kehidupan untuk menerangi kegelapan jiwa, pikiran, dan tindakan manusia dari apa yang oleh Peter L Berger disebut *chaos* yang memerlukan kanopi suci agama. Kehidupan kebangsaan di Indonesia saat ini diwarnai oleh krisis moral dan etika, disertai berbagai paradoks dan pengingkaran atas nilai-nilai keutamaan yang selama ini diakui sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kenyataan ini ditunjukkan oleh perilaku elite dan warga masyarakat yang korup, konsumtif, hedonis, materialistik, suka menerabas, dan beragam tindakan menyimpang lainnya. Sementara itu proses pembodohan, kebohongan publik, kecurangan, pengaburan nilai, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya (*tazlim*) semakin merajalela di tengah usaha-usaha untuk mencerahkan (*tanwir*) kehidupan bangsa. Situasi paradoks dan konflik nilai tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan makna dalam banyak aspek kehidupan dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara (*PP Muhammadiyah*, 2014).

Pemimpin Bangsa

Bangas Indonesia pasca kemerdekaan 1945 telah melewati fase sejarah yang sarat dinamika, sejak era 1945-1965 pada masa Preesiden Soekarno, kemudian zaman Presiden Soeharto tahun 1965-1998, serta setelah era reformasi 1998 sampai saat ini. Dalam pandangan Muhammadiyah, Indonesia saat ini mengalami perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda dengan masa-masa terdahulu. Sejak reformasi yang digulirkan satu setengah dasawarsa lalu, Indonesia telah menjadi negara demokratis terbesar ketiga setelah India dan

Amerika Serikat. Krisis ekonomi yang dialami pada 1997/1998, yang menda-tangkan akibat-akibat sosial-politik yang berkepanjangan telah teratasi. Dengan tingkat pertumbuhan yang cukup baik, meski mulai menurun pada tahun terakhir ini, Indonesia dianggap sebagai negara yang secara ekonomi sangat menjanjikan, kendati dihadapkan pada kesenjangan sosial ekonomi yang memprihatinkan. Realitas kehidupan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia berkembang sedemikian kompleks.

Setelah 73 tahun merdeka, Indonesia masih mengalami kejumudan (stagnasi), penyimpangan (deviasi), dan peluruhan (distorsi) dalam berbagai bidang kehidupan kebangsaan ditimbang dari semangat, pemikiran, dan cita-cita nasional yang diletakkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Meskipun terdapat banyak kemajuan, seperti dalam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan suasana kemajemukan bangsa yang terpelihara dengan baik, tak dapat dipungkiri masih banyak persoalan rumit dan mendesak yang harus segera diselesaikan. Di antara masalah yang cukup serius adalah korupsi yang masif, penegakan hukum yang lemah, kesenjangan sosial yang melebar, sumberdaya alam yang dieksploitasi dan dikuasai pihak asing, dan hal-hal lain yang berdampak luas pada kehidupan kebangsaan yang jauh dari cita-cita nasional.

Kehidupan kebangsaan kita masih diwarnai oleh krisis moral dan etika, disertai berbagai paradoks dan pengingkaran atas nilai-nilai keutamaan yang selama ini diakui sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kenyataan ini ditunjukkan oleh perilaku elite dan warga masyarakat yang korup, konsumtif, hedonis, materialistik, suka menerabas, dan beragam tindakan menyimpang lainnya. Sementara itu proses pembodohan, kebohongan publik, kecurangan, penga-buran nilai, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya (*tazlim*) semakin merajalela di tengah usaha-usaha untuk mencerahkan (*tanwir*) kehidupan bangsa. Situasi paradoks dan konflik nilai tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia kehi-langan makna dalam banyak aspek kehidupan dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara.

Akibat lebih jauh dari masalah-masalah krusial dan kondisi paradoks itu, Indonesia semakin tertinggal dalam banyak hal dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia telah banyak kehilangan peluang untuk berkembang menjadi bangsa atau negara yang berkemajuan. Jika permasalahan ini tidak memperoleh pemecahan yang sungguh-sungguh melalui upaya-upaya

rekonstruksi yang bermakna, maka Indonesia berpotensi menjadi negara gagal, salah arah dalam menempuh perjalanan ke depan. Situasi demikian jelas bertentangan dengan makna dan cita-cita kemerdekaan.

Sesungguhnya Indonesia memiliki modal untuk berkembang menjadi negara berkemajuan. Syaratnya ialah adanya rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang ditegakkan di atas nilai-nilai asar berbangsa yang kokoh sekaligus melakukan perubahan transformasional yang signifikan dalam alam pikiran, pola sikap, dan tindakan para elite dan warganya untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bermakna lebih dari sekadar kemajuan fisik-materi, kebebasan berdemokrasi, dan hal-hal lainnya tanpa bangunan nilai yang kuat.

Dalam pandangan Muhammadiyah dalam Buku Indonesia Berkemajuan (2015) bahwa kehidupan kebangsaan di Indonesia memerlukan rekonstruksi bermakna di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh salah satunya faktor dinamis karakter kepemimpinan dalam seluruh struktur kehidupan kebangsaan. Indonesia saat ini memerlukan karakter kepemimpinan yang progresif, reformatif, inspiratif dan berakhlak mulia yang mampu menyerap aspirasi masyarakat dan mengkristalisasikan nilai-nilai etika keagamaan dan moral Pancasila secara aktual sebagai landasan kebijakan di pelbagai sektor kehidupan kebangsaan. Dalam konteks kehidupan kebangsaan, kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang memiliki komitmen terhadap kebenaran, mendorong terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi, berpihak kepada hak-hak masyarakat, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

Kepemimpinan profetik memiliki kualitas ruhaniah yang memadukan keseimbangan hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama umat manusia serta lingkungannya untuk membangun peradaban hidup yang utama. Kepemimpinan profetik merupakan perpaduan antara kualitas kenegarawanan dengan kemampuan transformatif, yakni kepemimpinan yang berkarakter dan berkepribadian kuat, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mampu melakukan mobilisasi potensi, mengagendakan perubahan, dan memproyeksikan masa depan. Kepemimpinan yang dimaksud mampu memadukan kekuatan visi, pengambilan keputusan, memiliki kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas yang kuat sebagai manifestasi kenegarawanan, serta mampu memecahkan persoalan-persoalan bangsa.

Kepimpinan profetik dalam sebuah sistem pemerintahan dibangun di atas tonggak wawasan yang visioner. Yakni, kepemimpinan yang memberikan kete-

ladanan dan bersikap adil terhadap semua golongan, bisa menumbuhkan potensi masyarakat untuk bersama-sama membangun negara yang adil makmur dan bermakna bagi setiap warga negaranya. Kepemimpinan yang adil akan menghilangkan fanatisme sempit kelompok dan golongan. Kepemimpinan seperti ini akan bisa memobilisasi warga masyarakat untuk berjuang, berkorban dan bahkan rela mati demi pembangunan dan kemajuan. Tiadanya keteladanan pimpinan dan hilangnya sosok pemimpin yang amanah sangat berpengaruh bagi penegakan nilai-nilai seperti yang disebutkan di atas.

Kepemimpinan profetik memiliki kriteria sebagai berikut: (a) religius, kata sejalan dengan tindakan, dan bertanggungjawab; (b) visi dan karakter kuat sebagai negarawan, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang diri sendiri, partai politik, dan kroni; (c) berani mengambil berbagai keputusan strategis dan memecahkan masalah-masalah krusial bangsa; (d) mewujudkan *good governance*, tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta penyelamatan aset dan kekayaan negara; (e) menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman di dalam dan luar negeri; (f) melepaskan jabatan partai politik dan fungsi-fungsi lain yang dapat menimbulkan konflik-kepentingan serta mengganggu jalannya pemerintahan dalam memimpin bangsa dan negara; dan (g) memiliki strategi perubahan yang membawa pada kemajuan bangsa.

Para pemimpin di berbagai sektor dan tingkatan harus memiliki dan menjunjung tinggi kebenaran (*sidiq*), kejujuran (*amanah*), menyampaikan kebenaran dan kejujuran (*tabligh*), dan cerdas dalam mengelola aset negara (*fathanah*). Demikian juga, para pemimpin harus menunjukkan keteladanan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keteladanan elite menjadi kunci penting bagi tumbuhnya kepercayaan, sebagai pusat identifikasi diri bagi rakyat, serta menjadi modal sosial dan ruhaniah yang berharga untuk kemajuan bangsa.

Para pemimpin bangsa saat ini dari pusat sampai daerah di berbagai lini baik pemerintahan maupun kekuatan non-negara perlu melakukan rekonstruksi diri dalam alam pikiran, orientasi sikap dan tindakan, serta konsistensi dalam membangun Indonesia. Dinamika politik liberal yang ditandai dengan sikap politik serba-pragmatis hanya untuk meraih kemenangan politik telah menjadikan politik Indonesia saat ini serba-transaksional, berbiaya sangat tinggi, dan bahkan bersumbu-pendek. Politik benar-benar berada dalam habitatnya yang asli sebagaimana logika Laswellian, “*who gets what, when and how*”,

siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana caranya. Lebih ekstrim praktik politik transaksional itu seolah membenarkan tesis Machiavellian, “*the end justifies the means*”, demi meraih tujuan segala carapun digunakan. Politik hanya menjadi alat-tukar kepentingan dan rebutan kursi kekuasaan semata minus idealisme dan kenegarwanan.

Bersamaan dengan liberalisasi politik, praktik politik Indonesia yang dikuasai sepenuhnya oleh partai politik dan kekuatan-kekuatan pemilik modal telah menciptakan oligarki politik baru yang sebenarnya mengancam masa depan Indonesia. Kekuasaan oligarki (*oligarchia*) pada era Yunani Kuno merupakan bentuk kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang. Aslinya mereka yang sedikit itu benar-benar memegang tampuk kekuasaan secara langsung. Tetapi terdapat pula model kekuasaan *pseudo-oligarchy*, yakni negara yang dipimpin Kepala Pemerintahan tetapi di belakangnya terdapat sekelompok kecil orang yang mengendalikan pemerintahan, tanpa harus berada di dalamnya. Segelintir orang memiliki tangan perkasa yang berpengaruh dan mengendalikan para alite pemerintahan, layaknya para dalang yang bersembunyi di balik atraksi wayang. Termasuk hadirnya hegemoni partai politik sebagai kekuatan oligarki yang sepenuhnya menguasai tatanan kenegaraan di Republik ini, tidak kecuali dalam mengendalikan proses politik pencapresan dan pencawapresan untuk Pemilu 2019.

Meminjam analisis tajam Jeffrey Winters tentang perangai kuasa dalam suatu oligarki yang mencengeram. Bahwa siapapun yang menguasai dan memiliki keunggulan sumber daya material di suatu negeri, maka akan otomatis mengendalikan kekuatan politik dan ekonomi. Ketika kekuatan ekonomi dan politik berada di satu tangan atau kelompok tertentu, maka lahirlah akumulasi kekuasaan yang dahsyat bernama hegemoni di suatu negeri. Hegemoni itu, menurut Gramsci, akan menjelma menjadi ideologi, sehingga mereka yang menjadi korban pun akan terasa nyaman dihegemoni. Maka semakin kompleks daya jalar virus politik liberal di negeri ini, sehingga Indonesia disandera oleh kekuatan-kekuatan oligarki yang haus tahta, rakus harta, dan nir-nilai makna.

Negara dan pemerintahan Indonesia harus benar-benar berdaulat, termasuk dari hegemoni politik oligarki. Indonesia haruslah menjadi milik semua, jangan menjadi milik segelintir orang atau kelompok tertentu. Soekarno dalam pidatonya di sidang BPUPKI tahun 1945 yang monumental, berpesan sarat jiwa kenegarawanan: “*Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan,*

maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua". Bukan negara oligarki yang dikuasai dan dikendalikan segelintir orang.

Politik liberal yang transaksional dan semata berorientasi kekuasaan telah menjadikan kehidupan kebangsaan kehilangan jiwa, rasa, etika, kehormatan, dan sifat kenegarwanan yang sesungguhnya sangat penting bagi tegaknya politik berkeadaban untuk membangun Indonesia yang dicita-citakan. Sementara para aktor dan elitnya dengan ringan diri dapat melakukan politik apa saja tanpa bingkai etika, moral, keseimbangan, respek, toleransi, kejujuran, keterpercayaan, penghargaan, ketulusan, pengkhidmatan, keadaban, dan jiwa kesatria. Akibatnya, dunia politik di tangan para aktornya yang tamak dan tidak pernah akil-baligh itu menghasilkan panorama Indonesia yang bak padang sahara yang kering dari sukma Agama, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa. Sementara nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan Nusantara hanya sebatas menjadi narasi-narasi retorik yang diproduksi sekadar untuk membangun citra-diri nan indah bak sayap burung merak di taman bunga Indonesia, minus aktualisasi yang bergaris-lurus antara idealita dan dunia nyata.

Kita tentu tidak ingin karena inkonsistensi para elite dan warganya yang banyak memproduksi perangai-perangai yang berlawanan dengan kebenaran, kebaikan, dan kepatutan di atas fondasi iman dan taqwa yang aktual, maka Indonesia menjadi kehilangan peluang untuk maju membangun peradaban sekaligus menjauh dari berkah Tuhan. Allah mengingatkan para hambanya dalam Al-Quran:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰءِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “*Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*” (QS Al-‘Araf: 96).

Di sinilah pentingnya para pemimpin bangsa yang tercerahkan akal-budi dan peran kebangsaannya. Kata pepatah Itali, bahwa “Ikan busuk dimulai dari

kepala”. Betapa penting posisi dan peran para pemimpin di negeri dan umat mana pun. Merah putih dan hitamnya umat dan bangsa tergantung pemimpinnya. Pemimpin itu jantung dan kepala dari tubuh manusia. Jika pemimpin itu baik, maka baiklah umat dan bangsa. Sebaliknya nasib umat dan bangsa akan nestapa manakala para pemimpinnya berperangai dan bertindak buruk, hianat, dan ugal-ugalan. Padahal yang dipertaruhkan nasib manusia yang banyak dengan segala urusannya.

Para Nabi, Umar bin Khatthab, Umar bin Abdul Azis, Iskandar Dzulqarnain, Mahatma Ghandhi, Nelson Mandela, dan para pemimpin dunia lainnya yang menggoreskan tinta emas dalam kepemimpinannya merupakan anugerah Tuhan dari keteladanan para pemimpin yang mencerahkan dunia. Rakyat, negara, dan umat manusia menjadi aman, damai, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat karena kemuliaan para pemimpinnya. Sebaliknya karena ulah tangan Fira’un, Hitler, Mussolini, Pol Pot, serta sederet para diktator dan pemimpin tiran kehidupan manusia dan lingkungannya porak poranda dan mengalami kehancuran. Kehidupan menjadi anarki dan kacau karena jiwa, pikiran, dan tindakan wewenang-wenang para pemimpinnya yang haus kuasa, rakus tahta, dan bertindak semaunya tanpa makna.

Kami percaya di Republik ini masih banyak elite dan warga bangsa yang masih jernih hati, pikiran, dan tindakannya untuk membangun Indonesia yang berkemajuan dalam bingkai cita-cita luhur dan masa depan peradaban bangsa. Maka saatnya energi positif ruhaniah dan kecerdasan akal-budi bangsa Indonesia di tangan para pemimpin dan warga bangsa di seluruh persada tanah air digelorakan untuk menggoreskan tinta emas 73 tahun Indonesia Merdeka. Para pemimpin itu sejatinya memiliki kemuliaan posisi dan peran dalam membawa nasib umat dan bangsanya menuju tangga kemajuan. Jangan biarkan nasib umat dan rakyat menjadi pertarungan tak berguna dan tak bermakna di tengah kegaduhan politik yang disebar oleh para aktor yang haus kuasa dan tahta minus pertanggungjawaban moral politik nurani yang luhur. Ketika kontestasi politik makin memanas dengan segala hasrat dan kepentingan para elite serta pemimpin yang tumpah ke segala arah, sesungguhnya umat dan bangsa ini tengah menanti jaminan ubahan nasib hidupnya ke tangga terbaik di pundak para pemimpinnya.

Para pemimpin bangsa mesti melipatgandakan pengorbanannya untuk rakyat di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Jangan sebaliknya, para pemimpin menyandera nasib dan masa depan rakyat yang dipimpinnya karena hanya

menuruti hasrat kuasanya yang melampaui takaran dan merugikan kepentingan bangsa dan negara. Kyai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dalam falsafahnya yang keenam berpesan: “*Kebanyakan pemimpin-pemimpin rakyat, belum berani mengorbankan harta benda dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Malah pemimpin-pemimpin itu biasanya hanya memperlakukan, memperlalat manusia yang bodoh-bodoh dan lemah.*”.

Khusus dalam memasuki tahun politik 2019 Muhammadiyah berharap semua pihak dapat memelihara keadaban, kebersamaan, kedamaian, toleransi, keadilan, dan keutamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontestasi politik tidak perlu menjadi penyebab dan membawa pada situasi keretakan, konflik, dan permusuhan antar komponen bangsa. Semua dituntut berkomitmen menjaga politik dari berbagai penyimpangan dan transaksi yang menyebabkan kerugian besar bagi kehidupan bangsa dan negara. Kontestasi politik juga diharapkan tidak semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan, tetapi tidak kalah pentingnya meniscayakan komitmen dan usaha yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan idealisme, nilai dasar, dan cita-cita nasional yang luhur sebagaimana telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Inilah yang penting menjadi komitmen dan visi kenegaraan para pemimpin, elite, dan segenap komponen bangsa saat ini dan ke depan.

Muhammadiyah menaruh sikap positif dan kepercayaan bahwa dengan komitmen, nilai dasar, dan visi kenegaraan yang fundamental maka seluruh kekuatan strategis nasional yaitu pemerintah, partai politik, dan segenap komponen bangsa dapat membangun kesadaran kolektif dan kebersamaan untuk terus memberi harapan positif bagi seluruh rakyat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemimpin nasional dari pusat hingga daerah juga diharapkan mengedepankan keteladanan, kebersamaan, kedamaian, dan sikap kenegarawanan yang luhur dalam perikehidupan kebangsaan. Berikan rakyat *uswah hasanah*, kegembiraan, dan harapan positif untuk hidup lebih baik serta terjamin hak-haknya selaku pemberi mandat kedaulatan di Republik ini. Jangan biarkan rakyat yang penuh nestapa tetapi masih memiliki harapan itu seolah menunggu godot. Semoga Allah SWT melimpahkan anugrah-Nya yang terbaik bagi bangsa dan negeri tercinta Indonesia, sehingga menjadi *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur!*

Bagian Pertama



Etos Berkemajuan Muhammadiyah dan Daya Transformasi Memajukan Indonesia

*“...Dapatkah kau perkirakan
Bagaimana sederhana kerja yang dimulainya
Betapa bersahaja lingkungan di sekitarnya
Tetapi jejak panjang ribuan kilometer
Dimulai dengan langkah bersama
Dia menghimpun ummat dengan cita-cita yang sama
tarjih, tajdid, menolong kesengsaraan umum,
mencerdaskan bangsa.”*

Taufiq Ismail, Puisi untuk Muhammadiyah

Muhammadiyah tetap kerja keras untuk kebaikan bangsa dan masyarakat di segala cuaca. Rasa-rasanya, kiprah ini dapat dibenarkan adanya bahwa cuaca mendung dan hujan politik serta ekonomi tak sedikitpun menyurutkan langkah Muhammadiyah untuk berperan: mengabdikan pada kemanusiaan sebagai manifestasi keberislaman yang menuju paripurna. Dapat dibayangkan, Muhammadiyah telah mengambil peran sosial, keagamaan dan politik pendidikan' sejak belum ada negara merdeka yang mengayominya tetapi berada di tengah pahitnya penjajahan. Etos 'sedikit bicara banyak kerja' adalah etos yang dahsyat yang diwariskan dan dirawat sebagai karakter unggul yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Meyakinkan etos kerja Muhammadiyah sebagai etos kerja bangsa bukanlah masalah sederhana di tengah pusaran politik yang minus moral. Tetapi bukanlah Muhammadiyah yang sebenarnya jika mentalitasnya gampang menyerah. Muhammadiyah terus melanjutkan etos kerjanya dan cara cerdas kerjanya melampaui satu abad usianya.

Etos kerja merupakan etos yang sangat menonjol dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Etos ini juga yang paling bisa menjelaskan rahasia dibalik awetnya gerakan amal ini melampaui satu abad usianya. Tidak ada di belahan bumi mana pun, gerakan Islam sebesar Muhammadiyah dapat berdaya tahan melampaui seratus tahun. Karenanya, puisi tentang Muhammadiyah yang diberikan judul "Rasa syukur dan doa bersama" ciptaan sastrawan Taufiq Ismail sebagaimana kutipan di atas, sangatlah tepat memberikan nafas apresiatif dan kebanggaan bagi warga Muhammadiyah serta bangsa Indonesia seutuhnya, akan peran historis gerakan sosial keagamaan ini. Muhammadiyah telah mengantarkan ratusan ribu bahkan jutaan manusia Indonesia melek baca dan punya daya saing dalam kehidupan. Dengan prestasi demikian Muhammadiyah semakin besar tantangannya di masa-masa yang akan datang, bukan malah menciptakan kebanggaan lalu berpangku tangan.

Pendiri gerakan Muhammadiyah dengan segala keterbatasan dukungan mampu memproyeksikan gagasannya jauh ke depan melampaui zamannya—sangatlah berkemajuan cita-cita dan etos berfikir-aksinya. Kita tentu dengan kekuatan yang lebih baik, dengan SDM yang jauh lebih mumpuni, seharusnya bisa mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih berdaya tahan dalam memenangkan kompetisi global, baik dalam alam ideologi maupun alam kebudayaan ummat manusia (tata kehidupan universal).

SEKOLAH-SEKOLAH MUHAMMADIYAH DI JAWA DAN MADURA (1932)

Tipe Sekolah	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Madura	Jumlah
Sistem Sekolah Barat					
Volkschool (SR)	8	88	2	0	98
Sekolah Standar	1	23	2	2	28
Sekolah Schakel	0	17	5	1	23
H.I.S	7	32	10	1	50
M.U.L.O /Normaal HIK	1	2	1	0	4
Kweekschool	1	3	0	0	4
jumlah	18	165	20	4	207
Sekolah-sekolah Agama					
Diniyah	2	59	12	4	77
Wustha	1	9	1	0	11
jumlah	3	68	13	4	88
Sekolah-sekolah Lain					
Aisyiyah/Meisje School	2	6	0	8	16
Jatim School	0	7	0	0	7
Bustan (TK)	1	1	0	0	2
Sekolah lain	0	4	0	0	4
jumlah	3	18	0	8	29
JUMLAH SEMUA	24	251	33	16	324

Sumber: Politik Kaum Modernis, Alfian, 2010, hal. 212.

Di dalam pergerakan, etos dapat mendorong kehidupan masyarakat dalam membangun kekuatan diri menjawab tantangan zaman dan juga keluar dari ketertinggalan di segala bidang kehidupan. Di Muhammadiyah, etos kerja ini kemudian menjelma menjadi 'etos berkemajuan' yang membutuhkan strategi operasional baru karena tantangan yang dihadapi juga serba baru, misalnya bagaimana teknologi diperankan, bagaimana menjawab kebutuhan-kebutuhan komunitas yang ada di masyarakat, bagaimana meningkatkan daya saing pendidikan dasar menengah dan perguruan tinggi yang bernaung di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Selain itu, peran-peran lebih nyata Muhammadiyah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance* atau *husn at-tadbir*) serta mendorong negara berperilaku adil kepada rakyat.

Keluar dari Kemelut Klaim Sejarah

Dalam banyak framing, seolah peran Muhammadiyah berada pada nomor dua dibandingkan yang lainnya, misalnya dalam dikotomis nasionalis-Islam, atau di kalangan ummat Islam sendiri. Banyak sekali kita lihat teks dalam media yang menuliskan NU-Muhammadiyah ketimbang Muhammadiyah-NU, padahal secara abjad dan usia, tentu saja Muhammadiyah lebih pas diletakkan di urutan pertama. Namun, ini semua jika untuk kebaikan bangsa, rasa-rasanya sulit sekali bagi Muhammadiyah jika akan mempersoalkan hal-hal tidak substansial semacam itu. Rasionalitas membimbing kepada tindakan yang bernilai guna ketimbang simbolik. Inilah kenapa juga Muhammadiyah dianggap ‘kurang’ nasionalis di hadapan sejarah-sejarah yang ditulis di luar. Tentu saja, ini menjadi *concern* hari ini —di era *post truth* ini semua dapat mengalami paradok dan jungkir balik. Viral, walaupun hoax, dapat menjadi ‘agama’ seperti yang disinggung Yuval Noah Hariri (2018) dalam buku terbarunya, *21 Lesson for the 21st century*.

Sekian lama, dengan minimalnya pengakuan negara terhadap peran Muhammadiyah, menjadikan bangsa ini saling klaim atas peran kebangsaan yang tidak produktif dalam wacana pembangunan bangsa. Pekerjaan rumah ini seharusnya telah selesai puluhan tahun lalu, sehingga hari ini Bangsa ini sudah dapat lebih leluasa mengarahkan kiblat menuju Bangsa yang berkemajuan, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Inilah yang selalu diperjuangkan Muhammadiyah, dari dulu sampai nanti.

Dalam pembentukan ide kesadaran Negara-Bangsa (*nation-state building*) yang merdeka, kita melihat banyak sekali komunitas yang ada terlibat pergumulan dalam dinamika kesejarahan ini seperti organisasi Islam modern Muhammadiyah, Taman Siswa dan kelompok teosofi. Organisasi buruh yang beragam tak lepas juga dari peranan ini, sebagaimana dikutip John Ingleson (2016) dalam bukunya *Buruh, Serikat, dan Politik*. Hal ini penting untuk mengakui beragam elemen gerakan yang memang punya andil membangun kesadaran berbangsa, anti-kolonialisme, dan membangun kesatuan dengan cara dan metode yang beragam.

Sangat nampak bahwa di Republik ini masih belum kelar klaim peran sejarah yang diidap oleh kelompok. Ada yang mengaku 100 persen Indonesia, sehingga terkesan menegasikan peran komunitas lain serta loyalitas warga lain dalam membela Pancasila dan NKRI. Juga antara kelompok ‘kiri’, ‘nasionalis-sekuler’, dan kelompok kanan yang sangatlah

rentan dipolitisir. Kita bisa lihat isu terorisme, isu seputar Piagam Jakarta, isu komunisme yang memunculkan ‘kebingungan publik’—bahkan muncul tidak sedikit tuduhan bahwa segala isu ini sebagai manifestasi praktik “*state terrorism*”—di mana negara terlibat di dalam pengarusutamaan isu kekerasan ini.

Dengan demikian, kita belum berdamai dengan sejarah bangsa kita. Dengan kata lain, pelajaran sejarah kita mengalami involusi bahkan sangat mungkin situasi ini adalah situasi kemunduran. Salah satu caranya adalah mempercepat konsolidasi kekuatan masyarakat sipil Islam untuk segera menghentikan perdebatan historis ini, sekurang-kurangnya tak berupaya mengecilkan peran komunitas lain. Ini agenda yang sangat mendesak, karena biar bagaimanapun centang perenang bangsa ini juga sangat dipengaruhi kehidupan masyarakat sipil. □Ini juga yang bisa kita harapkan untuk melakukan kehidupan demokrasi yang substantif.

Jika KHA Dahlan mendapat gelar Pahlawan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo mendapat gelar Pahlawan Nasional pada era pemerintahan Joko Widodo, walaupun sebelumnya Ki Bagus juga pernah mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Perintis Kemerdekaan Nasional Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan KHA Dahlan sebagai Pahlawan Nasional dengan surat Keputusan Presiden no. 657 tahun 1961 karena peran: (1) kepeloporan dalam kebangkitan ummat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah; (2) menyebarkan ajaran Islam yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan ummat; (3) kepeloporan dalam amal usaha sosial dan pendidikan yang berdampak pada kebangkitan dan kemajuan bangsa; dan terakhir (4) kepeloporan dalam kebangkitan wanita Indonesia untuk ‘setara’ dengan kaum pria dengan akses pendidikan dan peran sosial.

Itu terjadi tahun 1961, empat dekade kemudian Muhammadiyah berjuang untuk mendapat pengakuan Negara atas peran Ki Bagus Hadikusumo, perjuangan itu telah dilakukan sejak 2002, kemudian tahun 2013, sebagai sebuah simbol bahwa peran gerakan Islam diapresiasi semua anak bangsa, dimulai dari pemerintah. Aspirasi ini memang secara luas tumbuh di masyarakat dengan penduduk mayoritas Islam. Upaya ini akhirnya dikabulkan negara pada tahun 2015, walaupun hanya satu dari tiga tokoh gerakan Islam yang diusulkan (dua lainnya adalah Abdul Kahar Mudzakkir dan Kasman Singodimedjo). Tentu ini menjadi pertanyaan besar

ummat, mengapa Negara hanya mengabdikan satu tokoh, padahal peran yang dilakukan juga sama. Menurut pemerintah, Ki Bagus sebagai pemimpin Muhammadiyah, dinilai punya peran penting sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Ki Bagus Hadikusumo sangat besar peranannya dalam perumusan Muqadimah UUD 1945 dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan keadilan. Pokok-pokok pikirannya dengan memberikan landasan-landasan itu dalam Muqadimah UUD 1945 itu disetujui oleh semua anggota PPKI.

Hampir setiap jelang 1 Juni, muncul ketidakpuasan kalangan masyarakat tertentu akan peran kebangsaannya. Katakanlah ummat Islam. Ada satu tokoh sentral yang ditinggi-unggulkan, dan di saat yang sama terkesan mengecilkan peranan ummat Islam. Wajar jika Max Lane (2015) memperkuat kembali gambaran situasi kehidupan berbangsa di Indonesia dengan mengatakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang belum selesai (*unfinished nation*), sehingga perlu terobosan besar untuk melakukan akselerasi pembangunan bangsa ini. Bahkan, solusi radikal perlu dilakukan untuk memutus siklus ketidakjujuran sejarah. Jelas, perlu obyektifikasi dalam melihat sejarah agar tidak menjadi penghambat bagi bangsa ini untuk *move on* atau mengalami gerak maju (*progressive*).

Muhammadiyah dan Keindonesiaan: Autentisitas Kebangsaan

Babak kedua peradaban bangsa di tangan Muhammadiyah dicitacitakan sebagai babak keunggulan, babak kemajuan dalam *tagline* Indonesia berkemajuan. Abad kedua Muhammadiyah ditandai dengan penyelenggaraan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 2010, dan babakan Islam berkemajuan serta Indonesia berkemajuan dibangkitkan dalam suasana optimistik warga Muhammadiyah dalam perhelatan akbar Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar tahun 2015 yang lalu. Etos Muhammadiyah adalah jelas etos membangun. Generasi yang ditempa adalah generasi yang membangun bangsa, bukan yang menghancurleburkan bangsa.

Dua dari enam pokok pikiran hasil Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) sangat penting untuk digarisbawahi, untuk menyelesaikan sengketa sejarah tak berkesudahan ini. *Pertama*, Indonesia adalah rumah bersama yang dibangun di atas nilai-nilai dan cita-cita luhur konstitusi 1945. Dengan demikian, negara sebagai ‘fasilitator’ perlu secara

PERSENTASE KADER MUHAMMADIYAH DI DPR RI ERA REFORMASI (1999-2014)

No.	Periode	Jumlah Kader Muhammadiyah di DPR	Jumlah Anggota DPR	Persentase Kader Muhammadiyah di DPR
1	1999-2004	22	500	4,4%
2	2004-2009	26	550	4,727%
3	2009-2014	25	550	4,545%
Total		73	1600	4,56%

Sumber: Pergeseran Politik Muhammadiyah, Syaifullah, 2015, hal. 237

PERSENTASE KADER MUHAMMADIYAH DI DPD RI ERA REFORMASI (1999-2014)

No.	Periode	Jumlah Kader Muhammadiyah di DPD	Jumlah Anggota DPD	Persentase Kader Muhammadiyah di DPD
1	1999-2004	5	195	2,56%
2	2004-2009	11	128	8,59%
3	2009-2014	11	132	8,33%
Total		27	455	5,3%

Sumber: Pergeseran Politik Muhammadiyah, Syaifullah, 2015, hal. 267

obyektif memberikan makna bagi kontribusi tegaknya *nation* Indonesia dan juga membuka ruang seluas-luasnya bagi elemen bangsa untuk bersinergi dan berkolaborasi, untuk menggerakkan bangsa ini kearah yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana amanah para pendiri Bangsa.

Kedua, bangsa Indonesia memerlukan tatanan kehidupan sosial dan politik yang lebih kuat, berlandaskan spirit Persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan visi bersama untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan bermartabat. Bangsa yang kuat, dimana pun berada, adalah bangsa yang sudah selesai dengan sejarahnya, dan tidak terus-menerus dilanda kekalutan sejarah yang berujung pada stigma negatif, baik yang terjadi antar warga negara, atau polemik antara negara dengan masyarakat. Negara demokratis seharusnya menjadi bagian dari solusi dan bukan menjadi bagian dari persoalan.

Dengan membangun kebersamaan yang tulus dan menempatkan persatuan serta Pancasila sebagai konsep yang final maka pekerjaan rumah

PERSENTASE KADER MUHAMMADIYAH DALAM KABINET ERA REFORMASI (1999-2014)

No.	Presiden	Masa Bakti	Jumlah Kader Muhammadiyah di Kabinet	Jumlah Kabinet	Persentase Kader Muhammadiyah di Kabinet
1	B.J. Habibie	1998-1999	2	37	5,41%
2	Abdurrahman Wahid	1999-2001	3	37	8,10%
3	Megawati	2001-2004	1	33	3,03%
4	Susilo Bambang Yudoyono	2004-2009	2	37	5,41%
5	Susilo Bambang Yudoyono	2009-2014	2	37	5,41%
Total			10	181	5,52%

Sumber: Pergeseran Politik Muhammadiyah, Syaifullah, 2015, hal. 289

selanjutnya adalah bagaimana kekuatan sosial, politik, budaya ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk membangun bangsa ini agar mempunyai kedaulatan di bidang politik, kepribadian dalam bidang budaya, dan kemandirian di bidang ekonomi sebagai fondasi membangun bangsa. Meminjam istilah KNIB, berarti Negara-Bangsa besar ini harus digerakkan untuk visi berkemajuan di bidang politik, berkemajuan di bidang kebudayaan, dan berkemajuan di bidang ekonomi. Muhammadiyah punya praktik kehidupan yang inklusif sangat panjang sejarahnya. Muhammadiyah dapat bersanding dengan kebudayaan yang sangat kental seperti Jawa, sebagaimana yang ditulis dalam bukunya Ahmad Najib Burhani, *Muhammadiyah Jawa*. Juga, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial Muhammadiyah yang tidak membedakan latar belakang agama, sehingga toleransinya sangatlah autentik dan asli, seperti praktik pendidikan di Indonesia bagian timur dan di banyak bagian lainnya di negeri ini. Muhammadiyah membangun bangsa ini tidak pernah main-main. Penuh kesungguhan dan kerja keras.

Sebagian besar kelompok Islam di Indonesia adalah Islam yang “moderat” dan tidak mempersoalkan konsepsi pembangunan para pendiri bangsa, sebagaimana yang sedang diemban oleh pemerintahan hari ini. Jujur harus kita sampaikan bahwa tidak ada oposisi untuk cita-cita membangun negara sejahtera, *baldatun thoyibatun warabbun ghaffur* sebagaimana yang diharapkan ummat Islam. Maka, sebetulnya, kelompok Islam, nasionalis, dan anak cicitnya dan negara tidak punya alasan mendasar untuk tidak berdamai dengan sejarah dan mengelola serta merencanakan masa depan bangsa ini.

Sentuhan Muhammadiyah, Memajukan Bangsa

Apa saja yang disentuh oleh tangan Raja Midas menjadi emas. Begitulah legenda cerita yang kita kenal dalam mitologi Yunani kuno. Analogi ini layak kita gunakan juga untuk Muhammadiyah. Banyak urusan jika diserahkan kepada ahlinya menjadi maslahat, seperti cerita satu abad lebih Muhammadiyah hadir melayani dan menginspirasi anak bangsa. Muhammadiyah menyentuh tanah menjadi lembaga pendidikan, menjadi gedung rumah sakit, menjadi sekolah, masjid, panti asuhan, yang jumlahnya mencapai ribuan dan memberi manfaat yang tak terhitung oleh angka statistik. Uang sedikit, di tangan Muhammadiyah menjadi bukti, menjadi saluran penyedia kesejahteraan yang luar biasa. Lazismu misalnya, dapat menghimpun miliaran rupiah hanya dalam waktu hitungan hari, dan dapat melakukan berbagai upayanya untuk peran kemanusiaan, tidak hanya dalam negeri tetapi juga untuk peran kemanusiaan di dunia internasional.

Etos berkemajuan Muhammadiyah dapat dijabarkan menjadi beberapa etos kerja progresif di beberapa bidang kehidupan sebagai bagian dari bangsa untuk berkontribusi kepada kemajuan dan tegaknya kehidupan bernegara. *Pertama*, etos berkemajuan di bidang ibadah, yaitu mendayagunakan kekuatan sumberdaya yang ada untuk mendorong bahwa nilai-nilai ibadah bukan semata-mata untuk membentuk keshalehan individual, melainkan untuk mengaktualisasikan ummat dalam rangka membangkitkan keshalehan sosial. Hal ini perlu dilakukan terus-menerus secara konsekuen dan berkelanjutan, sebagai suatu etos orang-orang yang tercerahkan. Haji tidak perlu dilakukan berkali-kali, tetapi bagaimana kemampuan ibadah jamaah ditransformasikan untuk agenda-agenda keummatan —menjawab problem sosial kekinian. Gagasan ini telah dengan baik dicontohkan oleh KH Ahmad Dahlan yang kemudian kita kenal sebagai teologi Al-Maun atau teologi amal sosial. Karena itu, gagasan semacam ini harus ditemukan padanan-padanannya di lapangan yang lebih praksis sesuai konteks masyarakat.

Kedua, etos berkemajuan di bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah lambat laun akan mengalami paceklik ‘kader saudagar’ atau kader entrepreneur, mengingat semakin banyaknya warga Muhammadiyah yang memilih jalan sebagai ‘priyayi’ di sektor-sektor birokrasi, juga di amal usaha Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah. Situasi ini akan menjebak Muhammadiyah pada

POTENSI AMAL USAHA MUHAMMADIYAH 2000, 2005, 2010

No.	Jenis Amal Usaha	Data Tahun		
		2000	2005	2010
1.	Sekolah Dasar (SD)	1.128	1.132	1.176
2.	Madrasah Ibtidaiyah/Diniyah (MI/MD)	1.768	1.769	1.428
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.179	1.184	1.188
4.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	534	534	534
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	509	511	515
6.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	249	263	278
7.	Madrasah Aliyah (MA)	171	172	172
8.	Pondok Pesantren	55	67	67
9.	Akademi	45	55	19
10.	Politeknik	3	4	4
11.	Sekolah Tinggi	52	70	88
12.	Universitas	32	36	40
	Jumlah total Perguruan Tinggi Muhammadiyah	132	165	151
13.	Perguruan Tinggi Aisyiyah	6	10	11
14.	Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dll.)	312	345	457
15.	Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga, dll.	240	330	318
16.	Panti Jompo		54	
17.	Rehabilitasi Cacat		82	
18.	TK Aisyiyah Bustanul Athfal		2.289	
19.	Sekolah Luar Biasa (SLB)		71	
20.	Masjid		6.118	
21.	Musholla		5.080	
22.	Tanah		20.945.504 m ²	

Sumber: Profil 1 Abad Muhammadiyah, MPI PP Muhammadiyah, 2010, hal. xii.

mekanisme organisatoris yang tak fleksibel, karena latar belakang pekerjaan itu secara diam-diam menjadi mekanisme gerak organisasi yang dikelola. Etos kerja ekonomi, selain kebutuhan membangun semangat bekerja, disiplin, dan kolaborasi untuk memperluas jangkauan aktifitas bisnis, juga perlu diupayakan bersama pembangunan etos berbagi, solidaritas dan kerelawanan.

Belum lama ini ada berita tak sedap di dalam pengelolaan Amal Usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Masih banyak guru yang gajinya

Data Amal Usaha 'Aisyiyah 2010-2015

MAJELIS	AMAL USAHA	JUMLAH
MKS	Panti Asuhan	194
DIKTI	STIKES	8
	STKIP	1
Kesehatan	RS, Klinik, RB	98
Dikdasmen	KB	1385
	SPS	1607
	TK	5722
	PAUD	8816
	TPA	72
	TPQ	1579
	SD	18
	MDA	229
	MI	5
	SMP	4
	MTS	8
	SMU	3
	SMK	5
	MA	5
	SLB	18
	PSNT	3
	KF	3904
	TBM	3
	PKBM	7
	KSTR	12
	LS	171
	PNFI	4062
Jumlah Amal Usaha Dikdasmen		27638
JUMLAH TOTAL AMAL USAHA		55577

sumber: sekretariat PP 'Aisyiyah

Keterangan:

- KB : Kelompok Bermain
- SPS : Satuan PAUD Sejenis
- TK : Taman Kanak-Kanak
- TPA : Tempat Penitipan Anak
- TPQ : Taman Pendidikan Al-Qur'an
- MDA : Madrasah Diniyah Awaliyah
- MI : Madrasah Ibtidaiyah
- MTs : Madrasah Tsanawiyah
- SMA : Sekolah Menengah Atas
- MA : Madrasah Aliyah
- SLB : Sekolah Luar Biasa
- PSNT : Pesantren
- KF : Keaksaraan Fungsional
- TBM : Taman Baca Masyarakat
- PKBM: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- KSTR : Keseteraan
- LS : Life skill

jauh dibawah standar upah minimum regional, atau jauh dari kata cukup, namun mereka tetap bertahan mengabdikan di lembaganya. Hal yang paling menyedihkan adalah, bahwa keberadaan lembaga itu tak jauh dari AUM yang sangat besar dan *moncer*. Dalam hal ini etos berbagi lewat subsidi silang tidak berjalan sesuai harapan: Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang berada di bawah satu atap yang sama. Etos berbagi belum kuat melembaga, ini adalah suatu kenyataan.

Ketiga, etos berkemajuan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Setelah satu abad, tujuan Muhammadiyah tahun 1914, yakni: '*memajukan dan menggembirakan pengajaran agama di Hindia Belanda (Indonesia), dan memajukan dan menggembirakan kehidupan...*' nampaknya semakin dekat dengan kenyataan. Semua itu bisa diperlihatkan betapa *output* dan *outcome* pendidikan telah mewarnai kemajuan kehidupan masyarakat dan bangsa secara makro dan mikro. Ini sangatlah luar biasa kalau mau dinilai secara adil dan jujur, betapa "Indonesia berhutang sangat besar kepada Muhammadiyah." Dan, menjadi tidak pas bila memberlakukan sebaliknya. Dari sinilah kelihatan

sekali betapa kontribusi Muhammadiyah telah mendorong perubahan sosial, mendorong kemajuan dan menjernihkan kehidupan masyarakat (Marpuji Ali, 2015).

Di banyak lembaga pemerinkatan perguruan tinggi, kontribusi keilmuan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah sangat menggemblirkan, banyak prestasi yang membanggakan. Artinya, kita tidak puas dengan apa yang telah dicapai. Dalam pelayanan pendidikan dasar dan menengah, masih ada pekerjaan rumah mengenai 'seberapa beradab' tata kelola yang telah dipraktikkan oleh Muhammadiyah. Kecenderungan sekolah sebagai instrumen untuk menyediakan tenaga kerja yang melahirkan manusia mesin serba mekanistik, yang juga dipengaruhi oleh orientasi kognitif yang over dosis, kerap kita temukan dibanding lembaga pendidikan yang mempedulikan nilai-nilai keadaban, nilai-nilai etis dan keberpihakan pada nilai kemanusiaan.

Nampaknya, Muhammadiyah belum banyak menyumbangkan pembangunan tradisi literasi bangsa ini, sehingga setiap ada perangkan dunia, selalu bangsa ini terpentat di buritan halaman. Kekuatan literasi adalah modal besar gerakan keilmuan, juga fondasi terpenting gerakan yang beretos kemajuan. Dari sinilah, kita bisa menyambung sejarah perkembangan dunia kepustakaan di Muhammadiyah dari awal pendiriannya hingga di abad kedua. Kesadaran itu tetap sama, bahwa intelektualisme adalah investasi penting melanjutkan kehidupan berbangsa.

Keempat, etos berkemajuan di bidang politik dan pemerintahan. Kerap kali kita mendengar kalimat 'Muhammadiyah tidak diperhitungkan dalam konstelasi politik nasional', sebagai kalimat bernada kecewa, karena Muhammadiyah dengan peran kesejarahannya, dengan dedikasi pengabdian untuk bangsa, tidak diperlakukan baik oleh Negara dalam memutuskan kebijakan nasional menyangkut pengelolaan pemerintahan. Walaupun Muhammadiyah tidak didesain sebagai organisasi politik, namun nilai-nilai etis kenegaraan haruslah tetap diproduksi oleh Muhammadiyah sebagai mentalitas berbangsa, untuk mendorong terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan berkesejahteraan, dimana keberadaan dan peran Negara menjadi suatu keniscayaan. Muhammadiyah perlu kembali menafsir *high politics* dalam kehidupan politik kontemporer saat ini, misalnya dalam upaya penegakan hukum untuk koruptor, untuk kejahatan lingkungan, untuk keadilan HAM, urusan sengketa perda-perda bermasalah, keadilan berdagang (mengurangi dominasi toko modern berjejaring, misalnya).

Apa yang dicapai dalam agenda jihad konstitusi pada periode kepemimpinan Prof. Dien Syamsuddin, haruslah direvitalisasi dengan pelebagaan peran politik-kebangsaan Muhammadiyah yang lebih mapan, terstruktur, dan sistemik, sebagai upaya menegakkan kiblat bangsa dengan politik nilai. Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan menjadi bermakna, jika gagasan-gagasan yang dirumuskan menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam mengelola kebijakan di berbagai bidang. Jika tidak, maka KNIB tersebut tak lebih dan tak bukan hanyalah menjadi ajang festival pengalaman dan gagasan saja. Saatnya etos berkemajuan segera dibangkitkan dari alam mimpinya.

Terakhir, etos berkemajuan dalam bidang informasi. Kesadaran literasi Muhammadiyah adalah literasi yang memberadabkan kehidupan. Kemelekan terhadap dunia digital dan internet jangan sampai hanya menjadi mudharat bagi kehidupan dunia dan akherat. Karenanya, upaya Muhammadiyah untuk memasukkan nilai akhlak dalam bersosial media adalah watak unggul dan maju di era revolusi industri. Fikih Informasi dan Akhlak Sosmediyah untuk melawan banalitas media sosial dan disinformasi yang dapat menggelincirkan suatu bangsa dalam kehancuran. Dakwah di bidang informasi ini telah menjadi *concern* sejak lama di Muhammadiyah. Muhammadiyah akan terus-menerus bekerja keras untuk membangun bangsa yang unggul, dengan menjadi produsen pengetahuan dan informasi. Bukan menjadi 'setan digital' yang menjadikan viral sebagai panduan hidup, terlepas validitas dan obyektifikasinya.

Di dalam gerakan literasi berbasis komunitas, Muhammadiyah telah turut mendinamisasi dengan mendorong praktik kerja literasi aktual di berbagai sudut negeri, yang kemudian diwadahi dalam forum gerakan literasi Muhammadiyah bernama Serikat Taman Pustaka sejak 2017 kemarin. Ada ribuan komunitas bergerak di sekolah, di musholla/masjid, rumah sakit, perguruan tinggi, dan di berbagai area yang memungkinkan berkegiatan literasi. Abad pengetahuan kembali disemai untuk memperkokoh bangsa dengan fondasi yang kuat. Muhammadiyah tak segan-segan memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Inilah fakta yang seharusnya semua orang tahu. [defendi]



Muhammadiyah Mengawal Perjalanan Bangsa

Oleh: Kasiyarno

“Dadio wong Islam sing kemajuan.”
(K.H. Ahmad Dahlan)

Sudah satu abad Persyarikatan Muhammadiyah mengabdikan dirinya di bumi pertiwi. Kehadiran persyarikatan yang lebih awal dari kemerdekaan bangsa dan masih tetap bertahan hingga sekarang menjadi satu pertanda bahwa organisasi ini tidak saja luwes menselaraskan diri dengan dinamika zaman, tetapi juga mampu secara aktif mengisi ruang penting dalam dinamika bangsa.

Dalam satu edisi majalah ini (SM 18/ 96, 2011: 13), Haedar Nashir menulis, *“Muhammadiyah dengan ideologi Islam yang berkemajuan bahkan dapat menawarkan pemikiran-pemikiran Islam alternatif yang lebih bercorak humanitarian dan kultural, dengan pandangan-pandangan dan tampilan-tampilan yang lebih lembut.”* Dengan kata lain, Muhammadiyah telah berjasa besar dalam “mendinginkan” corak keislaman yang khas nusantara, atau dalam bahasa Haedar Nashir, lebih bercorak humanitarian dan kultural.

* Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. adalah rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

Satu perspektif penting yang hendak penulis ajukan dalam tulisan ini adalah bahwa kontribusi persyarikatan ini mempunyai sifat kontinuitas, yaitu kemampuan untuk selalu memberikan peran kesejarahan yang bersifat futuristik tidak saja bagi dirinya sendiri namun juga bagi lingkungannya yang lebih luas. Peran kesejarahan tersebut berarti bahwa Muhammadiyah selalu memberikan torehan tinta penting dalam setiap episode perjalanan bangsa dan negara. Dalam tulisan ini, penulis membagi kurun kesejarahan tersebut dalam lima era: kolonial, revolusi kemerdekaan, orde lama, orde baru dan reformasi.

Pada Era Kolonial, sisi humanitarian persyarikatan ini telah ditegaskan oleh Bapak Pendiri Muhammadiyah, KHA Dahlan, melalui pengamalan surat Al Ma'un (surat ke 107) dalam bentuk aksi nyata ke tengah-tengah masyarakat. Dalam semangat surat ini, keimanan jelas dikaitkan dengan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) yang mengarah pada karakter progresifitas. "*Dadio wong Islam sing kemajuan*," begitu pesan KHA Dahlan saat itu.

Pesan dalam kalimat pendek ini memiliki makna yang amat dalam dan berimplikasi luas untuk mengubah *mindset* yang lebih terbuka menuju umat yang beradab dan bermartabat. Misalnya, dalam beribadah pun orang Islam harus berwawasan maju, tidak bersikap taklid tetapi berdasarkan pada pengetahuan dan pemahaman syariat yang benar. Dalam membangun kesejahteraan umat tidak perlu anti terhadap kemajuan yang dicapai oleh bangsa Barat. Perubahan arah kiblat sholat dan penyelenggaraan pendidikan Islam dengan menggunakan model pendidikan Barat merupakan contoh-contoh praktis perubahan pola pikir yang berkemajuan dari Kyai Dahlan.

Contoh lain menurut catatan KH. Muhammad Syoedja', pada masa itu ada beberapa kejadian atau upaya penting yaitu (1) Timbulnya penyiaran agama oleh para mubalighin dan mubalighat; (2) Penyiaran agama Islam melalui perpustakaan dengan mendirikan Taman Pustaka, (3) Timbulnya aksi untuk pertolongan umum yang diberi nama Penolong Kesengsaraan Oemoem terhadap orang miskin dan anak yatim, penderita yang sengsara, (4) Berdirinya Sopo Tresno yang kemudian menjadi Aisyiyah, dan

(5) Terbentuknya bagian Penolong Haji. Kesemuanya ini berangkat dari satu kesadaran kolektif yang dibangun oleh KHA Dahlan untuk menegakkan ajaran agama Islam yang sebenarnya, yaitu agama yang mampu membawa kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Masih banyak amal usaha yang dikembangkan KHA Dahlan beserta para sahabatnya saat itu. Akan tetapi agaknya kelima hal ini saja sudah cukup menunjukkan betapa strategis perjuangan Muhammadiyah di awal pertumbuhannya. Yang cukup menarik adalah tidak ada satupun kegiatan tersebut yang dicurigai oleh pemerintah kolonial, sekalipun sesungguhnya apa yang dikerjakan oleh Muhammadiyah adalah menanam benih-benih kesadaran untuk menjadi sebuah bangsa yang percaya diri dan mampu mengurus dirinya sendiri, alih-alih mengharap belas kasihan dari pemerintah kolonial yang saat itu menjalankan politik etis, yaitu politik (pura-pura) balas budi dari pemerintah kolonial kepada bangsa yang dijajahnya. Sifat nasionalisme yang ditanamkan oleh Muhammadiyah tersebut bahkan ditunjukkan melalui penggunaan Bahasa Indonesia dalam semua laporan dan publikasi kegiatan persyarikatan.

Di Era Revolusi Kemerdekaan, sejarah tak bisa menghapus catatan bahwa salah seorang proklamator terkemuka Indonesia, Bung Karno, pernah menjadi bagian penting dari Persyarikatan Muhammadiyah. Tidak saja karena beliau pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Muhammadiyah saat diasingkan ke Bengkulu, akan tetapi beliau bahkan berwasiat agar ketika dirinya dipanggil Sang Pencipta kerandanya diselubungi dengan bendera Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan bagaimana semangat zaman saat itu, dimana seluruh bangsa Asia sedang berjuang untuk melepaskan diri dari cengkraman kolonialisme, telah diserap sekaligus disebarkan oleh Muhammadiyah ke dalam jiwa anak-anak bangsa, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Bung Karno yang tak ingin berpisah dengan Muhammadiyah di akhir hayatnya.

Pada masa ini pula, Muhammadiyah melalui kepemimpinan KH Mas Mansyur melakukan sebuah gebrakan di bidang ekonomi,

yaitu dengan memisahkan riba' dengan bunga bank yang tidak menimbulkan kemudharatan. Terobosan ini menjadi sangat penting mengingat pada saat itu sistem perbankan masih dianggap tabu oleh sebagian besar ummat Islam, padahal kemajuan perkenomian modern tidak bisa melepaskan diri dari sistem perbankan.

Sedangkan di bidang politik, sumbangan Muhammadiyah dilakukan melalui tokoh-tokohnya, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir dan Kasman Singodimejo yang menjadi anggota Panitia Sembilan, yang merumuskan dasar resmi negara untuk pertama kali. Pada saat opsir Jepang mewakili Indonesia bagian Timur minta penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang sudah disepakati untuk pembukaan UUD 1945, dan mengancam akan memisahkan diri dari Negara RI, maka Ki Bagus Hadikusuma merumuskan sila pertama tersebut dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain itu, Kasman Singodimejo bahkan adalah Ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) atau cikal bakal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sekarang. Sedemikian besar peranan ketiga tokoh ini, sehingga ketiganya diusulkan oleh Muhammadiyah melalui Panitia Pengusulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional, yang diketuai AM Fatwa September tahun 2012 lalu, sebagai Pahlawan Nasional.

Selanjutnya pada Era Orde Lama yang merupakan masa-masa penuh ketegangan antar anasir bangsa, Muhammadiyah juga punya kontribusi penting dalam pemerintahan. Saat itu bangsa ini terbelah dalam tiga golongan atau kelompok besar, yaitu kaum agamis, nasionalis dan komunis (NASAKOM), sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Bung Karno untuk menyatukan semua paham kebangsaan di Indonesia. Alih-alih bersatu, ketiga golongan besar ini justru saling bersaing memperebutkan pengaruh dan kekuasaan politik yang berpotensi untuk mengancam integrasi bangsa. Pada saat itu, KH Ahmad Badawi diangkat oleh Bung Karno sebagai Penasehat Presiden untuk Urusan Agama. Di bawah bayang-bayang ancaman PKI, KHA Badawi berhasil meyakinkan Bung Karno untuk tidak membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan

Muhammadiyah yang saat itu dihasut PKI sebagai organisasi pendukung utama Masyumi, saingan terberat PKI.

Selain itu, syukurlah, bersama komponen agamis dan nasionalis lainnya, Muhammadiyah melalui KHA Badawi kala itu berhasil membendung bahkan meruntuhkan cengkraman PKI yang berhasrat kuat untuk meruntuhkan sila pertama negara, yang bagi Muhammadiyah dijiwai oleh semangat tauhid. Upaya ini tidak berjalan mudah karena PKI selalu berlindung di balik isu Nasakom dan selalu memperoleh dukungan kuat dari pemerintahan Soekarno.

Pada Era Orde Baru situasinya berubah. Pemerintahan baru lebih mengedepankan kebijakan politik *developmentalisme*, yang melakukan modernisasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Dengan dukungan Kabinet ahli dan Golongan Karya, Soeharto melaksanakan program pembangunan lima tahun yang disusun menurut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Masa ini dwi fungsi ABRI dihidupkan dan kekuasaan komunis disingkirkan sampai ke akar-akarnya.

Pada tanggal 16 Agustus 1982 Presiden Soeharto di depan sidang pleno DPR RI meminta Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas bagi seluruh partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Pada tanggal 6 Maret 1983 keluarlah Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN yang mewajibkan Partai Politik dan Golongan Karya menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi semua organisasi kemasyarakatan, Situasi ini menimbulkan ketegangan dan reaksi yang cukup hebat terutama yang datang dari ormas-ormas keagamaan.

Gaya kepemimpinan Pak AR, begitu KH AR Fakhruddin biasa disapa, sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu, memiliki peran penting, yakni gaya kepemimpinan yang cukup luwes dalam menyatukan berbagai konflik pemikiran terkait dengan isu sensitif tersebut. Di depan semua hadirin di Mukhtamar Muhammadiyah ke 41 di Solo, Pak AR menyebutkan bahwa asas

Pancasila itu diterima, “dengan ikhtiar”, yaitu dalam pengertian bahwa penerimaan tersebut disertai tekad untuk “*menegakkan kalimat Allah di Indonesia ini. Tidak merusakkan peraturan-peraturan di Indonesia, tapi tidak menjual iman, tidak menjual agama.*”

Sikap bijaksana tersebut ternyata cukup signifikan bagi keberlangsungan perjuangan persyarikatan. Era ini juga dapat disebut sebagai masa-masa kegemilangan Muhammadiyah di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Jumlah amal usaha di ketiga bidang tersebut mengalami peningkatan yang cukup pesat. Prestasi ini begitu mengesankan sehingga membuat Presiden RI saat itu, Pak Harto, berujar, “*Sebagai orang yang pernah mengecap pendidikan Muhammadiyah, saya ikut mengharapkan agar Muhammadiyah tumbuh makin besar, makin kuat, dan makin banyak amalnya dalam bidang-bidang yang amat luas.*”

Dukungan pemerintah tersebut tentu sangat bermanfaat bagi persyarikatan. Akan tetapi, pada saat kekuasaan Orde Baru semakin menyimpang dari demokrasi, Muhammadiyah melalui Amien Rais, sebagai tokoh dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah, maju mengingatkan Pak Harto dengan saran melakukan suksesi kepemimpinan. Sayangnya, saran tokoh reformasi yang diusulkan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya Desember 1993 ini tidak direspon positif yang berakibat munculnya gelombang demonstrasi yang menjatuhkan rezim Orba.

Memasuki Era Reformasi, Muhammadiyah telah memformatkan dirinya sebagai organisasi dakwah yang siap memasuki era globalisasi, antara lain dengan memelopori forum tingkat dunia dua tahunan yang disebut World Peace Forum (WPF) atau Forum Perdamaian Dunia yang pada akhir tahun lalu telah diselenggarakan untuk keempat kalinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dien Syamsudin, diharapkan dalam forum yang dihadiri oleh banyak tokoh dari beragam latar belakang itu dapat menghasilkan suatu solusi atas permasalahan dunia dalam konteks demokrasi dan multikulturalisme.

Semangat menjawab tantangan global tersebut tidak lantas mengurangi kepedulian persyarikatan untuk tetap memperhatikan persoalan-persoalan nasional. Salah satu isu strategis tersebut adalah menyangkut penguasaan sumber daya alam dan energi yang keuntungannya semakin lama semakin berada di pihak asing. Hal ini kalau dibiarkan akan berdampak pada gagalnya pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, bersama 12 ormas Islam dan beberapa tokoh lainnya, Dien Syamsudin meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabulkan uji materi mengenai kedudukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) pada UU 22/2001 tentang Migas. “*Muhammadiyah dan segenap orang dan pemohon akan terus melakukan kajian, pengawasan termasuk memberikan sumbangan pemikiran untuk pemerintah dan DPR ... perjuangan untuk menegakkan konstitusi ini kami sebut jihad dan akan segera kami tindak lanjuti dengan melakukan gugatan ke pihak-pihak lain yang kami yakini merugikan rakyat,*” tegas ketua Umum Muhammadiyah ini.

Muhammadiyah di Masa Depan

Bagaimana Muhammadiyah seharusnya mereformasi dirinya untuk mengantisipasi perubahan global telah banyak dikaji dalam *International Research Conference on Muhammadiyah* (IRCM) bertopik “*Discourse on Genuine Identity of Muhammadiyah in post Centennial Era*” di Universitas Muhammadiyah Malang akhir tahun 2012 lalu. Apapun yang disampaikan oleh para pakar internasional tersebut, Muhammadiyah selama ini telah berhasil membuktikan diri sebagai organisasi yang tak pernah berhenti (*stagnan*) mengisi roda sejarah bangsa dan negara.

Pada era dimana masalah kehidupan menjadi semakin kompleks seperti sekarang ini, kehadiran organisasi gerakan seperti Muhammadiyah sangat diperlukan. Untuk itu penulis memberikan beberapa catatan agar eksistensi dan fungsi persyarikatan ini tetap berkelanjutan. *Pertama*, Muhammadiyah harus selalu konsisten sebagai gerakan dakwah keagamaan yang bergerak untuk kemaslahatan ummat sebagaimana yang telah ditunjukkan di masa awal berdirinya. *Kedua*, Muhammadiyah tidak boleh lengah untuk

menjaga kemandirian di tengah derasnya godaan dana internasional (bantuan asing?) sebagaimana yang telah ditanamkan para tokoh pendahulu pada masa revolusi kemerdekaan. *Ketiga*, Muhammadiyah harus mampu menjaga diri dari pusaran konflik ideologis dan politis yang selalu muncul dalam praktek penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat baik dari infiltrasi gerakan liberalisme maupun radikalisme. *Keempat*, Muhammadiyah harus terus menjaga kesinambungan amal usahanya dengan tidak saja meningkatkan kualitas manajemen dan jumlah amal usahanya tetapi juga jiwa berMuhammadiyah setiap warga yang ada di dalamnya. *Kelima*, Muhammadiyah harus siap masuk ke dalam pergaulan masyarakat internasional dengan tetap menjaga jati diri dan kepeduliannya pada persoalan-persoalan di dalam negeri.

Akhirul kalam, marilah kita merenungkan ungkapan bijak dari Buya Syafii Maarif yang diutarakannya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 15 Desember 2009 lalu: “Sejalan dengan kualitas Islam sebagai solusi seperti yang kita harapkan, maka rumusan ini patut pula dipertimbangkan: *Sebuah Muhammadiyah yang tidak mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah Indonesia, bukanlah Muhammadiyah yang sebenarnya!* Di sinilah letaknya salah satu tantangan terbesar yang sedang menanti jawaban Muhammadiyah.”

Sumber: suaramuhammadiyah.id 28 Maret 2017, judul asli: “Sumbangan Muhammadiyah dalam Mengawal Perjalanan Bangsa”.



Satu Abad 'Aisyiyah

KILAS SEJARAH

'Aisyiyah dibentuk oleh Muhammadiyah, pada 27 Rajab 1335 H/19 Mei 1917 dalam perhelatan akbar nan meriah, bertepatan dengan momen Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sembilan perempuan terpilih sebagai sang pemula kepemimpinan perdana 'Aisyiyah. Siti Bariyah mendapatkan amanah sebagai Ketua 'Aisyiyah yang pertama.

Embrio berdirinya 'Aisyiyah telah dimulai sejak diadakannya perkumpulan Sapa Tresna di tahun 1914, yaitu perkumpulan gadis-gadis terdidik di sekitar Kauman. Nama 'Aisyiyah itu terinspirasi dari nama istri Nabi Muhammad SAW, yaitu 'Aisyah, yang dikenal cerdas dan mumpuni. Harapannya, profil Aisyah juga menjadi profil perempuan Aisyiyah.

Islam yang berkemajuan, sebagaimana penafsiran Muhammadiyah-'Aisyiyah terhadap ayat Al-Qur'an yang tidak membedakan jenis kelamin dalam hal berdakwah, menjadi karakter gerakan Muhammadiyah-'Aisyiyah.

Paham Islam berkemajuan dan pentingnya pendidikan bagi gerakan Muhammadiyah-'Aisyiyah menghasilkan pembaruan-pembaruan jenis-jenis kegiatan yang dilakukan Muhammadiyah-'Aisyiyah, seperti pendidikan keaksaraan, pendirian mushola perempuan, kongres bayi atau *baby show*, penerbitan majalah Suara 'Aisyiyah di tahun 1926, pendirian Taman Kanak-Kanak, dan jenis-jenis kegiatan inovatif lain.

MEMASUKI 1 ABAD AISYIYAH

'Aisyiyah sudah memasuki perjalanan 1 Abad. Sebagai organisasi perempuan di Indonesia yang berusia hampir 100 tahun, 'Aisyiyah memiliki pengalaman dalam berkontribusi memajukan perempuan Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam

bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan sosial, kesadaran hukum, pendidikan politik, dan pemberdayaan perempuan. 'Aisyiyah sebagai organisasi otonom perempuan Muhammadiyah bekerja di seluruh provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Aisyiyah merintis pendidikan untuk anak-anak yang pertama di Indonesia dengan nama *Frobel School*, yang saat ini bernama Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA). Selanjutnya, 'Aisyiyah mencanangkan gerakan pemberantasan huta huruf, buta huruf Latin dan buta huruf Arab, memberikan pendidikan keagamaan bagi para buruh batik, mendirikan musholla perempuan pertama di tahun 1922 yang kemudian direplikasi oleh organisasi 'Aisyiyah di seluruh Indonesia dan menjadi ciri khas 'Aisyiyah.

Berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh 'Aisyiyah tersebut merupakan upaya meningkatkan pengetahuan dan mendorong partisipasi perempuan dalam dunia publik. Selain itu, untuk menyebarkan ide-ide pembaharuan, pada tahun 1926 Aisyiyah menerbitkan majalah organisasi yang bernama Suara 'Aisyiyah dan masih terus terbit hingga saat ini.

Adapun dalam konteks pergerakan perempuan Indonesia, 'Aisyiyah merupakan salah satu organisasi yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia I, 22-25 Desember 1928, di Yogyakarta, yang merupakan basis kuat 'Aisyiyah. Warga 'Aisyiyah banyak hadir meramaikan perhelatan kongres, dan 'Aisyiyah menjadi salah satu organisasi pemrakarsa terbentuknya badan federasi organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Dua pimpinan 'Aisyiyah kemudian terpilih sebagai pimpinan, yaitu Siti Moendjijah sebagai Wakil Ketua dan Siti Hajinah sebagai anggota.

(sumber: www.absbandung.sch.id/profilaisyiyah)



Bagian Kedua

Percik-Percik Pemikiran untuk Indonesia Berkemajuan

LAUNCHING BERDIRINYA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

(Catatan H.M. Syudja')

Setelah surat permohonan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah dikabulkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan besluit, rechtspersoon, tanggal 18 November 1912 Miladiyah, bersamaan dengan 8 Dzulhijjah tahun 1330 Hijriyah (surat izin itu dikirim kepada si pemohon, Persyarikatan Muhammadiyah, dengan melalui H.B. Boedi Oetomo Yogyakarta).

Tidak selang beberapa hari lantas mengadakan rapat pengurus Muhammadiyah yang pertama kali dengan mengundang beberapa orang yang dipandang perlu, diantaranya 2 orang anggota pengurus Boedi Oetomo yakni Raden Dwijosewoyo dan R. Budiharjo dan beberapa orang dari Kauman.

Rapat Pengurus itu untuk membicarakan bagaimana cara kita akan memproklamkan berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah kepada umum dan dimana tempat yang paling baik pada waktu itu. Setelah dibicarakan dengan semangat yang ramai mengenai soal tempat, karena pada waktu itu belum ada tempat yang tersedia untuk berkumpul orang banyak, akhirnya Raden Dwijosewoyo memberi petunjuk, kalau dapat disetujui, dimajukan usul hendaknya perkumpulan itu diselenggarakan di Loodge Gebouw Malioboro dan beliau sanggup menguruskannya, dan waktunya hari Sabtu malam Minggu terakhir bulan Desember 1912. Rapat itu sebaiknya dibikin undangan terbuka. Artinya yang tidak diundang juga boleh datang. Adapun yang diundang ialah para priyayi Pangreh Praja baik Kasultanan maupun Governement, orang-orang yang dikenal.

Para pengurus diatur dengan berpakaian uniform secara dahulu yang mirip akan jiwanya Muhammadiyah, yaitu ketua KHA. Dahlan bersurban puteran bergamis dan berjubah Hangguri Blau. Sedang pengurus yang sudah haji bersurban biasa, berbaju hitam tutup dan bernyamping (kain panjang) dan berterumpah. Bagi yang belum berhaji memakai destar, baju putih buka memakai dasi, berkain panjang, pakai selop. Adapun pakaiannya tersilah masing-masing orang.

Rapat Undangan Terbuka Muhammadiyah yang Pertama Kali

Pada hari Sabtu malam Minggu terakhir dalam bulan Desember 1912 Miladiyah, Muhammadiyah mengadakan rapat Undangan Terbuka untuk memproklamkan berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah, bertempat di Gedung Loodge Gebouw Malioboro. Dengan mengundang ± 150 orang yang dipandang perlu seperti tersebut dalam rencana di atas. Tetapi yang hadir lebih kurang 60-70, termasuk yang tidak diundang. Maklumlah memang kesadaran rakyat pada masa itu belum merata, bahkan masih nyenyak tidurnya.

Rapat dipimpin oleh KHA. Dahlan dan dimulai pada jam 8.30 dengan mengucapkan selamat datang dan banyak terima kasih pada sekalian hadirin baik yang diundang maupun yang tidak diundang, terutama para

priyayi dan saudara-saudara dari pengurus Boedi Oetomo yang telah membantu tenaga dan moreel, selama Muhammadiyah memajukan permohonan izin kepada pemerintah Hindia Belanda sampai berhasil. Dan menghaturkan beribu sembah nuwun terhadap Sri Paduka Kanjeng Sultan Hamengku Buwono yang menyetujui berdirinya Muhammadiyah di negeri Yogyakarta. Mudah-mudahanlah Muhammadiyah dapat hidup subur dan dapat mencapai kepada maksudnya. Amin.

"Sekarang rapat kami buka dengan mengucapkan al-Fatihah." Dok, suara ganden memukul meja pimpinan.

Lalu dipersilahkan Sdr. Dwijosewoyo membacakan surat izin yang berupa Rechtspersoonlijkheid Muhammadiyah dan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah yang masih berbahasa Belanda serta diterjemahkan dengan bahasa Jawa, serta dengan penjelasannya, sehingga dapat difahami oleh hadirin pada umumnya.

Sdr. Dwijosewoyo lalu tampil ke muka untuk melaksanakannya maksud itu dengan memulai membaca dalam bahasa Belanda dan terjemahannya bahasa Jawa, serta penjelasan-penjelasan sampai memuaskan kepada hadirin semua. Satu dua orang yang memajukan pertanyaanapun sudah diberi jawaban dengan memuaskan juga.

Pembacaan Rechtspersoon dengan terjemah dan penjelasan-penjelasan dengan jawaban pertanyaan kurang lebih memakan tempo satu jam 30 menit. Pimpinan mengucapkan terima kasih diperbanyak atas pembacaan Rechtspersoon dengan segenap penjelasannya, serta jawaban-jawabannya terhadap kepada para yang memajukan pertanyaan, sehingga dapat menambah penjelasan bagi mereka yang masih kurang jelas.

Kemudian, pimpinan mempersilahkan Kiyai Panghulu Pakualam Haji Abdullah Siraj tampil ke muka untuk membacakan doa kepada Allah swt. untuk kebahagiaan Muhammadiyah dalam menjalankan pimpinan yang menuju kepada maksud dan cita-citanya.

Kemudian K.H. Abdullah Siraj tampil ke muka, sebelum mengucapkan doa beliau ingin menyambut akan lahirnya Muhammadiyah karena sangat terharu, dan mendoa kepada Ilahi mudah-mudahan lahirnya Muhammadiyah diberi usia yang panjang dalam bimbingan Tuhan serta diperlindungi dan diberi petunjuk kepada jalan benar dan lurus. Amin.

Pimpinan mengucapkan terima kasih banyak kepada semua hadirin dan menutup rapat tersebut dengan membaca Al-Fatihah. Dok. suara hamer memukul meja pimpinan tanda bubar.

Pada jam 11.30. Alhamdulillah rapat selesai dengan bahagia dan gembira tidak terhalang suatu apa.

*H.M. Syudja', Ketua Bahagian PKO yang pertama. Catatan ini dikutip dari Cerita tentang KHA Dahlan, Catatan Haji Muhammad Syudja'

K.H. Ahmad Dahlan

Jalan Persatuan Para Pemimpin



**Kyai Haji Ahmad Dahlan atau
Asma paring Dalem R. Ngabehi
Ngabdul Darwisy.**

Lahir di Yogyakarta, 1 Agustus 1868 –
wafat di Yogyakarta 23 Februari 1923.
Abdi Dalem Pamethakan Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat.
Pembina dan pembangun
Persyarikatan Muhammadiyah.
Pahlawan Nasional Indonesia.

*“Pikirkanlah pemimpin-pemimpin!
Sejak Rasul-rasul (Utusan-utusan),
sahabat-sahabatnya dan pemimpin
kemajuan Islam pada jaman dahulu
hingga sekarang, sudah sementara
lama pemimpin-pemimpin itu
bekerja. Mereka itu orang yang
ternama, sebagian sudah mendapat
pengajaran di perguruan tinggi.
Walau begitu, belum dapat mereka
bersatu hati.”*

Tidak banyak, memang tidak banyak, pemikiran-pemikiran KH Ahmad Dahlan, misalnya kita kenal tentang pelajaran Surat Al-Maun, pelajaran Surat Wal-Ashri, yang kemudian keduanya dikenal dengan istilah teologi Al-Maun dan Teologi Al-Ashr, setelah dikaji dan ditulis dalam berbagai artikel dan buku oleh para ahli akademisi. Juga, misalnya dengan apa yang telah ditulis oleh K RH Hadjid, seorang murid KHA Dahlan yang paling muda yang suka menuliskan apa saja pelajaran yang didapatnya dari KHA Dahlan. K RH Hadjid menyatakan, selama 6 tahunan berguru dan berteman dengan KHA Dahlan, ia hanya mendapatkan 7 falsafah ajaran dan 17 kelompok ayat Al-Qur’an, yang pernah diajarkan kepadanya.

Tetapi, yang sedikit itu, ternyata memberi hasil yang luas dan dahsyat hingga usia persyarikatan Muhammadiyah ini mencapai satu abad lebih. Berkembangnya amal usaha Muhammadiyah di bidang-bidang pendidikan, sosial dan agama, boleh dikatakan adalah hasil dari pemikiran-pemikiran KHA Dahlan dalam upaya pemahamannya terhadap ajaran-ajaran Agama Islam sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw..

Pada Kongres Muhammadiyah tahun 1922, beberapa bulan sebelum KHA Dahlan wafat, beliau menyampaikan sebuah pidato yang transkripnya dibukukan di dalam Almanak Muhammadiyah Tahun 1923. Transkrip pidato itu diberi judul Tali Pengikat Hidup Manusia. Boleh dibilang, naskah ini adalah pemikiran *genuine* dari Kyai Dahlan yang bisa direkam secara langsung dalam bentuk tulisan, sebuah pemikiran di masa-masa akhir menjelang beliau wafat. Mencermati apa yang menjadi keprihatinan KHA Dahlan dalam pidato itu, salah satu yang pokok dan belum menemukan jalan pemecahannya adalah tentang persatuan para pemimpin ummat. Masalah persatuan para pemimpin ini nampaknya menjadi keprihatinan dan perhatian Kiyai Dahlan setelah sekian tahun menjalankan kepemimpinan dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

Berikut kami kutipkan bagian awal dari pidato tersebut, yang mengungkap pemikiran Kiyai Dahlan tentang Jalan Persatuan Para Pemimpin:

TALI PENGIKAT HIDUP MANUSIA^{*)}

Tali pengikat hidup manusia adalah suatu pengetahuan yang terlalu amat besar bagi kemanusiaan umumnya, sehingga memenuhi bumi. Oleh karena itu, Tuan-tuan Pembaca diharap mau memikirkan benar-benar dan mengingat-ingat dan jangan tergesa-gesa.

Untuk memimpin suatu kehidupan itu seharusnya dan sepatutnya memakai suatu alat, yaitu Al-Qur'an. Bukankah manusia itu perlu bersatu hati karena beberapa sebab?

^{*)} dikutip sebagian, diambil dari buku Perkembangan Pemikiran Muhammadiyah dari Masa ke Masa, Drs. Sukrianta AR dan Drs. Abdul Munir Mul Khan (penyunting), Yogyakarta: PT Dua Dimensi. Desember 1985 (cet. I).

Pertama, Sebab manusia, bangsa apa saja, sesungguhnya nenek-moyangnya satu, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi, semua manusia itu satu daging dan satu darah. Kedua, supaya semua manusia dapat hidup senang bersama-sama di dunia. Jika manusia lalai akan tali pengikat ini, maka akan rusak dan merusakkan. Ini suatu kenyataan yang tidak boleh dipungkiri lagi.

Pikirkanlah pemimpin-pemimpin! Sejak Rasul-rasul (Utusan-utusan), sahabat-sahabatnya dan pemimpin kemajuan Islam pada jaman dahulu hingga sekarang, sudah sementara lama pemimpin-pemimpin itu bekerja. Mereka itu orang yang ternama, sebagian sudah mendapat pengajaran di perguruan tinggi. Walau begitu, belum dapat mereka bersatu hati.

Jangan pemimpin-pemimpin terkejut, lihatlah kanan-kiri, muka dan belakang dengan baik, bukankah masih tidak karuan? Ingatlah, saya tidak hanya memandang satu bangsa saja, akan tetapi semua bangsa manusia. Meskipun kita melihat hanya satu bangsa belum juga satu hati. Hal itu sesungguhnya tidak enak, akan tetapi lawannya (enak) yakni berbahaya. Apakah sebabnya begitu?

Pertama, kami pemimpin-pemimpin, belum bersatu hati, yang satu mengabaikan yang lain, tolak-menolak pengetahuan, padahal pengetahuan-pengetahuan itu perlu bagi manusia. Jadi, sudah tentu pengetahuan pemimpin-pemimpin itu kurang. Kurangnya pengetahuan itu menjadikan pendek-pikiran (*cupet ing pamanggih*, Jawa). Jadi, sesungguhnya pemimpin-pemimpin itu masih meraba-raba pada kegelapan. Apakah jadinya? Lalu tumbuh perbantahan antara pemimpin-pemimpin itu (rusak).

Kedua, pemimpin-pemimpin belum memimpin dengan tenaga atau tindakan (*lampah*, Jawa). Kebanyakan masih memimpin dengan suara saja. Sesungguhnya mereka baru mencari pengertian dan menaburkan pengertian itu kepada orang banyak, belum memperhatikan tindakan (*mrihatosaken lampah*, Jawa) bagi dirinya sendiri dan orang banyak. Jadi, pemimpin-pemimpin itu sebagian besar baru memerlukan suara agar supaya kelihatan pendapat baiknya walaupun kelakuannya sendiri masih mengecewakan, yakni rusak dan merusakkan.

Terangnya, pemimpin-pemimpin itu banyak yang dipermainkan hawa nafsunya sendiri tanpa mengerti dan merasa. Misalnya, hawa nafsu mengajak malas dan kikir jika untuk suatu keperluan dan tidak malas dan kikir jika untuk suatu kesenangan. Begitulah hawa nafsu itu memperlakukannya,

sehingga hawa nafsu itu menyesatkan kepada penipuan, kebohongan, main gila dan sebagainya. Bukankah hal itu rusak dan merusakkan?

Ketiga, kebanyakan pemimpin-pemimpin belum mempunyai tujuan untuk baik dan enaknya semua manusia. Mereka baru mementingkan kaumnya (golongannya) sendiri, lebih-lebih lagi ada yang hanya mementingkan badannya sendiri, kaumnya pun tidak dipedulikan. Maka, jika badannya sendiri sudah mendapat kesenangan, pada perasaannya sudah berpahala, dan sudah sampai maksudnya. Hal yang demikian itu sudah banyak yang diketahui (cacatnya) sehingga perkumpulan menjadi rusak dan menyebabkan cerai-berainya yang dipimpin; kembali mereka seperti keadaannya sebelum dipimpin, kemudian hati mereka meradang dan jera.

Jalan Persatuan

Pemimpin-pemimpin harus tahu benar kelakuan, keadaan dan adat-istiadat orang yang dipimpin, supaya dapat berbuat dengan mengingat “ukur badan sendiri” dan jangan tergesa-gesa, harus terang dan paham terhadap barang yang diterima atau ditolak, serta jangan dengan jalan paksa. Dengan begitu akan dapat menumbuhkan pembicaraan yang enak, menuju keperluan (tujuan) yang amat penting, yaitu *manusia bersatu hati*.

Sudah menjadi adat kebiasaan orang, bahwa apa yang sudah dipahami dan dikerjakan menurut pengajaran gurunya atau pergaulan teman-temannya dan menurut pikirannya sendiri akan menjadikan gembira dan senang hatinya. Dan hal itu akan dipegang lahir dan batin, lebih-lebih jika hal itu sudah dijalani oleh nenek-moyangnya. Hal itu akan dikira-kira dan dipercaya mendatangkan kebahagiaan. Siapa yang menyalahinya akan mendapat kecelakaan dan kesusahan. Pemimpin-pemimpin dipersilahkan menengok, apakah sikap yang demikian itu hanya ada pada kaum kita, orang Islam, saja? Tidakkah kaum lain, misalnya Budha, Kristen dan Yahudi juga demikian keadaannya?

Pemimpin-pemimpin! Oleh sebab “benar” itu sesungguhnya hanya satu, maka bagaimanakah kita mendapatkan yang “Benar” itu agar tidak mendapatkan kesalahan di hadapan Allah Yang Maha-suci.

Begitu pula telah menjadi kebiasaan orang, mereka segan dan tidak mau menerima apa saja yang kelihatan “baru” yang tidak sama dengan apa yang sudah dijalani. Karena menurut perasaannya barang yang baru itu

akan menjadikan celaka dan susah, meskipun sudah jelas dan nyata bahwa orang yang mengerjakan dan menjalani barang “baru” itu misalnya, mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Yang demikian itu terkecuali orang yang memang banyak dan senang berpikir dan merasa dengan panjang dan dalam.

Apakah kelakuan seperti tersebut di atas dapat disebut baik atau betul? Sudah tentu tidak, sebab orang yang tersebut di atas itu hanya berhukumkan adat kebiasaan dan adat-istiadat, karena adat-istiadat tidak boleh dijadikan hukum untuk menentukan “baik” dan “tidak baik”, “betul” dan “salah”. Yang dapat dijadikan hukum untuk menentukan betul dan salah, baik dan tidak baik hanya hukum yang sah dan sesuai dengan hati yang suci.

Uraian tersebut di atas harus dipikirkan dan dirasakan dengan sungguh-sungguh secara panjang dan dalam perlunya manusia bersatu-hati, sebab di dalamnya tergantung sesuatu yang amat besar, yaitu bahagia dan celaka. Sebab itu, saya sangat berhasrat hati meminta agar pemimpin-pemimpin itu secara bersama-sama mempersatu-hatikan semua manusia. Sebelum semua manusia bersatu hati, tidakkah wajib pemimpin-pemimpin itu bersatu hati lebih dahulu? Sudah barang tentu wajib dan wajib sungguh.

Marilah, segera kita, pemimpin-pemimpin, berkumpul membicarakan kebenaran (haq) itu tanpa memilih-milih bangsa, semuanya saja. Dan jangan sekal-kali puas atau bosan sehingga kebenaran itu terdapat (diketemukan). Sesudah itu lalu kita berasaskan satu, berpengetahuan satu, dan bertenaga satu rupa. Pendeknya, manusia semuanya harus bersatu hati karena adanya permufakatan dengan memakai hukum (*wewaton*, Jawa) yang sah dengan hati suci dan tidak jera sehingga semua manusia bersatu-hati. [Ad]

Ahmad Syafii Maarif

Muhammadiyah, Nasionalisme, dan Indonesia Masa Depan

“Sebuah Muhammadiyah yang tidak mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah Indonesia, bukanlah Muhammadiyah yang sebenarnya.”



Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif.
Lahir di Sumpurkudus, Sijunjung,
Sumatera Barat, 31 Mei 1935;
Guru Besar Ilmu Sejarah, Ketua Umum
PP Muhammadiyah (1998-2005),
Presiden World Conference on
Religion for Peace (WCRP) dan pendiri
Maarif Institute, peraih penghargaan
Ramon Magsaysay dari Pemerintah
Filipina (2008)

Kelahiran Muhammadiyah tahun 1912 mendahului kelahiran bangsa (1920-an) dan negara (1945) Indonesia. Ungkapan nasionalisme memang tidak populer di kalangan Muhammadiyah, tetapi perbuatan yang bercorak nasionalistik telah menjadi wataknya sejak semula kebangkitannya. Muhammadiyah langsung bergerak untuk membenahi kultur umat terjajah melalui proses pencerahan dan kemanusiaan, sesuatu yang sangat mendasar bagi bangunan sebuah bangsa yang bakal lahir. Keterbukaannya terhadap gagasan-gagasan baru yang lebih segar telah menjadi sifat Muhammadiyah selama sekian dasawarsa. K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923), sekalipun lahir di lingkungan kultur Jawa Kraton yang kental, berkat pergaulannya dengan berbagai kalangan dan pergulatan batinnya yang sangat intens dengan situasi Islam yang sedang jatuh, telah memaksanya membuat kesimpulan yang saya rumuskan berikut ini: “Tidak boleh terus terkapar dalam situasi begini.” Pergaulan dan pergumulan inilah yang melatarbelakangi kelahiran Muhammadiyah yang sekarang sedang memasuki abad ke-2 usianya.

Sesungguhnya sebagai gerakan sosial keagamaan yang sadar betul tentang keadaan umat yang miskin lahir-batin dan terjajah lagi, Muhammadiyah menemukan gagasan baru dalam format “Islam yang berkemajuan,” bukan Islam yang lumpuh di tangan umat yang lemah yang telah cukup lama menjadi mainan sejarah. Pada mulanya perumusan tujuan Muhammadiyah berangkat dari cita-cita sederhana dan lokal sifatnya, yang dalam Anggaran Dasar 1912 terbaca: *a). menyebarkan pengajaran Igama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wassalam kepada penduduk Bumiputera di dalam residensi Yogyakarta, dan; b). memajukan hal Igama kepada anggauta-anggautanya.*

Dua tahun kemudian, dalam Anggaran Dasar 1914, sifat lokalnya berubah secara dramatis dalam rumusan: *a). Memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran Igama Islam di Hindia Nederland, dan; b). Memajukan dan menggembirakan kehidupan (cara hidup) sepanjang kemaunan agama [Igama?] Islam kepada lid-lidnya.*

Untuk mencapai tujuan itu, Muhammadiyah mendirikan sekolah, menggerakkan pengajian, dan menggalakkan penerbitan dalam berbagai bentuk. Dengan cara ini, Muhammadiyah ingin menebus kelumpuhan umat melalui proses pencerdasan dan pencerahan. Adapun gagasan tentang bagaimana menolong kesengsaraan umum (seperti orang sakit) baru muncul tahun 1923, sebagai embrio PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem), dipelopori oleh Kiyai Sudja’ dengan persetujuan Ahmad Dahlan.

Nama Hindia Nederland dalam AD Muhammadiyah baru diubah menjadi Indonesia saat Kongres ke-28 di Medan, Nopember 1941, beberapa bulan menjelang invasi Jepang untuk mengusir Belanda, sedangkan tujuan dan upaya mencapainya belum mengalami perubahan yang berarti. Rumusan tujuan baru terjadi pada Muktamar Muhammadiyah ke-31 di Jogjakarta, 21-26 Desember 1950 yang berbunyi: “*Maksud Persyarikatan ini akan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.*”

Dalam ungkapan lain, cita-cita untuk mendirikan masyarakat Islam adalah gagasan yang muncul pasca-proklamasi, bukan di era awal. Kemudian pencantuman Asas Islam bagi Persyarikatan adalah keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Jogjakarta tahun 1959. Fasal 2 berbunyi: “Persyarikatan berasaskan Islam.” Yang ajaib adalah kenyataan bahwa selama 47 tahun (1912-1959) Muhammadiyah bergerak tanpa asas tertulis,

tetapi tidak ada masalah, bukan? Apa yang hendak saya tegaskan di sini adalah bahwa masalah asas dalam perjalanan Muhammadiyah ternyata adalah kondisional, tidak mutlak. Artinya, sekiranya data autentik tentang masalah asas ini dicermati dengan baik pada tahun 1980-an, maka Muhammadiyah tidak perlu “bergesekan” terlalu keras dengan negara/pemerintah yang pada waktu itu berada di bawah sistem otoritarian.

Mencuatnya masalah asas di kalangan Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari suasana pergulatan politik kebangsaan dalam Majelis Konstituante yang bersidang antara tahun 1956 s/d 1959. Karena perdebatan tentang dasar negara dalam majelis dinilai gagal oleh penguasa saat itu, maka dikeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 dengan perintah kembali kepada UUD 1945 serta dengan membubarkan majelis. Muhammadiyah sebagai bagian yang menyatu dengan denyutan nadi bangsa tentu tidak bisa melepaskan diri dari iklim politik yang sarat konflik itu. Maka munculnya asas Islam dalam AD Muhammadiyah hendaklah dibaca dalam konteks perpolitikan bangsa tahun 1950-an itu. Sebelum itu, sebagaimana telah dijelaskan di depan, apa yang dikenal dengan kepribadian Muhammadiyah tidak terkait secara konstitusional dengan masalah asas itu.

Ini penting saya sampaikan untuk mengantisipasi fluktuasi politik Indonesia di masa depan dengan serba kemungkinannya agar Muhammadiyah lebih cerdas dan tidak perlu menguras energi terlalu banyak untuk sesuatu yang bersifat kondisional. Siapa yang meragukan keislaman Muhammadiyah selama bergerak tanpa asas? Tetapi jika ada upaya, dari siapa pun, agar faham keislaman Muhammadiyah dikebiri atau dimandulkan, maka baru energi Persyarikatan kita kerahkan untuk menentukan sikap yang tepat dan cerdas untuk menghadapinya. Islam itu tidak terletak dalam Anggaran Dasar, tetapi bersemayam dengan kukuh di pusat saraf kesadaran warga Muhammadiyah. Dalam perspektif ini, kualitas keislaman warga Persyarikatan harus senantiasa dipertajam dan diasah terus-menerus untuk mempercepat agar pesan Langit berupa rahmat bagi alam semesta dapat dibawa turun ke bumi dengan penuh rasa tanggung jawab. Posisi kita sekarang masih teramat jauh dari cita-cita ideal itu. Pada dataran global, umat Islam belum berhasil menyamakan bahasa dan strategi bagaimana agar pesan itu tidak hanya tergantung di awan tinggi, tetapi dirasakan secara kongkret dalam kehidupan nyata.

Renungan serupa ini adalah buah dari kegelisahan saya yang terdalam tentang Islam, kemanusiaan, dan masalah-masalah besar lainnya

yang belum juga menemukan solusi yang adil, baik pada tingkat nasional, regional, mau pun global sampai detik ini. Energi umat dalam perjalanan waktu yang panjang lebih banyak terkuras oleh persoalan-persoalan pinggir tetapi dinilai sebagai substansi ajaran agama. Untuk Indonesia, misalnya, kita telah bertungkus-lumus selama bertahun-tahun untuk memperjuangkan merek mewah berupa negara Islam, sementara fondasi moral dan intelektual yang kuat untuk itu belum dimiliki. Pemikiran-pemikiran Abul 'Ala al-Maududi dan Said Quthb yang revolusioner, tetapi reaktif dan tidak realistis, pada suatu masa telah kita telan dengan sikap bilâ kaifa (tanpa disoal secara cerdas dan mendalam).

Sebegitu jauh, pendapat mengenai asas yang kondisional ini belum pernah saya dengar dari siapa pun atau membacanya dalam seluruh dokumen Muhammadiyah. Ini adalah temuan saya melalui bacaan dan pergaulan. Adapun asas Islam yang sudah dikukuhkan kembali pada Mukhtar Jakarta tahun 2000, biarkan saja tetap seperti itu, tetapi kita akan bersikap lebih longgar dan lentur sekiranya prahara politik terjadi lagi di tanah air tercinta ini di masa depan. Saya berharap, demokrasi kita yang belum stabil ini tidak akan mendorong orang untuk menggantinya dengan sistem lain, sebab ongkosnya pasti akan terlalu mahal. Sebagai gerakan rakyat, Muhammadiyah semestinya tidak hanya terpukau dan terpaku oleh dirinya sendiri yang semakin membesar, sementara bangsa ini secara keseluruhan menjerit mencari keadilan dan keteladanan. Pertanyaannya adalah: jika bangsa ini tenggelam, apakah Muhammadiyah mau turut tenggelam atau kita telah menyiapkan diri untuk turut penyelamatkannya?

Jawaban saya terhadap pertanyaan yang sedikit ngeri ini belum banyak beranjak dari apa yang pernah saya sampaikan di depan Sidang Tanwir Bali tahun 2002: "Jika bangsa ini tersungkur, Muhammadiyah akan turut tersungkur." Dalam pandangan saya, dengan segala kebesaran dan ekspansi amal-usahanya yang tidak pernah menyusut, Muhammadiyah belum sempat menawarkan hasil-hasil pemikiran alternatif bagi bangsa ini. Maka tesis saya adalah agar Muhammadiyah memperkuat wawasan kebangsaan dan sekaligus tampil sebagai gerakan ilmu. Pendapat ini adalah dalam rangka mengantisipasi serba kemungkinan masa depan Indonesia yang belum juga cukup siuman dalam menata diri sebagai bangsa dan negara yang berdaulat.

Nasionalisme Indonesia yang dulu telah berhasil memerdekakan bangsa ini, dalam perjalanannya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan

berupa tegaknya keadilan dan kemakmuran yang merata, nasionalisme itu sendiri tampaknya seperti telah kehilangan elan vital untuk menuntun bangsa ini ke arah masa depan yang lebih cerah dan bermartabat. Bahkan kelihatannya nasionalisme sedang kebingungan melihat kelakuan anak-anak bangsa yang telah lupa daratan, lupa lautan. Pragmatisme elit politik dan elit ekonomi telah semakin melumpuhkan kekuatan nasionalisme dan patriotisme yang dulu pernah sangat perkasa. Para pemikir Muhammadiyah belum tentu terlalu hirau dengan fakta keras yang memprihatinkan ini.

Dengan peta sosio-kultural-politik seperti yang baru saja gambarkan, maka waktunya sudah sangat tinggi bagi Muhammadiyah untuk menata ulang tidak saja posisinya di tengah-tengah dinamika kebangsaan, tetapi juga merumuskan peran strategis yang mungkin dimainkannya dalam tempo yang dekat ini. Peran itu tidak akan pernah terwujud secara meyakinkan, jika pimpinan Muhammadiyah dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat tidak mengenal secara cermat peta kebangsaan yang sedang berubah secara dinamis dan dramatis. Buta peta dan sempitnya pergaulan menjadi salah satu faktor utama mengapa peran itu akan sukar dimainkan secara maksimal.

Sekalipun demikian, harapan masyarakat luas, terutama saudara-saudara kita sebangsa yang tidak seagama dengan kita masih menaruh harapan besar kepada Muhammadiyah dan NU untuk tetap berperan sebagai payung pelindung eksistensi mereka yang sering “diteror” oleh kelompok-kelompok yang mengesankan dirinya sebagai yang paling religius dan paling dekat dengan Tuhan, jika bukan telah mengambil alih peran Tuhan tentang kebenaran. Indonesia masih beruntung karena arus besar Islam di sini telah mengkristal dalam kultur Muhammadiyah dan kultur NU yang moderat, terbuka, dan modern. Jika terasa kelemahan dalam kultur ini adalah karena Muhammadiyah dan NU kurang agresif dalam upaya memasarkan cita-cita Islam yang memayungi semua suku bangsa, penganut agama, dan siapa pun yang hidup di bumi Nusantara ini. Di saat-saat kritikal, sikap agresif tetapi terukur perlu juga ditunjukkan agar pihak lain tidak menilai kita telah kehabisan amunisi untuk berperan sebagai payung pelindung dan tenda besar bagi semua.

Islam yang Ditawarkan

Dalam usia yang semakin senja, saya ingin menyampaikan, khususnya kepada anak-anak muda Muhammadiyah agar urutan filosofi

perkaderan dibalik secara radikal. Jika selama ini urutan itu adalah: kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa, diubah menjadi: kader kemanusiaan, kader bangsa, kader umat, dan baru kader persyarikatan. Mengapa kader kemanusiaan ditempatkan paling atas?

Pertimbangannya adalah dalam pemikiran berikut ini. *Pertama*, misi Islam sebagai “rahmat bagi alam semesta,” mengharuskan kita untuk memasuki gelanggang kehidupan dari pintu kemanusiaan. Melalui paradigma mondial, kita akan memandang seluruh umat manusia, siapa pun mereka, pada hakekatnya adalah sahabat. Jika terjadi konflik dan permusuhan, harus diselesaikan dalam bingkai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sebuah dunia yang masih sarat dengan pertentangan dan pertumpahan darah, diktum “rahmat bagi alam semesta” masih terdengar terlalu jauh di sana. Tetapi umat Islam tidak boleh melepaskan diri dari kawalan diktum itu, karena itu berasal dari suaran Langit, betapa pun posisi dan peran kita masih saja berkulat di pinggir-pinggir peradaban. Agar peran kita bisa dihargai pihak lain, maka upaya pertama yang harus dilakukan adalah perbaikan dan pembenahan total terhadap kondisi internal kita yang masih rapuh.

Kedua, dari posisi kader kemanusiaan, kita turun selangkah menjadi kader bangsa, karena kita hidup dan bernafas dalam teritori negara-bangsa yang bernama Indonesia. Dalam sebuah masyarakat pluralistik, konsep keumatan disamping ditempatkan dalam bingkai kemusiaan universal, perumahan kebangsaan adalah dermaga awal untuk dijadikan pangkal tolak untuk bergerak lebih jauh. Dengan filosofi ini, umat Islam akan tampil sebagai garda terdepan tanpa rasa canggung untuk membela dan merawat kepentingan bangsa ini bersama-sama dengan umat-umat lain dalam iklim persaudaraan yang dalam dan jujur.

Ketiga, manusia diciptakan memang tidak dalam format sosio-kultural yang tunggal, tetapi dalam lingkungan beragam umat dengan ciri khasnya masing-masing. Ciri ini adalah pertanda bahwa Allah, Maha Pencipta, anti-keseragaman, sebab panorama serba-seragam dapat membuat manusia menjadi miskin wawasan dan kaku dalam pergaulan. Ini adalah sebuah fakta sejarah yang tidak mungkin dibantah. Oleh sebab itu, berilah kesempatan masing-masing umat yang beragam itu mencetak kadernya sendiri untuk kepentingan lingkungan khas yang berbeda, tetapi dalam wawasan tetap berada di bawah tenda kebangsaan dan di atasnya terbentang tenda kemanusiaan yang sangat luas, hampir tak bertepi. Iman saya tidak

menemui kesulitan apa-apa untuk meluaskan radius pergaulan dengan segala macam manusia dengan syarat sama-sama berpegang kepada konsep *litaârrafû* (untuk saling menyapa, saling memperkaya, dan saling bertukar unsur-unsur pengalaman dan peradaban).

Keempat, adalah sebuah kenyataan sejarah, di kalangan umat yang satu, keberagaman internal telah menjadi fakta sejak masa dahulu kala. Untuk Indonesia, seperti telah ditakdirkan Muhammadiyah dan NU telah muncul sebagai dua sayap utama yang juga memerlukan pembinaan kadernya masing-masing, demi kelangsungan gerakan dan misi yang telah dirumuskannya. Baik Muhammadiyah dan NU, menurut tesis saya, adalah bagian yang menyatu dengan tiga ranah pergaulan di atas: kemanusiaan, kebangsaan, dan keumatan. Dengan menyebut dua arus besar umat itu, kelompok-kelompok Islam yang lain tidak berarti punya peranan kecil untuk mengukuhkan pilar-pilar kebangsaan Indonesia. Mereka semua telah berjasa pula melalui cara dan strategi masing-masing yang sengaja tidak kita bicarakan di sini.

Untuk mengoptimalkan peran keislaman kedua sayap utama umat ini, maka pertanyaan ini harus dijawab: “Apakah Islam yang ada di hati dan di otak Muhammadiyah dan NU sekarang ini masih cukup memadai untuk kepentingan kemanusiaan, kebangsaan, dan keumatan yang kini sedang berada dalam dinamika sejarah yang sangat kreatif dan kritikal?” Dalam pantauan saya, jawabannya: sudah tidak memadai. Jalan keluarnya adalah agar seluruh bangunan Islam yang sudah menjadi sejarah perlu dikaji kembali secara bertanggung jawab, jujur, dan kritikal. Ini adalah kerja ijtihad dalam makna yang substansial. Kajian itu harus menghasilkan sebuah Islam yang mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah kemanusiaan, kebangsaan, dan keumatan, disamping berfungsi sebagai kekuatan pengawal peradaban. Ada pendapat: “Sebuah Islam yang tidak mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah manusia, bukanlah Islam yang sebenarnya.” Tantangan ini tidak mungkin mungkin dijawab secara tuntas, jika otak dan hati dibiarkan mandul dalam kemalasan atau tidur nyenyak dalam iklim setengah sadar. [Ad]

Sumber tulisan: dari makalah *Menata Ulang Posisi Muhammadiyah sebagai Gerakan Keagamaan dan Kemasyarakatan di Tengah Dinamika Kehidupan Bangsa*, disampaikan dalam forum Seminar dan Lokakarya Pra-Muktamar Muhammadiyah Satu Abad, Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, 15 Desember 2009.

Dadang Kahmad

Bhinneka Tunggal Ika, Kemajemukan Budaya Indonesia



*“Semua elemen Bangsa
berhak mendapat
pengakuan atas identitasnya
masing-masing”*

Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.
Lahir di Garut, Jawa Barat, 5 Oktober
1952. Guru Besar Sosiologi Agama UIN
Sunan Gunung Djati Bandung.
Ketua Pusat Studi Sunda.
Ketua Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Jawa Barat 2005-2010.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah
(Membidangi Pustaka dan Informasi)
2010-2020.

Masyarakat Indonesia ditakdirkan sebagai masyarakat yang paling beragam di dunia. Kadar kemajemukannya itu nampak pada keadaan geografis yang terdiri dari 13 ribu lebih gugusan pulau berada dalam kewasannya. Dan dalam satu pulau tidak hanya dihuni oleh satu kelompok suku bangsa saja melainkan ada yang terdiri dari berbagai kelompok suku bangsa. Seperti halnya di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan pulau-pulau lainnya. Sehingga di Indonesia terdapat lebih dari 250 kelompok suku bangsa dengan lebih dari 250-an bahasa lokal (*lingua franca*).

Di bumi pertiwi ini berdiri ribuan tempat ibadah yang berbeda-beda dibawah naungan enam agama resmi diakui negara maupun agama tidak resmi yang jumlahnya puluhan. Semuanya terikat oleh prinsip hidup Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bersatu dalam kemajemukan, dan itulah Indonesia. Pertanyaannya, apakah multikulturalitas di negeri ini merupakan berkah atau sebuah titik lemah sebuah bangsa?

Kemajemukan masyarakat merupakan keniscayaan kehidupan manusia. Kalau kita melihat kepada dasar pijakan teologis dari agama-agama, maka akan kita dapatkan ajaran bahwa kebhinnekaan kultur itu merupakan sesuatu yang ditakdirkan dari Tuhan. Contohnya, dalam agama Islam yang dengan tegas mengemukakan bahwa kemajemukan itu adalah sunnatullah, ketentuan Tuhan yang tidak terbantahkan lagi. Dalam kitab suci Al-Qur'an, Tuhan mengisyaratkan bahwa multikultur atau kemajemukan budaya merupakan desain Tuhan.

Dalam surat al-Hujurat ayat 13 dinyatakan, “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu (manusia) dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”

Kata *Syu'ub* adalah jamak yang sepadan dengan kata bangsa dalam bahasa Indonesia. Sementara kata *qabilah* biasa diterjemahkan suku bangsa yang berdasarkan keturunan. *Qabilah* terdiri dari sekian banyak kelompok keluarga yang dinamai *imarah*, dan *imarah* merupakan kumpulan komunitas yang disebut *bathn*. Kelompok kecil dibawah *bathn* terhimpun menjadi kumpulan *fakhda* yang lebih dekat dengan konsep keluarga dalam masyarakat modern.

Keberanan kitab suci seperti Al-Quran adalah sebuah postulasi yang akurat. Demikian pula dengan fakta bahwa manusia cenderung untuk berkoloni, berkabilah, bermasyarakat dan berbangsa-bangsa, merupakan sebuah postulasi atau kebenaran yang didukung oleh kitab suci agama seperti Al-Quran. Fenomena kabilah-kabilah (*al-qabail*) dengan demikian merupakan *sunnatullah* yang tidak mungkin dihindari.

Pengelompokan manusia menjadi kabilah yang bermacam-macam menyimpan sebuah tujuan, untuk saling kenal mengenal (*li ta'arafu*). Konsep *ta'aruf* dalam sosiologi memiliki nuansa yang sama dengan konsep komunikasi, dialog, atau interaksi sosial. Mekanisme *ta'aruf* ini akan menghindarkan masyarakat yang berbeda-beda tersebut terlibat konflik dan perselisihan.

Studi terhadap masyarakat manusia, sebagaimana diisyaratkan al-Qur'an, sudah dilakukan jauh sebelum disiplin ilmu sosial (sosiologi) muncul. Dalam buku *The Nature and Types of Sociological Theory*, Don Martindale, dengan jujur mencatat bahwa kegiatan ilmiah yang sekarang disebut sebagai

sosiologi, sesungguhnya sudah dilakukan oleh Ibnu Khaldun, empat ratus tahun sebelum Auguste Comte menulis sosiologi.

Inti gagasan sosiologi Ibnu Khaldun terletak dalam konsep Solidaritas Sosial (*asabiyya*)¹ yang membedakan berbagai kelompok kabilah. Untuk mempertahankan eksistensinya masyarakat dituntut memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya (*basic needs*). Setiap individu secara alamiah akan sulit bertahan hidup, kecuali dia bergabung dengan individu lain untuk membentuk kelompok atau koloni. Bagaimanapun kerjasama jauh lebih memberi peluang untuk terpenuhinya kebutuhan dasar tadi. Misalnya, kebutuhan akan makanan, pakaian dan senjata untuk mempertahankan eksistensinya.

Dengan berkelompok juga, menurut Ibnu Khaldun manusia sekaligus mengikuti ketentuan Tuhan untuk tetap mempertahankan kelangsungan spesies manusia. Sehingga kontinuitas keberadaan manusia di muka bumi tetap lestari. Lebih jauh lagi, Ibnu Khaldun juga membaca kemunculan masyarakat dan negara, sebenarnya memiliki latar belakang dan tujuan yang sama. Fenomena terpenting, yang dimaksud adalah solidaritas.

Jejak paling awal solidaritas sosial dikaitkan dengan persoalan silsilah keturunan dan pertalian darah, yang menjadi landasan pembentukan kelompok masyarakat kecil. Namun, ikatan darah semacam itu, tidak berarti apa-apa, kecuali komunitas tersebut membuka interaksi dengan kelompok lain dan kehidupan yang sama (*common life*).

Pertemuan antarkomunitas ini menciptakan interaksi yang saling menguntungkan (*mutual interaction*). Pada gilirannya nanti akan melahirkan solidaritas sebagai kesatuan pertalian kekerabatan yang lebih luas. Karena itu relasi antar berbagai kelompok masyarakat yang berbeda akan menciptakan solidaritas yang lebih besar lagi. Solidaritas sosial, dalam analisisnya Ibnu Khaldun lebih nampak dalam masyarakat kesukuan (*tribal society*). Hal ini diakibatkan karena kehidupan nomadiknya.

Kemajemukan Indonesia

Masyarakat plural, multikultur merupakan fenomena masyarakat modern. Interaksi antarsuku bangsa, ras dan etnis semakin menguat seiring pertumbuhan globalisasi dan modernisasi. Tetapi sebenarnya peradaban

¹ The Core of Ibn Khaldun's sociology is found in his concept of social solidarity (*assabiyya*), the distinctive property of society", Don Martindale, *op.cit.* hal. 132.

agama-agama sudah sejak lama mempraktikkan prinsip kemajemukan ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan contoh agama Islam sejak abi Muhammad merintis terbentuknya masyarakat di Madinah. Melalui *al-Shahifah al-Madinah (Madinah Charter)*, Nabi SAW. berusaha mencari titik temu antarkepentingan berbagai golongan, kabilah dan agama di Madinah. Langkah pertama Nabi adalah dengan mengakui hak eksistensi berbagai kelompok itu dalam dokumen “Konstitusi Madinah”. Hal sama juga dilakukan penerus beliau yaitu Khalifah Umar bin Khattab dalam sikap baiknya terhadap penduduk Yerusalem yang terdokumentasikan dalam “Piagam Aelia” (nama lain Yerusalem).

Teladan Nabi (*sunnah*) secara estafet dipraktikkan oleh Khalifah Umar dan juga pada masa Khalifah Umawi di Andalusia (Spanyol) yang memperlakukan politik multikultur yang gemilang.

Dalam catatan sejarah Umawi di Spanyol yang mendapat sanjungan dari Max Dimont yang menyebutnya sebagai rahmat bagi Andalusia yang mengakhiri kezaliman dan kekelaman kolonialisme dan pemaksaan agama waktu sebelumnya. Dibawah rezim pemerintahan Islam yang bertahta selama 700 tahun, Spanyol diibaratkan sebagai negeri tiga agama dan “satu tempat tidur”: Orang-orang Islam, Kristen dan Yahudi hidup rukun dan bersama-sama menyertai peradaban gemilang. Kesaksian Max Dimont termaktub dalam buku *The Indestructible Jews*, sebagai berikut: *The Arab conquest of Spain in had put and end to the forcible conversion of Jews to Christianity begun by King Recared in the sixth century. Under the subsequent 500 years rule of the Moslem emerged the Spain of three religions and one bedroom Mohammedans, Christians, and Jews shared the same brilliant civilization, an intermingling that affected bloodlines even more than religious affiliation* (Max I. Dimont, *The Indestructible Jews*, New York: New American Library, 1973, h. 203).²

Artinya, penaklukan Spanyol oleh bangsa Arab pada tahun 711 telah mengakhiri pemindahan agama kaum Yahudi ke Kristen secara paksa yang telah dimulai oleh Raja Recared pada abad Keenam. Di bawah kekuasaan kaum muslimin selama 500 tahun setelah itu, muncul Spanyol untuk tiga agama dalam satu tempat tidur. Kaum Muslim, kaum Kristen dan kaum Yahudi secara bersama menyertai satu peradaban yang cemerlang, suatu pencampuran yang mempengaruhi garis darah justru lebih banyak daripada mempengaruhi afiliasi keagamaan.

Teladan Nabi dan masa keemasan Islam mempunyai nilai relevansi dengan kondisi riil bangsa Indonesia. Pluralisme dan kemajemukan di negeri ini semestinya menjadi berkah bukan menjadi masalah. Beberapa peristiwa konflik yang terjadi akhir-akhir ini mengoyak rajutan kebangsaan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Gejolak primordialisme dan sparatisme di gelanggang politik Indonesia harus dibayar dengan harga yang mahal.

Dari sejumlah fenomena konflik yang terjadi di Indonesia di dekade 2000-an dapat dikategorikan menjadi tiga kategori. Pertama, tuntutan pengakuan identitas etnis dalam wujud negara merdeka (*ethnonationalism*) seperti yang disuarakan oleh Papua, Aceh dan Timor-Timur. Kedua, keinginan mempertahankan identitas etnis dan agama antar kelompok (konflik horizontal) seperti yang terjadi di Ambon, Halmahera, Poso, Sambas, Nusa Tenggara Timur. Ketiga, perjuangan perlindungan hak-hak masyarakat adat terhadap eksplorasi sumber daya alamnya.³

Kategorisasi di atas menginformasikan bahwa konflik etnik, ras dan antar kelompok hakikatnya muncul dalam konteks yang berbeda-beda. Karena itu pula, penyikapan dan setiap resolusi atas konflik yang mengemuka harus dipahami sebagai efek domino dari *missmanagement* dalam berbangsa dan bernegara. Khasanah keragaman selama ini lebih sering diperlakukan sebagai penghambat pembangunan, daripada sebagai anugerah dari Tuhan untuk dijadikan kekuatan.

Bangsa Indonesia sendiri sebenarnya bukan tanpa prestasi. Pengalaman berbangsa dan bernegara hingga mencapai 73 tahun adalah bukti nyata bahwa Indonesia mempunyai formula untuk mengatasi konflik internal yang hakikatnya secara prinsipil memiliki spirit dengan pengalaman dengan bangsa lain. Semua itu tidak terlepas dari azas berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila. Peranan Pancasila dalam manajemen konflik bangsa adalah merupakan sebuah titik temu (*kalimatussawa*) yang menyatukan keragaman dan pluralitas bangsa ini.

Persoalannya sekarang, bagaimana nilai Pancasila sinergis dengan fakta sosiologis masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam konteks demokrasi, kenyataan kemajemukan menjadi persoalan yang cukup serius. Sebab, demokrasi pada prinsipnya sangat menjunjung tinggi realitas

² Dikutip dari Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2000. hal. xxvii.

perbedaan seperti perbedaan suku, agama dan etnisitas yang disandang secara askriptif oleh manusia. Karena itu, usaha-usaha untuk menghilangkan atau menegaskan identitas kesukuan, kelompok agama dan ras merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur demokrasi yang memberi ruang kebebasan dan rasa aman (*social security*) sebagai ruang bagi terciptanya interaksi antarkelompok warga secara wajar (*being existence with the other*).

Rasa aman dan pengakuan akan eksistensi bahkan dapat menjadi modal sosial bagi berbagai kelompok etnik dan atau etnisitas dalam menyokong proses pembangunan. Dengan situasi yang kondusif bagi perbedaan kelompok dan etnis serta agama berpeluang besar untuk saling berdialog, bersimbiosis, dan dapat hidup berdampingan secara harmonis, tanpa harus kehilangan jati diri identitas primordialnya masing-masing.

Situasi yang kontras akan terjadi jika rasa aman dan ruang bebas bagi masyarakat terusik. Pluralitas dan kemajemukan justru berbalik menjadi potensi disintegrasi sehingga dapat mengakibatkan lepasnya ikatan kebangsaan yang selama ini ditegakkan di atas unsur-unsur kesukuan. Maka, untuk mewujudkan integrasi nasional, haruslah diawali dengan beberapa langkah strategis untuk melakukan pengakuan (rekognisi) serta mempelajari dan memahami persoalan SARA secara terbuka, arif dan jujur. Dengan demikian akan dihasilkan beragam pandangan yang didasarkan pada fakta yang sesungguhnya, bukan berdasarkan opini subyektif.

Harapan tersebut tentu tidak semudah membalikkan tangan. Sebagai negeri dengan himpunan garis pantai yang terpanjang di dunia, serta rangkaian kepulauan dengan bentangan hampir setara panjang Eropa, dan dihuni oleh aneka gugus etnis, agama dan budaya, serta khasanah kekayaan peradaban yang berlapis, Indonesia tap pelak lagi merupakan sebuah negeri plural *par excellence*.

Memang, dalam masyarakat plural, “kehendak bersama” (*common will*) sulit diraih. Kehendak untuk merawat kerukunan nasional dalam masyarakat plural sulit diwujudkan, kecuali melalui penguatan penghormatan terhadap seluruh hak eksistensi semua elemen masyarakat. Di sini, basis legitimasi kebangsaan tidak lagi didasarkan kepentingan politik dominan. Identitas

³ Rebeka Harsono, *op. cit.* hal. 496.

berbangsa harus didasarkan pada keragaman etnis, bahasa dan keagamaan yang dikukuhkan dengan loyalitas terhadap seperangkat aturan hukum, ide-ide dan institusi politik yang dipandang adil dan efektif. Lagi-lagi peran Negara menjadi signifikan untuk menegakkan *the rule of law* yang menjamin keseimbangan dan keadilan antargugus kebangsaan.

Persoalan yang mendesak adalah menemukan paradigma baru dalam rangka mengayomi keragaman di Tanah Air. Paling tidak ada beberapa prinsip strategis yang bisa dijadikan alternatif.

Pertama, regulasi pemerintah harus lebih berdasarkan pada keragaman yang ada di Nusantara. Tidak boleh ada monopoli baik mayoritas terhadap minoritas, atau sebaliknya. Kedua, semua elemen bangsa berhak mendapat pengakuan atas identitasnya masing-masing.

Ketiga, pluralitas dan multikultur tidak hanya menjadi agenda masyarakat saja, melainkan juga menjadi persoalan krusial dalam proses kepemimpinan nasional. Tanpa dukungan struktural, khazanah kebudayaan yang dipraktikkan masyarakat hanya tinggal cerita. Dan lahirnya kerukunan umat beragama sebagai realisasi dari kebutuhan yang mendesak tersebut di atas.

[Ad]

sumber tulisan: Dadang Kahmad. 2017. *Wawasan Keagamaan Madani*, Bandung: MPI Press. Hlm. 10-20, dengan diberikan judul baru.

Hajriyanto Y. Thohari

Gerakan Filantropi Muhammadiyah untuk Indonesia Berkemajuan



Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.
Lahir di Karanganyar, 26 Juni 1960.
Wakil Ketua MPR RI 2009-2014 dari Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar 2009-2015. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah 1993-1998. Wakil Sekretaris PP Muhammadiyah 2000-2005. Ketua Badan Pengurus LAZIS Muhammadiyah (2010-2015) Ketua PP Muhammadiyah 2015-2020.

“...bahwa reinkarnasi roh PKO berada di PAY, MDMC dan LAZISMU. Maka bersama-sama dengan Majelis Pengembangan Masyarakat (MPM), MDMC dan Lazismu menjadi Trisula Baru gerakan filantropi Muhammadiyah.”

MUHAMMADIYAH menamakan dirinya lebih sebagai gerakan (*movement, harakah*), dari pada organisasi (*organization*) atau apalagi yayasan (*foundation*). Kata “gerakan” disebut secara eksplisit dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah dan juga dalam lagu *Sang Surya* yang *konon* bisa membuat bulu kuduk warga Muhammadiyah berdiri tatkala dilagukan bersama: “Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku”.

Belakangan saja Negara Republik Indonesia, yang *nota bene* lahir tiga puluh tiga tahun kemudian ((1945) setelah kelahiran Muhammadiyah (1912), menyebutnya organisasi massa (disingkat ormas). Dan kemudian Pemerintahan Orde Baru dan Reformasi, mungkin karena saking bingungnya, malah berubah lagi dengan menyebutnya organisasi kemasyarakatan (tidak jelas apa singkatannya). Sementara orang Barat, sebagaimana diwakili para orientalis dan *Indosianist*, mungkin juga saking bingungnya menyebutnya *non governmental organization* (NGO).

Dalam kenyataan pun demikian pula adanya: secara historis sejak awal berdirinya, terlebih lagi dalam beberapa dasawarsa masa-masa formasinya, Muhammadiyah memang lebih menampilkan dirinya sebagai gerakan amal (*a philanthropical movement*), bahkan gerakan filantropi *par excellence*. KH Ahmad Dahlan, sang pendiri, dan murid-muridnya adalah pribadi-pribadi yang tidak begitu tertarik dengan polemik-polemik keagamaan atau teologis, melainkan berkecenderungan sangat kuat pada kerja-kerja kemanusiaan, kedermawanan kepada sesama, sangat cinta sesama, dan gandrung pada pekerjaan-pekerjaan amal (filantropis, *philanthropist*). Mereka dikenal sebagai orang-orang yang pemurah, dermawan, dan suka menolong pada sesama. Agama Islam itu lebih mementingkan amal dari pada spekulasi-spekulasi teologis.

Teologi Al-Ma'un dan PKO

Pengejawantahan dari jiwa pemurah, dermawan, dan suka menolong sesama itu salah satunya tampak sekali dalam pembentukan PKO atau *Penolong Kesengsaraan Oemoem (Assistence for Relief of Public Suffering)* pada 1920-an. Kata *oemoem (public)* dalam frase *Penolong Kesengsaraan Oemoem* ini penting untuk digarisbawahi oleh karena penekanannya pada kerja-kerja kemanusiaan tanpa memandang perbedaan agama dan suku atau bangsa. Ahmad Dahlan dalam pidato pengarahan pada pendirian PKO (1920-an) yang dipimpin oleh salah seorang kawan dan sekaligus muridnya, yaitu Hadji Mohammad Soedjak, malah sempat menegaskan: "*Hadjatnja PKO itoe akan menolong kesengsaraan dengan memakai asas agama Islam dengan segala orang, tidak dengan membelah bangsa dan agamanja*". Artinya, dari Muhammadiyah yang berasas agama Islam untuk kemanusiaan universal.

KH Ahmad Dahlan memang memakai asas agama Islam, yaitu isi dan substansi dari Al-Quran Surah 107: *Al-Ma'un*, yang *nota bene* artinya sendiri sangat lah telak: "Pemberian Pertolongan (*helping!*)". Surah ini terdiri dari tujuh ayat yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut: (1) Adakah kau lihat orang yang mendustakan agama?; (2) Dialah orang yang mengusir anak yatim (dengan kasar); (3) Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin; (4) Maka celaka lah orang-orang yang shalat; (5) Yang alpa dalam shalat mereka; (6) Yang hanya ingin dilihat orang; dan (7) Menolak memberi

pertolongan atau bantuan kepada orang yang memerlukan pertolongan. Inilah teologi al-Ma'un, dan inilah pula ideologi al-Ma'un!

Abdullah Yusuf Ali dalam *magnum opus*-nya *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary (1983)* memberikan penekanan terhadap surah al-Ma'un itu sebagai berikut. *Pertama*, catatan nomor 6281: Hanya manusia yang mengingkari iman dan tanggung jawab akhirat yang memperlakukan kaum yang lemah dengan sikap menghina dan hidup serakah dan sombong. *Kedua*, catatan 6282: Amal kebaikan atau cinta kasih dengan memberi makan orang miskin atas tanggungan pribadinya adalah bentuk amal yang paling mulia, yang berada di luar jangkauan orang yang berhati batu, karena tidak mendorong atau bahkan melarang atau memandang rendah orang yang beramal atau berbuat baik kepada orang lain.

Ketiga, catatan nomor 6283: Ibadah yang sebenarnya tidak hanya terdapat dalam bentuk shalat dengan tidak disertai hati dan pikiran yang benar-benar berusaha hendak mencari ridha Allah, serta memahami dan melaksanakan kehendak-Nya yang suci. *Keempat*, nomor 6284, Bila mereka sudah berdiri hendak mengerjakan shalat, mereka berdiri malas-malas; hanya supaya dilihat orang dan mengingat Allah hanya sedikit. *Kelima*, nomor 6285: Kaum munafik itu berpamer besar-besaran dengan berbuat baik, ibadah dan beramal yang kosong. Tetapi mereka benar-benar akan gagal jika kita uji mereka dengan perbuatan yang kecil saja untuk memberi bantuan atau sedekah, bersikap sopan santun dan berhati baik dalam kehidupan sehari-hari, memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukannya, yang hanya memakan biaya sedikit tapi berarti banyak.

Surah Al-Ma'un itulah yang mendorong Ahmad Dahlan dan murid-muridnya ber-*manhaj* amal (*men of action, faith in action*) sehingga menjadi orang-orang yang pemurah, dermawan, dan suka menolong pada sesama. Dengan semangat yang dikobarkan oleh teologi Al-Ma'un, pandangan Islam berkemajuan (*modernisme*), dan puritanisme yang menggebu dengan melakukan reformasi pengelolaan zakat (*almsgiving*), sedekah (*donation*) dan *Waqf (religious endowment)*, Muhammadiyah tampil sebagai kekuatan filantropi modern.

Dari Amal Muhammadiyah ke Amal Usaha Muhammadiyah

Zakat, sedekah dan waqaf menjadi motor sekaligus tulang punggung Muhammadiyah sebagai gerakan filantropis dengan mendirikan sekolah,

panti asuhan yatim, dan Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO). Rumah Sakit sebagai pengejawantahan semangat “semangat PKO” (*Semanat Penolong Kesengsaraan Oemoem*), misalnya, berhasil didirikan pada tanggal 15 Februari 1923. *Penolong Kesengsaraan Oemoem* adalah aktivitas dan pekerjaan Muhammadiyah yang paling otentik dan original lebih dari yang manapun juga. Kegiatan-kegiatan amal ini berupa pendirian sekolah, panti asuhan yatim, klinik atau rumah sakit, dan lain-lainnya yang dibiayai atau digerakkan dari Zakat, Sedekah dan waqaf. Inilah “Amal Muhammadiyah” yang disingkat AM!

Belakangan seiring dengan perubahan lingkungan strategis dalam berbagai bidang kehidupan, apa yang disebut Amal Muhammadiyah (AM) berkembang menjadi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). AUM dalam bidang pendidikan mengambil bentuk pendirian TK ABA, sekolah-sekolah, universitas, dan lain-lainnya; dalam bidang kesehatan (klinik, rumah sakit dan rumah bersalin), penerbitan (majalah, surat kabar, radio, televisi, dan lain-lain), biro perjalanan haji dan umroh, dan bisnis keuangan (koperasi, Baitut Tamwil, bank perkreditan, bank), dan lain-lainnya. Semua kegiatan atau bentuk AUM apapun, apalagi yang mengandung unsur profit (baca: Sisa Hasil Usaha atau SHU) yang barangkali menjadi kecenderungan baru dalam perkembangan Muhammadiyah dalam beberapa dasawarsa terakhir, pada sejatinya merupakan perluasan atau tambahan (*extention*) dan improvisasi yang datang belakangan. Walhasil, itu tidak lah otentik Muhammadiyah. *Dus*, tidak original! Jika pendirian sekolah-sekolah unggulan dan rumah-rumah sakit favorit saja tidak otentik Muhammadiyah, apatah lagi kegiatan bisnis yang orientasinya memang profit. Demikian juga mungkin “amal usaha” di bidang politik yang memang untuk kekuasaan! Pasalnya, pada sejatinya Muhammadiyah yang otentik adalah gerakan etik dan filantropik. Bukan gerakan AUM yang disengaja (*intended and recognized*) untuk memperoleh profit atau sisa hasil usaha (SHU).

Tentu dengan mengatakan tidak otentik bukan berarti itu semua dilarang atau tidak diperbolehkan. Boleh saja Muhammadiyah terjun dalam bentuk pengembangan AUM, atau sekalian saja bisnis (usaha) sekalipun, yang dimaksudkan untuk mengejar profit (sisa hasil usaha: SHU) mengingat perkembangan dan dinamika kehidupan yang nyatanya telah berkembang sedemikian rupa sehingga perjuangan mewujudkan visi dan misi Muhammadiyah memerlukan sumber daya ekonomi yang kuat dan besar. Tetapi sekali lagi kegiatan-kegiatan yang berdimensi ekonomi atau profit tersebut haruslah dipandang sebagai faktor komplementer belaka. Pasalnya itu tidak otentik

Muhammadiyah! Hanya sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, lembaga-lembaga sosial, dan amal-amal yang bersemangat *penolong kesengsaraan oemoem* lah yang benar-benar otentik Muhammadiyah.

Dalam konteks dan perspektif ini maka sebetulnya pewaris dan pelanjut Muhammadiyah yang otentik adalah *gerakan-gerakan yang benar-benar seutuhnya dan sepenuhnya melaksanakan "semangat penolong kesengsaraan oemoem" in optima forma*. Pertanyaannya dimana saja sekarang ini tempat-tempat kegiatan Muhammadiyah yang benar-benar untuk untuk menolong kesengsaraan *oemoem*? Rumah-sakit rumah sakit Muhammadiyah yang dulu merupakan tempat dan instrumen Muhammadiyah untuk menolong kesengsaraan *oemoem* kini apakah masih tetap demikian ataukah telah berubah menjadi seperti rumah-rumah sakit lain pada umumnya? Bukankah singkatan Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) juga sudah berubah secara resmi menjadi Pembina Kesejahteraan Umat (PKU)? Artinya, bukan hanya kata *oemoem* yang inklusif telah berubah menjadi *umat* yang berkonotasi internal untuk tidak mengatakan eksklusif, melainkan juga semangat menolong kesengsaraan *oemoem* telah bergeser menjadi penyedia jasa kesehatan dengan membayar, untuk tidak mengatakan industri pelayanan kesehatan?

Tentu di RS/PKU Muhammadiyah ada subsidi silang antara pasien yang mampu dan yang tidak mampu. Artinya pasien yang berduit tebal membayar mahal di mana sebagian dananya digunakan untuk mensubsidi pasien-pasien fakir miskin yang tidak mampu membayar yang jumlahnya nyatanya sangat besar. Tetapi bukankah dana itu adalah tetap saja dananya orang yang sakit? Bagaimana mungkin orang yang sedang sakit diminta *by system* untuk ikut menanggung biaya orang lain yang sedang sakit juga, meski orang lain yang sakit itu adalah orang-orang miskin? Mestinya, ini idealnya, jika RS/PKU Muhammadiyah itu masih mewarisi semangat PKO maka biaya bagi pasien-pasien miskin yang sengsara itu ditanggung oleh dana yang dihimpun dari zakat, infak, sedekah, atau waqaf oleh Muhammadiyah. Demikian juga halnya dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah: siswa-siswa yang datang dari keluarga yang tidak mampu ditanggung oleh Muhammadiyah melalui dana-dana ZISKA.

Pertanyaan filantropisnya sekarang adalah darimana Muhammadiyah memperoleh dana untuk menolong orang-orang yang sengsara itu? Jawabnya adalah dana-dana yang dihimpun oleh Muhammadiyah dari

orang-orang Muhammadiyah yang berjiwa filantropis, yakni orang-orang Muhammadiyah yang pemurah, dermawan, dan suka menolong sesama melalui zakat, infak, sedekah yang dihimpun oleh Lazismu. Walhasil, Lazismu pada hakekatnya adalah reinkarnasi dari Penolong Kesengsaraan Oemoem *alias* PKO. Semangat Muhammadiyah yang diilhami oleh Teologi Al-Ma'un yang sangat filantropis tersebut mesti terus digelorakan dengan gigih, penuh semangat dan antusiasme dalam tubuh Muhammadiyah dari Pusat sampai ke Ranting. Lazismu adalah hulu dan hilir gerakan filantropi yang otentik Muhammadiyah!

LPB Atau MDMC

Sangat meyakinkan, semangat filantropi tidak pernah surut dari keluarga Muhammadiyah. Kini setelah PKO menjadi PKU, dan sebagian (besar) sekolah-sekolah Muhammadiyah telah menjadi sekolah-sekolah unggulan dan favorit yang mahal, Muhammadiyah masih tetap memiliki (sedikit atau banyak) RS/PKU dan sekolah-sekolah gratis yang masih bisa diposisikan sebagai lembaga penolong kesengsaraan oemoem. Di samping Panti Asuhan Yatim (PAY) yang tetap setia menjaga semangat filantropi Muhammadiyah, kini Muhammadiyah, setelah Tsunami 2004, melembagakan gerakan penolong kesengsaraan oemoem melalui Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) Muhammadiyah atau *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC).

MDMC pada sejatinya adalah merupakan reinkarnasi, manifestasi atau pengejawantahan dari semangat PKO yang dahulu memang menjadi inti (*core*) gerakan Muhammadiyah dalam menolong sesama tanpa pamrih. MDMC bergiat sebagai relawan penanggulangan bencana yang dipandang sebagai tugas suci (*mission sacre*) yang didedikasikan bukan semata pada sesama manusia yang sedang mengalami kesengsaraan, tetapi juga terhadap Pencipta alam. Tugas kerelawanan adalah bagian integral dari ibadah kepada Allah, sehingga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan hanya mengharap ridha Allah.

Setelah rumah-rumah sakit Muhammadiyah kini telah menjadi amal usaha Muhammadiyah yang tidak bisa lagi berjalan kecuali dengan berorientasi bisnis dan profit, maka MDMC lah yang paling mungkin menjadi pelanjut semangat PKO yang berjiwa filantropis itu berdasarkan teologi dan ideologi Al-Ma'un itu. Artinya, MDMC lah yang menjadi

kekuatan operasional ajaran KH Ahmad Dahlan tersebut di atas, bahwa kepedulian PKO adalah menolong kesengsaraan umum dengan bertolak dari asas Islam untuk semua orang tanpa membedakan suku dan agama (baca lagi: "*Hadjatnja PKO itoe akan menolong kesengsaraan dengan memakai asas agama Islam dengan segala orang, tidak dengan membelah bangsa dan agamanja*").

MDMC mungkin saja bekerja sama dengan berbagai pihak, misalnya dengan DeFAT (*Department of Foreign Affair and Trade*), pemerintahan Australia, dalam rangka *Hospital Preparedness and Community Readiness for Emergency and Disaster* (HPCRED) yang mentransformasikan seluruh Rumah Sakit PKO Muhammadiyah menjadi Rumah Sakit Siaga Bencana seperti yang dilakukan selama sepuluh tahun terakhir ini, tetapi tetap saja MDMC harus bebas dan mandiri. Kemandirian ini bukan hanya secara finansial, melainkan juga secara visi dan misi sehingga kemurniannya terus tetap terjaga. Dalam kerangka inilah Muhammadiyah mengembangkan Lazismu sebagai kekuatan filantropi moderen dan melanjutkan reformasi pengelolaan zakat (*almsgiving*), sedekah (*donation*) dan *Waqf* (*religious endowment*). Sebab, Lazismu harus menjadi motor sekaligus tulang punggung Muhammadiyah sebagai gerakan filantropis.

MDMC dengan HPCRED telah mengembalikan RS/PKU Muhammadiyah ke dalam *track*-nya yang benar dan otentik: gerakan penolong kesengsaraan oemoem yang filantropis. RS/PKU dan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang dalam beberapa dasawarsa terakhir berwajah bisnis yang berorientasi profit kini telah mulai kembali berwajah filantropis: menjadi RS/PKU siaga bencana. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) juga melatih diri menjadi sekolah-sekolah siaga bencana. Satuan-satuan tugas (Satgas) penanggulangan bencana kini berdiri di RS/PKU, sekolah-sekolah dan PTM, dan daerah-daerah atau Cabang. Bahkan Korp Komando Keamanan Muhammadiyah (KOKAM) di bawah Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Kepanduan Hizbul Wathan (HW), juga ditraining oleh MDMC sehingga menjadi kekuatan-kekuatan siaga bencana. Di negara yang masuk dalam kawasan *ring of fire* ini satgas-satgas siaga bencana yang berbasis RS/PKU, sekolah, perguruan tinggi, Kokam, HW, dan berbasis komunitas cabang dan daerah Muhammadiyah, akan menjadi kekuatan kemanusiaan yang luar biasa penting dan strategis.

Menjadikan LAZISMU sebagai motor gerakan

Kini tidak lah terlalu *arbitrer* (baca: sewenang-wenang atau mana suka) untuk mengatakan bahwa reinkarnasi roh PKO berada di PAY, MDMC dan LAZISMU. Maka bersama-sama dengan Majelis Pengembangan Masyarakat (MPM) yang juga sangat otentik Muhammadiyah, MDMC dan Lazismu menjadi Trisula Baru gerakan filantropi Muhammadiyah. Amelia Fauzia dalam *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia* (2013) menyebut Muhammadiyah dengan kata-kata *"It was not solely a modern voluntary organization employing zakat, sedekah, and waqf, but it was succesfull as a philanthropic organization"*.

Mungkin, dalam kerja-kerja kemanusiaan ini Muhammadiyah tidak sendirian alias eksklusif. Ada banyak organisasi Islam lain yang juga melakukan kerja-kerja semacam ini, tetapi, lagi-lagi meminjam kata-kata Amelia Fauzia dalam tesisnya, *"More than many other Islamic voluntary organization, Muhammadiyah's work in the area of philanthropy was (and is) exceptional, since is inisiated philanthropic practices for social welfare and educational project, such as establishing and maintaning school, hospital, and arphanages. These programmes go far beyond just fundrising, and Muhammadiyah can be seen as a philanthropic organization when it is compared with the amil (zakat administration) institution that grew later in post colonial Indonesia... Muhammadiyah managed and redistributed them for the needs of the poor"*.

Secara politis dan sosiologis peran gerakan filantropi sangat lah besar: membantu negara dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang sangat lebar (Gini rasio 0,39% tahun ini dan 0,41% tahun yang lalu). Bersama-sama-sama dengan factor alam, cuaca, dan sistem keluarga atau kekerabatan, tradisi filantropi sangat lah membantu pemerintah atau negara. Tak terbayangkan bagaimana akibatnya jika problem kemiskinan dan kesenjangan perekonomian ini terjadi dan berlangsung jika tidak dibantu mengatasinya oleh gerakan filantropi. Dalam konteks dan perspektif inilah peran LAZISMU sangat lah besar. Apalagi sejak Tahun 2016 Lazismu telah menjadi lembaga zakat terbesar di Indonesia.

Semangat kerelawanan (*volunterisme*), cinta kasih dan kedermawanan kepada sesama (*filantropisme*) adalah jati diri gerakan Muhammadiyah yang paling otentik dan orisinal. Saya tidak tahu pasti apakah semangat dan atau

karakter ini cocok (*fit and proper*) atau sangat tidak cocok untuk dibawa bergiat ke medan politik Indonesia yang semakin pragmatis, oligarkis, dan plutokratis seperti sekarang ini. Tetapi agaknya terbukti Muhammadiyah dan orang Muhammadiyah yang filantropis dan secara teologis cenderung puritanistik itu seringkali *madek mangu* dalam lapangan politik yang keras ini. Dan dengan roh volunterisme dan filantropisme ini pula Muhammadiyah barangkali juga akan kesulitan untuk terjun dalam bisnis yang semakin kapitalistik ini. Maka, menurut hemat saya, akan jauh lebih mulia bagi Muhammadiyah untuk tetap tabah, kukuh dan setia dengan kerja-kerja kemanusiaan yang ikhlas yang mungkin sunyi sepi ini, kerja-kerja yang jauh dari kekayaan dan ketenaran pencitraan dunia glamour yang sarat dengan tepuk tangan kekaguman yang hingar bingar itu.

Mungkin pernyataan tersebut di atas tampak terlalu eskatologis yang apokaliptik, tetapi demikianlah teologi Al-Ma'un mengajarkan kepada kita, warga Muhammadiyah. *Innama nuth'imukum li wajhillah la nuridu minkum jazaan wa la syukura* (Q.S. 76/Al-Insan: 9): "Kami memberikan makan kepada kamu karena Allah semata; kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu". Kata Yusuf Ali dalam tafsirnya tersebut di atas berbunyi demikian: "Kata-kata ini tak perlu benar-benar diucapkan. Mereka mengeluarkan sedekah dengan niat yang bersih dan bersikap sangat rendah hati". Dengan teologi ini relawan-relawan Muhammadiyah berusaha menjadi yang terdepan dan tercepat dalam kerja-kerja kerelewanan dan kemanusiaan. Tidak hanya dengan nilai-nilai keimanan dan keikhlasan semata, melainkan juga dengan keahlian dan ketrampilan teknis di lapangan (*skill*) yang berstandar moderen dan profesional. Semoga.

Sumber: Makalah dipresentasikan pada Kajian Ramadhan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, tanggal 3-4 Juni 2017 di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Judul Asli: "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Filantropi; Perspektif Historis dan Sosiologis"

Said Tuhuleley

Ekoteologi Pertanian untuk Mengatasi Masalah dan Pertanian Ramah Lingkungan



Dr. H. Said Tuhuleley, M.M.

Lahir di Saparua 22 Mei 1953,
wafat di Yogyakarta 9 Juni 2015.

Sekretaris Majelis Tabligh
PP Muhammadiyah 1985-1990.

Badan Pendidikan Kader dan
Pembinaan AMM 1990-1995.

Sekretaris Majelis Diktilitbang
PP Muhammadiyah 2000-2005.

Ketua Majelis Pemberdayaan
Masyarakat PP Muhammadiyah
2005-2015.

Bumi Makin Panas. Ini bukan judul film, tetapi gejala nyata yang dirasakan dunia saat ini. Betapa tidak! Suhu rata-rata udara di permukaan Bumi yang di abad lalu meningkat $0,75^{\circ}\text{C}$, dalam 50 tahun terakhir ini naiknya berlipat ganda. Badan PBB, *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), memproyeksikan bahwa pada tahun 2100 suhu rata-rata dunia cenderung akan meningkat dari $1,8^{\circ}\text{C}$ menjadi 4°C –dan skenario terburuk bisa mencapai $6,4^{\circ}\text{C}$ – kecuali dunia mengambil tindakan untuk membatasi emisi gas rumah kaca.

Laporan yang dikeluarkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), satu badan PBB yang terdiri dari 1.300 ilmuwan dari seluruh dunia, *Fourth Assessment Report*, terungkap bahwa 90% aktivitas manusia selama 250 tahun terakhir inilah yang membuat planet semakin panas. Sejak Revolusi Industri, tingkat karbon dioksida beranjak naik mulai dari 280 ppm menjadi 379 ppm dalam 150 tahun terakhir. Tidak main-main, peningkatan

konsentrasi CO₂ di atmosfer Bumi itu tertinggi sejak 650.000 tahun terakhir! IPCC juga menyimpulkan bahwa 90% gas rumah kaca yang dihasilkan manusia, seperti karbon dioksida, metana, dan nitro oksida, khususnya selama 50 tahun ini, telah secara drastis menaikkan suhu Bumi. Sebelum masa industri, aktivitas manusia tidak banyak mengeluarkan gas rumah kaca, tetapi pertambahan penduduk, pembabatan hutan, industri peternakan, dan penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan gas rumah kaca di atmosfer bertambah banyak dan menyumbang pada pemanasan global (sumber: Titik Adianingsih, www.google.com, 2008).

Dari sini sudah jelas terlihat bahwa sumber dari bencana pemanasan global tidak datang dari negara-negara miskin di belahan Dunia Ketiga, tetapi bermula dan berkembang dari negara-negara kaya di belahan Dunia Pertama, yang menganut dan mengembangkan secara gegap gempita ideologi neo-liberalisme.

Dalam suatu artikel pendek yang menarik di bawah tajuk, “Neoliberalisme dan Utang Luar Negeri Penyebab Pemanasan Global”, yang diposting pada 12 Nopember 2007 oleh Timpakul (www.sarekathijauindonesia.org), diuraikan secara menarik kenyataan tersebut. Pangkal dari masalah ini menurut artikel tersebut adalah hasrat melakukan penghisapan sumber-sumber ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lintas negara (TNCs). Korporasi global memanfaatkan dukungan politik elit di negara-negara kaya dan lembaga-lembaga kreditor internasional menjadikan utang luar negeri sebagai instrumen utama untuk mengakumulasi kekayaan dan menghisap sumber-sumber penghidupan rakyat. Kini kekuasaan TNCs telah menaklukkan kekuatan ekonomi negara yang sesungguhnya diperuntukkan bagi menegakkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

Tentu saja kekuasaan TNCs yang besar seperti itu dimungkinkan terjadi karena ada perselingkuhan dengan elite nasional, kaum ‘komprador’. Pengakuan John Perkins dalam bukunya yang terkenal, “*Confessions of An Economic Hit Man*”, membuka mata semua orang tentang adanya perselingkuhan jahat tersebut. Perselingkuhan ini berakibat fatal bagi rakyat banyak. Dapat ditemukan paling sedikit dua akibat langsung yang dialami masyarakat. *Pertama*, di dalam pabrik-pabrik besar pemeras keringat, para buruh dengan upah yang tidak layak dipaksa bekerja ekstra keras. Perkins dalam buku lainnya, “Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional” (Terjemahan Wawan Eko Yulianto & Meda Satrio, 2009) menulis:

“Barangkali tak ada kaitan antara kemiskinan, pelanggaran korporat, dan konsumen AS yang lebih jelas ketimbang di pabrik-pabrik pemeras keringat di Indonesia (seperti juga yang terdapat di banyak negara lain). Beberapa korporasi besar berkaliber internasional, didukung kebijakan Bank Dunia yang mendorong privatisasi dan keringanan pajak untuk perusahaan-perusahaan asing, mempekerjakan sendiri atau melimpahkan proyek ke pabrik-pabrik yang mengupah buruh terlalu rendah. Dan seandainya mereka protes, mereka akan dihajar atau dibunuh. Para buruh itu hidup penuh penderitaan agar barang bisa dijual dengan harga rendah di toko-toko Negara Maju”.

Kedua, kegiatan industri, terutama di sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa dan transnasional menjadi salah satu penyebab pemanasan global dan penghancuran lahan-lahan produktif masyarakat. Belum lagi akibat langsung yang ditimbulkan karena perubahan iklim yang drastis seperti kekeringan yang berkepanjangan, banjir yang terjadi hampir setiap tahun, longsor, badai. Semuanya menyengsarakan rakyat yang terus menerus mengalami proses pemiskinan. Dalam bidang pertanian, misalnya, dapat ditemukan bagaimana petani harus berhadapan dengan jaringan pabrik pupuk yang merambah sampai ke desa-desa. Padahal penggunaan pupuk kimia yang berlebihan berakibat fatal bagi kondisi tanah pertanian. Belum lagi tercemarnya air tanah karena penggunaan pestisida yang gila-gilaan.

Masalah Pertanian

Indonesia sejak lama dikenal sebagai Negara agraris dengan mayoritas masyarakat atau penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Potensi kekayaan alam Indonesia dalam hal pertanian sudah tidak diragukan lagi. Tanah yang luas lagi subur dan kekayaan sumber daya alam Indonesia sangat mendukung untuk tumbuhnya berbagai macam hasil pertanian.

Namun demikian, realitas nasib masyarakat petani dan pertanian di Indonesia menunjukkan hal yang berbeda dengan potensi sumber daya alam tersebut. Pertanian dan masyarakat tani Indonesia berada pada titik nadir. Pertanian rakyat, seperti tanaman pangan misalnya, telah lama mengalami *leveling-off*. Pertanian dan masyarakat tani mengalami proses pemiskinan sistemik dan masif. Berapa pun *in-put* diberikan, produksi padi petani tidak bertambah. Begitu pula kenaikan harga dasar gabah dan beras tak mampu mengangkat petani dari keterpurukan. Petani-petani dengan berbagai produk pertanian lainnya mengalami hal serupa.

Proses pemiskinan itu datang dari banyak sisi. Kebijakan pertanian misalnya, sering tidak berangkat dari kondisi objektif masyarakat tani dan pertanian nasional. Nasib petani semakin dipertanyakan dalam *gonjang-ganjing* politik ekonomi perberasan saat ini. Beriring dengan itu petani dihadang masalah tata-niaga, pemasaran, termasuk distribusi, dan sebagainya. Sebagian besar petani tampak lebih sebagai sapi perah korporasi besar saprotan, baik pupuk, pestisida, benih, hingga perniagaan produk-produk pertanian.

Selain itu, dikejanya peningkatan pendapatan domestik (GDP) membawa konsekuensi bagi diperbesarnya kuantitas produksi diikuti dengan volume eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang semakin besar. Fachruddin M Mangunjaya di dalam bukunya, “Hidup Harmonis dengan Alam” (2006) menyebut bahwa dampak dari eksploitasi SDA akan berpengaruh terhadap kesehatan ekosistem. Akibatnya tentu sangat terasa bagi mutu produk negara berkembang. Fachruddin menyebut:

“.....Akibatnya, keunggulan komparatif produk negara berkembang menjadi sangat lemah. Sebab perdagangan bebas hanya terseleksi dengan keunggulan mutu. Maka negara yang mempercayai SDA yang kaya dan mempunyai SDA berlimpah, berupaya mengejar pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang eksploitasi SDA habis-habisan tanpa memikirkan kerusakan dan polusi yang terjadi di negaranya”. (Fachruddin M Mangunjaya, 2006, p 125).

Akibatnya, bagi kerusakan lingkungan dan lahan pertanian sangat jelas. Longsor yang terjadi di mana-mana, musim yang tidak menentu, banjir yang tidak habis-habisnya, semuanya menyengsarakan kehidupan petani kita.

Sementara itu, kepemilikan dan pengusahaan lahan pertanian terus mengecil. Keadaan itu diperparah oleh kondisi kesuburan lahan yang kian memburuk akibat penggunaan pupuk kimia (sintetis) dan pestisida atau sejenisnya yang sangat berlebihan dan hampir-hampir tanpa kendali yang berarti. Dalam kondisi seperti itu, kurang ditemukan upaya yang berarti dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan petani di dalam bidang pertanian, paling sedikit di dalam budidaya pertanian. Kemampuan pembudidayaan terus tertinggal dibanding petani di berbagai negara manca. Perbankan dan *stakeholders* lainnya tampak enggan memberikan dukungan kepada petani dan sektor pertanian.

Di samping masalah kualitas tanah tersebut, ditemukan juga paling sedikit tujuh faktor dan keterbatasan yang menyebabkan kesejahteraan petani relatif lemah dan semakin menurun. *Pertama*, sebagian petani miskin karena memang tidak memiliki faktor produktif apa pun kecuali tenaga kerjanya (*they are poor because they are poor*). *Kedua*, luas lahan petani sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi. *Ketiga*, terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan. *Keempat*, tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik. *Kelima*, infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai. *Keenam*, struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-tawar (*bargaining position*) yang sangat lemah. *Ketujuh*, ketidakmampuan, kelemahan, atau ketidaktahuan petani sendiri (Bayu Krisnamurthi, 2003, www.ekonomirakyat.org).

Masalah tanah pertanian yang rusak ditambah ketujuh permasalahan di atas perlu diselesaikan secara mendasar dan komprehensif, sebab tanpa itu petani akan terancam dan kedaulatan pangan akan sulit dicapai. Peluang ke arah penyelesaian permasalahan itu terbuka lebar, asal ada usaha sungguh-sungguh yang dilakukan semua pihak. Terdapat dua peluang besar untuk dimasuki dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani dan pertanian di Indonesia. *Pertama*, kebijakan *Indonesia go Organic* yang dicanangkan Departemen Pertanian beberapa waktu lalu dapat menjadi salah satu *entry point* penguatan masyarakat tani dan pertanian nasional. Banyak alasan yang mendasari pilihan ini. Di antaranya, gerakan pertanian organik yang terus menguat sebagai buah kesadaran akan dampak buruk pertanian agro-kimia (sintetik). Gerakan itu telah dimulai sejak awal tahun 80-an, terutama dimotori oleh LSM. Pasar produk-produk pertanian organik dalam negeri yang terus tumbuh juga menjadi alasan penting. Berbagai pemberitaan memperlihatkan bahwa pertumbuhan itu tidak karena gaya hidup, melainkan kesadaran akan konsumsi yang halal dan sehat (*halalan thoyyiban*). Titik-masuk ini sangat berpeluang untuk membangun kembali pertanian berkelanjutan.

Kedua, pengembangan pertanian terintegrasi (*integrated farming*) sangat dimungkinkan, terutama integrasi antara pertanian, peternakan, dan perikanan tambak. Empat manfaat sekaligus dapat diperoleh petani dengan model seperti ini, yaitu secara perlahan kualitas tanah pertanian dapat diperbaiki; tersedianya bahan dasar utama untuk pembuatan pupuk organik, dengan sedikit sentuhan teknologi sederhana; tersedianya bahan

dasar untuk membuat pakan ternak, dengan sedikit sentuhan teknologi sederhana; dan diperolehnya penghasilan tambahan untuk mengatasi masalah sempitnya lahan, sebab ternak bagi petani adalah tabungan.

Kedua peluang ini jika ditopang oleh jaringan kerjasama yang sinergis antara petani dan berbagai institusi kemasyarakatan yang peduli, akan sangat besar manfaatnya bagi pemberdayaan masyarakat petani dan pertanian di Indonesia. Hanya saja, sebagaimana yang secara garis besar digambarkan di atas, masalah lingkungan hidup dan pertanian bukanlah sekadar masalah individual dan kultural semata. Dalam banyak hal permasalahan petani dan pertanian serta lingkungan kita sesungguhnya berakar pada masalah struktural. Oleh karena itu, kendatipun kali ini kita membatasi diri hanya membicarakan ekoteologi tani dan bahari, akan tetapi jangan pula dilupakan pentingnya membicarakan “teologi kekuasaan” bahkan “fiqih kekuasaan” yang bernuansa struktural.

Ekoteologi Pertanian

Gay Gardner dalam *“Invoking the Spirit: Religion and Spirituality in the Quest for A Sustainable”* (dalam Husein Herianto, 2007, p 89) mendesak para pemerhati dan aktivis lingkungan untuk menjalin kerjasama dengan kaum agamawan, yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Gardner memandang bahwa keterlibatan agama merupakan suatu keniscayaan karena agama memiliki, setidaknya, lima aset yang sangat berguna dalam memelihara bumi dan membangun dunia yang adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis. Lima modal penting agama tersebut adalah: 1) kapasitas membentuk kosmologi (pandangan dunia) yang sejalan dengan visi ekologis; 2) otoritas moral; 3) basis pengikut yang besar; 4) sumberdaya materi yang signifikan; dan 5) kapasitas membangun komunitas.

Sejalan dengan Gardner, Thomas Berry dan para ilmuwan lainnya berpendapat bahwa nilai-nilai agama masih memiliki peran yang kuat dalam membangun etika manusia, terutama dalam hubungannya terhadap alam di Abad XXI. Agama dipandang tidak hanya berhubungan dengan teologi saja, tetapi juga telah berorientasi pada praktek-praktek berkesinambungan dan komitmen jangka panjang terhadap lingkungan (dalam Dian Maya Safitri, niamchomsky.wordpress.com, 2011). Dua pandangan ini mewakili kesadaran baru tentang pentingnya peranan agama dalam penyelesaian masalah manusia dan kemanusiaan. Agama seakan-akan ‘diundangi’

kembali,—setelah sekian lama dipisahkan dari masalah-masalah dunia— ketika manusia menghadapi masalah-masalah besar yang sulit dipecahkan, termasuk masalah ekologi, pertanian, ekonomi, dan sebagainya.

Kesadaran itulah yang mendorong Lembaga Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat pada tahun 2008 menerbitkan buku dengan judul: “Teologi Lingkungan; Teologi Pengolahan Lingkungan dalam Perspektif Islam”. Buku tipis itu cukup menjelaskan berbagai hal di seputar teologi lingkungan, seperti teologi hubungan manusia dengan alam dan asas konservasi sumberdaya alam.

Tentang teologi hubungan manusia dengan alam, buku tersebut menjelaskan secara singkat bagaimana hubungan manusia dengan alam. Alam semesta berikut segala isinya diciptakan Allah dalam kesetimbangan, proporsional, dan terukur atau mempunyai ukuran-ukuran, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (QS ar-Ra’d: 8; al-Qamar: 49; al-Hijr: 19). Manusia merupakan bagian dari alam, sebagai penghuni planet bumi. Oleh karena itu manusia dan alam berada dalam posisi yang saling berhubungan. Sebagai khalifah Allah di muka bumi (QR al-An’am: 165), manusia berkewajiban memakmurkan bumi sebagai bagian dari alam. Posisi sebagai khalifah tidak lantas membawa manusia boleh berbuat semaunya terhadap bumi, bahkan alam. Tetapi posisi sebagai khalifah membawa konsekuensi, yaitu bahwa manusia bertanggungjawab penuh untuk memelihara lingkungan di mana dia hidup.

Sebelum itu, pada 2003, keluar fatwa para ulama NU tentang masalah hubungan manusia dengan lingkungan. Fatwa tersebut adalah sebagai berikut.

“Memelihara lingkungan hidup itu kewajiban syara’—Kalimat wa sta’marakum fi haa dalam surat Hud ayat 61: ‘Huwa ansya’kum minal ardh wa sta’marukum fi haa’ adalah perintah Allah untuk memelihara lingkungan. Juga surat al-Baqarah ayat 30: Sesungguhnya hendak aku jadikan khalifah di muka bumi. Khalifah’ adalah wakil Allah yang menerima mandat untuk memakmurkan dan melestarikan lingkungan. Perusakan lingkungan adalah hirabah—karena itu, tingkat kejahatan perusakan lingkungan tergolong berat karena menimbulkan bencana alam yang mengorbankan jiwa dan harta. Tingkat kejahatan itu dikategorikan dalam hukum Islam sebagai hirabah seperti yang dimaksud surat al-Maidah ayat 33: Orang yang merusak lingkungan berarti telah melanggar dan memerangi perintah Allah SWT dan

RasulNya dan telah berbuat kerusakan di muka bumi yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum (lingkungan) yang menjadikan kebutuhan dasar hidup semua makhluk di muka bumi". (Arie Budiman & Ahmad Jauhar Arief, 2007, p 244).

Fatwa dari ulama NU sejalan dengan apa yang kemudian dirumuskan oleh Lembaga Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahkan fatwa itu mencantumkan juga ancaman Allah dalam surat al-Maidah ayat 33 kepada perusak lingkungan.

Secara menarik Dedy Umamur Rais dalam artikelnya yang berjudul, "Lingkungan dalam Perspektif Islam" (2008) menyimpulkan lima hal di seputar fiqh lingkungan sebagai berikut:

Pertama, *rekonstruksi makna khalifah. Dalam al-Qur`an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah (QS. al-Baqarah: 30). Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia (QS. Luqman: 20), tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya (QS. al-A`raf: 56).*

Kedua, *ekologi sebagai doktrin ajaran. Artinya, menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang (furu), tetapi termasuk doktrin utama (ushul) ajaran Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam Riayah al-Biah fiy Syariah al-Islam (2001), bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (maqashid al-syariah).*

Ketiga, *tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi, juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang.*

Keempat, *perusak lingkungan adalah kafir ekologis (kufr al-bi`ah). Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagad raya (alam semesta) ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah (QS. Shaad: 27)".*

Sampai di sini kita telah menyinggung ekoteologi secara umum. Pertanyaannya sekarang, bagaimana ekoteologi pertanian itu. Walaupun sebagian besar rumusan tentang ekoteologi berhubungan erat dengan sektor pertanian, akan tetapi permasalahan dalam dunia pertanian tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan. Sebab masalah pertanian menyangkut banyak sekali faktor, mulai dari kepemilikan lahan yang kian sempit, tanah yang semakin mengalami penurunan kualitas, penggunaan pupuk kimia (sintetis) dan pestisida yang sulit sekali dilupakan petani, sampai dengan pemasaran produk pertanian yang terombang-ambing oleh mekanisme perdagangan yang cenderung lebih menguntungkan pemodal besar. Tetapi tentu saja pembicaraan saat ini harus dibatasi pada ekoteologi pertanian.

Tentang pertanian sendiri, di dalam al-Qur'an banyak sekali penjelasan yang menyangkut bidang ini. Misalnya dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 99:

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.

Surat al-An'am ayat 141:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Surat al-Baqarah ayat 25:

“Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam

surga-surga itu, mereka mengatakan: “Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu.” Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya”.

Surat al-Baqarah ayat 265:

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat”.

Surat Yaassin ayat 34-36:

“Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Surat Ibrahim ayat 37 yang memuat doa Nabi Ibrahim yang sangat kita kenal:

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur”.

Surat an-Nahal 68-69:

“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: ‘Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.’, kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.”

Surat an-Nahl ayat 10-11:

“Dia-lah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”.

Surat-surat yang terjemahannya dikutip di atas itu mengandung pengertian tentang bagaimana Allah mementingkan pertanian. Karena pentingnya pertanian itu, tidak jarang Allah memberi perumpamaan atas satu perkara dengan bidang pertanian. Misalnya orang yang memiliki aqidah yang kokoh diupamakan sebagai tanaman yang menghujamkan akarnya dengan kuat ke dasar bumi, dan memancarkan tunasnya yang menjulang tinggi. Perumpamaan bagi orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai).

Bahkan ayat ketiga dari surat al-Maa’uun yang sangat kita kenal itu sedikit banyak berhubungan dengan bidang pertanian. Allah menentukan salah satu dari dua kriteria orang yang mendustakan agama adalah, “tidak menganjurkan memberi makan orang miskin”. Persoalannya di sini berhubungan dengan ketersediaan pangan, yang tentu saja dihasilkan oleh pertanian, peternakan, dan perikanan.

Karena pentingnya pertanian bagi kehidupan manusia, maka Allah jelas melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Salah satu bentuk kerusakan itu adalah kerusakan ekologi. Tentu saja termasuk di dalam membuat kerusakan itu adalah menggunakan pupuk kimia (sintetis) dan pestisida secara sangat berlebihan, yang tidak saja berbahaya bagi kesehatan tanah, akan tetapi berbahaya juga bagi kesehatan manusia. Allah menegaskan di dalam surat al-Maa’idah ayat 32 yang terjemahannya kurang lebih:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka

bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi”.

Ayat ini menjelaskan bahwa di mata Allah orang yang membunuh bukan karena yang dibunuh tersebut melakukan pembunuhan posisinya sama dengan orang yang membuat kerusakan di muka bumi.

Dengan demikian jelas sekali bahwa model pertanian setelah diberlakukannya Revolusi Hijau, dimana pupuk kimia (sintetis) dan pestisida digunakan tanpa kendali sama saja dengan membunuh semua orang. Karena akibat jangka panjang bagi kesehatan manusia, bahkan bagi petani itu sendiri, sangat mengerikan. WHO mencatat, terdapat 772 ribu kasus penyakit baru akibat penggunaan pestisida kimiawi. Belum lagi hama yang mampu melahirkan generasi hama baru yang lebih kebal terhadap pestisida.. Yang lebih parah, intensifikasi pertanian berdasarkan data FAO telah menyumbang lebih dari 20% emisi rumah kaca global. Kegiatan pertanian dengan model seperti itu mengancam 70% spesies burung dan 40% spesies tanaman (Umar Said, 2010).

Oleh karena itu, di berbagai negara, orang sudah mulai masuk pada model pertanian yang sekarang dianggap paling modern, yaitu kembali kepada model pertanian nenek moyang. Integrasi antara pertanian, peternakan, dan perikanan (terutama perikanan tambak) yang menjadi andalan nenek moyang kita kembali dibangkitkan. Tentu saja setelah mengalami pemodernisasian agar dapat diproduksi secara besar-besaran. Contoh yang menarik adalah yang dikembangkan di Haifa, Israel. Tanah-tanah yang tandus dapat dirubah menjadi kebun buah-buahan yang sayuran yang subur. Andalannya adalah *integrated farming*, menyatukan peternakan dan pertanian. Limbah pertanian diolah sebagai pakan ternak, dan limbah peternakan diolah menjadi pupuk. Jangan heran kalau Israel yang tanahnya jauh lebih buruk dari daerah tertentu di Gunung Kidul, bahkan tanah tersuburnya lebih buruk dari tanah gersang di sebagian Gunung Kidul, mampu menjadikan pertanian dan peternakan sebagai salah satu andalan pendapatan nasionalnya.

Di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 205 Allah berfirman: *“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”* Selain itu, di dalam surat an-Nah; ayat 5, Allah juga menegaskan tentang berbagai manfaat binatang ternak bagi manusia: *“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan.”*

Dari sini jelas terlihat, bahwa merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak adalah perbuatan yang tidak disukai Allah, dan bahwa binatang ternak itu manfaatnya banyak sekali, tidak sekadar untuk dimakan dagingnya. Salah satu manfaatnya yang besar bagi para petani adalah kotorannya, baik yang padat maupun yang cair.

Muhammadiyah melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) enam tahun terakhir ini gencar mengkampanyekan sekaligus mendampingi petani untuk beralih ke model pertanian yang dikembangkan nenek moyang tapi sekarang sudah mulai dianggap moderen ini. Basis pemberdayaannya adalah jamaah/kelompok tani, dengan mengandalkan *integrated farming*. Tentu saja, karena sebagian besar petani yang didampingi adalah petani yang memiliki lahan sempit, maka bentuk jamaah/kelompok menjadi sangat penting. Kepada para petani sembari bergurau dikatakan, saatnya jamaah/kelompok tani membangun 'pabrik pupuk' sendiri, tidak perlu tergantung dengan pupuk kimia (sintetis). Yang disebut 'pabrik pupuk' itu sebenarnya sederhana saja: kambing atau sapi milik kelompok dikandangkan sehingga kotorannya, baik padat maupun cair dapat diolah menjadi pupuk. Teknologinya tentu sederhana, disesuaikan dengan kondisi petani kita pada umumnya. Pakan ternak dan ikan tambak atau kolam pun demikian.

Tentu tidak mudah merubah pola tanam petani yang sudah sedemikian lama tertanam dalam memori mereka. Semuanya harus berjalan dengan pendampingan yang kontinyu. Sangat dituntut kesabaran para fasilitator yang mendampingi para petania, peternak, dan nelayan tambak.

Tapi persoalan tidak berhenti sampai budidaya pertanian saja. Sebagaimana dikatakan di bagian lain makalah ini, persoalan yang dihadapi para petani itu luar biasa kompleksnya. MPM membatasi diri untuk

sementara masuk pada empat ranah aktivitas untuk sekedar membantu para petani memecahkan masalah mereka, yaitu, *pertama*, budidaya pertanian dengan memperkenalkan model *integrated farming*, yang biasanya oleh MPM disebut 'pertanian ramah lingkungan'; *kedua*, pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan; *ketiga*, pemasaran hasil pertanian maupun produk olahan; dan yang *keempat*, yang tidak kalah pentingnya, adalah advokasi kebijakan publik yang merugikan petani, peternak, dan nelayan tambak.

Sayang, usaha besar ini belum merata di seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM). Hanya sekitar separuh dari PWM yang telah memberi perhatian serius bagi masalah pertanian yang ramah lingkungan ini. Padahal salah satu kosekuensi dari perbincangan tentang ekotologi pertanian ini adalah usaha sungguh-sungguh ntuk mengembangkan model pertanian yang ramah lingkungan.

Problem Dunia: Pergeseran Peta Global ke Cina

Sudah jelas al-Qur'an menegaskan kepada kita bahwa segala apa yang ada di muka bumi ini diperuntukkan bagi memakmurkan manusia. Akan tetapi manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan, termasuk memelihara segala isi alam ini termasuk tanaman dan binatang.

Bagi Indonesia, dunia pertanian, peternakan, dan perikanan, masih mengandalkan penggunaan pupuk dan pakan kimia (sintetis) termasuk pestisida dan sejenisnya. Hal ini lambat laun akan mengganggu kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan itu sendiri. Sekarang saja sudah bisa kita lihat di mana-mana terjadi gagal panen. Ada petani yang sampai membakar tanamannya, karena sudah tidak produktif lagi. Padahal modal untuk membeli pupuk kimia (buatan) dan pestisida sudah sangat besar. Bahkan dapat ditemukan di berbagai tempat, petani terpaksa menjual rumahnya untuk menutup kerugian akibat gagal panen.

Keadaan ini kalau dibiarkan terus akan membawa masalah pangan yang serius bagi kita. Sekarang saja kita sudah mengimpor segala macam bahan konsumsi. Beras, sapi, daging, kacang kedele, buah-buahan. bahkan garam, sudah kita impor.

Dalam kondisi pertanian, peternakan, dan perikanan kita yang masih morat-marit seperti ini pemerintah Indonesia bersama pemerintah negara-

negara ASEAN lainnya telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan Cina (CAPTA), dan mulai berlaku efektif beberapa tahun yang akan datang.

Sebelum perjanjian ini diberlakukan secara penuh saja kita sudah melihat mengalirnya buah-buahan dari Cina ke Indonesia, yang menggusur produk buah-buahan lokal. Khusus untuk produk pertanian dari Cina, penguasaan pangsa pasar terjadi begitu luar biasa. Kementerian Pertanian mencatat defisit perdagangan buah-buahan kita mencapai 600 juta dollar AS, sepanjang tahun 2010.

Menteri Pertanian RI menjelaskan, perdagangan produk pertanian Indonesia-Cina mengalami defisit parah, utamanya sejak 2010. Menurut data dari Kementerian Pertanian RI, pada 2005 impor buah-buahan Indonesia sekitar 413.410,6 ton, senilai US \$. 234,07 juta. Sedangkan pada 2010 menyentuh angka 601.965,0 ton senilai US \$. 591,68 juta (Mbahwo.com).

Produk sayur kita juga mulai tergusur oleh produk Cina, sedangkan beras mulai terdominasi oleh beras Vietnam. Bahkan baru-baru ini ditemukan adanya impor ikan air tawar dari Cina. Tragis.

Dalam kondisi seperti pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan melindungi para pelaku usaha di Indonesia. Mengingat, UKM dan pasar tradisional merupakan dua kelompok yang kini terancam dengan membanjirnya produk China ke Indonesia.

Hari sudah tinggi untuk menunda ini semua. Jika pemerintah tidak menyiapkan ini secara baik, maka sudah bias kita bayangkan kehidupan petani, peternak, nelayan, dan UKM kita di masa depan. Wallahualam.

Sumber: makalah Seminar Nasional Transformasi Teologi dan Reaktualisasi Etos Kerja Islam Sebagai Respons terhadap Pergeseran Peta Geoekonomi, Geopolitik, dan Geobudaya Global ke Cina, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Kampus UMY, 7 Agustus 2011. Judul Asli: Ekoteologi Pertanian; Suatu Pemikiran Awal.

Rahmawati Husein, Ph.D.



Memahami Bencana di Indonesia dan Paradigma Penanggulangan Bencana

Rahmawati Husein, MCP., Ph.D.
Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan
Bencana PP Muhammadiyah (MDMC)
2010-2020. Anggota Regional Steering
Group North and South East Asia World
Humanitarian Summit, United Nations
2013-2016. Anggota Dewan Pengarah BNPB
2016-2021. Anggota Advisory Group of the
Central Emergency Response Fund (CERF)
sejak 2018. Penghargaan Tokoh Inspiratif
'Tangguh Award' Tahun 2015 BNPB.

Pendahuluan: Bencana dan Potensi Bencana di Indonesia

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana sering dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu (1) bencana alam yaitu bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (2) bencana nonalam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, serta (3) bencana sosial yaitu yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. (UU No. 24 tahun 2007)

Indonesia sebagai negara kepulauan berada pada posisi secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis menyebabkan Indonesia sangat rawan terhadap berbagai bencana alam, sehingga sering disebut sebagai “supermarket” bencana. Posisi geografis Indonesia masuk dalam pertemuan tiga lempengan bumi, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia menyebabkan posisi negara labil, mudah bergeser, dan tentu saja rawan bencana gempa bumi, tsunami dan longsor. Secara geografis, Indonesia juga terletak di daerah sabuk api atau yang dikenal dengan “*ring of fire*” dimana 187 gunung api berderet dari barat ke timur. Disamping itu, posisi geografis Indonesia berada pada daerah yang ditandai dengan gejolak cuaca dan fluktuasi iklim dinamis yang menyebabkan Indonesia rawan bencana alam kebumihan seperti badai, topan, siklon tropis, banjir.

Di samping faktor alam yang dapat menyebabkan bencana, kompleksitas kondisi masyarakat Indonesia dari segi demografis seperti kepadatan penduduk dan segi ekonomi seperti kemiskinan yang masih tinggi telah menambah tingginya kerentanan terhadap peristiwa bencana alam. Saat ini Indonesia menempati rangking pertama dari 265 negara di dunia terhadap risiko tsunami dan rangking pertama dari 162 untuk tanah longsor, serta rangking ke-3 dari 153 negara terhadap risiko gempa bumi, dan ranking ke-6 dari 162 untuk risiko bencana banjir. (vivanews, 2011).

Sepanjang kurun waktu 1980-2009 Indonesia mengalami 312 kasus bencana alam. Kerugian akibat berbagai bencana tersebut tidak sedikit, baik itu kerugian jiwa, harta benda dan rusaknya infrastruktur serta terhentinya produksi ekonomi dan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan data Bappenas kerugian akibat bencana alam di Indonesia sejak tsunami Aceh, Desember 2004 hingga gempa Sumatera Barat, September 2009 mencapai Rp. 150 triliun. Sementara korban meninggal di Aceh saja mencapai 227, 898 orang dan lebih 6,000 orang di Yogya dan lebih seribu orang di Padang. Jumlah tersebut belum termasuk korban cacat, sakit akibat gempa, tsunami dan gunung meletus serta ratusan ribu pengungsi seperti saat Gunung Merapi meletus tahun 2010 (BNPB, 2010, vivanews, 2011).

Di samping memiliki potensi, kerentanan dan kerugian yang besar dari bencana alam, Indonegian juga rentan terhadap bencana non-alam dan bencana sosial. Bencana akibat lumpur Lapindo dan banjir badang akibat jebolnya dam di Jakarta dan Way Ela merupakan bentuk bencana non-alam akibat kegagalan teknologi serta interaksi antara manusia dengan

lingkungannya. Sementara potensi bencana nonalam lainnya seperti epidemi dan wabah penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan flu burung juga terus meningkat. Sedangkan potensi bencana sosial di Indonesia juga sangat tinggi karena dipengaruhi berbagai macam suku bangsa, ras, agama dan golongan serta meningkatnya konflik akibat perebutan sumber daya alam dan perubahan politik dan kepemimpinan di tingkat lokal.

Memahami Bencana dan Pengelolaannya: Tanggap Darurat ke Pengurangan Resiko Bencana

Selama ini masih banyak masyarakat yang melihat bencana alam sebagai sesuatu yang datang di luar kemampuan manusia atau suatu peristiwa yang begitu saja terjadi tanpa pemberitahuan sehingga kecenderungannya adalah menunggu kejadian tersebut dialami atau menimpa diri mereka. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan konvensional yang menganggap bencana merupakan sifat alam dan terjadinya bencana adalah karena kecelakaan. Bencana alam juga tidak dapat diprediksi, tidak menentu, dan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak terelakkan atau terhindarkan serta tidak terkendali (Triutomo, 2007). Di samping itu adanya keyakinan bahwa bencana adalah “kehendak Tuhan” (*the Acts of God*) di mana kejadian bencana alam itu di luar kemampuan manusia ataupun kehendak Tuhan (Lindell at al., 2006), sebagai bentuk peringatan, cobaan bahkan kutukan, sehingga manusia tidak berhak dan tidak dapat mempersiapkan diri menghadapi bencana.

Berdasarkan pada pandangan ini, masyarakat terdampak dipandang sebagai “korban” dan penerima bantuan dari pihak luar atau harus segera mendapat pertolongan, sehingga fokus dari penanggulangan bencana lebih pada bantuan (relief) dan kedaruratan (emergency). Oleh karena itu pada umumnya tindakan yang dilakukan adalah upaya reaktif yang sifatnya kedaruratan, yang menekankan pada penanganan dan pemberian bantuan bukan penanggulangan. Bentuk penanganan biasanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan darurat seperti pangan, penampungan darurat, kesehatan dan mengatasi krisis yang dialami oleh masyarakat. Sementara tujuan dari penanganan bencananya adalah untuk menekan tingkat kerugian, kerusakan dan cepat memulihkan keadaan (Bakornas BP, 2007; Pujiono, 2007).

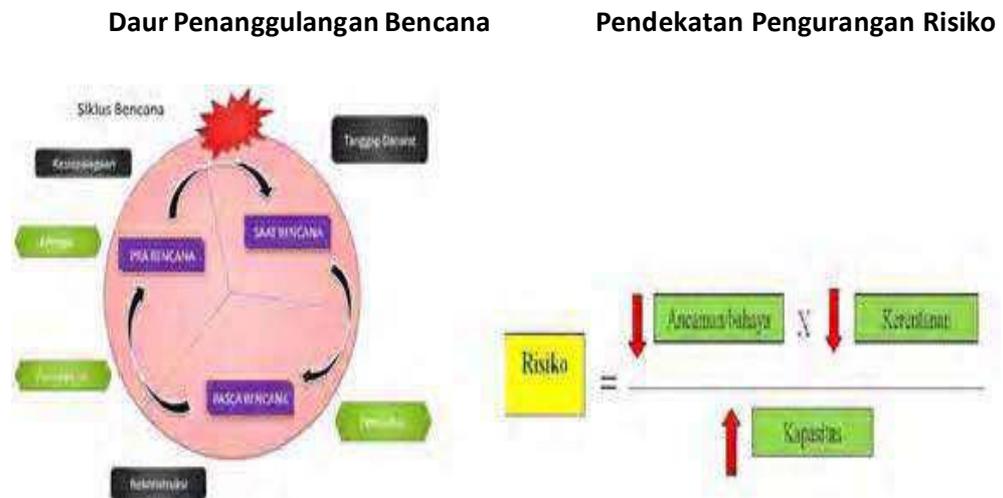
Di dunia termasuk di Indonesia hampir mayoritas sumber daya manusia, dana, maupun program-program penanggulangan bencana diarahkan pada saat tanggap darurat. Di organisasi Muhammadiyah sendiri 80 persen kegiatan penanggulangan bencana maupun sumber daya dan sumber dana masih diperuntukkan untuk kegiatan kedaruratan seperti pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di seluruh Indonesia, serta pendampingan sosial, bantuan medis dan pemulihan kehidupan dan penghidupan.

Dari pandangan konvensional paradigma penanggulangan bencana berkembang ke pandangan yang lebih progresif yang melihat bahwa bencana sebagai bagian dari pembangunan dan bencana adalah masalah yang tidak berhenti. Oleh karena itu penanggulangan bencana tidak dapat dilepaskan dari masalah pembangunan sehingga upaya yang dilakukan adalah mengintegrasikan program pembangunan dengan penanggulangan bencana. Pandangan yang lebih progresif yang berkembang juga dipengaruhi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Berkembangnya pengetahuan mendorong timbulnya pandangan bahwa bencana adalah merupakan proses geofisik, geologi dan hidrometeorologi yang dapat mempengaruhi lingkungan fisik dan membahayakan kehidupan manusia.

Berdasarkan pandangan ini paradigma yang berkembang adalah mitigasi dimana fokus penanggulangan bencana diarahkan pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan meningkatkan kekuatan fisik struktur bangunan untuk memperkecil kerusakan yang terjadi akibat adanya kejadian alam. Paradigma ini memandang bahwa upaya penanggulangan bencana lebih diarahkan kepada identifikasi daerah rawan bencana, mengenali pola yang menimbulkan kerawanan serta melakukan kegiatan mitigasi yang bersifat struktural seperti membangun konstruksi (rumah, bangunan, dam, tanggul, dan lain-lain) maupun non struktural seperti penataan ruang termasuk tata guna lahan, standar bangunan, dan lain-lain (Bakornas PB, 2007; Godschalk *et.al* 1999).

Sementara itu pandangan holistik melihat bahwa kejadian alam dapat menjadi ancaman bencana jika bertemu dengan kerentanan serta ketidakmampuan masyarakat menghadapi risiko. Pandangan ini dikenal dengan paradigm pengurangan risiko. Pendekatan ini merupakan perpaduan dari sudut pandang teknis dan ilmiah dengan faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik dalam pengurangan bencana. Oleh karena itu, berdasarkan

pandangan ini upaya penanggulangan bencana ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana.



Cara pandang baru terhadap pengelolaan bencana ini juga kemudian dijadikan kesepakatan international melalui Kerangka Aksi Hygo 2005-2015 yang diadopsi oleh Konferensi Dunia untuk Pengurangan Bencana atau yang dikenal dengan *World Conference on Disaster Reduction (WCDR)*. WCDR ini ditandatangani oleh 168 negara dan badan-badan multilateral. Lima prioritas yang ditegaskan dalam kerangka tersebut meliputi:

1. Meletakkan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau resiko bencana serta menerapkan system peringatan dini
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab resiko bencana.
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yg dilakukan lebih efektif. (UNISDR, 2005).

Pada paradigma ini, masyarakat merupakan subyek, obyek sekaligus sasaran utama upaya pengurangan risiko bencana dengan mengadopsi dan memperhatikan kearifan local (*local wisdom*) dan pengetahuan tradisional (*tradisional knowledge*) yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Perubahan paradigma tersebut membawa perubahan dalam pengelolaan bencana yaitu:

1. Penanggulangan bencana tidak lagi fokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko
2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah
3. Penanggulangan bencana bukan lagi hanya urusan pemerintah tetapi juga menjadi urusan bersama masyarakat, lembaga usaha, dimana pemerintah menjadi penanggung jawab utamanya (Bakornas PB, 2007)

Dari Peduli ke Sensitivitas dan Ikhtiar

Perubahan pandangan dan paradigma tentang bencana dan pengelolannya mendorong adanya pendekatan baru melalui manajemen risiko. Pendekatan ini mengharuskan setiap individu dalam masyarakat untuk memahami situasi dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman serta kapasitas yang dimiliki untuk menekan risiko seminimal mungkin.



Untuk mengurangi resiko bencana, beberapa langkah peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan melalui:

1. Kesadaran masyarakat dalam memahami situasi lingkungan dan ancaman bahaya.
2. Pemahaman tentang kerentanan dan kemampuan untuk mengukur kapasitas yang dimiliki.
3. Kemampuan untuk menilai risiko yang dihadapi baik oleh individu, keluarga, dan masyarakat dilingkungannya.
4. Kemampuan untuk merencanakan dan melakukan tindakan untuk mengurangi risiko yang dimiliki baik melalui peningkatan kapasitas dan mengurangi kerentanan.
5. Kemampuan untuk memantau, mengevaluasi dan menjamin keberlangsungan upaya pengurangan risiko sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dicegah.

Pendekatan pengurangan risiko ini merupakan sebuah usaha atau ikhtiar untuk lebih sensitif dalam memahami lingkungan. Bencana tidak lagi hanya menjadi pengetahuan, peringatan dan bentuk kepedulian saat terjadinya saja, tetapi pengetahuan tentang ancaman bencana dan kemampuan menghadapi dan mengelola bencana menjadi kegiatan yang harus terus dilakukan.

Mengutip beberapa ayat, ikhtiar dapat dianalogikan sebagai upaya mengubah nasib (QS Ar-Ra'du [13]: 11). *“Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum, kecuali dari kaum itu sendiri.”* Serta usaha manusia untuk memahami lingkungan dan bersungguh-sungguh dalam setiap usahanya ke arah kebaikan. *“Berbuatlah (dan bergeraklah). Karena Allah, rasul, dan orang-orang beriman akan menjadi saksi atas perbuatan kita.”* (QS At-Taubah [9]: 105). *“Dan, Allah tidak akan menyia-nyiakan apa pun yang telah kita lakukan, kecuali selalu ada nilai di hadapan-Nya”.* (QS Ali Imran [3]: 191). *“Dan, mereka yang bersungguh-sungguh berbuat di jalan Allah, maka pasti Kami akan tunjukkan jalan-jalan (kebaikan)”* (QS Al-Ankabut [29]: 69).[Ad]

Sumber: Catatan diskusi disampaikan dalam *Workshop Fiqh Kebencanaan* oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, di UMY, 25 Juni 2014. Judul Asli: *Bencana di Indonesia dan Pergeseran Paradigma Penanggulangan Bencana: Catatan Ringkasan.*



Bagian Ketiga

Diantara Tokoh Muhammadiyah untuk Indonesia Berkemajuan

Kyai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, bukan sekadar untuk memperbanyak sekolah dan perguruan tinggi, bukan pula sekadar untuk memperbanyak rumah sakit, rumah yatim, balai pengobatan.

Tetapi Kyai mendirikan Muhammadiyah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam, sehingga sekurang-kurangnya manusia Indonesia dapat mewujudkan masyarakat utama, adil makmur berjalan menurut garis yang diridloi oleh Allah.

(Pak A.R. - K.H. AR Fachruddin
Ketua PP Muhammadiyah 1968-1990)





AHMAD BADAWI

Politik dan Agama untuk Kebahagiaan Dunia-Akhirat

K.H. Ahmad Badawi.

Lahir di Yogyakarta, 5 Februari 1902,
wafat di Yogyakarta, 25 April 1969.
Penasihat Pribadi Presiden Soekarno
dibidang agama (1963). Imam III
Angkatan Perang Sabil (APS) 1947-1949.
Wakil Ketua Masyumi di Yogyakarta, 1950.
Ketua Umum PP Muhammadiyah (1962-1968).

Putra Kauman Yogyakarta yang masih keturunan Panembahan Senopati ini pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (1968) sebagai Penasehat Presiden Bidang Agama Islam. Pada masa awal Kemerdekaan RI, beliau terlibat dalam pergerakan politik perjuangan bangsa. Beliau bergabung dalam Angkatan Perang Sabil (APS), beroperasi di daerah Sanden, Bantul, Tegalayang, Bleberan, Kulonprogo. Pada tahun 1947 beliau diangkat sebagai Imam III APS. Beliau pernah menjadi anggota Lasykar Rakyat Mataram dan bergabung dengan Batalyon Pati dan Resimen Wirata MPP Gedongan.

Politik dan agama menjadi dua hal yang tak bisa dilepaskan dari sosok KH Ahmad Badawi. Dalam sebuah pidato di Peneleh Surabaya (1958), KH Ahmad Badawi mengatakan, perkembangan dunia sekarang yang menjadi perhatian masyarakat adalah mengenai soal kebendaan/keduniaan/baik yang berupa politik, ekonomi, sosial maupun aliran-aliran yang tampaknya merupakan aliran keagamaan, sesuai dengan apa yang tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid: 20. Kesibukan para tokoh, pemimpin, guru-guru dan lain-lain dalam lapangan mereka masing-masing

banyak yang ditujukan untuk kehidupan di dunia semata-mata. Akibatnya, menimbulkan perebutan kedudukan, yang semula untuk memperjuangkan ideologi untuk kepentingan masyarakat. Tetapi setelah mendapatkan kedudukan, yang tampak dalam penglihatan kita justru mereka itulah yang bahagia, rakyat tetap menderita. Mereka lupa dan lengah dari tujuan semula. Kedudukan yang mestinya hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan, menjadi tujuan utama, sedang tujuan yang sesungguhnya dilupakan, sampai berani untuk korupsi, menipu, menerima suap dianggap hal yang biasa.

Para guru yang semestinya sebagai pendidik masyarakat, sudah terbalik hanya menjadi penjual ilmu. Pendidikan yang sesungguhnya sudah kosong sama sekali, sampai para penulis pun hampir semuanya sudah ditujukan untuk mencari honorarium atau sebagai perusahaan kalau karyanya diterbitkan. Para pelajar dan siswa, dalam memilih sekolah yang dipandang adalah yang paling mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan banyak hasilnya, bukan untuk dimanfaatkan kepada masyarakat, tetapi semata-mata hanya untuk mata pencaharian seorang sendiri. Madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren yang tidak mempunyai dasar PGP hampir tidak laku.

Ahmad Badawi mengawali karier politik bergabung dengan Partai Masyumi. Pada 1950, ia menjadi Wakil Ketua Majelis Syuro Masyumi di Yogyakarta. Tidak banyak peran penting bisa dimainkan karena partai ini keburu dibubarkan.

Selanjutnya, Kiai Badawi memfokuskan diri untuk bereaktivitas dakwah di persyarikatan Muhammadiyah, menjadi guru di madrasah milik Muhammadiyah. Sikap istiqamahnya di bidang tabligh membuatnya diberi amanah sebagai Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah (1933). Seiring waktu berjalan, amanah yang diberikan kepadanya terus bertambah. Kiprahnya di Muhammadiyah membuat Ahmad Badawi diberi amanah untuk duduk dalam kepemimpinan puncak Muhammadiyah hingga menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1962-1968. Pada periode 1969-1971, Kiyai Badawi menjadi penasehat PP Muhammadiyah.

Pada masa kepemimpinannya, Muhammadiyah agak tersendat antara lain karena tidak sedikit anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota Masyumi. Saat itu, Muhammadiyah menjadi bidikan Pemerintah Orde Lama. Hal ini dipengaruhi oleh gosokan-gosokan PKI yang membuat isu bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang anti-Pancasila, anti-Nasakom, dan pewaris DI/TII merupakan batu sandungan keinginan PKI. PKI selalu memusuhi Islam dan sering menohok dari belakang.

Menyikapi kondisi yang genting ini yang diprediksi akan membahayakan pergerakan Muhammadiyah, maka pimpinan Muhammadiyah berusaha keras mendekati Bung Karno. Alhamdulillah, usaha ini berhasil antara lain dengan diangkatnya Kiyai Badawi sebagai penasehat Bung Karno. Kedekatan beliau dan Muhammadiyah dengan Bung Karno ini merupakan penyeimbang kekuatan politik saat itu. Pada masa pemerintahan Bung Karno ada tiga partai besar yakni Partai Nasional Indonesia, Nahdhatul 'Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Beliau tidak hanya membela Muhammadiyah tetapi juga berjuang untuk umat dan organisasi Islam lainnya. Beliau berhasil meyakinkan Bung Karno untuk tidak membubarkan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam.

Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad di Jakarta, antara lain memutuskan masalah Kepribadian Muhammadiyah dan penepatan amal usaha Muhammadiyah. Menurut Kiai Badawi, apabila Muhammadiyah ini kita lancarkan menurut kepribadiannya, seperti juga dimasa yang sudah-sudah adalah merealisasikan prinsip-prinsip membangun dan memajukan dalam bidang spirituil dan materiil. Muhammadiyah dengan sungguh-sungguh berusaha terwujudnya kepercayaan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, tanpa memusyrikkan kepada sesuatu. Muhammadiyah berusaha terlaksananya kebangsaan yang satu, yang bulat dan kompak tanpa memandang rendah antara satu suku dengan suku lainnya. Menurut firman Allah, suku-suku dan bangsa-bangsa itu disisi Allah adalah sama dan sederajat, hanya takwa kepada Allah jualah yang menjadi ukuran. Itulah arti Muhammadiyah memperbanyak kawan dan tidak mencari lawan.

Muhammadiyah dengan ajaran Islam yang murni membina perikemanusiaan yang luhur, saling menghargai, tolong menolong, gotong royong, memikirkan si yatim, memperhatikan yang miskin dan lemah, menolong yang sengsara dan menderita demi kesejahteraan bangsa semuanya. Dengan ajaran Islam, Muhammadiyah membangun dan memajukan dalam bidang kesadaran beragama dan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan masyarakat, Muhammadiyah merindukan tumbuh dan berkembangnya jiwa persatuan dengan segala keikhlasan, antara sesama kaum Muslimin maupun seluruh komponen bangsa, tanpa memaksakan paham ideologi dan agama.

Menurut kepribadian Muhammadiyah, beribadat kepada Allah tidaklah terbatas kepada shalat di masjid, tidak terbatas kepada hubungan individu kepada Allah, tetapi berbuat *islah*, berbuat maju dan membangun masyarakat adalah pula beribadat kepada Allah, dan karena itu Muhammadiyah merasa wajib untuk melaksanakan tanpa ada pamrih dan ambisi-ambisi rendah.

Pancasila adalah Dasar Negara, Islam yang menjadi dasar menuntun dan memerintahkan beramal dan berusaha dengan amalan-amalan dan usaha-usaha yang sifatnya dapat mengisi kepada Pancasila serta mempertegas garis-garis besar haluan negara.

Pribadi yang ikhlas, jujur, dan sarat pengalaman dan perjuangan ini juga merupakan sosok yang suka menulis. Diantara karya-karya tulisnya, adalah: 1) *Jadwal Waktu Shalat untuk Selamanya*, 2) *Menghadapi Orla (Orde Lama)*, 3) *Qawa'id al-Chams*, 4) *Mudzakkirat fi Tasji'il Islam*, 5) *Mi'ah Hadist (100 Hadis berbahasa Arab)*, 6) *Manasik Haji (bahasa Jawa)*, 7) *Parail (tulisan Latin berbahasa Jawa)*, 8) *Kitab Nikah (tulisan Arab Melayu)*, 9) *Nukilan Syu'aibul Iman (bahasa Jawa)*, 10) *Pengajian Rakyat*. Bukti bahwa beliau ahli falak dapat disimak dari buku-buku beliau yakni; 1) *Hitungan dengan Jalan yang ke I* (1940); 2) *Cara Menghitung Hisab Hakiki* ; dan 3) *Gerhana Bulan* (1960).[Im-Ls]

AR FACHRUDDIN

Menjelaskan Asas Pancasila Secara Sederhana dan Bijaksana



K.H. AR Fachruddin atau Pak AR.

Ketua PP Muhammadiyah 1968-1990. Penasehat PP Muhammadiyah 1990-1994. Pimpinan Muhammadiyah Kota Madya Yogyakarta (1952). Pimpinan Muhammadiyah Kota Madya (1953). Wakil Ketua PP Muhammadiyah 1956-1968. Anggota DPA 1988-1993.

K.H. Abdur Rozaq Fachrudin, atau lebih akrab dipanggil Pak AR, adalah cerita tentang keteladanan dan kharisma. Ada banyak alasan untuk menjadikan beliau panutan dalam kehidupan. Pak AR adalah ulama besar Muhammadiyah, dengan penampilan sejuk dan bersahaja. Kesejukannya tidak hanya kepada warga Muhammadiyah saja, tetapi juga bisa dirasakan oleh umat Islam dan umat beragama lain. Kelebihan Pak AR dalam menyampaikan dakwah adalah gaya kepemimpinan Pak AR yang menyejukkan.

Pak AR, adalah pemegang rekor paling lama memimpin Muhammadiyah, yaitu selama 22 tahun (1968-1990). Selama kepemimpinannya, sudah banyak lika-liku yang dihadapi Muhammadiyah berkaitan dengan perkembangan sosial politik. Salah satunya yaitu, tentang penerapan asas tunggal Pancasila bagi semua kekuatan sosial dan politik, termasuk organisasi kemasyarakatan. Muktamar Muhammadiyah yang sedianya dilangsungkan pada tahun 1981, terpaksa diundur tahun 1985. Begitu di Muktamar dikatakan asas Muhammadiyah adalah Pancasila, banyak orang Muhammadiyah yang menyatakan keluar dari Muhammadiyah. Bagaimana sikap Pak AR menghadapi itu? Pak AR mengatakan, "Kepada yang masih mau mendengarkan, saya jelaskan, asas Pancasila diletakkan bukan untuk mengasasi

Muhammadiyah. Muhammadiyah tetap berdasar Islam. Saya ambil perumpamaan. Begini, kalau kita pergi ke masjid untuk shalat Jum'at mengendarai sepeda motor, Negara RI mewajibkan orang yang naik sepeda motor lewat jalur helm harus pakai helm. Karena lewat jalur helm, saya gunakan helm. Helm tersebut tidak mengubah Islam saya. Niat saya shalat Jum'at ikhlas dan untuk mencari ridho Allah. Anggap saja asas Pancasila sebagai helm". Akhirnya, Pancasila diterima di Muktamar.

Pancasila, menurut Pak AR ialah suatu dasar Negara Republik Indonesia, yang jumlahnya lima. Adapun sila-sila dalam Pancasila adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Agama Islam, Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa; dzat, nama dan karya-Nya adalah satu. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang wujud ini; bumi, langit, matahari, bulan, bintang, seluruh alam dan isinya, termasuk umat manusia, semua adalah ciptaan Allah. Allah yang memberi hidup, dan juga akan mematikan semuanya. Allah tempat tujuan segala permintaan, dan menjadi tujuan dan pusatnya segala kejadian. Allah tidak berputera tidak diputerakan, tidak ada yang menyamai dan menandingi.

Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar setiap umat beragama di Indonesia termasuk yang berpegang pada kepercayaan saja harus saling menghormati, dan menghargai satu sama lainnya. Dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa diharapkan bangsa Indonesia tidak saling bertengkar, berselisih, saling mengejek satu sama lainnya karena perbedaan yang dianut. Siapapun di antara bangsa Indonesia harus mempunyai keyakinan bahwa hidup ini tidak cukup hanya mementingkan keduniaan, tetapi harus seimbang antara jasmani, rohani, lahir-batin, dunia dan akherat.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dimaksudkan agar bangsa Indonesia mempunyai keyakinan dan memegang teguh serta menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Manusia itu satu sama lain sederajat, tidak ada perbedaan, meskipun bangsa Indonesia sendiri terdiri dari bermacam-macam suku dan beraneka ragam bahasa. Bagi bangsa Indonesia, rasa kemanusiaan harus dapat menumbuhkan jiwa gotong-royong, tolong-menolong satu dengan lainnya, tenggang rasa dan sebagainya. Bagi bangsa

Indonesia, rasa kemanusiaan dapat mencegah dari sifat-sifat ingin menang sendiri, ingin berkuasa sendiri, dan juga harus menjauhkan dari sifat sombong, angkuh, mementingkan diri sendiri, siapa *lu*, siapa *gue*. Rasa kemanusiaan dalam Pancasila harus dapat menumbuhkan budi luhur, meninggalkan sikap merendahkan orang lain. Semuanya itu sesuai dengan tuntutan Agama Islam, bahwa: 1). Semua manusia adalah anak keturunan Nabi Adam, sedang Nabi Adam diciptakan Allah dari tanah, dari debu atau lumpur (tanah liat). Maka, tidak berarti bahwa bangsa Arab lebih mulia dari pada bangsa lain. Ukuran kemuliaan seseorang dihadapan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Mulia ialah dari takwanya, dari kebaktiannya dan ketergantungannya serta penghambaan kepada Allah, 2). Perbedaan bahasa, warna kulit, tempat kelahiran, tanah air, semuanya tidak menunjukkan kemuliaan yang satu lebih tinggi dari yang lain, 3). Tiap-tiap manusia, antara yang satu dengan yang lain mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan, 4). Manusia harus lebih memiliki rasa persatuan antara yang satu dengan yang lain.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia, hendaknya bersyukur kepada Allah adanya rasa persatuan di antara kita bangsa Indonesia. Bersyukur karena suku Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian dan suku-suku lain seperti suku Sunda, Madura, Aceh, Tapanuli, Minang, Batak, Pasemah, Rejang Lebong, Lampung, Banjar, Bugis, Sasak, Ambon, dan lain-lain. Semuanya mengakui bahwa mereka adalah satu nusa satu bangsa dan satu bahasa, Indonesia. Sejak bangsa Indonesia dijajah Belanda dan Jepang, sebenarnya rasa persatuan itu tetap subur. Kebangkitan rasa kebanggaan itu telah dipelopori Budi Utomo (1908), Sarikat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Nahdatul Ulama (1926), Taman Siswa (1922), dan Sumpah Pemuda (1928), semuanya menguatkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia.

Maka, dengan sila Persatuan Indonesia semakin kuatlah rasa persatuan bangsa Indonesia. Adanya transmigrasi penduduk Pulau Jawa ke Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Perpindahan suku bangsa Bugis ke Madura, Irian, Nusa Tenggara dan mengalirnya suku Minang ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain, semuanya itu menguatkan rasa persatuan Indonesia.

Apalagi sesudah terjadi asimilasi serta pernikahan antara suku satu dengan suku yang lain.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Dalam sila ini menjadikan bangsa Indonesia seluruhnya tanpa membeda-bedakan satu golongan dengan golongan lain, keturunan dari mana saja, memiliki rasa persamaan hak dan kewajiban sederajat terhadap kepentingan negara, bangsa dan masyarakat Indonesia. Semuanya, masing-masing mempunyai hak memilih dan dipilih, serta hak-hak yang lainnya. Dalam pelaksanaannya, kerakyatan itu diwujudkan dalam permusyawaratan perwakilan yang diatur dengan Undang-undang. Dalam bermusyawarah diusahakan untuk mufakat, selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia. Semua hal yang telah diputuskan hendaklah ditaati dan dilaksanakan dengan kemantapan.

Dengan sila Kerakyatan itu diharapkan bangsa Indonesia memiliki rasa harga diri, rasa tanggung jawab atas semua hal yang menjadi keperluan dan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat Indonesia. Dengan sila kerakyatan, seluruh bangsa Indonesia diharapkan mementingkan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat Indonesia melebihi kepentingan diri sendiri atau kepentingan golongannya. Selebihnya diusahakan jangan sampai sila Kerakyatan malah dijadikan alat untuk menindas golongan lain. Apabila musyawarah dan mufakat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan seadil-adilnya, akan memberikan rasa lega dan senang bagi seluruh bangsa Indonesia.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, diharapkan seluruh rakyat Indonesia memiliki rasa adil terhadap sesama, menjaga dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar keadilan dapat merata seluruh bangsa. Dengan sila kelima ini, bangsa kita diharapkan tidak memiliki rasa "*mumpung*". Misal mumpung kaya, pandai, berkuasa, mumpung sedang memerintah, sehingga mempunyai tingkah laku yang tidak terpuji, sewenang-wenang, merendahkan dan meremehkan terhadap yang lain. Dengan sila Keadilan Sosial diniatkan agar dapat meratakan keseimbangan dengan sesama bangsa, bahkan kepada seluruh umat seluruh dunia.**(IM)

AHMAD AZHAR BASYIR

Ijtihad, Berpikir Maksimal untuk Mendapatkan Ketentuan Hukum Syara'



KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928, wafat di Yogyakarta, 28 Juni 1994. Anggota Kesatuan TNI Hizbullah Batalion 36 Yogyakarta 1946. Anggota Pasukan Angkatan Perang Sabil (APS) 1948-1949. Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah 1985-1990, Ketua Umum PP Muhammadiyah 1990-1994, Ketua MUI Pusat 1990-1995. Anggota MPR RI 1993-1994. Anggota Akademi Fikih Islam OKI mewakili Indonesia. Penghargaan Tertinggi Bidang Syariah Islam "Al-Ulum wa al-Funun" Pemerintah Mesir 1989.

Putra K.H. Basyir ini, selain di Muhammadiyah, pernah menjadi Anggota Tim Pengkajian Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Anggota Pemikir Masalah-Masalah Islam Departemen Agama RI, bahkan aktif di Organisasi Konferensi Islam (OKI) mewakili Indonesia.

Kiprahnya di dunia pendidikan adalah beliau menjadi dosen di Fakultas Filsafat UGM sebagai dosen tetap sampai purna tugas, dan menjadi dosen tidak tetap di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta, IAIN (kini UIN) Sunan Kalijaga, dan Universitas Indonesia Jakarta.

Pengabdianya di Muhammadiyah dimulai sejak remaja yang semula sebagai juru ketik dan mengantar surat-surat Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Pada tahun 1954 dipercaya sebagai ketua Pemuda Muhammadiyah yang kemudian dikukuhkan pada Muktamar Muhammadiyah di Palembang tahun 1956.

Sebagai ahli fikih nasional dan internasional, beliau aktif dalam berbagai kegiatan pertemuan ilmiah dalam negeri dan luar negeri sebagai utusan Indonesia. Pada tahun 1985, beliau menghadiri Sidang Akademi Fikih ke-2 di Sana'a, Yaman, Sidang Akademi Fikih ke-3 di Amman Yordania (1986), Sidang Akademi Fikih ke-4 tahun 1988 di Jeddah Saudi Arabia. Kemudian juga beliau hadir di Sidang Akademi Fikih ke-5 di Kuwait (1988), Sidang Akademi Fikih ke-6 dan 7 (1990 & 1992) di Jeddah Saudi Arabia. Kemudian beliau juga hadir pada Seminar Masjid sedunia di Saudi Arabia tahun 1974, Seminar Riset Islam tahun 1977 di Mesir dan Konferensi ke-3 Majelis Tinggi Internasional Urusan Islam (1990).

Pelopop kelahiran Bank Syariah di tanah air ini juga mengembangkan sayap keilmuan di berbagai bidang melalui karya-karyanya yang melimpah. Sebagai ulama dan intelektual, beliau meninggalkan pemikiran antara lain dalam bentuk buku yang merupakan pewarisan ilmu, norma, dan pengalaman dalam bidang Ekonomi Islam, Hukum Islam dan tema-tema keislaman lainnya. Pada masanya, Ahmad Azhar merupakan salah satu tokoh penting yang mengiringi dan memahami berbagai problematika dan dinamika Muhammadiyah.

Pemikiran Ahmad Azhar Basyir

Pemikiran Islam pasca 1970-an berkembang sangat pesat yang digencarkan oleh kalangan cendekiawan muslim muda. Serangan gencar diarahkan kepada Muhammadiyah yang dinilai berhenti berperan dalam pembaharuan Islam dan berubah menjadi organisasi tradisional, tidak lagi memiliki semangat berijtihad.

Menghadapi kritik demikian, Ahmad Azhar menanggapi dengan hati tenang, menyambutnya sebagai masih adanya perhatian dan harapan khalayak terhadap peran Muhammadiyah sebagai pemandu kehidupan ummat Islam Indonesia.

Beliau menyatakan, bahwa Muhammadiyah adalah sebuah organisasi pembaharu, organisasi tajdid (reformasi) dalam Islam di Indonesia. Tajdid itu sekurang-kurangnya memiliki 3 dimensi, yakni: dimensi akidah, dimensi ibadah mahdhah; dan dimensi muammalah. Dalam hal akidah, semua persoalan harus kepada

ajaran Al-Qur'an dan Hadis, sifatnya absolut. Tajdid akidah diperlukan untuk mengatasi golongan yang “memudahkan pengertian” akibat pemikiran yang terlalu jauh. Dalam dimensi ibadah mahdah, perbedaan harus dikembalikan kepada sumber Al-Qur'an dan Hadis. Dalam dimensi muamalah, diperlukan pengembangan pemikiran sesuai perkembangan masyarakat, sebab Al-Qur'an dan Hadis memuat masalah muamalah dalam kaidah-kaidah umum, diperlukan penerjemahan ajaran-ajaran AL-Qur'an dan Hadis dalam kenyataan yang berkembang di masyarakat. Tajdid dalam hal ini memiliki makna dinamis.

Sebagai ulama yang familier dengan tradisi fikih, filsafat dan Muhammadiyah, pemikiran Ahmad Azhar terbentuk dalam karakteristik yang unik, tercermin dalam respon dan sikapnya terhadap masalah-masalah ijtihadiyah, antara lain dalam bidang medis seperti transplantasi organ tubuh, masturbasi, dan operasi kelamin. Dalam bidang hukum keluarga, meliputi ahli waris pengganti, hibah yang diperhitungkan sebagai warisan, pembagian warisan dengan cara wasiat serta pemikirannya tentang keluarga berencana (KB). Dalam menggulirkan keputusan dalam masalah-masalah tersebut, Ahmad Azhar secara tegas mempertimbangkan masalah moral. **[Lasa-Ad]**

Buku-buku karya K.H. Ahmad Azhar Basyir antara lain:

- 1) Kawin Campur; Adopsi dan Wasiat menurut Islam (1972) ;
- 2) Negara dan Pemerintahan dalam Islam (1981);
- 3) Citra Manusia Muslim (1982);
- 4) Ikhtisar Fikih Jinayat (1982);
- 5) Hukum Adat bagi Umat Islam (1983);
- 6) Maskawaih; Riwayat Hidup dan Pemikiran Filsafat (1983);
- 7) Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai (1983);
- 8) Falsafah Ibadah dalam Islam (1984);
- 9) Madzhab Mu'tazilah Aliran Rasionalisme dalam Filsafat Islam (1985);
- 10) Manusia; Kebenaran dan Toleransi (1986);
- 11) Hukum Internasional Islam;
- 12) Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah (1987);
- 13) Masalah Kedudukan Anak-Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam (1988);
- 14) Hukum Waris Islam (1990);
- 15) Fahaman Akhlak dalam Islam (1990);
- 16) Pendidikan Agama Islam I (Aqidah) (1991);
- 17) Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam (1992);
- 18) Hukum Perkawinan Islam (2000);
- 19) Garis Besar Sistem Ekonomi Islam;
- 20) Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat;
- 21) Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam (2000);
- 22) Ajaran Islam tentang Sex Education, Hukum Perkawinan dan Pendidikan Anak (1977);
- 23) Azas-Azas Mu'ammalat (1988);
- 24) Teologi Tanah.



AHMAD ADABY DARBAN

Memahami Sejarah, Memahami Realitas Sosial, Merangkai Harmoni

Drs. H. Ahmad Adaby Darban, S.U.

Lahir di Yogyakarta. 25 Februari 1952, wafat 6 November 2011. Ketua Umum PD Pelajar Islam Indonesia Yogyakarta 1974-1976, Presiden Persatuan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) Negara Bagian Victoria. Ahli Sejarah UGM. Ketua Majelis Pustaka PP Muhammadiyah 1995-2000. Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia DIY 2000-2005.

Proses deislamisasi dapat dilihat dalam narasi sejarah, bahwa Diponegoro mampu menggerakkan umat hingga membunuh 8000 pasukan Belanda dan membuat rugi 20 juta Gulden. Namun, kisah tersebut tidak pernah ditonjolkan, seiring dengan dikotomisasi Islam Abangan dan Islam Putih hingga pemisahan sekolah sekuler dengan sekolah agama. Tidak hanya itu, adu domba ulama, pembangunan Masjid Jami untuk ibadah ritual saja, dan pemberangkatan haji para ulama yang dekat dengan penguasa kolonial juga bagian narasi deislamisasi tersebut.

Sebagai sejarawan Indonesia, Pak Adaby tidak sekedar belajar di dalam ruang kelas melainkan ikut organisasi dan kursus sehingga membuatnya tampil sebagai pribadi yang handal. Tercatat ia pernah menjadi pengurus Pelajar Islam Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, Masyarakat Sejarawan Indonesia, hingga Persatuan Pelajar Indonesia Australia cabang Victoria. Kursus pun ia ikuti diantaranya penelitian keagamaan hingga Al Kitab Hidup Baru. Berbekal kemampuan secara teori dan praktik baik

akademik maupun non akademik, ia mampu menjadi seorang pemimpin dan pengajar yang kompeten maka dari itu tak heran apabila ia menjadi dosen teladan UGM dan diangkat menjadi Wakil Dekan III Fakultas Sastra UGM (sekarang Fakultas Ilmu Budaya).

Keunikan sejarawan yang lahir di lingkungan Muhammadiyah ini sangat terasa. Tatkala Muhammadiyah sibuk dengan TBC (Tahayul, Bidah, dan Khurafat), ia justru menganggap hal tersebut sebagai suatu kepercayaan masing-masing orang. Masalah TBC sebaiknya menjadi urusan privat, tidak dipublikkan apalagi dipermasalahkan. Mengingat hal tersebut kadang sering ditabrakkan dengan keberadaan makna filosofis dalam suatu cagar budaya yang merupakan irisan kajian dalam ilmu sejarah yang digelutinya. Ia pun angkat bicara dan meluruskan masalah tersebut agar dikaji secara ilmiah dengan memperhatikan realitas sosial yang ada, tidak ditabrakkan dengan masalah TBC.

Tak sekedar mengomentari masalah realitas sosial, Pak Adaby juga mengomentari masalah tafsir sejarah yang pro penguasa dan proses deislamisasi dalam narasi sejarah khususnya di Indonesia. Ia pun berusaha serius meneliti guna pelurusan sejarah yang sering dibengkokkan pada masa Orde Lama dan Orde Baru sesuai kepentingan penguasa. Meskipun istilah “Pelurusan Sejarah” masih dapat diperdebatkan secara ilmiah namun menurut sejarawan Asvi Warman Adam, istilah tersebut sebagai “obat” bagi para pelaku sejarah yang terkena dampak negatif dari pembengkokan sejarah tersebut. Sejarah pun perlu ditafsirkan ulang untuk mendekati keadaan yang sesungguhnya karena yang bisa 100% sama adalah peristiwanya bukan narasi nya.

Tak lupa tentang deislamisasi di Indonesia ia komentari sebagai bahan kritik untuk penulisan sejarah. Umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia seakan-akan tersingkir dari panggung sejarah. Menurutnya, proses deislamisasi dapat dilihat dalam narasi sejarah seperti pengaburan bahwa Diponegoro mampu menggerakkan umat hingga membunuh 8000 pasukan Belanda dan membuat rugi 20 juta Gulden. Namun kisah tersebut tidak pernah ditonjolkan seiring dengan dikotomisasi Islam Abangan

dan Islam Putih (dalam Bahasa Arab: Muti'an atau orang yang patuh) hingga pemisahan sekolah sekuler dengan sekolah agama. Tak hanya itu, adu domba ulama, pembangunan masjid jami untuk ritual saja, dan pemberangkatan haji ulama yang dekat dengan penguasa kolonial juga disinggung karena tidak pernah ada narasi sejarah yang menceritakan hal tersebut.

Pak Adaby yakin bahwa usaha pelurusan sejarah dan membawa umat Islam kembali ke panggung sejarah itu akan berhasil. Usaha yang dilakukan Pak Adaby memang tergolong utopis namun dengan ketekunan generasi penerusnya maka ia akan melihat dari surge bagaimana umat Islam yang paham akan sejarahnya. Namun ia mewariskan usahanya kepada para generasi penerus karena Allah memanggilnya pada 6 November 2011 pada saat Idul Adha. (eMBe)

Diantara buku karya Ahmad Adaby Darban:

1. Sejarah Lahirnya Pelajar Islam Indonesia (PII) (1976)
2. Fragmenta Sejarah Islam di Indonesia (1984, 2008)
3. Snouck Hurgronje dan Islam di Indonesia (1985)
4. Peranserta Islam dalam Perjuangan di Indonesia (1988)
5. Biografi Nasional: DIY (Anggota Tim Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian M.A.)
6. Sejarah Umat Islam Indonesia (anggota Tim. Prof.Dr.Taufik Abdullah, 1989)
7. Sejarah Kota Besar Yogyakarta (Anggota Tim Prof. Dr. Djoko Sukiman)
8. Historiografi; Sebuah Catatan perkembangannya (1992)
9. Biografi Sri Sultan Hamengku Buwana IX (Sebagai Ketua Tim, dterbitkan oleh IDSN Dirjen Kebudayaan P&K, 1994).
10. Sejarah Kauman, Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah (Yogyakarta: Terawang, 2000).
11. Rifa'iyah; Gerakan Protes di Jawa Tengah 1850-1859 (2002)
12. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (karya bersama Mustapha Kamal Phasya, 2000, 2002, 2004, 2006)
13. Sejarah 'Aisyiyah (Sebagai Ketua Tim, 2004)
14. Sejarah Lahirnya Orde Baru di Jogjakarta (Karya bersama Marchaban Faqih dan Darto Harnoko, 1997)
15. Jogjakarta Sebagai Ibukota Revolusi (Karya bersama Suhartono, P.J. Suwarno, Darto Harnoko & Yuwono, 2003)
16. Kraton Jogjakarta, The History and Cultural Heritage (anggota tim Dipimpin oleh Prof. Dr. Sitti Chamamah Soeratno, 2002)

ABDUL BARI SHO'IM

Konsepsi Filantropi Muhammadiyah

Konsepsi zakat yang dikembangkan Abdul Bari Sho'im berbeda. Apabila zakat pada umumnya hanya sekedar menerima kemudian tak tahu disalurkan kemana, Pak Sho'im tidak demikian. Zakat harus disalurkan kepada kegiatan yang produktif dan dapat memberi dampak positif untuk sekitarnya.

Baginya, saluran zakat sebaiknya melalui lembaga seperti di amal usaha Muhammadiyah agar dapat dialihfungsikan dengan baik kedalam kegiatan seperti pemberdayaan usaha fakir miskin, hingga pendidikan anak yang tidak mampu.

“Memberi pancing lebih baik daripada memberi ikan”. Itulah pepatah yang sering kita dengar namun kadang kita mengacuhkan apa makna dibalik hal kalimat motivasi yang hebat tersebut. Menjadi manusia yang *urip* tentu harus *urup* agar menjadi manfaat bagi manusia lainnya. Apabila kita hanya menerima ikan maka itu sekedar untuk makan sendiri tetapi apabila kita menerima pancing dan menggunakannya maka akan banyak ikan yang dapat kita bagikan kepada orang lain.

Meskipun sudah terkenal tetapi pepatah tersebut masih belum dapat diterjemahkan secara praktis. Namun ada sosok yang



K.H. Drs. Abdul Bari Sho'im.
Lahir di Kaliwungu Kendal, 29 September 1938, wafat di Weleri 27 Oktober 1995. Ketua PCM Weleri 1985-1990. Ketua PDM Kendal 1990-1995.

berhasil “menerjemahkan” pepatah tersebut, ia berusaha “menerjemahkan” dengan konsep zakat amwal yang bertumpu pada empat sehat lima sempurna (syahadat, sholat, puasa, haji) dan (zakat). Maka dari itu, apabila ada pimpinan Muhammadiyah yang tidak berzakat maka akan diklarifikasi kenapa tidak berzakat. Dialah Abdul Bari Sho’im atau akrab di sapa Pak Sho’im.

Pak Sho’im lahir di Kaliwungu, Kabupaten Kendal pada 29 September 1938 dari ayah Sueini dan Ibu Sutiyah. Ia termasuk sosok unggul yang cerdas baik akademik maupun keagamaan. Tak heran apabila ia pernah menempuh pendidikan syarian di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) hingga Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

Pak Sho’im adalah salah satu tokoh Muhammadiyah Kendal khususnya Kecamatan Weleri. Kehidupannya benar-benar dipayungi oleh semangat Al Maun yang digelorakan oleh KH Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Beliau adalah sosok utama dalam hal penyusunan fiqih zakat dari kalangan Muhammadiyah. Tujuannya hanya satu: Zakat kembali kepada umat yang membutuhkan.

Berawal dari buku “Zakat Kita”, beliau berusaha untuk memikirkan bagaimana umat Islam bisa saling bermanfaat bagi sesamanya. Bagi yang mampu dapat menyantuni yang tidak mampu dan yang tidak mampu dapat memanfaatkan santunan dengan sebaik-baiknya. Kreativitas dalam mengelola zakat telah melahirkan umat Islam yang produktif, tidak sekedar konsumtif.

Konsepsi zakat yang dikembangkan pun berbeda. Apabila zakat pada umumnya hanya sekedar menerima kemudian tak tahu kemana disalurkan, Pak Sho’im tidak demikian. Zakat harus disalurkan kepada kegiatan yang produktif dan dapat memberi dampak positif untuk sekitarnya. Baginya, saluran zakat sebaiknya melalui lembaga seperti di amal usaha Muhammadiyah agar dapat dialihfungsikan dengan baik kedalam kegiatan seperti pemberdayaan usaha fakir miskin, hingga pendidikan anak yang tidak mampu.

Dalam gerilya zakatnya, ia melatih banyak anak muda baik umum maupun AMM untuk dapat mengelola zakat secara professional. Militansi dalam berdakwah tentang pentingnya zakat tak diragukan lagi. Meskipun belum banyak tanggapan positif tentang zakat Amwal model Pak Sho'im namun toh akhirnya konsep zakat tersebut diterima banyak kalangan karena terbukti mampu mensejahterakan umat khususnya umat Islam.

Kepiawaiannya dalam mengelola zakat membuat PCM Weleri menjadi percontohan pengelolaan zakat Nasional. Terbukti dengan keluarnya SK Kementerian Agama RI No. 457 tahun 2002. Bagaimana tidak, dengan pemahaman bahwa zakat sama pentingnya dengan sholat dan diharapkan dapat menyelamatkan ekonomi umat Islam maka PCM Weleri tak tanggung-tanggung dapat menerima zakat sebesar 1 milyar lebih. Bahkan dengan zakat pun, PDM Kendal khususnya yang bermarkas di Weleri dapat mewujudkan amal usaha secara fisik nyata seperti gedung Muhammadiyah hingga Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal yang sebelumnya RS Yarsi saat sebelum dikelola oleh Muhammadiyah.

Ada perbedaan dalam fiqih zakat Pak Sho'im dengan fiqih zakat umum. Fiqih zakat Pak Sho'im diantaranya adalah: tidak ada pemisahan harta, golongan sesuai dengan keadaan nyata bukan karena mengikuti anggapan, dan zakat harus melalui amil. Untuk fiqih zakat umum tentu adalah kebalikannya. Namun bagaimanapun, konsepsi filantropi Muhammadiyah ala Pak Sho'im telah melahirkan cara pandang baru dalam memperhatikan masalah zakat khususnya sebagai pertanggungjawaban kepada umat. (eMBe)



A.M. FATWA

Saya Menghayati dan Mengamalkan Pancasila Justru Saya Seorang Muslim

Kapten KKO (Purn.) Andi

Mappetahang Fatwa atau AM Fatwa

Lahir di Bone, Sulawesi Selatan
12 Februari 1939, wafat di Jakarta
14 Desember 2017, anggota Dewan
Perwakilan Daerah dari Provinsi DKI
Jakarta (2009-2017),
Ketua Korps Muballigh
Muhammadiyah DKI Jakarta
(1977-1999).

Suatu yang menggembirakan, setelah sekian lama Pancasila kurang dibicarakan dan terpinggirkan dari ranah publik, pada saat ini timbul kesadaran untuk memperkuat Pancasila. Hal ini diharapkan akan menjadi penangkal efek globalisasi yang negatif dan pemahaman akan arah Reformasi, karena Pancasila menjadi dasar yang tetap (statis) dan menjadi “bintang” tuntunan yang dinamis.

Merebaknya tindak kekerasan, radikalisme dan teror boleh jadi disebabkan oleh pengaruh ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, yang sudah masuk ke Indonesia. Selain itu, Pancasila tidak dipahami, diresapi dan dihayati karena erosi oleh paham-paham selain Pancasila. Kondisi bangsa dan negara di mana banyak terjadi penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan sebagainya, yang tidak peduli dengan kehidupan rakyat yang masih ada yang mengalami kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, tetapi lebih bersikap individualisme, egosisme pribadi dan egoisme sektoral, perkelahian massal itu juga diakibatkan banyak yang tidak menghayati dan mengamalkan Pancasila. Hal ini membahayakan persatuan bangsa.

Oleh karena itu, dalam menangkal dan mengatasi pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan Pancasila, bangsa Indonesia

yang sangat majemuk ini harus memperkuat ketahanan mental ideologinya, agar bangsa dan negara tegak berdiri dalam pilar dan jati diri bangsa dengan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Hal ini berarti harus menolak sistem kenegaraan seperti liberalisme, kapitalisme dalam segala bentuk manifestasinya, sekulerisme, marxisme, komunisme, atheisme dan ideologi-ideologi lainnya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila. Siapapun dan organisasi apapun yang mengingkari Pancasila bisa dikategorikan tidak loyal dan tidak menegakkan serta dapat dianggap berkhianat terhadap Pancasila.

Memperkuat dan menegakkan Pancasila harus dilakukan dengan sepenuh hati secara menyeluruh, komprehensif dalam semua aspek kehidupan. Pendidikan dalam arti luas harus dilakukan. Peranan lembaga pendidikan sangat penting baik pendidikan formal maupun non formal. Dalam kaitan ini, Pancasila harus menjadi mata pelajaran penting yang diberikan secara bertingkat dan berlanjut sesuai tingkat pendidikan. Pancasila harus menjadi fundamen yang kuat yang dipahami, diresapi secara mendarah daging oleh setiap insan Indonesia. Di dalam kehidupan masyarakat harus dilakukan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih komunikatif, dialogis, persuasi dan menghindari cara yang represif, instruktif, indoktrinatif serta bersifat terbuka.

Yang lebih penting lagi adalah bagaimana pengalaman atau implementasi Pancasila di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Terkait dengan masalah ini, peran setiap pemimpin dari semua lapisan atau setiap atasan menjadi penting. Seperti diketahui, menurut pakar antropologi, masyarakat Indonesia lebih berorientasi ke atas. Oleh karena itu, jika yang berada di atas dapat memberikan contoh teladan dalam pengamalan Pancasila, akan diikuti oleh masyarakat. Penguatan ideologi sekaligus dasar negara Pancasila harus menjadi perhatian yang besar dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai hanya setengah hati terutama pengamalannya. [Ad]



AM Fatwa dalam sebuah kesempatan menghadiri Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar, 3-7 Agustus 2017. Foto: Ambo Rappe, PDM Bone.

Diantara buku-buku karya AM Fatwa:

1. Islam dan Negara (1955),
2. Dulu Demi Reformasi, Kini Demi Pembangunan (1985),
3. Demi Sebuah Rezim, Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili (1986, 2000),
4. Saya Menghayati dan Mengamalkan Pancasila Justru Saya Seorang Muslim (1994),
5. Menggugat dari Balik Penjara (1999),
6. Dari Mimbar ke Penjara (1999),
7. Satu Islam Multipartai (2000),
8. Demokrasi Teistis (2001),
9. Otonomi Daerah dan Demokratisasi Bangsa (2003),
10. PAN Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa (2003),
11. Kampanye Partai Politik di Kampus (2003),
12. Dari Cipinang ke Senayan (2003),
13. Catatan dari Senayan (2004),
14. Problem Kemiskinan, Zakat sebagai Solusi Alternatif (bersama Djamal Doa dan Aries Mufti, 2004),
15. PAN Menyongsong Era Baru, Keharusan Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional (2005),
16. Pengadilan Ad Hoc HAM Tanjung Priok: Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional (2005),
17. Menghadirkan Moderatisme Melawan Terorisme (2006-2007),
18. Satu Dasawarsa Reformasi Antara Harapan dan Kenyataan (2008),
19. Grand Design Penguatan DPD RI: Potret Konstitusi Pasca Amendemen UUD 1945 (2009),
20. Pendidikan Politik Bernegara dengan Landasan Moral dan Etika (2009).
21. Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa Bukan Hak Paten Suatu Golongan (2010).
22. Transisi Demokrasi di Atas Hampan Korupsi: Buah Pikir Reflektif Atas Carut Marut Reformasi (2013),
23. Meretas Jalan Membentuk Karakter (2013).



Prof. Dr. Abdul Hadi Wiji Muthari
(lahir di Sumenep, 24 Juni 1946;
adalah salah satu sastrawan,
budayawan dan ahli filsafat
Indonesia.
Salah satu pendiri Ikatan
Mahasiswa Muhammadiyah,
Mantan Ketua Majelis
Kebudayaan PP Muhammadiyah.

ABDUL HADI WM

Menafasi Kebudayaan Indonesia dengan Puitika Sufistik

Sastra adalah nafas kebudayaan. Dan, Abdul Hadi WM telah ikut menafasi kebudayaan Indonesia dengan puitika sufistik, dan prinsip-prinsip seni yang Islami, untuk ikut mendorong masyarakat ke arah pencerahan sosial dan spiritual. Upayanya itu, bagaimanapun, telah menjadi penyeimbang bagi pengaruh budaya Barat yang hedonis dan sekuler. Karena itu, Abdul Hadi WM, beserta karya-karya dan pemikirannya, adalah paradigma tersendiri dalam kebudayaan Indonesia.
(Ahmadun Yosi Herfanda)

Mulai dari zamannya Hamzah Fazuri (seorang sastrawan pembaharu dari pertengahan abad 16 sampai awal abad 17) hingga era reformasi, sufisme dapat disebut sebagai tema utama sastra di Indonesia. Dikenal sebagai sastra sufistik. Sastra sufistik mulai menjadi perbincangan serius sejak akhir 1970-an. Abdul Hadi Widji Muthari bersama Sutardji Calzoum Bahri, Danarto, serta sejumlah sastrawan lain menyuarakan semangat “Kembali ke Akar, Kembali ke Sumber”. Gerakan ini menjadi ilham bagi para sastrawan dalam bersastra.

Abdul Hadi WM berpendapat bahwa lima belas tahun awal Pemerintahan Orde Baru menjadi pintu gerbang kebaruan bagi sastra Indonesia. Beberapa sastrawan menyambut momen

tersebut sebagai ajang untuk menggagas berbagai hal baru dalam sastra. Itu pula yang ia anggap sebagai penyokong utama untuk periode berikutnya.

Gagasan baru tentang sastra Indonesia yang baru ia ungkapkan karena fenomena kala itu yang jelas benar menjadi titik balik sastra Indonesia. Sastra tidak dipandang sebagai suatu sastra itu sendiri melainkan ada pergumulan tentang nilai-nilai tradisi dan Ke-Indonesia-an yang turut menjadi nyawa dalam penciptaannya. Angkatan 70-an menjadi motor penggerak dalam reformasi sastra tersebut. Akar tradisi dan nilai Indonesia turut serta dipadukan untuk mewarnai geliat kreatif susastra.

Bagi Abdul Hadi WM, meskipun identik dengan Islam, sufisme tidak bisa dipandang sebagai dogma agama saja. Setiap orang juga harus melihat sastra sufisme ini sebagai kebudayaan universal dari segi peradaban, kebudayaan, dan estetika. Sebab, Islam merupakan agama yang universal. Abdul Hadi menjawab kritik kepada buku serta karya-karyanya yang tidak banyak mengutip referensi dari Arab. Ia menekankan bahwa studinya memang merupakan studi sastra Melayu yang asalnya dari Persia. Membicarakan sastra Islam itu tidak bisa dilihat dari kebudayaan Arab saja karena kebudayaan Islam bukan kontribusi Bangsa Arab saja. Kebudayaan Islam juga milik orang Melayu, Turki, Persia, Urdu, dan lain-lain.

Fenomena bangkitnya tradisi dan sastra sufi ini dilihat oleh A. Teeuw, Subagio Sastrowardoyo, dan Ulrich E. Kratz sebagai gejala bangkitnya budaya kedaerahan. Namun, Abdul Hadi melihat bahwa sumber ilham yang dijadikan sebagai karya dari akar kedaerahan itu adalah tradisi-tradisi universal seperti bentuk-bentuk spiritualitas bercorak Hindu dan Islam, yaitu mistisisme dan tasawuf. Ia berpandangan bahwa fenomena ini tidak sekedar kedaerahan dalam hal administrasi dan batas wilayah melainkan nilai menyeluruh dari aspek mistisme Hindu dan tasawuf Islam yang terpadu dalam apa yang dikenal “Sastra Sufi”.

Namun ia juga menggarisbawahi apa yang disebut “sufi” sebagai suatu hal yang tidak dapat dianggap dogma semata. Sufi lebih

daripada itu karena menyangkut aspek universal seperti peradaban, kebudayaan, hingga estetika. Nilai-nilai itulah yang menguatkan sufi dapat menembus berbagai batas teologis. Setidaknya itu yang ia ungkapkan di Universitas Paramadina.

Dalam pandangannya, sastra sufi sudah ada sejak zaman Bani Umayyah yang digunakan untuk memperbaiki masyarakat. Sejalan dengan hal itu, ia berpendapat bahwa sastra sufi tidak sekedar dilihat nilai estetika nya saja melainkan penikmatnya juga dapat mengingat Tuhan sekaligus menikmati sastra. Sastra sufi dipandang nya sebagai suatu jembatan antara aspek tradisional yang sarat akan nilai-nilai “langit” dengan aspek kosmopolitan yang sarat akan nilai-nilai “pikir”.

Jadi, meski tradisi-tradisi seperti itu memberi bentuk pada corak kedaerahan di Indonesia, tapi posisinya dapat dikatakan berada di luar batas kedaerahan. Ia lalu mengutip Oesman Effendy bahwa fenomena yang berhubungan dengan bentuk-bentuk spiritualitas ini adalah tanda munculnya neo-tradisionalisme dalam perkembangan kesenian Indonesia mutakhir.[Ad-MB]

Diantara karya-karya Abdul Hadi WM:

Laut Belum Pasang, Litera, 1971; Potret Panjang Pengunjung Pantai Sanur, Pustaka Jaya, 1975; Meditasi, Budaya Jaya, 1976 (mendapat hadiah Buku Puisi Terbaik DKJ); Tergantung Pada Angin (1977); Anak Laut Anak Angin, Harapan, 1983; Modin Karok, (Cerita Rakyat Madura), Balai Pustaka, 1983; Keluarga Tikus (cerita anak-anak), Balai Pustaka, 1984; Rumi: Sufi dan Penyair (1985); Hamzah Fansuri: Risalah Tasawuf dan Puisi-puisinya (1995); Sastra Sufi: Sebuah Antologi (1996); Kembali ke Akar Kembali ke Sumber: Esai-esai Sastra Profetik dan Sufistik (Pustaka Firdaus, 1999); Islam: Cakrawala Estetik dan Budaya (Pustaka Firdaus, 1999); Tasawuf yang Tertindas: Kajian Hermeneutik terhadap Karya-karya Hamzah Fansuri (2001); Hermeneutika, Estetika, dan Religiusitas: Esai-esai Sastra Sufistik dan Seni Rupa (2004); Kembali ke Akar Kembali ke Sumber: Jejak-jejak Pergumulan Kesusastraan Islam di Nusantara (2016); dan lain-lain. Disertasi: “Estetika Sastra Sufistik: Kajian Hermeneutik terhadap Karya-karya Syekh Hamzah Fansuri”, di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan di Universiti Sains Malaysia
Buku kumpulan puisi: *Cermin* (1975), *Meditasi* (1976), *Tergantung pada Angin* (1977), *Pembawa Matahari* (2002), *Tuhan Kita Begitu Dekat* (2012), dan sebagainya.



Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir. Lahir di Yogyakarta 1908, wafat 2 Desember 1973. Anggota Pengurus Besar Muhammadiyah 1946-1973. Rektor (pertama) dan perintis Universitas Islam Indonesia (Sekolah Tinggi Islam) 1945-1960. Salah satu dari 9 penandatangan “Piagam Jakarta” 22 Juni 1945.

ABDUL KAHAR MUZAKKIR

Menggagas Perguruan Tinggi untuk Kaum Perempuan

Pada forum Muktamar Kerja Aisyiyah bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad, tahun 1962, Prof A Kahar Muzakkir, yang biasa dipanggil Pak Kahar, menyampaikan pemikirannya tentang sebuah Perguruan Tinggi bagi kaum perempuan, sebagai kelanjutan dari pendidikan yang telah diselenggarakan bagi kaum perempuan Muhammadiyah, yaitu Madrasah Muallimat di Yogyakarta yang telah berdiri selama 40 tahun.

Ada enam poin pemikiran Pak Kahar berkaitan dengan pendirian sebuah perguruan tinggi bagi kaum perempuan.

Pertama, adalah suatu kewajiban suci bahwa kita umat Islam yang merupakan bangsa Indonesia yang besar ini, oleh Allah Swt dikaruniai iman dan Islam dan dijadikan *wasath* dan *khoiru ukhrijat linnas*. Agama dan idiologi Islam sudah sejak empatbelas abad lalu memberikan pedoman-pedoman hidup yang mulia dan bermutu tinggi. Islam yang semenjak lahirnya, memberi tugas wajib belajar yang sama baik bagi pria maupun bagi wanita.

Ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah mengenai kewajiban belajar senantiasa berlaku dari dahulu hingga kini, bahkan sepanjang masa. Ilmu dan pengetahuan selama-lamanya menjadi sendi dan dasar tiap-tiap tindakan terutama untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Umat Islam terutama untuk kemajuan masyarakat dan negara di mana kaum Muslimin pun semenjak lahirnya selalu membuktikan dengan bukti-bukti yang berharga.

Kedua, di tanah air Nusantara Indonesia, umat Islam terutama yang bernaung di bawah panji Muhammadiyah dengan bukti yang nyata baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka, mengambil bagian dalam pengajaran dan pendidikan pula. 'Aisyiyah sebagai garwa Muhammadiyah, tidak ketinggalan dalam memajukan bidang pengajaran dan pendidikan. Usaha-usaha 'Aisyiyah dalam bidang tersebut terbukti tidak demikian ketinggalan.

Ketiga, selain ajaran al-Qur'an dan sunnah, ajaran-ajaran asuhan guru mursyid kita, KH. Ahmad Dahlan Rohimahu Allah, di Indonesia sungguh sangat berguna dan layak menjadi teladan. Beliau sejak pagi-pagi telah memberi pengajaran dan pendidikan kepada kita bukan saja dalam bidang agama akan tetapi dalam bidang usaha-usaha kemajuan duniawiyah pula.

Keempat, Madrasah Mu'alimat adalah hingga kini merupakan suatu perguruan kita yang masih dapat kita pertanggungjawabkan dalam tujuan menghasilkan pendidikan wanita Islam. Madrasah Mu'alimat sudah 40 tahun kita dirikan. Banyak benar sudah hasil madrasah yang tersiar dan berkembang sampai ke Merauke sebagai ibu keluarga yang utama, guru yang rajin, mubaligh yang patuh, pemimpin yang setia di samping sebagai pedagang yang *bonafid*, pengusaha yang produktif dan sarjana yang terpelajar tinggi, dan di samping sebagai muslimah yang taat.

Kelima, Indonesia kini telah menjadi suatu negara yang besar. Bangsa Indonesia pun suka atau tidak, telah harus menjadi bangsa yang besar. Dalam pada itu kaum muslimin dan muslimat harus pandai menempati kedudukan *culturil* yang sepadan di arena bangsa lain sesuai pula sebagai *khoiro ummat ukhrijat linnas*. Ke dalam (Indonesia) merdeka hendaknya jangan ketinggalan atau terdesak oleh lain-lain golongan.

Kesemuanya itu menghendaki umat Islam harus pula dapat menyelenggarakan tenaga ahli dalam bidang-bidang yang diperlukan. Kaum muslimat terutama kaum 'Aisyiyah yang sudah memiliki banyak-sedikit pengalaman-pengalaman dalam alam kemajuan kemasyarakatan dirasakan perlu menyelenggarakan

perguruan untuk ahli perempuan yang tetap gigih memegang teguh ajaran-ajaran Islam.

Keenam, tenaga ahli dari perempuan Islam dan juga sekarang diperlukan guru-guru menengah, dosen, dokter, dokter gigi, apoteker perempuan, sarjana hukum, pengacara, ahli-ahli seni yang tak keluar dari ajaran Islam, ahli sastra, pegawai negeri atau swasta, ahli sejarah, ahli ilmu bumi, ahli ekonomi, dan dagang dan perempuan diplomat dan lain-lain.

Untuk memenuhi calon-calon di atas, Madrasah Mu'alimat yang secara praktek dan kenyataan sudah dapat menyumbangkan tidak sedikit tenaga-tenaga dalam masyarakat kita, baiklah kita pelihara dan kita atur kembali dengan tujuan-tujuan baru dan rencana pelajarannya, dengan tidak meninggalkan adab dan kesusilaan Islam, baik dalam akhlak maupun pakaian yang sesuai dengan syarat-syarat pakaian Islam.

Keenam pemikiran tersebut mendasari Pak Kahar untuk menggagas sebuah perguruan tinggi yang diharapkan adalah suatu universitas perempuan berdasarkan Islam. Universitas ini dikemudian hari sebaiknya dikembangkan menjadi suatu universitas yang lengkap dalam bidang keahlian yang sesuai dengan sifat-sifat perempuan.

Pada waktu itu, Pak Kahar kemudian mengusulkan secara konkrit sebuah institut bernama Institut Ummul Mu'minin, dengan rencana program studi: 1 Pendidikan, untuk menyiapkan ahli pendidikan agama Islam, dakwah ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu masyarakat (*social sciences*); 2. Jurusan Sastra, menyiapkan ahli sastra dan bahasa Arab, Indonesia, bahasa daerah, bahasa-bahasa Afro-Asia dan bahasa-bahasa Barat; 3. Jurusan hukum, yang menyiapkan ahli-ahli hukum syariah dan negara; serta 4. Jurusan ekonomi, yang menyiapkan ahli ekonomi dan akuntansi.

Pemikiran ini, rupanya baru berhasil diwujudkan dalam bentuk sebuah universitas, dengan diresmikannya Universitas Aisyiyah Yogyakarta pada 10 Maret 2016, setelah melalui perjalanan panjang dari sebuah sekolah kebidanan, sekolah perawat, akademi dan sekolah tinggi ilmu kesehatan.[Ad-MB]



Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.

Lahir di Kudus, 2 September 1968.
Sekretaris PWM Jateng 2000-2002,
Ketua Umum PP Pemuda
Muhammadiyah 2002-2006, Advisor
The British Council London sejak 2006.
Sekretaris Majelis Dikdasmen PP
Muhammadiyah 2005-2010. Sekretaris
PP Muhammadiyah 2010-2015.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah
2015-2020.

ABDUL MU'TI

Dialog Antaragama Untuk Kedamaian Sejati

Di tengah pluralitas dan kompleksitas kehidupan global, dialog antaragama dan peradaban adalah sebuah keniscayaan. Kedamaian sejati akan terbangun manakala di dalam masyarakat tumbuh budaya toleran: bersikap positif terhadap perbedaan, bekerjasama untuk kemanusiaan dan mengakomodir mereka yang berbeda keyakinan. Budaya inilah yang dibutuhkan Indonesia sekarang dan masa depan.

Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. aktif dalam berbagai kegiatan seminar dan acara-acara nasional maupun internasional, khususnya yang berhubungan dengan persoalan yang menyangkut kerukunan umat beragama. Pikiran-pikirannya cukup cemerlang dan sering menjadi rujukan berbagai media.

Dalam sebuah diskusi tentang “Kebebasan Beragama, Gerakan Takfir dan Deradikalisasi”, dia mengatakan, menganggap orang atau kelompok lain sesat dan kemudian dianggap sebagai kafir merupakan salah satu bentuk dari kekerasan teologis. Implikasi dari kekerasan teologis itu kemudian diikuti dengan kekerasan-kekerasan fisik yang memang berdampak sangat serius terhadap kebebasan beragama bahkan juga dalam hubungannya dengan keamanan warga negara. Gerakan pengkafiran, lanjut Abdul Mu'ti, dapat dikategorikan sebagai *hatespeech* atau pembicaraan yang

tidak menyenangkan orang lain, walaupun argumennya adalah dalil-dalil agama. Sebab itu, penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan hukum, bukan pendekatan politik atau pendekatan teologis. “Kalau dia dengan pendekatan hukum maka tidak ada seorang warga pun warga negara yang kebal hukum,” tandasnya.

Abdul Mu'ti menambahkan, gerakan pengkafiran tidak hanya terjadi di penganut agama Islam, tetapi terjadi juga pada penganut agama lain. Dan gerakan ini muncul karena kecenderungan fundamentalisme agama dalam kehidupan global sekarang ini sangat kuat. Selain itu adanya sikap eksklusifisme dan perasaan yang paling benar sehingga menganggap yang lain itu seluruhnya salah. Selain itu, gejala ini semakin kuat karena persoalan keagamaan seringkali digunakan dan disalahgunakan untuk kepentingan popularitas politik. Sebab itu, negara tidak boleh tunduk kepada tekanan-tekanan kelompok mayoritas. Melainkan tunduk kepada hukum, dan sudah menjadi kewajiban negara untuk menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.

Dalam bukunya yang berjudul “*Inkulturasasi Islam: Menyemai Persaudaraan, Keadilan dan Emansipasi Kemanusiaan*”, Mu'ti menulis, kerukunan antar umat beragama masih rentang karena lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal, seperti peraturan tentang penyebaran agama, pendirian tempat ibadah, dan lain-lain. Bahkan, peraturan tersebut —dalam beberapa kasus— justru menjadi pemicu konflik ketika pelaksanaannya tidak adil. Kerukunan umat beragama masih bersifat mekanistik-prosedural, belum bersifat intrinsik-kultural. Belum tercipta budaya toleran.

Agar toleransi tidak menjadi slogan dan jargon politik semata, perlu dibangun budaya toleran. Kerukunan yang tumbuh dari dimensi dalam, *inner dimension of religion*. Hidup rukun dan toleran karena panggilan iman dan kemanusiaan. Ada tiga prinsip penting yang bisa dikembangkan sebagai fondasi dalam menumbuhkan dan membangun budaya toleran. *Pertama*, bersikap positif terhadap perbedaan keyakinan. Pluralitas keagamaan adalah *sunatullah*, sesuatu yang terjadi sesuai kehendak Tuhan. Berbeda agama adalah bagian dari *fitrah* atau *tabiat* manusia (Fathi Osman, 2006). Meniadakan perbedaan

adalah sesuatu yang mustahil. Diperlukan sikap positif untuk menerima perbedaan. Tidak sekedar menerima perbedaan sebagai koeksistensi sosiologis, tetapi memahami sumber-sumber perbedaan dan menerima mereka yang berbeda sebagai bagian integral masyarakat. Salah satu sumber konflik agama adalah ketika para pemeluk agama melihat orang lain sebagai *strangers, a menace* —monster yang mengerikan (Martin E Marty, 2005). Tidak perlu menyembunyikan agama sebagai identitas. Beragama adalah pilihan pribadi. Tetapi pengamalan dan ekspresi beragama membutuhkan ruang publik. Disinilah makna penting bersikap positif terhadap perbedaan.

Kedua, membangun tanggung jawab sosial bersama. Berbeda bukan berarti tidak bisa bekerjasama. Setiap agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling membantu sesama. Meskipun memiliki eksklusivitas teologis, agama memiliki universalitas misi kemanusiaan. Di dalam Islam, iman akan sempurna apabila disertai amal shalih: kebajikan yang bermanfaat untuk semesta. Keyakinan Kristiani yang teguh dan terbuka menumbuhkan kepedulian kepada “yang lain yang menderita” (Paul F Knitter, 2006). Tetapi, universalitas kemanusiaan ini juga bisa menjelma menjadi konflik ketika pertolongan kepada orang lain dilandasi oleh motif koversi: mengajak orang lain memeluk suatu agama.

Ketiga, memfasilitasi dan mengakomodir mereka yang berbeda, sehingga dapat beragama sesuai keyakinannya. Tidak ada dominasi mayoritas atas minoritas, atau tirani minoritas terhadap mayoritas. Relasi yang dibangun bukanlah “menang-kalah” atau “besar-kecil” tetapi kesetaraan dan penghormatan. Di dalam Piagam Madinah, semua komunitas —tanpa membedakan agama dan etnis— disebut sebagai “*ummat*”. Sebagai penghormatan terhadap tamu dan keyakinan. Nabi Muhammad mengizinkan kaum Nasrani Najran menunaikan shalat di masjidnya. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20/2003 menyebutkan siswa berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama. Ketentuan Sisdiknas ini adalah contoh bagaimana mengakomodir mereka yang berbeda keyakinan.*(IM)



ABDUL KARIM AMRULLAH

Umat Islam Harus Dicerdaskan dan Diberi Pendidikan yang Maju

Dr. Haji Abdul Karim Amrullah

Lahir dengan nama Muhammad Rasul di Nagari Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat 10 Februari 1879, wafat di Jakarta 2 Juni 1945. Dikenal juga sebagai Haji Rasul, adalah ulama terkemuka sekaligus reformis Islam di Indonesia. Pendiri Sumatera Thawalib, sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Memperoleh gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar, Kairo.

Ada tiga hal pokok persoalan yang menjadi pemikiran atau perhatian Abdul Karim Amrullah (AKA), yaitu persoalan keagamaan, pendidikan dan politik.

Dalam persoalan keagamaan, fokus perhatian beliau terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan praktek-praktek syirik, bid'ah, khurafat, takhayul dan taqlid, seperti persoalan lafal niat, qunut, talqin atas mayat di kuburan, kenduri kematian, upacara Barjanzi dan sejenisnya serta meribathahkan seorang guru atau Syekh. Dalam pandangan Abdul Karim Amrullah praktek-praktek upacara adat dan tradisi di atas tidak ada contoh dan perintahnya dari Nabi Muhammad saw. sehingga harus ditinggalkan dan harus diberantas.

Di bidang pendidikan, Abdul Karim Amrullah berpandangan bahwa umat Islam harus dicerdaskan dan diberi pendidikan yang maju. Dalam kepentingan gerakan pembaruan pendidikan, AKA mendukung dan merestui didirikannya perkumpulan "Sumatera Thawalib" oleh murid-muridnya yang dipimpin Hasyim al-Husni di Padang Panjang pada tahun 1918. Pada tahun 1920 AKA

memelopori berdirinya organisasi Persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) sekaligus menjadi ketuanya. Syaikh DR. H Abdul; Karim Amrullah, mendirikan Tabligh School di Kauman Padangpanjang pada tahun 1929, yang kepemimpinannya diserahkan kepada putranya Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA). Tabligh School kemudian berkembang menjadi Kulliyatul Muballighin Muhammadiyah Padangpanjang (KMM) pada tahun 1935. AKA menentang kebijakan pemerintahan Kolonial Belanda dalam masalah Ordonansi Sekolah Liar di Wilayah Minangkabau pada tahun 1932.

Dalam bidang politik, perjuangan AKA diwujudkan dalam bentuk penentangan terhadap berbagai Ordonansi dari pemerintah Kolonial Belanda. Sebagai dampak dari perjuangan politik tersebut, pada tahun 1941 sampai Maret 1942, AKA diasingkan ke Sukabumi, Jawa Barat karena dianggap sebagai tokoh yang berbahaya.

Di masa pendudukan Jepang, AKA diberi beberapa jabatan, antara lain sebagai penasehat Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), penasehat Pusat Kebudayaan, penasehat Syumubu dan anggota Pusat Pembantu Prajurit. Selain jabatan-jabatan tersebut, AKA juga diangkat sebagai guru latihan ulama seluruh Jawa yang diadakan MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia).

Meski pada masa-masa awal beberapa jabatan penting diterimanya dari pemerintahan Pendudukan Jepang, tapi setelah melihat penderitaan umat Islam di bawah penindasan Jepang, maka dia mulai bersikap keras. Tidak jarang dia juga bersikap kritis dan antipati terhadap tokoh-tokoh umat Islam yang sudi bekerja sama dengan Jepang. Sikap kritis dan antipatinya terhadap pemerintahan Pendudukan Jepang itu dipegangnya hingga dia wafat.

Selain memfokuskan pembaruannya pada tiga persoalan di atas, Abdul Karim Amrullah juga dikenal sebagai tokoh yang mempunyai peran besar dalam memelopori dunia penerbitan di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya dalam bentuk majalah dan buku-buku. Ada beberapa majalah yang terbit berkat perannya, antara lain majalah Al-Imam (terbit 1906) dipimpin

Muhammad Kalali. Selain itu, AKA juga mempunyai peran besar dalam penerbitan majalah al-Munir. Majalah ini diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 1911 di bawah pimpinan Haji Abdullah Ahmad. Di dalam majalah itu dia menjadi anggota redaksi yang bertugas menjawab persoalan-persoalan keislaman. Selanjutnya, ada dua majalah lagi yang turut dibidani penerbitannya, yaitu majalah Al-Ittafaq dan Almanak Lima Guna sebagai majalah PGAI (Persatuan Guru-guru Agama Islam).

Sejak tahun 1906 Abdul Karim Amrullah menetap di kampung halamannya, Sungai Batang Maninjau setelah kepulangannya yang kedua dari kota Makkah. Di kampung halamannya itulah dia mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam dengan nuansa yang baru kepada masyarakat. Berkat kemasyhurannya sebagai seorang pemuda yang cerdas dan putera dari Syekh Nan Tuo, maka berbondong-bondonglah orang belajar kepadanya. Dari bimbingannya kemudian lahir murid-muridnya, antara lain Abdul Hamid Hakim, Zainuddin Labai El Yunusi, Haji Abbas Datuk Tunaro, H. Yusuf Amrullah, A.R. Sutan Mansyur, Haji Jalaluddin Thaib, Haji Mukhtar Luthfi, Hasim El Husni, Adam Balai-Balai, Rahman El Yunusiyah, Rasuna Said, HAMKA (putranya sendiri) dan lain-lain. [Ad]

Buku karya Buya Dr. H. Abdul Karim Amrullah antara lain adalah:

1. 'Amdatul Anam fi Ilmil Kalam (1908);
2. Qatthi'u Riqabil Mulhidin (1910);
3. Syamsul Hidayat (1912);
4. Sullamul Ushul (1914);
5. Aiqazum Niam (1916);
6. Alfawa'dul 'Aliyah (1916);
7. Mursyidit Tudjar (1916);
8. Pertimbangan Adat Minangkabau (1918);
9. Dinullah (1918);
10. Pembuka Mata (1919);
11. Al-Ifsah (1919);
12. Sendi Aman Tiang Selamat (2 Jilid) (1922);
13. Al Burhan -Tafsir Jus Amma (1922);
14. Kitabur Rahmah (1922);
15. Al-Qaulush Shahih - bantahan atas Ahmadiyah (1923);
16. Cermin Terus (1928);
17. Annida (1929);
18. Pelita (2 jilid) (1930-1931);
19. Pedoman Guru (1930);
20. Al-Faraidh (1032);
21. Al-Bashair (1938);
22. Al-Misbah (1938);
23. Asy-Syir'ah (1938);
24. Al-Kawakibud Durriyah (1940);
25. Hanya Allah (1943);
26. Al-Ihsan; dan
27. Membantah Islam dan Kebangsaan.

ABDULLAH TJAN HOATSENG

Dakwah Islam untuk Menentang Penjajah Belanda



H. Abdullah Tjan Hoatseng.
Lahir di Tobelo Maluku Utara, 14
Juni 1877, wafat 4 Juli 1970.
Ketua Muhammadiyah Galela
Halmahera Utara (1928), Perintis
Muhammadiyah Tobelo (1930).
Imam (pemimpin Agama Islam)
di Tobelo.

H. Abdullah Tjan atau H. Abdullah Tjan Hoatseng dilahirkan pada 14 Juni 1877 di Tobelo, Maluku Utara. Ia adalah sosok Tionghoa dari keluarga Tjan dan keturunan kelima yang memeluk agama Islam. Eksistensinya sebagai seorang Tionghoa-Muslim yang minoritas tidak mengurangi kepiawaiannya dalam berdakwah terutama wilayah Halmahera Utara kala itu menjadi ladang penginjilan bagi *zending*. Alhasil, Abdullah Tjan adalah seorang pendakwah *cum* jihadis Qur'an dan Hadis.

Halmahera Utara menjadi ladang penginjilan oleh *Utrechtsrhe Zending Venreniging (UZV)* sejak terjadi gempa bumi 22 Mei 1864 dipimpin oleh Pdt. Hoveker. UZV sebelumnya beroperasi di Irian Barat Pdt. Van Dijken, Pdt. de Bode mengabdikan diri ke Galela pada 1865 dan Pdt. van Been mulai bertugas di Tobelo pada 1871. Namun tempat tinggal Tjan, kampung Gamsung adalah tempat yang paling sulit ditembus. Tjan pun pada akhirnya menjadi sosok alim ulama yang mampu membendung pengaruh *zending*.

Abdullah Tjan pun resmi mendapatkan amanah menjadi Imam atau alim ulama di Tobelo. Ia mulai gencar menghidupkan kegiatan keagamaan. Tidak sekedar berdakwah namun juga merawat dan mengembangkan tempat ibadah dan kajian keislaman seperti masjid dan mushola. Ramadhan di Tobelo pun menjadi semarak berkat keuletannya membimbing umat Islam disana. Alhasil, kultur Islam pun kembali hidup dan menyala-nyala disana.

Abdullah Tjan sebenarnya sudah menjadi ketua Muhammadiyah Halmahera Utara di Galela (1928) namun karena kepentingan dakwah yang lebih luas, ia pun berusaha sekuat tenaga merintis Muhammadiyah di Tobelo. Permohonan izin untuk membawa sinar surya ke Tobelo ditolak oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda. Namun, akal tak habis karena ia akhirnya mendirikan Persatuan Islam Tobelo (Persit), sebuah organisasi Islam dengan nuansa Muhammadiyah (karena sejatinya memang Muhammadiyah). Abdullah Tjan melaporkan sikap Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda kepada Pengurus Besar Muhammadiyah di Yogyakarta. PB Muhammadiyah akhirnya mengizinkan pendirian Muhammadiyah Tobelo tanpa izin, hal itulah yang membuat Tjan semakin bersemangat dalam beramar maruf nahi munkar.

Rintangan pun banyak dihadapi oleh Abdullah Tjan baik sebagai seorang minoritas Tionghoa-Muslim dan sebagai pengurus Muhammadiyah Tobelo. Semangat tuntutan ilmu walau sampai negeri Tiongkok membuatnya bersemangat dalam berdakwah karena asal usul Tionghoa yang dipandang sebagai suatu episentrum turut membuat dirinya harus bermanfaat bagi umat Islam dan sesama manusia. Muhammadiyah pun berkembang sangat pesat di Tobelo dan Madrasah Muhammadiyah pun juga berdiri di sana.

Misi *Zending* (Kristen) yang merasa “lahan dakwahnya” diambil alih oleh Muhammadiyah melakukan aksi-aksi untuk memblokir dakwah Islam. Aksi-aksi tersebut awalnya hampir berhasil karena keadaan umat Islam di Tobelo masih belum sejahtera dan butuh uluran materi untuk menyambung hidup, disitulah *Zending*

beraksi. Abdullah Tjan pun tak kehabisan akal, ia bersama Mohammad Amal (Imam Galela), Humar Djama (Imam Morotai), dan Amly Sidik (Imam Kao) membentuk Imam Permusyawaratan Onderafdeling Tobelo (IPOT) untuk menjaga dakwah Islam di sana. Peranan Abdullah Tjan sebagai tokoh Muhammadiyah jelas menjadi bumerang bagi misi *Zending* sehingga pembunuhan karakter pun dilakukan untuk mencegah Abdullah Tjan dan kawan-kawan berkuasa dalam dakwah namun pada akhirnya gagal juga.

Abdullah Tjan adalah sosok multitalenta yang kuat dilapangan namun gagah dalam bersidang. Ia selalu mengalahkan argumentasi pendeta-pendeta *Zending* yang ingin mengalahkannya baik sebagai sesama pengkabar langit maupun sebagai pribadi. Ia juga kerap diserang oleh bangsanya sendiri yaitu para hakim Sya'ra di Ternate namun dilindungi oleh Sultan Ternate karena kebaikan dan kecerdasannya. Ketangkasan Tjan dalam masalah administrasi juga membuatnya dipercaya sebagai staf KUA di Maluku, meski demikian ia tetap menjadi Imam Tobelo dan semakin giat berdakwah terutama selepas menunaikan ibadah haji. [eMBe]

AR SUTAN MANSUR

Muhammadiyah ini adalah gerakan iman, sekarang kita nyatakan lagi; Muhammadiyah adalah gerakan iman dan tetap gerakan iman”.



Buya Ahmad Rasyid Sutan Mansur, atau dikenal AR Sutan Mansur. Lahir di Maninjau, Sumatera Barat 15 Desember 1895, wafat 25 Maret 1985. Ketua Umum PP Muhammadiyah (1953-1959)

Masa kepemimpinannya Buya AR Sutan Mansur (1953-1959) tercatat berhasil merumuskan khittah (garis perjuangan) Muhammadiyah. Mencakup tentang usaha-usaha menanamkan dan mempertebal jiwa tauhid, menyempurnakan ibadah dengan khusyuk dan tawadlu, mempertinggi akhlak, memperluas ilmu pengetahuan, menggerakkan organisasi dengan penuh tanggung jawab, memberikan contoh dan suri tauladan kepada umat, konsolidasi administrasi, mempertinggi kualitas sumber daya manusia, serta membentuk kader handal.

Kecintaan beliau terhadap Muhammadiyah tidak pudar terbawa arus jaman dan usia. Ketika tidak lagi menjadi Ketua PP Muhammadiyah, beliau menjadi penasehat PP Muhammadiyah sampai beliau wafat. Pada saat serah terima Ketua PB Muhammadiyah dari Ki Bagus Hadikusumo kepada AR Sutan Mansur, dia menyampaikan, kalau kita menengok ke belakang, tampaklah bahwa telah jauh perjalanan yang ditempuh oleh pergerakan Muhammadiyah ini, dia telah mempunyai pengalaman dalam zaman penjajahan Barat dan Timur; Muhammadiyah sekarang ibarat kapal yang tengah mengalami pelayaran di lautan negara merdeka dan akan terus melayari lautan persatuan bangsa-

bangsa di dunia. Siapa tahu ditengah pelayaran yang begitu jauhnya akan melewati ombak-gelombang yang menggunung tinggi yang badainya mengancam keselamatan.

Siapakah yang dapat menjamin keselamatan kapal ini dalam pelayarannya itu? Saya hanya dapat berkata; *La Haula wala quwwata illa billahil aliyil adhim*. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan, selain perlindungan dan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar, dan perlindungan serta pertolongannya itu diletakkannya dalam syarat yang berujud “Iman” di dalam dada hamba-Nya. Iman yang tinggi nilainya, yakni iman yang aktif yaitu melahirkan sifatnya, bukan iman yang pasif, yaitu iman yang tidur atau lemah.

Sebagaimana di masa yang lalu kita nyatakan bahwa: Muhammadiyah ini adalah gerakan iman, sekarang kita nyatakan lagi; Muhammadiyah adalah gerakan iman dan tetap gerakan iman. Allah SwT menetapkan: siapa yang beriman kepada Allah, maka orang itulah yang diberi petunjuk hatinya, sebaliknya siapa yang tidak iman atau ragu, akan digelapkan cahaya dihadapannya. Digelapkan perasaan dan pikirannya, dan langsung terjun menuju jurang kesengsaraan yang dalam; jurang kesengsaraan karena kemurkaan Ilahi; siapa yang akan membela, kalau Allah SwT telah marah, siapa yang akan menghinakan kalau Allah cinta padanya. Demikianlah yang telah sama-sama kita yakini dan sama-sama kita rasakan dalam perjalanan kita yang begitu lama.

Sekarang ini, Muhammadiyah terus melangkah menuju keridhoan Ilahi dengan memegang sinar hidayat yang diamanatkan kepada kita sekalian dan kepada seluruh hamba-Nya yang percaya dengan mengikuti jejak utusan Allah nabi besar Muhammad saw. Keridhoannya kita mohon, ampunan kita sembahkan, pintu taubat kita masuki, dan itulah jalan yang wajib ditempuh oleh orang-orang Mukmin.

Untuk itu, menurut AR Sutan Mansur, kita harus melatih diri dengan beberapa sifat, diantaranya sebagai berikut:

1. Usahakan merebut “*khasyah*” yaitu takut kepada kemurkaan Allah SwT, yang disebut juga dengan takwa. Hendaklah sifat

'*khasyah*' itu direbut, ditanam dalam hati, dalam perasaan dan dalam pikiran dan laksanakan wasiat-mewasiati, memegang teguh takwa itu walaupun terhadap Ketua Umum dari Pusat Pimpinan, walaupun kita adalah anggota Ranting yang jauh di daerah.

2. Rebut waktu. Artinya, janganlah waktu itu dibiarkan berlalu, tidak dimanfaatkan, sebab berbagai peristiwa itu terjadi dalam waktu, kalau waktunya sudah pergi, maka peristiwa (kejadian) itupun turut pergi, dan datang waktu yang baru membawa kejadian baru yang harus dikerjakan pula.
3. *Wifa'bil'adhi*, artinya penuhi janji. Orang yang memenuhi janji adalah orang yang menempuh jalan hidup mendekatkan diri kepada Allah, dan mengharap keridhoan-Nya. Tuhan ridlo kepada mereka, dan mereka ridlo kepada Tuhan-Nya. Perbuatan pengingkaran janji adalah perbuatan yang sangat berbahaya, dia menjatuhkan harga diri, menghilangkan izzah, membinasakan nilai jiwa, dan Tuhan akan memberikan ganjaran kepada si pengingkar janji dengan hidup menderita dibawah kendali musuhnya. Berhati-hatilah dalam membuat janji, dan pikirkan baik dan buruknya.
4. Tanamkan jiwa tauhid. Adapun ilmu tauhid hanyalah alat untuk mengetahui. Dalam mengetahui 'Tauhid' usahakan melatih jiwa tauhid itu di dalam diri, hingga jiwa tauhid itu menjadi permata dalam alam pikiran dan alam perasaan.
5. Singkirkan tauhid yang bersifat kulit bukan isi. Yang pertama, kedua dan ketiga jalankan dengan Istiqomah, yang keempat dan kelima ambillah menjadi pedoman dan pelajaran, pengajian dan kursus hingga melahirkan kualitas yang baik.

Ditengah kesibukannya sebagai pengurus puncak kepemimpinan Muhammadiyah dan dakwah, AR Sutan Mansur juga memanfaatkan kesempatan untuk menulis buku dan artikel-artikel, antara lain; *Jihad, Seruan Kepada Kehidupan Baru, Tauhid Membentuk Kepribadian Muslim dan Ruh Islam.*(im)**

ASJMUNI ABDURRAHMAN

Pak Asjmuni merupakan seorang tokoh tua yang dapat menjembatani pemikiran-pemikiran yang muncul dari kalangan muda. Selama ini, ada kesan masing-masing pihak merasa benar (truth claim). Beliau lebih menekankan aspek akademis daripada ideologis. Ketika melihat pemikiran-pemikiran yang muncul di kalangan muda, beliau menganggap itu sebagai loncatan pemikiran. Menurut beliau, kalangan muda terlalu mudahmewacanakan tapi tidak didukung kerangka metodologis yang kuat alias penguasaan terhadap turath kurang memadai.
(Munawwar Khalil, M.Ag.)



Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman.
Lahir di Yogyakarta 10 Desember 1931, Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah 1990-1995. Anggota PP Muhammadiyah Koordinator Bidang Tabligh dan Tarjih 1995-2005. Penasehat PP Muhammadiyah 2005-sekarang. Ketua MUI DIY 1995-2000. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI 1995-2000, Ketua Bidang Fatwa MUI 2000-2005, Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan MUI 2005-2010. Mantan Ketua Dewan Syariah Nasional. Mantan Ketua Dewan Pengawas BRI Syariah.

Pengisi rubrik Tanya Jawab Agama Islam Harian Kedaulatan Rakyat sejak 1996 ini merupakan tokoh fikih kontemporer dan penulis yang produktif. Lulusan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah ini pernah menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY 1975-1995 dan Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa serta Bidang Hukum dan Perundang-Undangan. Pribadi yang dibesarkan dalam lingkungan Muhammadiyah itu pada tahun 1970-1975 menjadi anggota Majelis Tabligh PP Muhammadiyah.

Semasa kepemimpinan beliau sebagai Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah 1990-1995, muncul pemikiran perlunya penentuan hukum Islam terhadap masalah-masalah kontemporer seperti masalah bayi tabung, pencangkokan jantung, keluarga berencana, emansipasi wanita, dan lainnya.

Sebagai akademisi dan santri "*wetan Kali Opak*" beliau merupakan pribadi yang produktif dengan menghasilkan buku-buku antara lain; *Qaidah Fikih* (1976); *Pengantar Kepada Ijtihad* (1978); *Kedudukan Adat Kebiasaan dalam Hukum Islam* (1982); *Pencangkokan dalam Sorotan Hukum Islam* (1982); *Hukum Syar'i dan Pembagiannya* (1983); *Metoda Penetapan Hukum Islam* (1986); *Ushul Fikih Syiah, Sejarah Peradilan di Indonesia; Sholat Berjama'ah* (2003); *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi* (2005); *Memahami Makna Tekstual, Kontekstual dan Liberal* (2005); *Mahkamah Konstitusi Sejarah, Tugas, wewenang dan Strukturnya, Badan Arbitrase Syari'ah Nasional* (2005).

Dalam berbagai tulisannya, beliau merespon berbagai masalah seperti masalah Bank Syari'ah, Virus HIV/AIDS, liberalism. Kini memang diperlukan Bank Islam yang dikelola secara profesional dan itu sudah menjadi kebutuhan umat. Mengenai penyakit HIV/AIDS, beliau menyatakan dalam makalahnya berjudul "*Transplantasi (Pencangkokan Organ) dalam Sorotan Hukum Islam*". Dalam makalah yang disampaikan pada Mukhtamar Tarjih di Klaten tahun 1980 itu, beliau menyatakan: *Hukum melakukan pencangkokan dengan tujuan pengobatan, yang kalau tidak dilakukan akan membahayakan jiwa pasien, ialah mubah, karena darurat. Hukum pencangkokan dengan tujuan pengobatan cacat badan seperti dimasukkan darurat, kaenasangat dihajatkan untuk tidak menimbulkan komplikasi kejiwaan, maka hukumnya juga mubah*".

Pribadi yang santun, sederhana, dan rendah hati itu dalam berbagai kesempatan, melontarkan gagasan agar Majelis Tarjih PP Muhammadiyah memunculkan Putusan Tarjih pada masalah-masalah kontemporer. Putusan ini akan menjadi fikih dalam bidang tertentu, misalnya fikih lingkungan, fikih informasi, fikih air, fikih bencana dan lainnya. [Lasa Hs]



Ki Bagus Hadikusumo. Lahir di Yogyakarta, 24 November 1890, wafat di Jakarta, 4 November 1954. Ketua PP Muhammadiyah (1942-1953). Anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Mei-Juli 1945.

KI BAGUS HADIKUSUMO

Masyarakat Islam Memberi Perlindungan dan Jaminan Kemerdekaan Beragama

“...kalau pemerintah dengan kehendak sendiri, sehingga melanggar undang-undang, apalagi agama, kami akan memprotes menurut saluran yang sah.

Kami akan sampaikan protes itu dengan perantaraan wakil-wakil di parlemen yang telah kami pilih. Kami akan sampaikan dengan surat, melalui surat kabar atau dengan pembicaraan. Menegur kesalahan adalah kewajiban bagi kami”.

Putra Kauman Yogyakarta ini telah mewariskan pemikiran dan sumbangsih bagi Islam, Muhammadiyah, dan Negara. Sebagai tokoh pemikiran Islam di Indonesia, beliau berpikir bercorak neo-sufistik, rasional, dan selalu menggunakan referensi Al-Quran dan as Sunah. Santri KHA Dahlan ini pada periode awal Muhammadiyah sudah menjadi aktivis Persyarikatan, antara lain terpilih menjadi Ketua Majelis Tarjih pada tahun 1922 dan 1926, sebagai anggota Komisi MPM *Hoofdbestuur* Muhammadiyah (1926), dan Ketua PP Muhammadiyah tahun 1942-1953.

Ki Bagus dikenal sangat produktif menulis, pada tahun 1925 telah menerbitkan 14 jilid buku, yang didukung oleh kemampuan berbahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Dengan kemampuan ini beliau mengenal dan memperdalam pemikiran-pemikiran Muhammad ‘Abduh, Rasyid Ridha, Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rusyd dan lainnya.

Pada tahun 1938, Ki Bagus menjadi salah satu tokoh pendiri Partai Islam Indonesia (PII). Pada tanggal 7 November 1945, Muhammadiyah di bawah kepemimpinan beliau menjadi teras pembentukan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) sebagai satu-satunya partai umat Islam saat itu. Ki Bagus dipercaya sebagai wakil ketua Masyumi sampai tahun 1950.

Andil beliau pada kelahiran NKRI cukup besar sehingga beliau diakui sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 116/TK/2015 tanggal 4 Nopember 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Peran yang dimainkan pada awal kemerdekaan RI antara lain bahwa beliau sebagai anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Di bulan Juni 1945, Bung Karno mengemukakan konsep dasar negara. Dalam konsep itu beliau mengusulkan “Ketuhanan” di bagian akhir dari dasar negara. Ki Bagus mengusulkan agar kata “Ketuhanan” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan diletakkan di bagian pertama dasar negara. Usulan ini akhirnya diterima dan ini merupakan keberhasilan diplomasi tokoh Muhammadiyah. Dengan bahasa lain dapat dipahami bahwa Muhammadiyah ikut mendirikan NKRI ini yang merupakan rumah besar bangsa Indonesia, sebagai *Darul ‘Ahdi wasy Syahadah*.

Pada masa pendudukan Jepang, umat Islam dan Muhammadiyah mengalami tekanan terutama dalam akidah. Jepang saat itu ingin merubah ketauhidan menjadi kemusyrikan dengan cara menghadap ke timur menyembah matahari. Untuk mengatasi kondisi ini, Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Ki Bagus membentuk mubaligh/da’i yang dikirim ke seluruh pelosok Jawa dan Madura untuk menguatkan akidah, memotivasi amal shaleh, dan menyemangati perjuangan melawan ketidakadilan dan kebatilan.

Percik Pemikiran

Menurut Ki Bagus, inti ajaran Islam adalah “Tauhid”. Kekuasaan mutlak dari Tuhan yang Maha Esa, tidak bersekutu dengan yang lain. Tidak ada tempat makhluk takut selain dia. Tidak ada tempat

berlindung, tidak ada yang disembah dan dipuja, tidak ada tempat memohon selain dia. Hidup di dunia ini adalah nikmat pemberiannya, supaya hidup ini dipergunakan untuk berbakti kepada-Nya. Maka bebas merdekalah jiwa raga dari pengaruh segala sesuatu selain Allah. Yang selain Allah adalah alam belaka. Percaya kepada yang ghaib, percaya adanya malaikat, jin ataupun syaitan dan percaya juga akan adanya ruh manusia, baik semasa ruh itu masih bersatu dengan badannya ataupun sesudah di mati. Tetapi segenap yang ghaib itupun tidak berkuasa apa-apa, yang Maha Kuasa hanya Allah SwT.

Lantaran ajaran itu manusiapun sadar, walaupun jasmaninya terbuat dari tanah dan air yang lemah dan tidak berkuasa, kembali menjadi kuat dan tahu akan nilai hidupnya. Sebab itu, hendaklah anggota Muhammadiyah memperdalam tumbuhnya akidah itu dan melatih diri, agar amal perbuatan muncul dari akidahnya. Agama Islam bukanlah semata-mata mengenai sholat, zakat, puasa dan haji. Islam meliputi segenap segi dari kehidupan, meliputi soal-soal kemasyarakatan (sosial) dan juga kenegaraan.

Karena itu, Ki Bagus berkata bahwa, terhadap semua bangsa kami ingin hidup berdampingan dengan baik, berlomba berbuat kebajikan untuk dipersembahkan kepada tanah air. Terhadap pemeluk agama lain, terutama Kristen, Katholik dan Protestan, dengan kesaksian Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad saw, kami menyebut mereka "ahli kitab". Jika keinginan kami menjadi kenyataan, yakni tercapainya masyarakat Islam, kami sebagai Muslim akan terhitung umat yang fasik dan dholim kalau kami tidak memberikan perlindungan bagi mereka didalam keyakinan agamanya. Bukan saja dijamin, bahkan kami mendapat perintah dari Tuhan, supaya memerintahkan orang Kristen yang hidup dalam masyarakat Islam, memegang teguh agamanya.

Ki Bagus memiliki visi kenegarawanan yang kuat. Kecenderungan terhadap nilai-nilai ke-Islaman juga nampak dalam berbagai aktivitas politiknya. Bagi Ki Bagus, pelembagaan Islam menjadi sangat penting untuk alasan-alasan ideologi, politis dan intelektual. Diapun mengatakan, terhadap partai-partai politik yang berjuang untuk kebahagiaan Indonesia dan membela kemerdekaan, kami menyatakan rasa hormat sesuai dengan

jasanya. Tetapi terhadap partai-partai yang menganjurkan tidak percaya kepada Tuhan, walaupun pada kulitnya menganjurkan kemakmuran rakyat, kami tetap tidak dapat menerimanya. Dan kami berkeyakinan, bahwa apabila Tuhan telah dihinakan atau ditentang, maka kuasa Tuhan akan bertambah kuat di bumi. Dan pamornya akan tetap berkuasa. Dan akan muncul umat-umatnya yang terpilih untuk mempertahankannya.

Terhadap perjuangan partai politik, Ki Bagus mengatakan, Muhammadiyah tetap memegang tradisi yang lama — Muhammadiyah tidak akan kami jadikan partai politik— Dalam keyakinan kami, perjuangan politik hendaklah dilaksanakan di dalam satu front Muslimin Indonesia yang teguh dan kompak. Pada keyakinan kami, cita-cita politik kita kaum Muslimin Indonesia hanya satu —Kalau ada kelemahan kaum Muslimin Indonesia, tidak lain sebabnya hanyalah karena perpecahan— Dan penyebab perpecahan bila dikaji secara ilmiah sebenarnya tidak ada, kecuali dibuat-buat, baik oleh kaum Muslimin sendiri, atau oleh orang luar.

Dalam pada itu, kami tetap mengharap hidayah Ilahi, semoga tercapailah perdamaian dan kesatuan langkah, dalam menghadapi zaman yang akan datang, dengan mengambil pelajaran dan pengalaman yang sudah-sudah, kami bersedia mengulurkan tangan, dan bersedia menjadi landasan atau menjadi sendi yang tidak nampak dalam usaha itu. Cuma, dalam perjuangan politik pada awalnya kejujuranlah yang kalah dan kecuranganlah yang menang. Tetapi akibat dari itu, menurut sejarah adalah salah satu dari dua; pertama, mendalamnya rasa dengan yang teraniaya dan munculnya saat pembalasan. Kedua, kehancuran negara itu karena datangnya kutuk, laknat Ilahi. Tidak ada yang kami maksudkan dengan perkataan ini. Semua kita dapat mengetahui dan mengukur diri sendiri. Kalau kami hendak memberi nasehat “jujurlah”. Jangan curang! Maka yang lebih dahulu akan kami nasehati itu ialah kami sendiri: “Wahai saudara, warga Muhammadiyah! Jujurlah!

Terhadap pemerintah Republik Indonesia, sejak dari Presidennya, wakil Presidennya, sampai kepada kabinetnya dengan silih berganti kami akan tetap jujur. Kami akan taat kepada

pemerintahan yang benar. Kami sadar akan kewajiban kami, sebab kami tahu akan hak kami.

Pemerintah dalam bentuk demokrasi seperti sekarang, terdiri dari eksekutif dan legislatif dan mempunyai undang-undang hasil musyawarah bersama, itulah yang dijalankan, itu wajib kita taati selama mereka masih berjalan menurut undang-undang. Itulah dia ulil ‘amri. Ulil ‘amri sebagaimana di zaman chalif yang memerintah “atas nama Allah”, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri, tidaklah dapat kami terima. Ulil ‘amri semacam itulah yang telah meruntuhkan Islam. Jadi kami berkeyakinan, bahwa ulil ‘amri dalam Republik Indonesia ialah kepala negara atau wakilnya, parlemen dan kabinet. Tetapi, oleh karena negara Republik Indonesia ini belum satu negara Islam, baru satu negara nasional, kami rasa baiklah kita jangan terlanjur memakai etika ke-Islaman di dalamnya. Apalagi kata-kata yang berat seperti itu. Hal itu dapat sama-sama kita pahami.

Maka kepada pemerintah, demikian kami Muhammadiyah akan taat, selama masih berjalan menurut undang-undang. Walaupun di dalamnya duduk partai-partai Islam atau tidak duduk sekalipun. Dan, kalau pemerintah melanggar undang-undang, apalagi agama, kami akan memprotes menurut saluran yang sah. Kami akan sampaikan protes itu dengan perantaraan wakil-wakil di parlemen yang telah kami pilih. Kami akan sampaikan dengan surat, melalui surat kabar atau dengan pembicaraan. Menegur kesalahan adalah kewajiban bagi kami. Baik dalam pemerintahan yang tidak ada wakil-wakil partai Islam atau yang duduk sekalipun. Sebab pemegang pemerintahan itu adalah dari kita untuk kita. Merekapun manusia seperti kita, dapat salah dan khilaf. Sahabatmu yang sebenarnya adalah yang berkata benar kepadamu, bukan yang membenar-benarkan katamu.

Karya-karya Ki Bagus Hadikusumo, antara lain: *Islam Sebagai Dasar Negara, Achlaq Pemimpin, Risalah Katresnan Djati* (1935), *Poestaka Hadi* (1936), *Poestaka Islam* (1940), *Poestaka Ichsan* (1941), *Poestaka Iman* (1954). [im-Ls]



BAKRI SYAHID

Membumikan Islam dengan Tafsir Al-Qur'an Bahasa Jawa

Brigjen TNI (Purn.) Drs. H. Bakri Syahid
Rektor pertama Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (1981-) dan
Rektor ke-4 UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (1972-1976).

Salah satu hal yang seringkali menjadi permasalahan dalam memahami Al Qur'an adalah kendala bahasa. Baik bahasa Al-Qur'an itu sendiri yaitu Bahasa Arab, ataupun tersedianya tafsir dan terjemahnya yang menggunakan bahasa yang tidak dan belum memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Hal itu pula yang melatarbelakangi Bakri Syahid untuk menyusun kitab Tafsir Al-Huda, setelah mendapatkan keluhan masyarakat Jawa yang merantau ke berbagai daerah, sulitnya mendapatkan al-Qur'an berbahasa Jawa dengan huruf latin disertai tuntunan membaca dan keterangan penting penjelasan maknanya.

Penyusunan kitab Tafsir Al Huda, tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan beliau. Dasar-dasar pendidikan agama yang kuat telah diperolehnya dari kecil di kampung Suronatan, kemudian terasah ketika melanjutkan studinya di *Kweekschool Islam Muhammadiyah* (Madrasah Mu'alimin). Lulus tahun 1935 ditugaskan menjadi guru di H.I.S. Muhammadiyah Sepanjang, Sidoarjo sambil berdakwah. Tugas ini dijalani beliau beberapa tahun sebelum dikirim bertugas ke Sekayu Bengkulu. Tahun 1942 diangkat menjadi Kepala Pusroh TNI AD di Jakarta. Tahun 1957 melanjutkan pendidikan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun

1963. Tahun 1964, ditugaskan oleh Jenderal A. Yani untuk mengikuti pendidikan militer di Fort Hamilton, New York, Amerika Serikat.

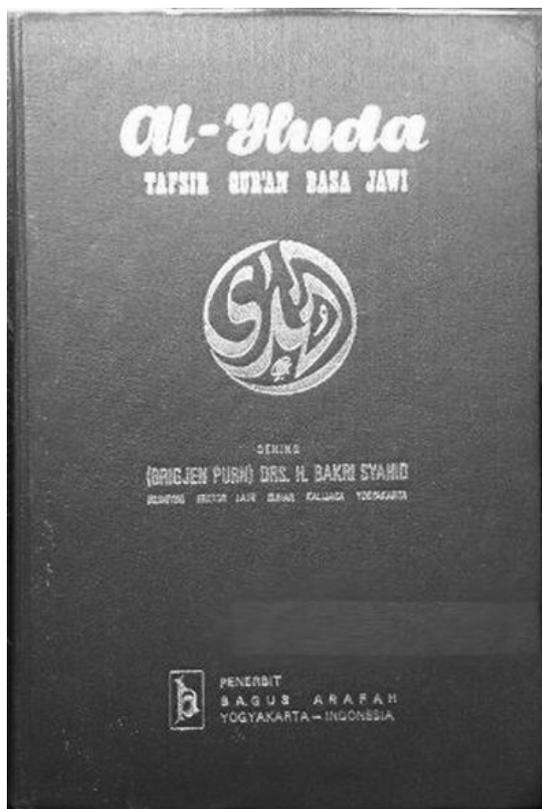
Tafsir Al Huda diperkirakan dibuat semenjak bekerja menjadi Asisten Sekretaris Negara Bidang Khusus pada tahun 1970 sampai beliau menjabat sebagai Rektor IAIN Sunan Kalijaga (1972-1976). Gagasan penyusunan tafsir ini muncul ketika Bakri Syahid menjadi utusan Indonesia dalam sarasehan para pemuka agama dari berbagai negara di kediaman pembesar Syeikh Saudi Arabia yaitu Syeikh Abdulmanan. Pada kesempatan itu, beliau bertemu dengan sahabat dan rekan kerja dari Jakarta sendiri, dari daerah-daerah transmigrasi, jamaah haji tahun 1955 dan 1971, juga masyarakat Jawa yang tinggal di Suriname, Singapura, Thailand, Philipina. Tafsir setebal 1376 halaman telah dicetak ulang sebanyak 8 kali dengan oplah setiap cetak antara 1000-2000an jilid, terakhir tahun 1994 setelah Bakri Syahid wafat.

Tafsir Al Huda memuat 114 surat dalam 30 juz dalam AL Qur'an. Penyajiannya sesuai sistematika penulisan al Qur'an mushaf Usmani, diawali surat al Fatihah diakhiri surat An Nas. Setiap surat diawali dengan penulisan identitas surat meliputi nama surat, nomor urut surat, jumlah ayat, kelompok turunnya surat (Makkiyah/Madaniyyah), dan urutan surat dalam proses turunnya. Dilanjutkan dengan teks ayat al Qur'an dalam bahasa dan huruf Arab, transliterasi ayat ke huruf Latin, terjemahan ayat ke dalam bahasa Jawa huruf Latin, dilengkapi keterangan atau penjelasan makna ayat dengan Bahasa Jawa huruf Latin sebagai catatan kaki. Pada akhir surat, dilengkapi pembahasan hubungan kandungan surat sebelumnya dengan surat sesudahnya.

Bakri Syahid, dalam upayanya memberikan pemahaman yang betul-betul membumi sehingga dapat dipahami oleh pembaca khususnya orang Jawa, dan orang Indonesia pada umumnya juga banyak menggunakan sumber rujukan. Rujukan itu dapat berupa buku ataupun tulisan. Selain al Qur'an sendiri juga tafsir al Qur'an oleh berbagai mufasir, buku tentang kebudayaan Jawa dan *serat*, buku-buku ilmu agama, buku-buku ilmu negara, baik yang berbahasa lokal, nasional, ataupun asing.

Di bagian akhir pembahasan seluruh al Qur'an, dilengkapi doa khatam al Qur'an dan lampiran dengan judul *Katarangan Sawatawis Ingkang Wigatos Murakabi* terdiri dari enam bab. Bab pertama membahas tentang kitab suci Al Qur'an, bab kedua tentang rukun Islam. Bab ketiga tentang rukun Iman, bab keempat tentang *safaat*, bab kelima tentang *al-birru (kabecikan)*, dan keenam tentang *hayuning bawana* sebagai kata penutup penulis.

Kehebatan Bakri Syahid, dengan latar belakang militer tetapi mampu menghasilkan kitab tafsir Al Qur'an yang mampu menjawab ke Gundahan pembaca Al Qur'an yang tidak mampu membaca dan berbahasa Arab tetapi dapat memahami bahkan memahami dengan budaya mereka sendiri yaitu Jawa khususnya atau Indonesia secara umum. Jika dibalik, pemahaman al Qur'an dengan budaya dan pola berpikir Jawa-Indonesia akan lebih mudah untuk "membumikan" al Qur'an itu sendiri sebagai pedoman berIslam yang *rahmatan lil alamin*. [Ris]



Diantara karya **Brigjen TNI Purn. Bakri Syahid**:
1. Al-Huda Tafsir Qur'an Bahasa Jawi. Penerbit Bagus Arafah Yogyakarta,
2. Tata Negara R.I., 3. Pertahanan Keamanan Nasional, 4. Ilmu Kewiraan, 5. Ideologi Negara Pancasila, 6. Ilmu Jiwa Sosial, 7. Kitab Fiqih, dan 8. Kitab 'Aqid.

DAUZAN FAROOK

Pahlawan Literasi di Atas Putaran Roda Sepeda

"Siapa saja dapat menjadi Penggerak literasi"

"Saya terpanggil untuk terjun ke medan perjuangan membela tanah air lewat jalur pendidikan, yaitu mendirikan perpustakaan keliling Mabulir (majalah buku bergilir)"

"Kalau dulu saya menjadi pejuang mengangkat senjata untuk membela negeri tercinta ini, maka sekarang saya 'mengangkat' buku dan majalah bekas yang sudah tidak dipakai orang-orang. Saya minta, saya sampuli rapi-rapi dan saya edarkan bergilir, keliling dari satu rumah ke rumah lainnya, dari satu asrama ke asrama lainnya, dari satu kantor ke kantor lainnya dengan sepeda tua sahabat saya itu, sepanjang ada yang mau membaca. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariyah saya sekaligus bentuk 'mengangkat senjata' yang bisa Mbah lakukan. Mencerdaskan orang Yogya, melalui aktivitas membaca." -Mbah Dauzan Farouk-

Literasi tidak hanya berkait dengan kegiatan membaca dan menulis saja, tetapi telah berkembang ke cakupan pengetahuan seseorang dalam berkomunikasi di masyarakat. Di era kebangkitan teknologi saat ini, perangkat komunikasi mengalami lompatan cukup jauh, mampu menimbulkan kesenjangan antara kemampuan menggunakan perangkat dan keahlian



Letnan Dua TNI (Purn.) Dauzan Farook

Lahir di Kauman Yogyakarta 1925 , wafat di Yogyakarta 6 Oktober 2007. Anggota pasukan Sub Wenkreise (SWK) 101. Pemanggul Tandu Panglima Besar Soedirman dalam perang gerilya (Desember 1948-Juli 1949). Penerima penghargaan Reksa Pustaka Bakti Tama (2006) dari Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. *Lifetime Achievement Award* dari Sabre Foundation (2007).

berkomunikasi itu sendiri. Dampak negatif yang terjadi tidak hanya berhenti pada kegagalan komunikasi, lebih jauh bahkan sering tercipta konflik yang berujung pada kasus hukum. Tidak tanggung-tanggung, bahkan pemerintah pun sampai mengaturnya dalam sebuah Undang-Undang IT.

Saat ini kendalanya bukan lagi ketidakmampuan membaca dan menulis, lebih jauh dari itu yaitu kendala kemampuan menggunakan teknologi dan keterbatasan atau ketidaktahuan keahlian dalam berkomunikasi.

Di masa KHA Dahlan, problem yang dihadapi adalah masih rendahnya kebiasaan membaca. Hal ini disebabkan oleh tidak atau belum mampu membaca, keterbatasan akses bahan bacaan, juga tidak tersedianya bahan bacaan. Akibatnya adalah ketidaksiapan masyarakat menghadapi perkembangan jaman. Dimulai dari Kampung Kauman, KHA Dahlan bahu membahu dengan istrinya, Siti Walidah, menggerakkan masyarakat laki-laki dan perempuan, anak-anak, muda-mudi sampai yang sudah tua, menggerakkan literasi masyarakat menghadapi situasi jamannya. Kampung Kauman yang menjadi pelopor gerakan literasi lebih dari seabad yang lalu ini terus menginspirasi hingga saat ini dan melahirkan banyak tokoh. Salah satu dari deretan tokoh literasi itu adalah Mbah Dauzan Farouk.

Pria yang dilahirkan pada tahun 1925 di kampung Kauman ini, tentunya mengalami sendiri peperangan fisik bangsa Indonesia dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Di masa mudanya, dengan gagah berani ikut memanggul senjata, berperang mengusir para penjajah dari bumi pertiwi. Rela berkorban demi agama, bangsa dan negara, menegakkan kedaulatan, mengangkat harkat, mensejajarkan martabat di tengah bangsa-bangsa yang merdeka.

Semangat dan keikhlasan itu melekat pada diri veteran perang ini. Kemerdekaan dan usia pensiun tidak dipakainya untuk bersantai apalagi berpangku tangan. Semangat dan inspirasi masa kecil saat membantu ayahnya, H. Muhammad Bajuri, mengelola Taman Pustaka Muhammadiyah, membuatnya mendirikan MABULIR,

singkatan dari Majalah dan Buku Keliling Bergilir, pada tahun 1989. Uang pensiun sebagai veteran dihabiskan untuk membeli buku, majalah dan mengelola perpustakaan MABULIR. Dengan bersepeda onthel, dihantarkannya buku-bukunya berkeliling mengunjungi para pembacanya.

MABULIR didirikannya dengan semangat untuk ikut mencerdaskan masyarakat, mengajak membaca, membentuk sikap literal bangsanya. Dipilihnya buku dan majalah yang bernas dan bermanfaat dengan membacanya terlebih dahulu sebelum dipinjamkannya secara bergiliran.

Buku dan majalah disiapkannya mulai sehabis Subuh, diperbaiki yang rusak, dipilih yang sesuai dengan sasaran pembaca yang akan dikunjunginya. Siang menjelang sore, dengan sepeda atau naik bis kota, dibawanya bahan bacaan itu untuk dipinjamkan. Pembacanya beragam, mulai dari anak-anak, siswa di sekolah, remaja masjid, karang taruna, mahasiswa dan orang dewasa. Didatanginya para pedagang pasar, pangkalan becak, sampai kelompok-kelompok pengajian. MABULIR semakin dikenal dan memberi manfaat dengan majalah dan buku bacaan.

Perjuangan Dauzan Farouk melalui MABULIR ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Beragam bantuan dan simpati juga penghargaan diberikan kepada beliau, walaupun bukan itu yang diharapkannya. Tahun 2005 Perpustakaan Nasional memberikan anugerah Nugra Jasadarma Pustaloka, disusul apresiasi Paramadina Award pada tahun yang sama. Lembaga dari luar negeri pun ikut memberikan apresiasinya, yaitu Lifetime Achievement Award dari Sabre Foundation dari Massachussetts, Cambridge, pada tahun 2007.

Bukan penghargaan yang beliau harapkan, bukan pujian yang beliau asakan. Semangat mencerdaskan lingkungannya, kesabaran berkeliling tanpa pamrih duniawi, berkorban tidak hanya harta tetapi juga fisik tuanya. Inspirasi untuk mengajak masyarakat menjadi cerdas, mendidik lingkungan berkehidupan yang bermartabat melalui literasi. Hidup Bapak Dauzan Farouk, pahlawan literasi. [ries]



DJOEANDA KARTAWIDJAJA

Meletakkan Dasar Wawasan Nusantara

Ir. H. Raden Djoeanda Kartawidjaja.

Lahir di Tasikmalaya, 14 Januari 1911, wafat di Jakarta, 7 November 1963. Anggota Muhammadiyah. Guru dan pimpinan SMA Muhammadiyah di Jakarta 1933-1937. Perdana Menteri Indonesia ke-10 (1957-1959). Menteri Pekerjaan Umum Indonesia (1948-1949). Menteri Perhubungan Indonesia (1946-1949 dan 1950-1953). Menteri Keuangan Indonesia (1959-1962). Menteri Pertahanan Indonesia (1957-1959).

Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, artinya bangsa Indonesia berhak mandiri, menegakkan kekuasaan dan kedaulatan di wilayah sendiri sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka yang lain. Bangsa Indonesia berhak atas penguasaan wilayah yang terdiri atas beribu pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tetapi, adakah yang tahu bahwa kedaulatan wilayah itu terputus-putus dengan munculnya wilayah laut internasional di sela-sela pulau? Atau, dengan kata lain wilayah Indonesia bukan merupakan satu kesatuan daratan dan lautan. Hal ini disebabkan saat itu batas wilayah laut hanya sejauh 3 mil laut (setara dengan jangkauan terjauh tembakan meriam kapal saat itu) mengikuti ketentuan perundangan territorial laut (*Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939*).

Kenyataan itu tentunya mengganggu kedaulatan dan wawasan kebangsaan mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi terpisah-pisah oleh wilayah laut internasional. Kedaulatan dan keamanan teritori Indonesia sangat rawan. Batas teritori warisan Belanda ini tidak sesuai dengan upaya menjaga keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia dan sangat tidak mencerminkan

bangsa dan Negara Indonesia sebagai satu kesatuan darat dan lautan. Wawasan Nusantara dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tidak utuh.

Kenyataan ini disadari oleh Djoeanda Kartawidjaja yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Dibantu oleh Mochtar Kusumaatmaja, dibuatlah garis-garis pada peta yang menghubungkan titik-titik paling pinggir wilayah pulau-pulau terluar Indonesia. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis pangkal kepulauan dan menjadi cikal bakal Wawasan Nusantara yang memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh yang meliputi darat, laut, dan udara.

Djoeanda beserta para diplomat yang lain (Mochtar Kusumaatmadja, Hasjim Djalal, Adi Sumardiman, Nugroho Wisnumurti, Budiman, Toga Napitupulu, Zuhdi Pane, Nelly Luhulima, Hardjuni, dan Wicaksono Sugarda) membawa gagasan Wawasan Nusantara tersebut ke dunia internasional melalui sebuah deklarasi. Usaha meyakinkan negara-negara lain itu tidaklah mudah. Namun, melalui perjuangan yang gigih semenjak tahun 1958, akhirnya dunia mengakui status Indonesia sebagai Negara Kepulauan dengan disepakatinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*).

Pada intinya, isi deklarasi yang kemudian disebut sebagai Deklarasi Djoeanda itu adalah “*Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia tanpa memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia.*”

Dengan undang-undang ini, wilayah kepulauan Indonesia tidak lagi tersekat-sekat oleh wilayah lautan internasional, wilayah laut di antara pulau-pulau menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia. Deklarasi Djoeanda dikukuhkan pada tanggal 18 Pebruari 1960 dalam Undang-undang NO. 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Ketetapan luasan wilayah Republik Indonesia

bertambah dari 2 juta km² meliputi wilayah daratan saja, menjadi 5,1 juta km² yang terdiri atas daratan dan lautan. Tambahan 3,1 juta km² terdiri dari luas laut territorial sekitar 0,3 juta km² dan perairan laut Nusantara sekitar 2,8 juta km². Hal ini kemudian dituangkan ke dalam Ketetapan MPRS No. IV tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Tidak hanya Indonesia saja yang mendapatkan keuntungan dengan adanya aturan ini. Lebih dari itu, Negara-negara kepulauan kemudian juga mendapatkan hak mengelola Zona Ekonomi Eksklusif seluas 200 mil laut di luar wilayahnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai hak mengelola (yurisdiksi) terhadap Zona Ekonomi Eksklusif. Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berjarak 200 mil laut, diukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut lepas. Penetapan zona ekonomi eksklusif ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Implementasi dari undang-undang tersebut berakibat terhadap luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta km², sehingga menjadi sekitar 5,8 juta km².

Dapat dibayangkan bagaimana jadinya jika Negara Indonesia wilayahnya yang terdiri dari daratan dan kepulauan, tetapi terpisah-pisah lautan, tersekat-sekat oleh wilayah internasional yang siapapun dapat masuk ke dalamnya dengan leluasa. Kedaulatan dan kebebasan mengelola wilayah akan sangat rentan dan terganggu setiap saat. Beruntunglah muncul Deklarasi Djoenda ini. [ries]



DIN SYAMSUDDIN

Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban

Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA.

Lahir di Sumbawa Besar, 31 Agustus 1958, Ketua IPNU Cabang Sumbawa 1970-1972, Ketua DPP IMM 1985, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah 1989-1993, Sekretaris Dewan Penasihat ICMI Pusat 1990-1995, Wakil Sekjen DPP Golkar 1998-2000, Chairman World Peace Forum (WPF) sejak 2006, Sekretaris Umum MUI 2000-2005, Ketua Umum MUI 2014-2015, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005 - 2015, Ketua Depan Pertimbangan MUI sejak 2015, dll.

Selain aktif di Muhammadiyah, sejak dari Pemuda Muhammadiyah sampai mencapai puncak menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, sudah bertahun-tahun pula Din Syamsudin memprakarsai dan memimpin organisasi dialog antaragama dan peradaban, baik di tataran lokal, nasional maupun global. Bahkan, jauh sebelum dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban (2017).

Pergulatan pemikiran dan pilihan gerakan Din yang khas, visioner, dan penuh warna, ikut mempengaruhi aktivitasnya di kemudian hari. Menjadi jembatan berbagai mazhab pemikiran keagamaan dan politik dengan menghidupkan iklim yang bersifat dialogis dan akomodatif. Jauh dari jebakan konfliktual.

Di ranah akademik, agama dan politik melekat pada pemikiran Din. Hal itu antara lain tercermin pada disertasinya di Interdepartmental Programme in Islamic Studies - University of California, Los Angeles (UCLA) Amerika Serikat, berjudul *'Religion and Politics in Islam: The Case of Muhammadiyah in Indonesian's New Order'* (1991). Disertasi tersebut mengukuhkan reputasi

akademik Din yang mencerminkan kepakaran dalam pemikiran politik Islam, termasuk studi kemuhammadiyah, sekaligus aktor gerakan yang bergulat di lapangan.

Selain itu, isu kristenisasi yang sering menjadi isu sensitif juga menjadi perhatiannya. Saat menghadiri Konferensi Pekabaran Injil 2018 di Brastagi, Sumatera Utara, pada 29-31 Mei 2018, Din menyampaikan pandangannya, maraknya isu Kristenisasi turut mempengaruhi berkembangnya radikalisme di Indonesia. Umat Muslim seringkali tersinggung terhadap perkembangan misi Kristen di Indonesia. “Data-data seperti ini mengentalkan berkembangnya isu Kristenisasi, yang pada gilirannya turut mempengaruhi berkembangnya radikalisme Islam di Indonesia,” kata Din Syamsuddin.

Menurut Din, isu kristenisasi membuat umat muslim merasa digerus. Ia mengungkapkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa Annual Growth Rate Protestan meningkat, utamanya di beberapa kantong muslim, seperti Yogyakarta dan Sumatera Barat. Din juga mengungkapkan, eksklusivisme, absolutisme, dan monopolistis adalah masalah pemuka agama di Indonesia saat ini. Terutama ketika pemuka agama menjadikan masyarakat sebagai pasar bebas agama dengan dasar logika kebebasan dan hak asasi.

“Perlu dipahami bahwa misi kerasulan Muhammad SAW adalah menyebarkan rahmat bagi alam semesta. *Lil ‘alamin* artinya seluruh alam, jadi bukan *lil muslimin*, atau rahmat hanya untuk seluruh muslim,” ungkap Din di hadapan lebih dari 300 Pemuka Agama Kristen itu.

Dalam muyawarrah besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa yang diselenggarakan Kantor UKP-DKAAP di Jakarta, Februari 2018, Din menjelaskan, para pemuka agama telah membahas dasar hubungan antaragama. Ia menyebut, telah disepakati fondasi relasi harus bersandar pada persahabatan berdasarkan kemanusiaan sejati. “Takdir kita adalah hidup sebangsa di dalam kemajemukan. Untuk itu kita mengaku bahwa bersama kita dari Tuhan, untuk Tuhan dan kemanusiaan. Di dalam Islam, ini yang dimaksudkan dengan *rahmatan lil alamin*”.

Kerukunan yang diperjuangkan bukan hanya berdasarkan kebutuhan bangsa, melainkan kebutuhan orang per orang, kelompok per kelompok. Kerukunan tak boleh menghalangi misi dan dakwah. Sebaliknya juga, misi dan dakwah tak boleh mengganggu kerukunan. “Pada dasarnya, agama Islam dan Kristen lebih banyak persamaan ketimbang perbedaan. Misalnya, antara Islam dan Kristen sama-sama menerima Yesus, letak perbedaan pada soal penyebutan gelar terhadap Yesus. Islam menerima Isa Almasih sebagai salah satu rasul yang agung. Sementara itu, Kristen mengakuinya sebagai Tuhan. Dalam Al-Qur’an, penyebutan nama Isa Almasih juga lebih banyak ketimbang Muhammad. “Selain itu, agama Islam dan Kristen sama-sama merupakan agama misioner. Kristen menyebutnya misi, sementara Islam menyebutnya dakwah,” jelasnya.

Istilah misi dalam Kristen maupun dakwah dalam Islam, menurut Din ada yang berhaluan keras dan halus. Ada yang membangun pandangan dan tujuan untuk menambah jumlah umat, ada pula yang hanya mengajak ke jalan Allah. “Jalan Allah dalam pengertian ini merujuk pada kebaikan bersama (*common good*). Di sini semua agama punya persepsi yang sama, sekali pun sebutannya berbeda. Bahwa dakwah itu bukan untuk mengajak orang masuk Islam, tetapi menuntun orang ke jalan yang benar,” ungkapnya.

Soal demokrasi, khususnya di Indonesia, Din Syamsuddin mengatakan, dalam mengelola sistem demokrasi di Indonesia, Pancasila harus menjadi landasannya. Dia menilai, selama ini pengelolaan sistem demokrasi, kerap melupakan Pancasila sebagai pijakannya. Politik di negeri ini harus dijalankan dengan cara-cara yang beretika dan beradab. Pancasila harus dijadikan landasan utama dalam berpolitik. Pancasila harus menapasi demokrasi di Indonesia. Terutama di sila ke-4.

Menurut Din, proses politik dalam membangun demokrasi juga harus selalu mengacu pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tak hanya itu, buah pikir pendiri bangsa hendaknya mengilhami para elit nasional. Karena, jika buah pikiran tersebut diabaikan, maka sama saja dengan membangun kehancuran.

Menurut pandangan Din Syamsuddin, salah satu permasalahan mendasar bagi bangsa, menurut Muhammadiyah adalah masih merajalelanya buta aksara moral, *moral illiterasi* masih melanda sebagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Buta aksara moral lebih berbahaya dari buta aksara latin maupun arab. Karena buta aksara moral tidak hanya melanda masyarakat bawah, yang mungkin tidak memiliki pendidikan tinggi, tetapi *moral illiterasi* ini juga menghinggapi para elit dan kaum terdidik. Inilah yang kemudian menampilkan gejala dan fakta korupsi, gejala dan fakta makelar kasus, makelar peradilan dan masih banyak persoalan-persoalan lain yang dihadapi oleh bangsa ini.

Untuk itu, Muhammadiyah mengajak seluruh pihak termasuk pemerintah agar bekerjasama, bahu membahu dalam membangun bangsa ini. Untuk membangun bangsa ini, diperlukan kerjasama dan kemitraan strategis yang sejati dari semua pihak. Tidak ada yang bisa berpretensi, kapan bisa menyelesaikan masalah bangsa ini dengan sendirinya. Din yakin, Pemerintah juga tidak berpretensi demikian. Muhammadiyah dan seluruh kelompok masyarakat pun demikian. Maka harus ada kerjasama, kemitraan startegis yang sejati.

Menurut Din, Muhammadiyah harus menjadi kawan bagi orang banyak, sekaligus mempunyai pendekatan baik kepada umat sebagai obyek dakwah yang bersifat *ngayomi* (melindungi). Juga menjadi kawan bagi organisasi kemasyarakatan yang lain dan pemerintah sebagai kelancaran dalam berdakwah.

Pemikiran Din Syamsudin dituangkan dalam beberapa buku karyanya, antara lain: *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam* (1999), *Muhammadiyah Kini dan Esok* (1990), *Peranan Golkar dalam Pendidikan Politik Bangsa* (1996), *Islam dan Politik Era Orde Baru* (2001), dan lain-lain.*(IM)

FARID MA'RUF

“Kalau kita benar-benar mempunyai maksud untuk memperbaiki masyarakat kita, maka hendaknya janganlah kita sembunyi-sembunyikan keadaan yang sebenarnya, sehingga kita dapat dengan jelas mengetahui kelemahan kita, dan kita dapat memperkuatnya”.



Prof. K.H. Farid Ma'ruf.

Lahir di Kauman Yogyakarta, 25 Maret 1908, wafat 6 Agustus 1976. Guru Bahasa Arab Madrasah Muallimin Muhammadiyah 1933-1946. Staf Kementerian Pertahanan bagian Politik (PEPOLIT) 1946. Kepala Jawatan Agama DIY 1951-1965. Dosen luar biasa di UGM, Akademi Tabligh (FIAD), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1951-1963. Anggota PP Muhammadiyah 1933-1969.

KH Farid Ma'ruf, adalah putra Kauman, Yogyakarta lahir 25 Maret 1908. Pada tahun 1933 (dalam usia 25 tahun) dia telah duduk sebagai anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai tahun 1969. Berbagai jabatan pernah dia sandang. Pada sidang Majelis Tanwir Muhammadiyah tahun 1958 di Yogyakarta, dalam pidatonya dia menyoroti kondisi umat Islam saat itu. Menurut pandangan Farid Ma'ruf, masyarakat Indonesia ini setelah mendapatkan kemerdekaan politik, yang semula mendapat nama baik, tetapi bertambah lama bukan bertambah baik, bahkan bertambah buruk namanya. Penderitaan hidup bagi rakyat umumnya, bertambah berat dirasakan. Kalau ada yang merasakan kenikmatan hidup, maka itu hanya satu dua orang saja. Kehidupan bertambah suram dan menyedihkan, sedangkan akhlak semakin bertambah merosot, meskipun harus diakui bahwa rakyat pada umumnya bertambah kritis.

Sekarang ini sudah bukan rahasia lagi merajalelanya korupsi, kericuhan, perilaku kriminal bertambah meluas, penegak keadilan kian hari kian melemah, sedangkan pornografi telah menjadi kegemaran. Pelacuran dikalangan pemuda dan terpelajar semakin menjadi, kegemaran hidup bermewah-mewah bertambah menyolok di kalangan para pemimpin dan para pedagang, masyarakat semakin menjauhkan diri dari ajaran-ajaran Agama.

Kesemuanya itu kini telah nampak, meskipun kita tidak berusaha melihatnya. Dengan mudah masyarakat mendengar dan melihat hal-hal yang semacam itu, bahkan lebih daripada apa yang kita nyatakan. Sehingga masyarakat kadang-kadang sudah kebal terhadap soal-soal semacam itu. Begitu masalah kemerosotan moral itu disebut, mereka seolah-olah sudah tidak memperdulikan lagi. Demikianlah memuncaknya kerusakan-kerusakan moral (budi pekerti) masyarakat kita bangsa Indonesia.

Sesungguhnya pada saat-saat setelah revolusi sangatlah menggembarakan, karena umat Islam kelihatan kompak. Bukan dalam negeri saja yang dapat mengambil manfaat dari bersatunya umat Islam itu, bahkan luar negeripun benar-benar merasa segan terhadap Indonesia karena bersatunya umat Islam Indonesia.

Tetapi sayang, keikhlasan para pemimpin Islam yang dapat mewujudkan persatuan umat Islam itu hanya berjalan sebentar. Setelah pangkat dan harta lebih banyak mendapat perhatian, maka mulailah kedudukan dan jabatan itu banyak diperebutkan daripada mempertahankan prinsip-prinsip perjuangan Islam. Persatuan umat Islam yang semula kokoh dan kuat itu mulai retak sedikit demi sedikit. Bukan kekuatan luar yang menggerogotinya, tetapi tangan yang ada di dalam sendirilah yang mengoyak dan merobek serta memutus tali persatuan itu. Umat Islam terpecah-pecah menjadi berkelompok-kelompok mengikuti para pemimpinnya masing-masing, pemimpin-pemimpin yang pada hakekatnya sudah tidak memperjuangkan ketinggian dan kemuliaan Islam, hanya memikirkan diri sendiri.

Akibatnya, masyarakat Islam menjadi lemah dan lesu, lebih-lebih kalau menghadapi pihak luar. Bagaimana umat Islam tidak lesu

kalau jiwa perjuangan sudah tidak berkobar lagi. Dan bagaimana jiwa umat Islam akan dapat bangkit, kalau pemimpin-pemimpinnya hanya bisa berseru dengan suara lantang, tetapi jauh dari keikhlasan jiwa?

Sebagai Wakil Ketua PP Muhammadiyah, dalam pidato peresmian berdirinya Akademi Tabligh Muhammadiyah, 18 November 1958 di Gedung Muhammadiyah Yogyakarta, dia mengatakan, dewasa ini masyarakat *alam Islami* (dunia Islam) pada umumnya dan masyarakat umat Islam Indonesia khususnya, tengah diliputi oleh suasana kelesuan dan kemunduran. Menurut kami, kelesuan dan kemunduran umat Islam itu pada garis pokoknya hanyalah karena tidak menunaikan akan perintah agamanya hampir dalam segala lapangan hidup mereka itu. Hingga karenanya, maka ruh Islam yang ada pada sanubari mereka itu menjadi lemah. Padahal ruh Islam itulah yang dapat menjadikan umat Islam umat yang dinamis, progresif, lincah dan gembira beramal.

Demikianlah sebab pokok yang melemahkan ruh Islam yang ada pada dada mereka, yang menyebabkan kemacetan gerak umat Islam seluruhnya; bahkan itu pulalah yang menyebabkan jumlah umat Islam yang besar sekarang ini tidak dapat diwujudkan menjadi potensi yang riil. Tetapi bila garis pokok itu agak kita perkecil, maka sebab itu dapat kita rinci lagi, antara lain: *Pertama*, kelengahan umat Islam sendiri terhadap pendidikan Islam. *Kedua*, akibat dari kelengahan umat Islam terhadap pendidikan Islam menyebabkan ruh Islam itu lemah, maka mudahlah terserang dan digoyahkan oleh faktor-faktor dari luar.

Kelengahan umat Islam itu telah sedemikian kronisnya, menyebabkan sejak perseorangannya, masyarakat perkampungannya dan sampai masyarakat umat Islam yang lebih luas menjadi lemah ruh ke-Islamannya, akibatnya umat Islam tinggal ada pada pengakuannya saja, sedang jiwa dan ruh Islamnya hampir sama sekali tidak ada kekuatannya.

Apa yang kami sebutkan di atas itu, adalah segi pendidikan Islam yang dapat membentuk karakter umat Islam menurut saripati pendidikan itu. Adapun tentang pengajaran Islam secara ilmiah,

secara teori atau secara ilmu pengetahuan semata-mata, hal itu tidak akan kami anggap sepi demikian saja. Di madrasah-madrasah mulai yang rendah sampai lanjutan, pengajaran Islam menurut teori sudah lumayan, meskipun masih banyak hal-hal yang mengecewakan. Pondok-pondok dan pesantren-pesantren pun kami akui betapa besar jasanya dalam memberikan pengertian-pengertian Islam secara ilmiah, meskipun disana-sini tentu masih banyak kekurangannya yang dapat disempurnakan.

Adapun faktor-faktor luar yang menambah rapuhnya ruh Islam pada sanubari umat Islam dapat pula kami bagi dua. *Pertama*, yang langsung menyerang dari sudut lahir, dan *kedua*, dari sudut rohani. Dengan kata-kata lain, dunia Islam itu ada yang terjajah negerinya, ada yang terjajah peradaban/kebudayaannya (rohaninya) dan ada pula yang malah terjadi kedua-duanya.

Dahulu, dari kalangan umat Islam sendiri ada yang mempunyai pikiran, bahwa agama mereka tidak akan lenyap setelah negara mereka dikuasai/dijajah oleh golongan lain. Mereka itu seolah-olah tidak berpikir bahwa ada golongan umat Islam yang sudah kehilangan jiwa Islam, rapuh kebudayaannya dan binasa peradabannya, sebelum mereka kehilangan kemerdekaan politiknya.

Khusus mengenai keadaan umat Islam Indonesia, menurut hemat kami, karena kelengahan kita terhadap pendidikan Islam yang sebenar-benarnya, maka walaupun Indonesia telah merdeka, namun jiwa kita umat Islam, cara-cara berpikir kita, perasaan kita, cara rumah tangga kita, pergaulan kita, bahkan sampai-sampai pada pakaian kita, masih dijajah oleh arus dan gelombang yang datang dari luar itu. Bahkan yang sangat menyedihkan, bukan sedikit dari golongan kita yang nampak bangga karena dapat menurutkan gelombang arus dari luar yang menjajah itu.

Oleh karenanya, maka menurut pikiran kami, satu-satunya terapi agar masyarakat kita dapat menuju kearah kemajuan yang diberkati Allah, pada pokoknya bagaimana daya dan usaha kita agar angkatan muda kita, baik putera maupun puteri dapat mempunyai jiwa Islam yang sebenar-benarnya.**[IM]



K.H. Faqih Usman.

Lahir di Gresik, 2 Maret 1904. Konsul Hoofdbestuur Muhammadiyah Daerah Surabaya dan Ketua Majelis Tarjih sejak 1934. Menteri Agama RI 21 Januari s.d. 6 September 1950 dan 3 April 1952 s.d. 30 Juli 1953. Ketua PP Muhammadiyah terpilih pada Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968. Wafat 3 Oktober 1968.

FAQIH USMAN

“..terlihat jelas bahwa peran ulama menentukan maju mundurnya umat Islam. Ulama palsu, ulama jawatan dan ulama yang tak lagi peduli pada umat turut menyokong kemunduran umat Islam.”

KH Faqih Usman, menjadi Ketua PP Muhammadiyah di tahun 1968 hanya beberapa saat. Ia adalah salah satu dari tokoh Muhammadiyah yang pernah menjadi Menteri Agama RI. Faqih Usman adalah anak dari seorang saudagar kayu dan pengusaha galangan kapal bernama Usman Iskandar. Ibunya, putri seorang ulama. Sejak kecil ia sudah mengenyam pendidikan agama. Sejak usia 10 tahun ia menjalani pendidikan di beberapa pesantren di kota Gresik. Tahun 1918-1922 ia belajar ke pondok pesantren di luar kota Gresik, salah satunya Pesantren Maskumambang.

KH Faqih Usman berkenalan dengan ide-ide pergerakan, termasuk dari dunia Islam di Timur Tengah, diantaranya saat mengelola majalah *Bintang Islam*. Bintang Islam adalah media progresif dan seringkali membicarakan isu-isu politis. Hal ini tak lepas dari peran H. Fachroedin, seorang tokoh Muhammadiyah di Yogyakarta yang juga tokoh Sarekat Islam.

Sejak terbitnya Majalah *Al-Imam*, umat Islam di Nusantara, terutama dari gerakan reformasi Islam, semakin intens berhubungan

dengan dunia Timur Tengah, khususnya Kairo yang menjadi pusat penyebaran ide-ide reformasi Islam. Redaktur *Al-Imam*, H. Thahir Jalaluddin pernah menuntut ilmu di Kairo dan amat terpengaruh dengan majalah *Al-Manar* yang diterbitkan Muhammad Abduh yang kemudian diteruskan oleh Rashid Ridha

Al-Manar sendiri telah dibaca oleh umat Islam di Nusantara. Seorang pembaca dari Kalimantan bernama Muhammad Imran bin Bashuni, bertanya kepada redaksi *Al-Manar*, mengapa umat Islam dalam keadaan mundur dan non muslim mengalami kemajuan? Pertanyaan ini dijawab oleh Syaikh Shakib Arslan, intelektual Islam asal Suriah, secara berseri di *Al-Manar*, edisi Desember 1930 hingga Februari 1931, yang kemudian dibukukan dengan judul *Mengapa Umat Islam Mundur?*

Pertanyaan serta renungan mengenai kemunduran umat Islam ini juga menjadi pertanyaan yang menggelayuti umat Islam saat itu, termasuk Faqih Usman. Di Timur Tengah, *majalah Al-Manar*, selain memuat secara berseri ulasan dari Syaikh Shakib Arslan, juga memuat tulisan lain tentang kemunduran umat Islam. Misalnya, naskah *Ummul Qura* karya Abdurrahman al-Kawakibi, seorang intelektual Islam asal Aleppo (Halb), Suriah, lahir pada 1849. Al-Kawakibi mengelola surat kabar *Al-Shahba* dan *Al-I'tidal*. Ia dikenal dengan dua karyanya, yaitu *Taba'i al-Istibdad wa Masari* dan *Ummul Qura*.

K.H. Faqih Usman menyatakan pendapatnya tentang Al-Kawakibi sebagai berikut, “...selain mendjadi salah seorang pengandjoer besar dalam pergerakan bangsanja, djoega ada mendjadi salah seorang penoentoen oetama dalam pergerakan perbaikan Oemmat Islam ‘oemomemnja. Djasanja dalam pergerakan bangsa ‘Arab hoesoensja pergerakan perbaikan Oemmat Islam oemomemnja, boekan kepalang besarnja, hingga dalam segala perobahan kebaikan jang tertampak dalam tanah ‘Arab dan dalam Doenia Islam ini, adalah tangannja pengadjoer tadi jang moela-moela toeroet menjoesoennja. Maka selagi pergerakan bangsanja dan pergerakan perbaikan Oemmat Islam sedang tengah-tengah berkembang ia meninggalkan doenia jang fana di dalam beroesaha fie Sabilillah.”

Kalimat *'Kemunduran Oemmat Islam'* itu mungkin terdengar janggal bagi sebagian muslim, namun realitanya memang demikian. Mengutip penulis Barat, Lothrop Stoddard (1883-1950), K.H. Faqih Usman menulis, *"Pendek kata, kaoem Moeslimin telah berganti mendjadi boekan Moeslimin lagi, dan telah sama toeroen kebawah sampai sedjaoeh-djaoehnja."*

Kemunduran umat Islam adalah sebuah kenyataan yang harus dicari penyebabnya. Menurut K.H. Faqih Usman, *'Oemmoe'l Qoera'* karya al-Kawakibi itu mampu menjabarkan sebab-sebab kemunduran tersebut. Menurutnya, *"Satoe-satoenja sebab itoe telah diperkatakan olehnja dengan pemandangan jang djelas loeas, dan dengan keterangan jang merdeka lagi njata. Sebab penjakit tadi, biarpoen sampai bertentangan dengan beberapa pendapat jang biasa dilakoekan orang banjak. Pegangannja hanja kepada hoekoem-hoekoem Islam jang sebenarnja sadja, boekan jang telah kemasoekan bid'ah atau tjampoeran loear."*

Sebab-sebab kemunduran umat Islam pada intinya setelah diringkaskan K.H. Faqih Usman disebabkan oleh 14 hal. Pertama, *'adanya setengah kepercayaan dan watak yang salah'*, misal, aliran Jabariyah yang memiliki pemahaman yang keliru. Penyebab kedua, adalah *'berbaliknya cara pemerintahan Islam menjadi istibdad'* atau despotik. Sejak era empat khalifah, perlahan sistem pemerintahan Islam berbalik menjadi monarki. Namun, kemunduran bukan saja disebabkan oleh sistem pemerintahan tetapi juga para ulama. *'Kebodohan pemuka-pemuka kerajaan Islam'* itu menjadi penyebab ketiga. Ketika ulama tak lagi menjadi pelindung umat Islam, maka kemerdekaan menjadi sirna. *'Hilangnya kemerdekaan'* menjadi penyebab kelima kemunduran umat Islam. Selain kemerdekaan, yang juga lenyap adalah *'Hilangnya amar ma'ruf dan nahi munkar.'*

Ketika *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi tulang punggung dakwah ini sudah runtuh, maka hal ini akan menyebabkan *'Hilangnya pengertian dan pertalian agama.'* Umat tak lagi memahami agamanya dan merasa terikat dengan agamanya. Hal ini diperburuk dengan munculnya, apa yang disebut oleh KH. Faqih Usman sebagai *'ulama gadungan'* atau ulama palsu. Selain

ulama gadungan’ juga hadir *‘ulama jawatan.*’ Yakni orang-orang yang menduduki jabatan tertentu kemudian diangkat menjadi ulama oleh penguasa. Ulama bukan lagi pengakuan dari umat, tetapi jabatan yang disematkan oleh penguasa.

Selain faktor-faktor individu yang rusak seperti di atas, penyebab kemunduran umat Islam juga terjadi ketika *‘ketiadaan mementingkan pada pengetahuan umum.*’ Ketika pengetahuan tak lagi dimiliki, maka *‘ketiadaan percaya pada diri sendiri*’ juga menjadi penyebab kemunduran umat Islam. Semua ini diperburuk oleh *‘tidak adanya pemimpin jang mencukupi.*’

Pemimpin yang tak mumpuni akhirnya membuat rakyat menderita dan hidup dalam *‘kefakiran*’. Kefakiran menjadi penyebab kemunduran umat Islam. Dalam keadaan fakir, umat tak lagi berdaya. Sebab lain yang disebutkan sebagai kemunduran umat Islam adalah *‘hilangnya hikmah pertemuan dan perkumpulan.*’

‘Ketiadaan pertalian antara pihak kekuasaan dan golongan penganjur rakyat,’ menjadi penyebab terakhir kemunduran umat Islam yang dituangkan oleh K.H. Faqih Oesman dari *Ummul Qura*. Jika kita melihat dari sebab-sebab di atas, maka terlihat jelas bahwa peran ulama menentukan maju mundurnya umat Islam. Ulama palsu, ulama jawatan dan ulama yang tak lagi peduli pada umat turut menyokong kemunduran umat Islam.

Ketika K.H. Faqih Usman menerbitkan buku *‘Rahasia Moendoernja Oemat Islam*’ ini, situasinya sangat relevan dengan kehidupan umat pada masa itu yang hidup di bawah cengkaraman kolonialisme. Namun bukan berarti buku ini kehilangan relevansi dan hikmahnya pada saat ini. Agaknya kita perlu merenungi kalimat K.H. Faqih Usman, yaitu, *“Sebab-sebab itoelah jang mendjadi pokok kemoendoerannja, maka apa bila ia masih tetap melengkat pada Oemmat Islam, nistjaja mereka ini akan tinggal teroes dalam kemoendoerannja.” [Im]*



K. R.H. HADJID

Kaderisasi Ulama Muhammadiyah

K.R.H. Hadjid.

Lahir di Yogyakarta, 29 Agustus 1898, wafat 1977. Ketua Majelis Tarjih, Wakil Ketua Majelis Tarjih, Ketua Majelis Tabligh dan Penasehat PP Muhammadiyah. Wakil Kepala Jawatan Agama DIY, Dosen Sekolah Tinggi Islam (sekarang UII), Ketua Pengadilan Agama DIY. Anggota Dewan Konstituante Republik Indonesia.

Putra Kauman Yogyakarta dan murid termuda sekaligus sahabat KHA Dahlan ini merupakan peletak dasar kaderisasi ulama Muhammadiyah. Pendidikan formalnya diperoleh dari Sekolah Rakyat/SR (sekarang SD). Kemudian beliau diajak ayahnya untuk pergi ke Mekkah menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu pengetahuan. Di Mekkah beliau berguru kepada Kiyai Fakih, Kiyai Humam, dan Kiyai al Mishri. Pada tahun 1910 beliau kembali dari Mekkah lalu nyantri di Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta. Setelah itu, beliau belajar di Pondok Pesantren Termas berguru kepada KH Dimiyati dan KH Bisri. Dari pondok ini nanti lahir ulama-ulama Muhammadiyah seperti K.R.H. Hadjid, K.H. Basyir (ayahanda Ahmad Azhar Basyir), K.H. Wahid (ayahanda Basith Wahid), dan K.H. Ahmad Badawi (ayahanda Djaldan Badawi).

Pengabdianya di Muhammadiyah dimulai sebagai guru *Standard School* Muhammadiyah (kini SD Muhammadiyah Suronatan). SD ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1918. Disamping itu, Hadjid juga mengajar di HIS (*Hollands Indische School*)

Muhammadiyah. Dengan pengalaman sebagai pendidik itulah, maka beliau dipercaya sebagai Direktur Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah (1924-1933) yang kemudian pada tahun 1933 – 1941 dipercaya sebagai Direktur Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam berbagai Kongres/Muktamar Muhammadiyah, beliau terpilih sebagai pimpinan Muhammadiyah, dan jabatan yang pernah beliau pangku antara lain sebagai Ketua Majelis Tarjih, Wakil Ketua Majelis Tarjih, Ketua Majelis Tabligh dan pernah menjadi Penasehat PP Muhammadiyah. Beliaulah yang berinisiatif perlunya pengkaderan ulama Muhammadiyah. Maka beliau diberi amanah menjadi tim pelaksana Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM). Lembaga ini diresmikan di Masjid Taqwa Yogyakarta tanggal 20 April 1968.

Selama memimpin Majelis Tarjih PP Muhammadiyah telah dilakukan 5 (lima) kali muktamar yang hasilnya dibukukan dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT). Muktamar Tarjih I diselenggarakan di Yogyakarta tahun 1950 menghasilkan keputusan Kitab Zakat. Muktamar II diselenggarakan di Purwokerta tahun 1953 menghasilkan keputusan Kitab Wakaf. Muktamar III diselenggarakan di Medan pada tahun 1953 menghasilkan keputusan tentang Kitab Haji. Muktamar IV yang diselenggarakan di Yogyakarta tahun 1954/1955 dengan menghasilkan keputusan tentang Kitab Masalah Lima. Muktamar V di Palembang pada tahun 1956 dengan menghasilkan keputusan tentang Kitab Shalat dan Kitab Jamaah dan Jum'ah.

Beliau pernah menjadi Wakil Ketua Hizbul Wathan (HW) yang diketuai oleh HM Muchtar. Organisasi kepanduan ini dulu bernama Padvinder Muhammadiyah

Pada tahun 1942-1945, beliau menjadi wakil Kantor Lembaga Agama (*Sumuka Tjo Koti Zimmokyoku*) di Yogyakarta. Lembaga ini berpusat di Jakarta dengan ketua KH Hasyim Asy'ari dan KH Kahar Mudzakir. Pada masa penjajahan Jepang ini, tidak sedikit ulama kita yang ditangkap dan disiksa secara kejam bahkan ada yang hilang, dan beberapa yang dibunuh. Maka pembentukan

Kantor Lembaga Agama ini untuk menanggulangi membela ulama yang saat itu tertindas.

Kiprahnya di luar Muhammadiyah antara lain, beliau pernah menjadi Wakil Kepala Jawatan Agama DIY, dosen tetap Sekolah Tinggi Islam (sekarang Universitas Islam Indonesia), dan pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Konstituante Republik Indonesia. Dewan ini antara lain bertugas untuk membentuk Undang-Undang Dasar sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Di tengah-tengah kesibukannya, beliau sempat menulis buku sebagai bentuk pengabdian ilmu dan pengalaman antara lain; 1) *Kalimah Sahadah Bahasa Jawa*; 2) *Tafsir Al Fatihah*; 3) *Pedoman Dakwah Umat Islam*; 4) *Pedoman Tabligh Bahasa Jawa Jilid I, II, III*; 5) *Buku Fiqh (ditulis dengan huruf Pegon)*; 6) *Tafsir Al Quran Juz 1-18*; 7) *Tujuh Belas Ayat-Ayat* ; 8) *Kitab Pertjontohan Bagi Pemoeda-Pemoeda Kita*; 9) *Falsafah Ajaran KH Ahmad Dahlan*; 10) *Buku Belajar Huruf Hijaiyah*; 11) *Piwoelang Islam*; 12) *Goeroe Tabligh*; 13) *Perkawinan; Menurut 'Adat dan Asas Perkawinan Setjara Islam*.

Dalam buku beliau yang berjudul *Buku Pelajaran Tafsir dan Ajaran Islam*, beliau membuat klasifikasi ilmu menjadi tiga, yakni; 1) ilmu fardhu 'ain; 2) ilmu fardhu kifayah; 3) ilmu yang dilarang. Menurutnya, ilmu fardhu ain adalah ilmu yang setiap hari diperlukan dan diamalkan oleh umat Islam seperti; akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan lainnya. Ilmu fardhu kifayah adalah ilmu yang dapat menyejahterakan dan menjaga agama sebagai kebutuhan lain. Ilmu seperti ini adalah tafsir, hadis, ushul fiqh, bahasa Arab, dan lainnya. Kemudian yang dimaksud sebagai ilmu yang dilarang adalah ilmu yang membahayakan akidah, ibadah, dan muamalah seorang muslim, misalnya ilmu sihir, ilmu nujum, ramalan, tahayul, klenik, dan lainnya. [Lasa Hs]

K.H. HISYAM

Pendidikan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kalau pendidikan maju, maka umat Islam juga akan maju.



KH Hisyam. Lahir di Kauman, Yogyakarta 10 Nopember 1883, wafat 20 Mei 1945. Abdi Dalem Pamethakan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Salah satu murid langsung KHA Dahlan. Ketua Bahagian Sekolah HB Moehammadiyah, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah 1934-1937.

Pada masa kepemimpinan Kyai Haji Hisyam, titik perhatian Muhammadiyah lebih banyak diarahkan pada masalah pendidikan dan pengajaran. Baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Hal ini terjadi, barangkali karena beliau sebelumnya telah menjadi ketua Bagian Sekolah yang dalam perkembangannya kemudian menjadi Majelis Pendidikan dalam kepengurusan Muhammadiyah.

Selama tiga tahun Muhammadiyah berada di bawah pimpinannya telah mendapat kemajuan yang lebih pesat, terutama pada segi ketertiban organisasi dan administrasi dan sudah tentu terutama pula dalam perkembangan sekolah Muhammadiyah. KH Hisyam menduduki jabatan sebagai Ketua Bagian Sekolahan (kini dikenal dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah) sejak periode KH Ibrahim. Dengan tekun dan cermat dia bekerja. Dperbaikinya pengorganisasian, ditingkatkannya mutu pelajaran, diawasi dan ditelitinya guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Kebijaksanaan KH Hisyam dalam melancarkan usaha pendidikan Muhammadiyah ialah modernisir sekolah-sekolah Muhammadiyah selaras dengan *policy* pendidikan pemerintah. Ini dimaksudkan agar mereka ingin memasukkan putra-putrinya ke sekolah-sekolah umum, tidak usah merasa perlu harus memasukkan ke sekolah Pemerintah Hindia Belanda. Lebih baik anak-anak itu belajar di sekolah Muhammadiyah yang selain mutunya sama, masih dapat diawasi pendidikan agamanya.

KH Hisyam selalu berusaha agar mutu sekolah Muhammadiyah tidak kalah oleh sekolah pemerintah. Walaupun harus menempuh persyaratan yang amat berat. Satu demi satu sekolah-sekolah Muhammadiyah itu mendapat pengakuan atau persamaan oleh pemerintah. Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan bantuan keuangan atau subsidi terlalu besar kepada sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh *missi Katolik* dan *Zending Kristen*. Padahal kedua golongan itu telah mendapat sumbangan pula dalam jumlah besar dari Negeri Belanda.

KH Hisyam berpendirian Muhammadiyah sebaiknya mau memanfaatkan subsidi pemerintah itu bagi kemajuan sekolah-sekolahnya. Kebijakan ini dapat disetujui oleh Pengurus Besar. Maka, secara berangsur-angsur sekolah-sekolah Muhammadiyah yang telah memenuhi syarat berhasil memperoleh bantuan itu. Walaupun jumlahnya masih terlalu amat sedikit dibandingkan dengan yang diperoleh oleh pihak Katolik dan Kristen. Kesediaan Muhammadiyah menerima subsidi itu telah menimbulkan kritik pedas yang dilontarkan oleh golongan lain, seperti Taman Siswa dan Sarekat Islam yang bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Segala kritikan dan celaan yang bertubi-tubi itu dijawab dengan tegas dan tuntas oleh KH Fachroedin, Wakil Ketua PB Muhammadiyah dengan mengatakan bahwa uang subsidi itu bukan berasal dari Negeri Belanda, tetapi dari hasil pemerasan terhadap bangsa Indonesia, dan bahwa dengan subsidi itu Muhammadiyah akan memajukan sekolah-sekolahnya tempat anak-anak bangsa Indonesia belajar mencari ilmu dan kemajuan, dan bahwa pemasukan uang pajak adalah sebagian terbesar dari

umat Islam yang pada umumnya setia membayar pajak walaupun terpaksa.

Jumlah sekolah Muhammadiyah yang mendapat subsidi hanya 121 sekolah. Jumlah yang terlalu amat sedikit dibanding dengan sekolah yang dimiliki *missi Katolik* yang memperoleh subsidi, yakni 696 sekolah dan 1893 sekolah yang diselenggarakan *Zending Protestan*. Hal itu disebabkan untuk memperoleh subsidi harus dipenuhi syarat yang terlalu berat. Menurut kebijaksanaan pemerintah kolonial Hindia Belanda, sekolah swasta yang berhak mendapat subsidi ialah sekolah yang atas dasar pemeriksaan dan penelitian telah mencukupi persyaratan mengenai gedung, kewenangan guru-guru, syarat penerimaan murid, kelengkapan alat-alat, dan mempunyai harapan baik untuk maju pada masa depan. Jadi bukan membantu sekolah yang lemah agar menjadi berkembang maju.

Atas jasa Kyai Hisyam dalam memajukan pendidikan yang memberikan dampak bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia, KH Hisyam yang saat itu menjabat sebagai Ketua PB Muhammadiyah, memperoleh bintang Ridder Orde van Oranje Nassau dari Pemerintah Hindia Belanda. Dalam suatu pertemuan dengan anggota PB Muhammadiyah lainnya, dia menegaskan bahwa soal bintang itu perkara kecil dan keduniaan. Sedang Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah adalah dorongan dari hal-hal ukhrawi, yakni mencari keridhaan Allah.[Im]

K.H. IBRAHIM

Agama Islam itu Agama yang Mengajak Persatuan

“Apakah kemajuan anda semua ini karena Kyai H Ahmad Dahlan ataukah karena Allah. Kalau karena Kyai H Ahmad Dahlan, sekarang ini Kyai H Ahmad Dahlan sudah wafat, sudah diambil kembali oleh yang punya. Tetapi kalau kemajuan anda semua karena Allah, Allah gesang salaminipun (Allah hidup selamanya), serta pasti akan menolong umatnya yang menjalankan perintah-Nya dan sesuai kehendak-Nya”.

Satu pekan setelah KHA Dahlan wafat, di Yogyakarta diadakan pertemuan Muhammadiyah. Dalam pertemuan itu, Kyai Ibrahim menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya dia mengatakan,

“Sebelum saya memulai khutbah, pada pembukaan perkumpulan pada hari ini, saya sangat berterimakasih kepada semuanya yang sudah menyempatkan hadir di perkumpulan Muhammadiyah, perkumpulan anda semua ini. Misalnya wakil pemerintah, wakil perkumpulan, wakil Ranting-Ranting Muhammadiyah, ataupun para warga semuanya. Ringkas kata, ucapan terimakasih saya



Kyai Haji Ibrahim (Al-Hafidz).
Lahir di Yogyakarta, 7 Mei 1874, wafat di Yogyakarta, 13 Oktober 1932.
Ketua Muhammadiyah yang kedua, pengganti KH. Ahmad Dahlan (1923-1932)

kepada semua yang ada di sini. Semoga kehadiran anda semua menambah kebaikan perkumpulan ini dan selanjutnya bermanfaat kepada diri kita pribadi dan orang banyak.

Adapun ucapan saya terhadap wakil surat kabar (pers), mudah-mudahan surat kabar anda bisa menjadi sarana meluruskan keadaan yang sebenarnya, tidak bergeser (berbeda) dengan keadaan yang sebenarnya. Karena kabar yang benar dapat dijadikan penerang, menjelaskan kepada yang tidak tahu, itu semua dapat menjadi sebuah kebaikan, tetapi kabar yang tidak nyata (tidak sesuai) dengan kenyataannya malah akan menjadi sumber kegelapan, dapat membuat kerusakan.”

Dalam sambutan itu juga, KH Ibrahim menambahkan, bahwa tahun-tahun terakhir ini, banyak kejadian yang berbeda dengan adat kebiasaan, misalnya rendahnya harga uang, mahalnya harga barang-barang, mundurnya perdagangan dan sebagainya. Keadaan di luar tanah Jawa juga banyak yang terjadi berbeda dengan kebiasaan, misalnya majunya penyebaran agama Islam di Inggris, menangnya Turki melawan Griekenland, keberanian Khalifah, dan sebagainya. Itu semua menggerakkan hati orang-orang di sini. Bentuknya bermacam-macam ada yang semakin bersemangat dalam menyiarkan agama, agama apa saja. Ada yang semakin bersemangat dalam bekerja mencari harta, ada yang sangat rajin dalam ikut memperbincangkan para aparatur negara dan sebagainya. Ringkas kata bermacam-macam kemajuannya. Semua itu sudah pasti sesuai dengan kecakapan, kesenangan, dan kemampuannya.

Pada tahun pertama ini banyak keadaan yang terlihat sepertinya akan menghalang-halangi kemajuan perkumpulan Islam. Sedang bagi Muhammadiyah sendiri, saat ini sedang dalam sorotan orang banyak. Orang banyak itu bermacam-macam, ada yang mengatakan baik ada pula yang menyatakan jelek. Semua itu sudah menjadi hal yang lumrah dan wajar, maka saudara-saudara Muhammadiyah jangan sampai berkecil hati, semakin hari harus semakin baik dalam bertindak menuruti perintah Allah, jangan sampai kegiatan tahun yang akan dijalankan kalah baik dengan tahun yang telah dijalani karena kalau terjadi demikian itu namanya mundur. Sama saja dapat dikatakan mundur. Jangan

sampai merasa suka kalau dipuji orang, dan jangan berkecil hati kalau dicela orang, karena yang menetapkan buruk dan baik itu hanyalah Gusti Allah sendiri. Tetapi celaan dan pujian itu harus diambil pelajarannya. Terlebih lagi kritik atau celaan yang menjelek-jelekkkan.

Dalam keadaan yang seperti ini, Pembimbing Muhammadiyah yang paling besar, yaitu Kyai H Ahmad Dahlan semakin parah sakitnya sampai akhirnya wafat. Muhammadiyah merasakan kehilangan yang sangat besar. Untungnya putra-putra Kyai H Ahmad Dahlan itu sudah pada dewasa bisa diserahi Muhammadiyah. Terlebih lagi apakah kita semua tidak berniat untuk bertindak sendiri dan hanya dibimbing saja. Susah kalau seperti itu. Akhirnya pertanyaan saya pada warga Muhammadiyah,

“Apakah kemajuan anda semua ini karena Kyai H Ahmad Dahlan ataukah karena Allah. Kalau karena Kyai H Ahmad Dahlan, sekarang ini Kyai H Ahmad Dahlan sudah wafat, sudah diambil kembali oleh yang punya. Tetapi kalau kemajuan anda semua karena Allah, Allah gesang salaminipun (Allah hidup selamanya), serta pasti akan menolong umatnya yang menjalankan perintah-Nya dan sesuai kehendak-Nya”.

Di akhir pidatonya, dia mengingatkan pada semuanya saja serta pada saya sendiri: *“Agama Islam itu agama yang mengajak persatuan, tidak mengajak berpisah-pisah. Apalagi orang Islam itu seharusnya menjadi satu. Melihat kejadian akhir-akhir ini, sepertinya persatuan orang Islam sudah bisa diharapkan. Tidak hanya setanah Jawa atau se Hindia tetapi se....jagad”.* [im]



ISMAIL THAIB

Ahli Tafsir, Sang Zuhud dari Samudera Pasai

Drs. Tgk. H. Ismail Thaib.

Lahir di Pantan Labu Aceh, 12 September 1932. Anggota PB PII Yogyakarta 1958. Ketua Tim Pengasuh Bahasa Arab RRI dan Unisi Yogyakarta 1970-1982. Penasehat Majelis Adat Aceh Yogyakarta 2006-2016. Dosen Luar Biasa UII, ISI, Unisula, IAIN, Al-Irsyad dan PUTM. Anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah 1985-2015.

Tokoh Majelis Tarjih ini dikenal produktif, tegas, dan berpegang teguh pada apa yang diyakininya. Beliau bergabung dengan Majelis Tarjih sejak 1991-1995 (periode Prof Drs. Asmuni Abdurrahman), 1995-2000 (periode Prof. Dr. Amin Abdullah), dan 2000-2005 (periode Prof. Dr. Syamsul Anwar). Sosok andalan Majelis Tarjih ini pernah menyatakan bahwa Majelis Tarjih merupakan perahu perjuangan. Beliau banyak mengkritisi Muhammadiyah terutama putusan-putusan Musyawarah Nasional Tarjih. Kritikan itu antara lain beliau menyoroti istilah *bayani*, *burhani*, dan *irfani* yang merupakan hasil Munas Tarjih ke 25 di Jakarta tahun 2000. Beliau juga mengkritisi makna “tarjih” yang seharusnya tidak sekedar membandingkan dua hadis/lebih, tetapi justru pada ijtihad itu sendiri. Ijtihad tidak saja mengembangkan tarjih tetapi juga mengembangkan eksplorasi hukum sesuai dengan metode penggalan hukum dalam ushul fiqh yang tentunya langsung merujuk pada Al Quran dan As Sunah. Dalam hal Manhaj Tarjih, beliau sepakat dengan 18 poin yang pernah

dicetuskan oleh KH Ahmad Azhar Basyir, M.A. yang menyatakan antara lain bahwa:

1. Sumber dalil Tarjih adalah Al Quran dan Sunnah *shahihah/ maqbullah*;
2. Dalam memutuskan sesuatu dilakukan secara musyawarah. Maka produk Majelis Tarjih adalah ijihad ijtima'i dan bukan ijihad *fardi* (sendirian);
3. Majelis Tarjih menggunakan *sadd adz-dzarai* untuk menghindari terjadinya fitnah dan *mafsadah*.

Sebagai ahli tafsir, beliau banyak menulis tentang tafsir dan Al-quran. Salah satu karya besarnya adalah mengalihkan aksara *Tafsir Tarjuman Al Mustafid* karya Teungku Syekh Abdur Rauf al-Singkili alias Teungku Syekh Syiah Kuala Qodhi Malik al-Adil (Mufti Kerajaan Aceh Darussalam (1615-1693 M). Tafsir ini merupakan karya klasik Islam pada abad ke-17 M, yang dikenal pula di Malaysia, Thailand Selatan (Pattani), Brunai Darussalam, dan Philipina Selatan. Tafsir ini terdiri dari 3 jilid, jilid 1 terdiri dari juz 1-10, jilid 2 terdiri dari juz 11-20, dan jilid 3 terdiri dari juz 21-30, yang telah dialihhurufkan selama 5 tahun dan selesai tanggal 25 Februari 2015.

Mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), dan Partai Masyumi ini paling senang membaca dan menulis. [Lasa Hs].

Buku karya Ismail Thaib, antara lain:

- 1) *Bunga Rampai Islam*; 2) *Menghidupkan Sunah Rasulullah Saw*; 3) *Tafsir Surat Al Fatihah dan Surat al-Ashr*; 4) *Setan Versi Al Quran*; 5) *Menelusuri Hubungan Antar Ayat*; 6) *Seluk Beluk Sedekah dan Rahasiannya*; 7) *Problematika Jum'at dan Shalat Jum'at Bagi Perempuan*; 8) *Potret Kehidupan Sahabat (terjemahan)*; 9) *Menuju Alam Keabadian*; 10) *Pertumbuhan Ijtihad dan Perkembangannya*; 11) *Kata-kata Mutiara*; 12) *Kapita Selekta*; 13) *Jati Diri Muslim*; 14) *Almau'idzat*; 15) *Tafsir Surat-Surat Pendek (dalam bahasa Arab)*; 16) *Dialog Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dan Malaikat Jibril*; 17) *Matahari, Bulan, dan Bintang-Bintang Sujud Kepadaku (kisah Nabi Yusuf a.s.)*; 18) *Pereulak Kerajaan Islam Pertama Nusantara*; 19) *Pandangan Orientalis terhadap Kitab Tafsir dan Kutubus Sittah*; 20) *Ensiklopedi Jum'at*; 21) *Fadhilah Kalimat Laailaha illallah dan Surat Al-Ikhlash*; 22) *Kunci-Kunci Pembuka Pintu Langit*; 23) *Nuzulul Qur'an*; dan lainnya.

KASMAN SINGODIMEJO

Jalan pemimpin itu bukan jalan yang mudah. Memimpin itu jalan menderita



Prof. Dr.(Hc) Mr. Kasman Singodimedjo (lahir di Poerworedjo, 25 Februari 1904, wafat di Jakarta, 25 Oktober 1982. Jaksa Agung Indonesia (1945-1946), Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Sjarifuddin II. Ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).

Mr. Kasman Singodimedjo bagai ditakdirkan untuk selalu tampil sebagai perintis di saat-saat kritis. Di waktu sekitar proklamasi, kata Jenderal TNI Abdul Haris Nasution, adalah lazim kalangan pemuda menyebut trio Soekarno-Hatta-Kasman, di mana Kasman dirasakan sebagai tokoh militer yang terdepan ketika itu. “Hanya dengan pimpinan Soekarno-Hatta-Kasman rakyat dapat digerakkan secara massal, dan kegiatan tanpa disertai ketiga pemimpin ini, dewasa itu akan merupakan suatu gerakan yang hanya setengah-setengah saja,”. Sedemikian besar sosok Kasman Singodimedjo pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia membuat dia memiliki peran yang cukup krusial di masa kemerdekaan.

Kasman yang terlahir di Purworejo dengan latar belakang pendidikan barat ini, malang melintang di dunia militer sejak jama pendudukan Jepang sampai dengan persiapan kemerdekaan. Inilah yang membentuk pribadi Kasman menjadi pribadi yang tegas. Aktifitasnya di organisasi juga tidak kurang-kurang. Tercatat sebagai aktivis *Jong Islamieten Bond* dan Muhammadiyah

menjadikan Kasman memiliki konsistensi keagamaan yang kuat. Beberapa jabatan politis sempat diembannya namun jiwa tentaranya tidak bisa dibendung untuk selalu memikirkan tentang keamanan negeri yang baru saja merdeka ini. Sempat memegang kendali sebagai ketua KNIP, lembaga peradilan dan menteri, sosok Kasman sangat menonjol ketika dihadapkan pada saat-saat kritis. Inilah yang selalu ditekankan bahwa ketika seseorang menjadi pemimpin itu bukanlah sebuah kenikmatan namun sebuah resiko untuk menderita.

Menurut Jenderal TNI A.H. Nasution, ketampilan ikut memimpin negara dan tentara pada saat-saat yang amat kritik itu, tidak akan datang dari “pemimpin-pemimpin rutin.” Tugas memimpin di masa-masa kritik pasti jauh lebih berbahaya dan lebih menentukan bagi nasib bangsa, dibanding dengan di masa negara dan tentara telah tegak terkonsolidasi. Dan ini telah dibuktikan oleh sosok Kasman Singodimedjo.

Peranan Kasman dalam saat-saat kritis terlihat ketika proses penyepakatan Preambule Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud kelengkapan Indonesia sebagai sebuah negara. Peristiwa yang kemudia dikenal dengan Tujuh Kata ini merupakan peristiwa upaya penyatuan kepentingan Islam dan non Islam atas tujuh kata yang ada di pembukaan UUD 1945. Waktu itu Ki Bagoes Hadikusumo menjadi satu-satunya representasi Islam dan berada di bawah tekanan namun memiliki keteguhan untuk tidak menghilangkan tujuh kata itu. Hanya Kasman yang berhasil meyakinkan Ki Bagoes bahwa kompromi ini murni untuk kepentingan bangsa dan sama sekali tidak akan merugikan umat Islam. Disitulah kemampuan lobi Kasman di saat kritis diuji dan dibuktikan, meskipun faktor kesamaan kiprah di Muhammadiyah yang menjadikan Ki Bagoes Hadikusumo melunak dan bersedia menghilangkan tujuh kata.

Di masa kemerdekaan, Kasman pernah dikriminalisasi oleh rezim yang berkuasa untuk sebuah tuduhan yang tidak pernah dilakukan. Namun kebesaran hati seorang Kasman Singodimedjo sangat diperlihatkan disini. Meskipun dia dikriminalisasi oleh Presiden Soekarno dan harus masuk bui selama 2 (dua) tahun,

namun di saat sang presiden meninggal Kasman merupakan salah satu yang melayatnya. Bagi dia memelihara persaudaraan sesama muslim lebih penting ketimbang memelihara dendam.

Kasman Singodimedjo adalah sosok yang sangat kuat memegang prinsip dan tidak mengenal takut dalam menegakkan kebenaran. Inilah yang membuat dia kadang tidak disukai oleh rezim yang berkuasa. Setelah dikriminalisasi di zaman Soekarno, pada zaman Soeharto pun Kasman tetap melancarkan kritik yang keras. Akibatnya dia menjadi satu-satunya anggota PPKI dan BPUPKI yang tidak dianugerahi Bintang Mahaputra oleh Presiden Soeharto. Namun, Kasman tidak pernah mundur dari keyakinannya itu.

Berbagai resiko yang dihadapi, tidak menyebabkan Kasman surut dari lapangan perjuangan. Seorang Muslim, kata Kasman, harus berjuang terus. Hukumnya wajib, karena *hidup itu adalah perjuangan*. Bagi Kasman, seorang Muslim harus berjuang terus, betapa pun keadaannya lebih sulit dari sebelumnya. Adanya kesulitan-kesulitan itu tidak membebaskan seorang Muslim untuk berhenti berjuang, bahkan ia harus berjuang lebih gigih daripada waktu lampau dengan strategi tertentu dan taktik yang lebih tepat dan sesuai.

Kasman Singodimedjo adalah tokoh pemimpin yang unik. Beliau adalah seorang nasionalis yang memperjuangkan tegaknya Islam, sekaligus pemimpin Islam yang berjuang untuk kepentingan nasional. Beliau adalah seorang politikus yang sekaligus seorang pekerja social. Beliau seorang cendekiawan yang selalu berada di tengah-tengah rakyat. Beliau seorang intelek sekaligus seorang kiai. Lebih dari itu semua, Kasman adalah seorang pejuang tanpa pamrih yang nyaris dilupakan oleh bangsanya. [Wied]



KUNTOWIJOYO

Humanisasi - Liberasi - Transendensi

Prof. Dr. Kuntowijoyo.

Lahir di Bantul 18 September 1943, wafat 22 Februari 2005. Seorang budayawan, sastrawan, dan sejarawan. Anggota Majelis Tabligh PP Muhammadiyah (1985-1990).

Dalam berkarya, Kuntowijoyo hampir selalu menjadikan Islam sebagai fundamen gagasannya. Ia cukup konsisten merujuk ajaran-ajaran Islam, terutama Alquran, sebagai dasar analisis terhadap peristiwa sejarah maupun masalah sosial yang diamatinya. Apa yang dilakukan Kuntowijoyo itu penting untuk mengimbangi paradigma orientalisme sarjana-sarjana Barat.

Namun begitu, Kuntowijoyo tak lantas memaksakan diri menghindari segala teori dan metodologi konvensional Barat. Perkakas keilmuan Barat ia perlakukan sebagai semacam pengayaan pemikiran. Dari situ ia berupaya melakukan sintesis pemikiran Barat dan Islam.

“Misalnya saja, dia menangkap makna yang terkandung dalam Surah Ali Imran ayat 110, dengan konsep-konsep yang dikenal umum yaitu humanisasi dan emansipasi untuk istilah ‘*amr ma’ruf*’, liberasi untuk ‘*nahyi munkar*’, dan transendensi untuk ‘iman kepada Allah’. Di sini dia berupaya memahami Al-Quran dalam kerangka ilmu, terutama teori-teori sosial,” tulis Dawam dalam pengantarnya untuk kompilasi karya Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (2008: 28). Dari kerangka pikir inilah kemudian lahir gagasannya tentang ilmu sosial dan sastra profetik.

Sudah sejak 1982 Kuntowijoyo menengarai perlunya sastra yang melawan arus dehumanisasi sebagai dampak negatif modernisasi. Sastra yang tak hanya melihat manusia sebagai instrumen industri. Sastra yang tak hanya sebatas ekspresi atau laku ibadah penulisnya, tetapi juga punya kekuatan transformatik.

Munculnya warisan intelektual Kuntowijoyo berupa sastra profetik itu ditengarai dipengaruhi oleh tokoh filsuf Islam, yaitu Muhammad Iqbal. Bermula dari gagasan teori Ilmu Sosial Profetik (ISP) yang dapat ditemukan dalam bukunya yang berjudul *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (2006). Kemudian dari gagasan ISP tersebut, muncullah maklumat sastra profetik yang esensinya tidak jauh dari gagasan ISP.

Kata profetik berasal dari kata *prophet* atau nabi, peran kenabian. Kuntowijoyo tidak pernah menyebut karyanya sebagai sastra Islam, sebab kecenderungan masyarakat terlalu sempit dalam mengartikan sastra Islam. Namun demikian, bukan berarti karya sastra Kuntowijoyo tidak bermuatan ibadah dan dakwah (Islam). Sastra profetik Kuntowijoyo memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sastra ibadah dan sastra murni. Sastra ibadah sebagai ekspresi dari penghayatan nilai-nilai agama yang bersumber dari al Quran dan hadis, kemudian sastra murni sebagai ekspresi atas sebuah realitas yang bersifat objektif dan universal.

Menurut Kuntowijoyo, sastra profetik bermaksud melampaui keterbatasan akal-pikiran manusia dan mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. Sastra profetik merujuk pada pemahaman dan penafsiran kitab suci (baca: al Quran) atas sebuah realitas yang terjadi dalam masyarakat. Secara epistemologi, sastra profetik merujuk pada strukturalisme transendental, artinya kitab suci merupakan wahyu yang hanya diyakini oleh orang yang beriman.

Strukturalisme yang dibangun oleh Kuntowijoyo merujuk pada istilah “strukturalisme” yang dipakai Jean Peaget (dalam buku *Structuralism*, 1970). Kuntowijoyo memandang bahwa al Quran adalah struktur, artinya tersusun secara sistematis. Islam adalah struktur, artinya dalam berislam haruslah memahami berbagai konsekuensinya seperti rukun iman, rukun Islam, dan sebagainya. Singkatnya, struktur adalah keutuhan (*wholeness*) sebagaimana yang dikatakan oleh Jean Peaget.

Sastra profetik bisa disebut juga dengan sastra demokratis, karena sastra ini tidak mengharuskan penulis memilih satu premis, tema, teknik, dan gaya (*style*), baik yang bersifat pribadi maupun yang baku.

Kuntowijoyo menginginkan sastra profetik hanya sebatas bidang etika, itu pun dengan suka rela, tidak memaksa. Etika itulah yang disebut sebagai profetik, karena ingin meniru perbuatan nabi yang setelah peristiwa isra'-mi'raj beliau kembali ke dunia untuk menunaikan tugas-tugas kerasulannya (melakukan transformasi sosial) daripada hanya menetap di langit tertinggi.

Etika profetik yang diuraikan Kuntowijoyo berdasarkan al Quran, yaitu pada surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi: "Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah". Setelah menyatakan keterlibatan manusia dalam sejarah (*ukhrijat linnas*), pada ayat selanjutnya berisi tiga hal, yaitu *amar ma'ruf* (menyuruh berbuat kebaikan) atau disebut *humanisasi*, nahi munkar (mencegah kemungkaran) atau disebut *liberasi*, dan *tu'minu nabillah* (beriman kepada Allah) atau disebut *transendensi*. Ketiga hal ini bersifat integral, kesatuan, dan komprehensif, maka tidak bisa dipisah-pisahkan secara atomistis.

Dalam kaitannya dengan sastra profetik ini, Kuntowijoyo melalui karya sastranya mengajak kita untuk peduli terhadap segala persoalan yang ada seperti penindasan politik atau negara terhadap rakyat yang digambarkan melalui novel *Waspirin* dan *Satinah* (2003), ketidakadilan gender, ketidakadilan ekonomi, dan sebagainya.[Ad]

Karya-karya Kuntowijoyo, antara lain adalah:

Kumpulan Sajak: *Isyarat* (1976), *Suluk Awang Uwung* (1976); Cerpen: *Laki-laki yang Kawin dengan Peri* (1994), *Sampan Asmara dan Pistol Perdamaian* (1995); Kumpulan Cerpen: *Hampir Sebuah Subversi* (1999).

Naskah Drama: *Rumput Danau Bento* (1969), *Tidak Ada Waktu Bagi Nyonya Fatma* (1972), *Barda dan Cartas* (1972), *Topeng Kayu* (1973).

Novel: *Kereta yang Berangkat Pagi Hari* (1966), *Khotbah di Atas Bukit* (1976), *Dilarang Mencintai Bunga-bunga* (1992), *Impian Amerika* (1998), *Mantra Penjinak Ular* (2001), *Waspirin dan Satinah* (2003).

Buku: *Social Change in an Agrarian Society: Madura 1850-1940*. -disertasi (1980), *Dinamika Umat Islam Indonesia* (1985), *Budaya dan Masyarakat* (1987), *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (1991), *Radikalisasi Petani* (1993), *Metodologi Sejarah* (1991), *Pengantar Ilmu Sejarah* (1995), *Muslim Tanpa Masjid* (2001), *Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas* (2002), *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (2004), *Petani Priayi dan Mitos Politik* (2017).

LASA Hs.

Menggerakkan Kepustakawanan Muhammadiyah



Drs. Lasa Hs., M.Si.

Pustakawan Utama UGM (2007). Kepala Perpustakaan UMY 2012-sekarang. Anggota Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah 1995-2020. Dosen Ilmu Perpustakaan di berbagai PTN/PTS Yogyakarta 1980-sekarang. . Ketua Forum Silaturahmi Perpustakaan PTM-PTA 2012-sekarang.

Pustakawan senior yang dimiliki Muhammadiyah ini telah memberikan pemikiran, perintisan dan pengembangan kepustakawanan Amal Usaha Muhammadiyah/AUM. Secara formal memang ia bekerja di perpustakaan perguruan tinggi, namun dalam sepek terjangnya telah menyentuh perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, kepenulisan, profesi pustakawan, pendidikan, dakwah Islamiyah, dan Kemuhammadiyah.

Dalam pengembangan perpustakaan Muhammadiyah, melalui MPI PP Muhammadiyah, ia telah membentuk organisasi pengelola perpustakaan dengan nama HIMPUSMA (Himpunan Pengelola Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah). Organisasi ini dibentuk bersama dengan Drs. H., Adaby Darban, SU (Allahu Yarham) dan Drs. Sony Sonhaji (Allahu Yarham) tahun 1998 di Kantor PP Muhammadiyah Jl KHA Dahlan. Organisasi ini telah mampu berfungsi sebagai organisasi kerjasama dan sarana pembinaan perpustakaan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Berbagai kegiatan telah diselenggarakan, seperti seminar, bedah buku, diklat, lomba perpustakaan terbaik, bimbingan akreditasi, dan telah memiliki jaringan informasi antarperpustakaan sekolah Muhammadiyah

yang difasilitasi dan didukung oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Beberapa perpustakaan sekolah Muhammadiyah yang telah terakreditasi A yang tidak lepas dari bimbingannya antara lain perpustakaan SD Muhammadiyah Sapen, SD Muhammadiyah Condongcatur, SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta, SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, SMA Muhammadiyah I Yogyakarta (juara I Perpustakaan Sekolah Nasional, 2016), SMA Muhammadiyah 2, Madrasah Muallimin dan Madrasah Muallimat Muhammadiyah, dan lainnya.

Kemudian untuk mencapai standar mutu perpustakaan sekolah Muhammadiyah telah disusun buku Pedoman Katalogisasi Perpustakaan Muhammadiyah, Manajemen & Standardisasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah Muhammadiyah. Kini sedang disiapkan buku Perpustakaan Sekolah/Madrasah Muhammadiyah Menuju Standar Nasional.

Virus pengembangan perpustakaan sekolah Muhammadiyah ini kemudian menyebar melalui sentuhan Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah'Aisyiyah/PTMA. Beberapa Perpustakaan PTMA yang telah membina perpustakaan sekolah/madrasah Muhammadiyah di wilayahnya antara lain perpustakaan UM Ponorogo, perpustakaan UM Surakarta, perpustakaan UM Magelang, perpustakaan UM Sukabumi, perpustakaan UM Yogyakarta, perpustakaan UNISYA, perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan, dan lainnya.

Untuk mengembangkan perpustakaan PTMA, pada tahun 2004 telah dibentuk Forum Silaturahmi Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah/FSPPTMA. Sejak dibentuk sampai awal tahun 2012 tidak menunjukkan aktivitas yang berarti. Atas inisiatif pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, organisasi ini dihidupkan kembali. Maka digelarlah pertemuan nasional dengan mengundang seluruh kepala perpustakaan PTMA di Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka/UHAMKA Jakarta. Dalam pertemuan itu disepakati untuk menghidupkan kembali FSPPTMA dengan memberikan amanah kepada Lasa Hs (Kepala Perpustakaan UMY) sebagai ketua, Irkhamiyati (Kepala Perpustakaan Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta) sebagai sekretaris, dan

Aris Thahirin (Kepala Perpustakaan UAD) sebagai bendahara untuk masa jabatan 2012-2017. Langkah-langkah pembenahan organisasi pada periode ini antara lain penyusunan AD, ART FSPPTMA, menetapkan visi, misi, tujuan, program jangka panjang (2012-2032), program jangka menengah (2012-2017, 2017-2022, 2022-2027, 2027-2032) dan jangka pendek (tahunan) dan juga telah ditetapkan *milestone*-nya. Selain itu, pembenahan administrasi, registrasi anggota, pembuatan jaringan informasi antarperpustakaan PTMA dan perpustakaan lain, kerjasama dengan PNRI, peningkatan SDM, sosialisasi program, dorongan kompetisi para pustakawan, dan bimbingan akreditasi perpustakaan PTMA.

Memperhatikan perkembangan Muhammadiyah yang telah berumur satu abad lebih, tentunya telah melahirkan beberapa pemikiran dalam berbagai bidang yang terekam dalam bentuk cetak maupun digital. Karya-karya intelektual tokoh dan publikasi Peryarikan itu belum diolah, dan belum didokumentasikan secara profesional. Maka beliau memiliki pemikiran bahwa seluruh Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisiyah dan Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah-‘Aisiyah diharapkan menyelenggarakan Muhammadiyah Corner. Adapun koleksi Muhammadiyah Corner/Muhcor ini antara lain; seluruh publikasi yang diterbitkan oleh Amal Usaha Muhammadiyah, rekaman pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah, rekaman pemikiran orang lain tentang Muhammadiyah, dan kitab-kitab yang menjadi rujukan Muhammadiyah.

Karya tulis yang dihasilkan Lasa Hs. berupa sebanyak 53 buku dan ratusan artikel maupun makalah. Buku-buku karyanya antara lain: 1. Kamus Kepustakawanan Indonesi (2017, edisi 4); 2. Manajemen SDM Perpustakaan (2017); 3. Manajemen & Standardisasi Perpustakaan PTMA (2017); 4. Manajemen & Standardisasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah Muhammadiyah; Menuju Standar Nasional (naskah, 2017); 5. Ensiklopedi Muhammadiyah (karya bersama); 6. 100 Tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi (karya bersama); 7. Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (kata pengantar Amien Rais, 1998). [Ad-LH]



LUKMAN HARUN

Kegigihan Lukman Harun dalam melenyapkan komunisme tidak cukup dilakukan dengan gerakan turun ke jalan dan menggalang kekuatan organisasi kepemudaan dan mahasiswa, tetapi juga ditingkatkan pada upaya politik konstitusional.

Drs. H. Lukman Harun.

Lahir di Suliki Sumatera Barat, 6 Mei 1934, wafat di Jakarta 8 April 1999. Sekretaris Jenderal Asian Conference on Religion and Peace (ACRP), aktif dan perintis World Assembly of Youth (WAY).

Lukman Harun adalah anak ke lima dari pasangan Kamisah dan ayahnya bernama Zaid. Setelah pulang dari Makkah berganti nama menjadi Haji Harun.

Pendidikan dasar Lukman Harun ditempuh di Minangkabau dan SMP Muhammadiyah di Payakumbuh dan pindah ke SMP darurat di Padang Jopang karena terjadi agresi militer Belanda ke-2. SMA Muhammadiyah Lukman Harun ditempuh di Jakarta, dan kemudian melanjutkan kuliah di Fisip UNAS Jakarta. Setelah kuliah Lukman Harun kemudian banyak aktif di berbagai organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI), Federasi Dakwah Mahasiswa dan Senat Indonesia. Di Muhammadiyah sendiri, Lukman Harun mulai terpilih sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Jakarta untuk Periode 1957-1960. Dan identitas kedaerahannya, Lukman Harun juga aktif di organisasi Keluarga Mahasiswa Minangkabau (KMM).

Keaktifannya di berbagai organisasi, khususnya keislaman, membuat Lukman Harun seringkali menghadiri berbagai kegiatan.

Bahkan lama kelamaan, Lukman Harun sering diundang menjadi narasumber di berbagai tempat. Keterlibatan dalam berbagai isu dan aktivitas di dalam negeri pun tidak cukup, Lukman Harun kemudian aktif juga di World Assembly of Youth (WAY). Ini adalah organisasi internasional sebagai bagian atau NGO dari PBB yang berpusat di Brussel (Belgia). Karena di Indonesia belum terbentuk, maka Lukman Harun beserta teman-temannya turut membidani lahirnya WAY Indonesia. Maka diajak bergabunglah beberapa organisasi kepemudaan Islam yang ada di tanah air. Selain jadi pemrakarsa, Lukman Harun juga kemudian menjadi ketuanya. Organisasi yang awal bergabung adalah organisasi berbasis agama, di antaranya adalah PMKRI, GMKI, IMM, Nasyiatun 'Aisyiyah, IPM, SKI, PII, IPNU, PMII, dan GP Ashor.

WAY merupakan organisasi yang bercorak anti Komunis. Maka organisasi yang bergabung pun sebenarnya bukan hanya berorientasi keagamaan tetapi juga yang menentang kehadiran Komunis di tanah air. Karenanya, bisa dibilang bahwa Lukman Harun merupakan tokoh yang begitu gigih menentang komunisme di tanah air. Sebab dengan upaya menggalang organisasi yang tidak sedikit, ini merupakan cara serius Lukman Harun untuk menghapuskan komunisme di Indonesia.

Selain dengan WAY sendiri, Lukman Harun dikenal aktif dalam organ taktis seperti di Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu/PKI. Organ ini seringkali melakukan aksi-aksi massa untuk pembubaran PKI. Bertugas sebagai penggerak massa, Lukman Harun terus menggalang kekuatan pemuda dan mahasiswa untuk menenyapkan PKI dan ajarannya.

Kegigihan Lukman Harun dalam menenyapkan komunisme tidak cukup dilakukan dengan gerakan turun ke jalan dan menggalang kekuatan organisasi kepemudaan dan mahasiswa, tetapi juga ditingkatkan pada upaya politik konstitusional. Ketika Sekretariat Bersama (Sekber) didirikan pada tahun 1964, dimana organ ini merupakan tempat militer, agamawan, pemuda, profesional, dan kelompok-kelompok nonpartai lainnya, Lukman Harun beserta Marzuki Yatim dari kalangan Muhammadiyah turut menandatangani. Sekber ini kemudian pada zaman Orde Baru

menjadi Golkar dan menjadi kekuatan utama pemerintah. Keterlibatan Lukman Harun dalam Sekber ini juga bukan tanpa alasan, sebab Sekber yang kemudian menjadi Golkar secara historis memiliki semangat yang sangat kuat untuk melanjutkan perjuangan pembubarkan komunisme.

Selain turut mendirikan Sekber, Lukman Harun juga ikut turut memperjuangkan dan aktif dalam Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang berdiri 20 Februari 1968 dengan posisi sebagai Sekretaris Umum. Partai ini merupakan lanjutan dari Masyumi yang dibubarkan Orde Lama. Karena diduga ada kekusruhan di kalangan internal yang ditengarai permainan penguasa, maka Partai ini pun tidak bertahan lama.

Selain aktif di berbagai organisasi dalam dan luar negeri, Lukman Harun adalah aktivis Muhammadiyah sejati. Di Muhammadiyah Lukman Harun terhitung banyak jasanya, mulai dari perjuangannya membuka jaringan internasional, sampai kepeduliannya terhadap Angkatan Muda Muhammadiyah agar bisa studi dan mendapatkan beasiswa di luar negeri. Kepada AMM juga Lukman Harun selalu menyampaikan pentingnya sektor ekonomi, jangan sampai kalah dengan pihak lain, agar marwah organisasi semakin baik. Lukman Harun berharap agar Muhammadiyah diurus secara serius dan profesional, jangan hanya menjadikan tempat kedua sehingga yang dicurahkan adalah tenaga dan waktu sisa.

Gagasan dan perjuangan politik Lukman Harun yang sangat penting, antara lain, pertama, terkait masalah interpelasi 31 orang anggota DPR-GR meminta keterangan pemerintah atas bantuan luar negeri kepada agama dan badan-badan agama. Interpelasi ini dikenal dengan interpelasi Lukman Harun. Kedua, RUU Ormas yang saat itu dirancang diduga akan merugikan ormas keagamaan, maka Lukman Harun meminta agar RUU Ormas tidak berlaku bagi organisasi keagamaan karena tidak bertentangan dengan Pancasila. Ketiga, terkait dengan RUU Pendidikan Nasional yang perlu penyempurnaan karena ditakutkan merugikan umat Islam. Dan keempat, perjuangan untuk menggolkan RUU Peradilan Agama di Indonesia. **[Roni]**



Kiai Haji Mas Mansoer.

Lahir di Surabaya, 25 Juni 1896,
wafat di Surabaja, 25 April 1946.
Ketua HB (Hoofdbestuur)
Moehammadiyah 1937-1943.
Tokoh Empat Serangkai.
Pahlawan Nasional Indonesia.

MAS MANSOER

Menyatukan Pemahaman Masalah Hukum Islam

“Para ulama hendaklah mendahulukan yang ahamm daripada yang muhim, artinya mendahulukan yang lebih perlu daripada yang sekedar perlu. Janganlah tenggelam di dalam ilmu, tetapi gunakanlah ilmu itu untuk bekerja atau berjuang bagi kebaikan dan kemajuan masyarakat. Janganlah pula sampai mau dibujuk untuk mengikuti barang yang bathil sekalipun diberi upah yang banyak, tetapi pertahankanlah barang yang haq (benar) sekalipun akan menerima resiko”.

KH Mas Mansur dikenal disiplin. Kiyai yang suka berpotret dan senang memakai sarung dan pecisnya itu telah menanamkan kesadaran disiplin terutama para pimpinan persyarikatan. Sebagai seorang organisator pada masanya terasa sekali adanya penyempurnaan organisasi. Beliau pula yang mencetuskan dan menyusun konsep 12 (dua belas) Langkah Muhammadiyah, yakni:

1. Memperdalam Masuknya Iman;
2. Memperluas Faham Agama;
3. Memperbuahkan Budi Pekerti;
4. Menuntun Amalan *Intiqad* (*self correction*);
5. Memperkuat Persatuan;
6. Menegakkan Keadilan;
7. Melakukan Kebijakan;
8. Memperkuat Majelis

Tanwir; 9. Mengadakan Konferensi Bagian; 10. Mempermusyawahkan Putusan; 11. Mengawaskan Gerakan Jalan; 12. Memper-sambungkan Gerakan Luar.

Pada masa sebelum kemerdekaan pertemuan/musyawarah tertinggi Muhammadiyah disebut *Congres* (bahasa Belanda), diselenggarakan setiap tahun. Pada masa kepemimpinan KH Mas Mansur nama pertemuan itu dirubah menjadi Muktamar, diselenggarakan tiga tahun sekali. Pada Muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985 penyelenggaraan Muktamar disepakati menjadi lima tahun sekali.

Pada *Congres* Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan tahun 1927 disetujui pembentukan Majelis Tarjih yang diusulkan oleh KH Mas Mansur. Namun demikian pada masa KH Ahmad Dahlan lembaga ini sebenarnya sudah dibentuk bersamaan dengan pembentukan Bagian Tabligh, Bagian Pengajaran, Bagian Penolong Kesengsaraan Omoem/PKO, dan Bagian Taman Poestaka. Ia menjadi sebuah program yaitu melakukan pengkajian ajaran agama Islam dan “untuk mencetak ulama-ulama yang ulung lagi modern untuk membimbing ummat yang terpelajar, sehingga cahaya Islam memancar menerangi semesta alam”.

Perlunya keberadaan Majelis Tarjih adalah untuk mencegah timbulnya perbedaan pendapat dan perselisihan masalah agama di kalangan Muhammadiyah dan untuk mencegah penyalahgunaan hukum dan dalil-dalil agama untuk kepentingan politik atau pribadi. Majelis ini melakukan sidang pertama kali di luar Kongres Muhammadiyah di Surakarta untuk menerbitkan Kitab Iman dan Kitab Shalat.

K.H. Mas Mansur selalu merespon persoalan-persoalan sosial dan agama dari aspek keimanan. Saat itu beliau merasakan lemahnya iman umat Islam, kurang cerdasnya umat Islam dalam memahami Islam secara baik, syiar Islam juga kurang, dan pada da'i enggan melakukan dakwah di daerah-daerah terpencil.

Bagi sebagian kalangan Muhammadiyah, dimasa lalu partai politik merupakan alat perjuangan. Sehingga tidak sedikit tokoh-tokoh Muhammadiyah yang terjun langsung ke dalam dunia politik

praktis. KH Mas Mansur juga pernah menjadi penasehat Pengurus Besar Syarekat Islam yang didirikan oleh HOS Cokroaminoto. Organisasi ini dikenal revolusioner dan radikal. Beliau juga pernah menjadi pengurus Partai Islam Indonesia (PII). Begitu menonjol peran beliau bersama tokoh nasional yang lain sehingga beliau merupakan salah satu dari Empat Serangkai, yakni Ir. Soekarno, Drs. Mochammad Hatta, KH Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka bergerak memimpin organisasi Putera (Pusat Tenaga Rakyat) bentukan pemerintah kolonial Jepang yang justru mereka gunakan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Atas peran dan jasanya, Mas Mansur kemudian diangkat sebagai Pahlawan Nasional dengan SK Presiden Nomor 162 tahun 1965 tanggal 26 Juni 1965.

Percik Pemikiran

Dalam pidatonya di Kongres Seperempat Abad di Betawi tahun 1936, KH Mas Mansur menguraikan sikap Muhammadiyah terhadap lima golongan dalam masyarakat, yaitu *golongan pemerintah, golongan pemeluk agama lain, golongan terpelajar, golongan alim-ulama, dan golongan rakyat umum*.

Kepada golongan *pertama, yakni pemerintah*, Muhammadiyah bersikap terbuka, bekerja dengan terang-terangan. Oleh sebab itu, Muhammadiyah mengharap kepada pemerintah agar tetap netral dan adil terhadap Muhammadiyah. Kepada golongan *kedua, yaitu pemeluk agama lain*, Muhammadiyah berseru dan mengajak agar mereka sudi kembali kepada tauhid, bersatu serta menghormati sekalian para Nabi, suka membantu bagi amal usaha Muhammadiyah karena amal usaha itu tertuju bagi kesejahteraan seluruh bangsa tanpa membedakan agama.

Kepada golongan *ketiga, yakni kaum terpelajar*, Muhammadiyah mengharap agar mereka sudi menaruh perhatian kepada agama karena dengan agama ini rasa kasih dan mesra kepada sesama hidup akan lebih meresap, serta budi pekerti yang luhur akan meningkat. Kaum terpelajar yang belum mengenal Islam janganlah tergesa-gesa mencela, tetapi hendaklah menyelidikinya terlebih dahulu sedalam-dalamnya.

Kepada golongan *keempat*, yaitu *alim-ulama*, Muhammadiyah mengharap dan berseru agar mereka suka memperhatikan setiap keadaan pada zaman Rasulullah SAW. dan para *Khulafaur Rasyidin*, terutama tentang bagaimana cara dan sikap Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu di dalam membimbing serta memimpin umat dengan ajaran Islam. Para ulama hendaklah mendahulukan yang *aham* daripada yang *muhim*, artinya mendahulukan yang lebih perlu daripada yang sekedar perlu. Janganlah tenggelam di dalam ilmu, tetapi gunakanlah ilmu itu untuk bekerja atau berjuang bagi kebaikan dan kemajuan masyarakat. Janganlah pula sampai mau dibujuk untuk mengikuti barang yang *bathil* sekalipun diberi upah yang banyak, tetapi pertahankanlah barang yang *haq* sekalipun akan menerima resiko.

Kepada golongan *kelima*, yakni *rakyat umum*, Muhammadiyah bersikap membimbing dan memperbaiki. Membimbing mereka kepada agama yang benar, kepada kehidupan yang baik. Memperbaiki adat istiadat serta akhlak mereka serta memajukan pendidikan dan kecerdasan mereka.

Selain itu, menarik pula perhatian KH Mas Mansur tentang sistem perbankan dipandang dari ajaran Islam. Perhatiannya itu, dia kemukakan dalam tulisan yang dimuat majalah *Siaran* yang diterbitkan oleh Majelis Tabligh tahun 1937 yang isinya: 1). Nash-nash yang sharih (jelas) dari Al-Qur'an Hadits nyata-nyata melarang riba, bunga pinjaman atau renten dan tiada satupun yang membolehkan, 2) Tujuan agama Islam ialah akan mendasari segala usaha dan hubungan manusia dengan dasar kecintaan, kasih dan tolong-menolong, sedang bunga bagi pinjaman nyata memberatkan serta menimbulkan rasa terpaksa dan dendam, 3) Laba daripada pinjam meminjam atau bunga atau rente dan apa saja namanya yang dilakukan oleh bank, adalah berdasar perjanjian terlebih dahulu dengan syarat yang mengikat merupakan paksaan batin bagi orang yang terpaksa meminjam. Serta sangat memberatkan, dengan demikian merupakan aniaya. Padahal, menurut dasar Islam, pinjam-meminjam adalah tolong menolong berdasar kasih sayang dan tidak disyaratkan peminjam harus memberi laba. Laba boleh diberikan nanti pada waktu

pelunasan atas kehendak sukarela dari peminjam dalam jumlah sukarela pula. Bagi yang memberi pinjaman, Allah akan menggantinya dengan pahala.

Dengan alasan tersebut, KH Mas Mansur dengan tidak ragu lagi menetapkan bahwa hukum Bank sebagai keadaannya sekarang ini yang berdasar kepada bunga atau rente adalah haram.

Pada Kongres ke-26 Muhammadiyah Oktober 1937, Mas Mansur mendapat amanah untuk menjadi Ketua Umum Muhammadiyah periode 1937-1943. Dalam Kongres ini Mas Mansur mengusulkan agar dalam Persyarikatan Muhammadiyah dibentuk lembaga atau majelis ulama yang membahas berbagai persoalan agama antara lain untuk menjaga dan memelihara kemurnian agama Islam dari berbagai usaha penyimpangan.

Usulan tersebut didasari pada pemikiran dan kekhawatiran akan timbulnya perpecahan, terutama di kalangan ulama Muhammadiyah, karena adanya perbedaan pemahaman dan pendapat dalam masalah hukum Islam yang berimbas kepada perpecahan dikalangan warga Muhammadiyah. Selain itu, dikhawatirkan pula munculnya penyelewengan dari batas-batas hukum agama karena didorong keinginan untuk mengejar kebesaran organisasi dengan melupakan inti pokok dan jiwa ajaran Islam. Usul Mas Mansur ini mendapatkan respon yang bagus dari para muktamirin, sehingga kemudian dibentuklah Majelis Tarjih. Pada kepemimpinan beliau inilah gerakan Muhammadiyah memiliki roh yang kuat dengan pengaktifan kegiatan Majelis Tarjih yang kemudian menghasilkan rumusan tentang *Masail al Khamsah* (Masalah Lima), yang meliputi hakekat dunia, agama, qiyas, sabilillah dan ibadah.

Karya dan pemikiran K.H. Mas Mansur yang dibukukan dan diterbitkan antara lain: 1. Tauhid dan Syirik; 2. Pemuda dan Tanah Air; 3. Sebab-Sebab Kemiskinan Rakyat Islam Indonesia; 4. Qurban dan Hikmahnya; 5. Cara Mengerjakan Rukun Islam; 6. *Ukuran Kebenaran Suatu Agama*. [Ls-Im]



Prof. Dr. M. Amin Abdullah.

Lahir di Pati, 28 Juli 1953. Ketua PPI Turki 1986-1987. Guru Besar Ilmu Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rektor IAIN/UIN Sunan Kalijaga 2002-2010. Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah 1995-2000. Ketua PP Muhammadiyah 2000-2005.

M. AMIN ABDULLAH

Integrasi-Interkoneksi Islam dan Sains

Paradigma integrasi-interkoneksi dapat dijadikan paradigma keilmuan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi Islam dan atau berbasis Islam, untuk mengembangkan model keilmuan yang non-dikotomik antara ilmu-ilmu agama (Islam) dan ilmu-ilmu umum (sains-teknologi dan sosial-humaniora).

Prof. Dr. M. Amin Abdullah, guru besar dalam Ilmu Filsafat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alumni Pesantren Gontor Ponorogo (1966-1978), pendidikan pascasarjana (S2-S3) di Departement of Philosophy, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turki (1984-1990) dengan disertasi *The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Kant* (1990). Postdoctoral fellowship di Universitas McGill, Kanada (1998). Pidato pengukuhan guru besar berjudul “Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multirelijius” pada 13 Mei 2000.

Dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak 1991, mencapai puncak karir sebagai rektor IAIN/UIN Sunan Kalijaga (2002-2010), dan selanjutnya sejumlah jabatan dan peran penting lainnya sesuai kapasitas ilmunya. Mengajar di berbagai perguruan tinggi lain, utamanya pada program S 3 di Universitas Islam Indonesia (UII), UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta (UMY), Inter-Religious International Ph.D. Program ICRS UGM Yogyakarta, UIN Mataram dan lain-lain.

Beberapa penghargaan yang diperoleh Prof Amin Abdullah antara lain Penghargaan atas Jasa dan Pengabdian dalam Membangun Arah Pengembangan Keilmuan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), Penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam dari Menteri Agama RI dalam Mengawal Integrasi Agama dan Sains di lingkungan PTKIN (2014). Anugerah Inklusi 2015 dalam mewujudkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai Universitas Inklusif.

Pemikiran Amin Abdullah

Hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan tampaknya menjadi pandangan dikotomis. Keduanya ibarat minyak dan air, dua entitas yang seolah tidak bisa bersatu dan terpisahkan. 'Konflik' antara keduanya ini memaksa para intelektual muslim untuk membuat "jembatan epistemologi" guna mendamaikan sains dan agama. Salah satunya adalah M. Amin Abdullah, ia berpendapat bahwa konsep integrasi-interkoneksi merupakan upaya untuk menghindari pandangan dikotomis dari ilmu dan agama (khususnya Islam-ilmu). Dalam pandangan epistemologi, konsep ini mencoba menawarkan kembali semua disiplin ilmu sehingga ada dialogisasi, komunikasi, sinergitas, dan hubungan saling membantu.

Pemikiran epistemologi Amin Abdullah dapat disimak dari pemaparannya tentang epistemologi Islam, yaitu: epistemologi bayani, irfani, dan burhani. Pemikirannya ini mengadopsi dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran epistemologi M. Abid AlJabiry. sebagaimana dapat dilihat dalam karya Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Dua buku al-Jabiry, yaitu *Takwin al-aql Araby* dan *Bunyah al-aql Araby: Dirasah Tahliyyah naqdiyyah li nudzumi al-ma'rifah fi al-tsaqafah al-Arabiyyah*, disebut Amin Abdullah, cukup representatif untuk meneropong struktur fundamental kefilosofan ilmu kajian-kajian keislaman dalam ranah humanities.

Menurut Amin Abdullah, epistemologi bayani, irfani dan burhani Al-Jabiry tersebut menyediakan struktur transformasi studi Islam

Untuk memahami konsep integrasi-interkoneksi keilmuan secara komprehensif, Amin Abdullah memperkenalkan paradigma keilmuan jaring laba-laba (*spider web*) bercorak teoantropo-sentris-integralistik. Melalui gambar jaring laba-laba keilmuan itu pula, Amin Abdullah menyampaikan kritik bahwa radius jangkauan aktivitas keilmuan pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Indonesia hanya terfokus pada lingkaran 1 dan jalur lingkaran lapis 2 (Kalam, Falsafah, Tasawuf, Hadis, Tarikh, Fiqh, Tafsir, Lughah). Itu pun, hanya terbatas pada ruang gerak pendekatan keilmuan humaniora klasik.

PTAI pada umumnya belum mampu memasuki diskusi ilmu-ilmu sosial dan humanities kontemporer seperti yang tergambar pada jalur lingkaran 2 (antropologi, sosiologi, psikologi, filsafat serta berbagai teori dan pendekatan yang ditawarkannya). Alhasil, terjadi jurang wawasan keilmuan yang tak terjembatani antara ilmu-ilmu klasik dan ilmu-ilmu keislaman baru, yang telah memanfaatkan analisis ilmu-ilmu sosial dan humaniora, bahkan juga ilmu-ilmu alam. Lebih dari itu, isu-isu sosial, politik, ekonomi, keagamaan, militer, gender, ekologi, ilmu-ilmu sosial-humaniora kontemporer posmodern sebagaimana tergambar pada jalur lingkaran lapis 3 hampir-hampir tidak tersentuh oleh ilmu-ilmu sosial dan kajian keislaman di negeri ini.

Pemikiran epistemologi Amin Abdullah melalui paradigma integrasi-interkoneksi senantiasa relevan untuk menjadi pijakan pengembangan keilmuan perguruan tinggi di Indonesia, terutama bagi perguruan tinggi Islam dan berbasis Islam seperti Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Paradigma integrasi-interkoneksi dapat dijadikan paradigma keilmuan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi Islam dan atau berbasis Islam, untuk mengembangkan model keilmuan yang non-dikotomik.

Dengan implementasi paradigma integrasi-interkoneksi di perguruan tinggi (Islam dan atau berbasis Islam), selain dapat memangkas dikotomi keilmuan, diharapkan nantinya dapat mengantarkan perguruan tinggi tersebut untuk mencapai kemajuan, terutama dalam pengembangan sains dan teknologi. Sebab, telah menjadi rahasia umum, penguasaan sains dan teknologi di dunia Islam saat ini sangat rendah. [Ad]

BUSYRO MUQODDAS

Mengendalikan Krisis Moral dan Etika Bangsa

"Korupsi membuat jutaan masyarakat yang seharusnya sudah terbebas dari status fakir miskinnya, terpaksa mengalami masa perpanjangan kemiskinannya, sungguh perbuatan yang nista"



Dr. Muhammad Busyro Muqoddas, M.Hum.

Lahir di Yogyakarta, 17 Juli 1952. Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1968-1974. Ketua Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah 1990-1995. Ketua Komisi Yudisial RI 2005-2010. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2010-2011. Penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2008.

Nama lengkapnya Muhammad Busyro Muqoddas, tetapi lebih dikenal dengan nama panggilan Busyro Muqoddas. Busyro adalah seorang tokoh hukum Indonesia kelahiran Yogyakarta 17 Juli 1952 yang pernah menjadi Ketua Komisi Yudisial dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Selama berkiprah di dunia hukum, Busyro seringkali bersikap tegas dan keras terhadap persoalan-persoalan hukum. Dia prihatin melihat kondisi hukum yang terjadi sekarang ini. Misalnya, ketika Bawaslu meloloskan caleg mantan narapidana korupsi. Busyro Muqoddas menyampaikan, jika caleg yang memiliki riwayat buruk seperti ini terpilih kembali maka dampaknya ialah tragedi dalam demokrasi. "Kita mudah menandai sasaran korupsi kalau tidak infrastruktur, APBN dan APBD. Ketika bidang ini dijarah wakil rakyat, dalam proses Pemilu dia akan mengalami beban moral. Dia memiliki riwayat yang buruk yang dia pernah menjadi nabi korupsi dan

dipilih lagi akan terjadi tragedi demokrasi. Ketika tragedi terjadi terus menerus, bukan hanya tragedi demokrasi, justru rakyat dikorbankan oleh Pemilu itu sendiri," jelasnya.

Dia mengatakan, KPU dan Bawaslu harus menjadi lembaga yang sama-sama memiliki visi, misi dan substansi yang sama. Dia menyayangkan adanya masalah krusial terkait PKPU dimana Bawaslu membuat keputusan tersendiri soal mantan napi korupsi. Busyro mengatakan kondisi demokrasi belakangan cukup memprihatinkan. Ia melihat demokrasi semakin liberal dan transaksional. Dalam demokrasi transaksional, kekuatan modal akan menjadi penentu. Jika dibiarkan, ini akan berbahaya bagi masa depan demokrasi. Dampak demokrasi transaksional ini adalah krisis kepemimpinan. Rakyat kemudian yang akan merasakan dampaknya.

Busyro Muqoddas menilai, larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) seharusnya didukung semua kalangan, terutama pemerintah dan DPR. Apalagi, DPR merupakan representasi rakyat. "Semua kalangan harus mendukung. Rakyat butuh perwakilan yang pro terhadap gerakan pemberantasan korupsi. Kalau DPR menolak, itu aneh," ujar Busyro.

Menurut dia, semua kalangan seharusnya memberi perhatian penuh terhadap seruan moral KPU tersebut. Apalagi, seruan tersebut telah melalui kajian empiris serta berbagai pertimbangan yang didukung dengan data berbasis riset. "Seruan KPU itu harus didukung, saya melihat yang tidak mendukung itu tidak memiliki alasan yang jelas," tegas Busyro.

Lebih lanjut Busyro menyampaikan, konteks korupsi di Indonesia semakin jelas menunjukkan jenis korupsi politik. Korupsi dilakukan pejabat di berbagai level dengan permainan bisnis. "Didominasi oleh bisnis, pejabat publik melakukan korupsi karena tekanan kekuatan bisnis pemodal. Apakah pemerintah membaca tidak seperti ini. Di satu sisi, lanjut dia, mantan napi korupsi berhak menjadi baik. Tetapi di sisi lain, untuk mengulang jabatan publik lagi apakah pemerintah berani mengambil risiko. "Apakah

tidak ada pejabat publik yang memiliki *track record* yang jelas. Jika masih memiliki banyak stok yang bagus mengapa larangan KPU tidak didorong semua kalangan," ujar Busyro.

Pikiran-pikiran Busyro tentang berbagai praktik korupsi dan manipulasi sering dicetuskan dalam tulisan-tulisan pendek, yang dia unggah di media sosial. Dalam sebuah tulisannya, dia mengatakan:

"Mekanisme praktik kelompok mafia peradilan selama ini telah menggambarkan pola gerak yang sistemik dengan pemeran utama yang terdiri dari: person hakim, jaksa, polisi, pengacara, makelar kasus, cukong sebagai pemodal. belakangan semakin terkuak adanya peran aktor utama lain yaitu politisi dan birokrat. Lengkap dan SEMPURNA! sudah. Sebagaimana mafia di Sisilia, Kolombia, dan lain-lain yang menggambarkan salahsatu bentuk perilaku anomali manusia dan pengingkaran atas kesejatian (otentisitas) dirinya. Inilah zaman, ketika modernitas kehidupan memerlukan rasionalitas pada setiap pilihan dan langkah hidupnya. Sayangnya, yang terjadi justru irasionalitas, yaitu pembunuhan atas fitrah dirinya sendiri".

Dalam tulisannya yang lain juga dikatakan, *"Berbagai laku kepalsuan, kebohongan, penipuan dan pembodohan sistemik, penistaan terhadap agama dengan bertopeng simbol-simbol agama, korupsi politik, hingga korupsi dalam bentuk menjarah kekayaan negara yang menjadi milik sah rakyat menjadi lazim di sekitar kita. Bahkan hak anak untuk berkembang akhlak, moral, serta akal budinya pun dikorup orang tuanya dengan memberi makan minum dari harta jarahan melalui kekuasaan. Bukankah membesarkan anak keturunan dengan harta haram, sejatinya adalah mengkorup dan merenggut titah fitrahnya, berarti merusak belahan jiwanya"*

Hukum itu kristalisasi dan normativasi akhlak, etika dan moral. Ketiganya mengandung "nilai rasa" yang menghasilkan kepekaan dan empati yang bersumber di hati. Maka hati merupakan unsur terpenting didalam memiliki dan memahami hukum. Dihati yang tenang (*muthmainnah*), penegakan hukum akan berhasil secara substansial. Jiwa tenang bersumber dari kedekatan dengan Ilahi

dan bersahabat dengan rakyat tertindas. Maka dekatilah Tuhanmu dan rengkuhlah mereka kaum tertindas dan hindarilah kemewahan bendawi.

Dalam kompleksitas problem bangsa yang semakin tidak solutif dan jauh dari advokasi ini, Busyro mengatakan,

"...kiranya perlu dilakukan gerakan keadaban yang berbasis pada elemen masyarakat lemah....target umum dan makro agar elemen masyarakat sipil menyadari bahwa peran yang semakin menguat pada negara tanpa dibarengi dengan komitmen moral dalam proses-proses politik, hanya akan mengakibatkan terkikisnya nilai keadaban dan kehancuran martabat bangsa..."

Selain pendidikan secara formal peraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) di tahun 2008 ini juga mengikuti berbagai pelatihan, sebut saja Pelatihan Investigasi Pelanggaran HAM Berat yang diikuti di tahun 2004. Ketika tahun 2004 Dirjen Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI bersama dengan Institute of Human Rights, University of Oslo Norwegia membuat pra-pelatihan internasional bidang Human Rights, Conflict Transformation and Peace Promotion in Norwegia yang diselenggarakan di Bogor Busyro juga tercatat sebagai peserta.(IM)



M. DAWAM RAHARDJO

Membangun Ekonomi Islam Institusional

Prof. Drs. Dawam Rahardjo.

Lahir di Solo, 20 April 1942, wafat di Jakarta, 30 Mei 2018. Seorang Ekonom Indonesia. Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah 1995-2000. Anggota PP Muhammadiyah 2000-2005.

Wacana ekonomi Islam sangat mungkin untuk terwujud di negara-negara demokrasi seperti Indonesia. Dikembangkannya lembaga pengumpul zakat, infak, sedekah, dan wakaf dan koperasi bisa menjadi modal penting menuju penguatan ekonomi Islam.

Adapun rancang bangun Ekonomi Islam Institusional dapat digambarkan sebagai berikut. *Pertama*, studi akademis tentang hakekat Ekonomi Islam, yang telah dimulai oleh Sjafruddin Prawiranegara. Kajian ini seharusnya bertolak dari pengertian mengenai “Islam” itu sendiri dalam arti generiknya, yaitu yang mengandung arti keselamatan (*salvation*), perdamaian (*peace*) dan kesejahteraan (*welfare*). Kajian ini mengarah kepada rumusan paradigma Ekonomi Islam, yang selama ini diasumsikan bertolak dari konsep “syari’ah”, dengan konsekuensi, Ekonomi Islam diidentikan dengan Ekonomi Hukum (*Legal Economics*).

Kedua, berhadapan dengan realitas bahwa Ekonomi Islam dipersepsikan sebagai identik dengan Ekonomi Syari’ah, maka studi akademis Ekonomi Syari’ah perlu diperluas ke arah kajian konsep *al Maqosith al Syari’ah* (maksud atau tujuan Syari’ah). Kajian ini akan mengarah kepada kajian filsafati mengenai aspek-aspek *al maslahah al mursalah* (*public benefit* berdasarkan *moral reasoning*) yang mencakup pemeliharaan dan pengembangan iman atau agama, akal, kehormatan, jiwa, keturunan dan harta. Kajian ini akan menghasilkan konsep mengenai Doktrin Kesejahteraan Manusia atau Doktrin Kemuliaan Hidup Manusia.

Kajian inipun juga bisa mengarah kepada konsep Ekonomi Islam sebagai Ekonomi Kelembagaan.

Ekonomi syari'ah sebagai Ekonomi Hukum sebenarnya mengemban misi amar ma'ruf nahi munkar dengan mengikuti prinsip "menghilangkan mudharat lebih diutamakan dari mencapai manfaat yang belum pasti". Aspek nahi munkar didahulukan dengan melakukan, *pertama*, menjalankan 3 prinsip: (1) menghindari perjudian (*maisir*), menghindari spekulasi (*gharar*), menghilangkan eksploitasi modal atas tenaga kerja (*riba*), menolak barang-barang yang haram dalam produksi dan konsumsi. *Kedua*, menciptakan 4 praktek kebaikan (*good practice*), yaitu: (1) memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa yang halal dan baik (*halalan-toyyiban*); (2) perdagangan yang jujur dan adil (*fair trade*); (3) menyediakan fasilitas kebaikan (*qord al hasan*); dan (4) transfer pendapatan dan kekayaan dari orang yang berkelebihan kepada yang berkekurangan (*sadaqah*) sebagai sistem jaminan sosial.

Ketiga, dalam kaitannya dengan studi mengenai doktrin-doktrin Ekonomi Islam, dari ancangan rancang bangun Ekonomi Moral Pasar Sosial Islam, ada tiga doktrin ekonomi Islam yang diusulkan untuk dipikirkan. (1) Doktrin kebebasan yang bertanggung jawab yang berbeda dengan doktrin *laissez-faire* dalam ekonomi liberal. Dalam doktrin ini terkandung aspek moral dalam perilaku manusia sebagai agen ekonomi. (2) Doktrin Pasar Berkeadilan (*fair exchange* atau *fair-trade*). Doktrin ini adalah tandingan dari doktrin perdagangan bebas *free-trade* dalam perdagangan internasional maupun nasional dan lokal yang memihak secara seimbang antara produsen maupun konsumen dan bisa dijadikan landasan bagi kemandirian ekonomi dari ketergantungan perdagangan (*trade-dependency*). (3) Doktrin kesejahteraan sosial berdasarkan al Maqosith al Syari'ah. Doktrin ini akan membedakan diri dari doktrin pasar sosial yang cenderung merupakan revisi dari sistem ekonomi liberal tanpa perbedaan dalam hakekat. Doktrin ini bertujuan mencari sistem jaminan dan perlindungan terhadap hak manusia untuk hidup mulia dan kebahagiaan (*human happiness*), sedangkan doktrin pasar sosial hanya menyangkut jaminan sosial (*social security*), sementara

doktrin Islam mencakup jaminan kemanusiaan (*human security*).

Keempat, kajian mengenai prinsip-prinsip Ekonomi Moral Pasar Sosial yang mencakup prinsip-prinsip (1) hak milik berfungsi sosial, (2) tanggung jawab moral, (3) toleransi dalam kemajemukan, (4) demokrasi-musyawarah atau komunikasi deliberatif (5) solidaritas sosial (6) keseimbangan pasar dan (7) keadilan sosial atau keadilan distributif.

Kelima, dalam melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi, baik dalam kerangka Ekonomi Syari'ah dan Ekonomi Moral Pasar Sosial, perlu dipelajari pembagian fungsi dan peranan 3 sektor ekonomi, yaitu sektor individu, sektor komunitas atau sektor sosial dan sektor negara. Kajian ini akan mengarah kepada kajian Ekonomi Politik yang menyangkut interaksi dan kerjasama antara tiga sektor ekonomi itu, baik di bidang produksi, distribusi dan konsumsi. Kajian ini memakai pendekatan ekonomi komparatif antar sistem dan model ekonomi. Dalam studi Ekonomi Islam, yang baru dikaji adalah peranan negara dalam perekonomian Islam sebagai ditulis oleh Muhammad Akram Khan. "The Role of Government in the Economy".

Kesimpulannya, sebagai diskursus, studi Ekonomi Islam intinya menyangkut dua bidang kajian dan penelitian. Pertama kajian dan penelitian tentang realitas yang telah terjadi dan mencapai tingkat diskursus, yaitu kajian mengenai Ekonomi Islam sebagai Ekonomi Syari'ah. Kedua, tentang Ekonomi Islam sebagai Ekonomi Institusional yang mencakup gagasan Ekonomi Islam secara komprehensif. Kajian ini akan menghasilkan konsep Ekonomi Islam sebagai sistem Ekonomi Moral Pasar Sosial.

Berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang bebas nilai, hanya mencakup aspek kelembagaan, Ekonomi Islam, sebagai ekonomi yang berbasis nilai (*value-based economics*) mencakup aspek mentalitas yang bersumber pada nilai. Dewasa ini, studi Ekonomi Syariah yang sebenarnya juga berbasis nilai itu, tetapi masih terbatas pada aspek kelembagaan, khususnya lembaga perbankan dan keuangan. Karena itu maka agenda studi Ekonomi Islam di masa mendatang perlu mengarah kepada kajian Ekonomi Islam sebagai Ekonomi Kelembagaan.

Dalam realitas, Ekonomi Syari'ah memiliki nilai instrumental yang tinggi karena sudah dilaksanakan dengan berhasil, walaupun masih terbatas yang diindikasikan oleh pangsa pasar pengelolaan sumberdaya keuangan, yaitu di Indonesia hanya sekitar 3,8%. Sementara itu, pengembangan pangsa pasar itu terganjal dengan keterbatasan modal domestik.

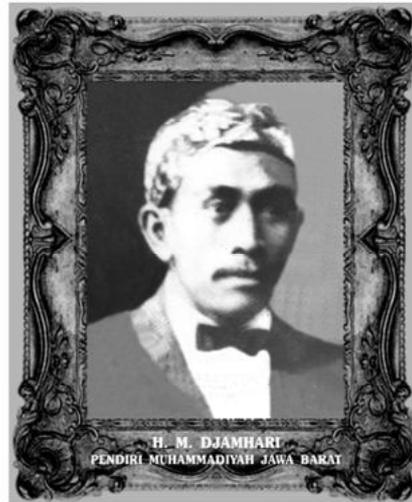
Karena itu dewasa ini diperlukan pengembangan visi dan misi Ekonomi Islam yang baru, yaitu ukuran keberhasilan ekonomi tidak terbatas pada ukuran pertumbuhan ekonomi, tetapi mencakup 5 aspek: (1) *Economic and Social Inclusion* atau Demokrasi Ekonomi (*Economic Democracy*) atau Partisipasi Ekonomi (*Participatory Economy*), (2) Kemandirian Ekonomi (*Economic Independency*) (3) Kualitas Hidup Manusia (*Quality of Life*) atau kemartabatan Hidup Manusia (*Human Dignity*) (4) Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan keamanan sosial-Ekonomi (*Social and Economic Security*), (5) Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Dengan demikian maka agenda studi Ekonomi Islam tidak hanya mencakup pembangunan ekonomi (*economic development*), melainkan juga pembangunan manusia seutuhnya (*total human development*) sebagai visi baru pembangunan yang tidak hanya menyangkut aspek material, melainkan juga aspek kebudayaan (*cultural*) dan kerohanian (*spiritual*). Karena itu, maka yang pertama perlu dilakukan adalah redefinisi Ekonomi Islam sebagai ilmu tentang perilaku manusia dalam pengelolaan sumberdaya, dengan cara menghindari kegiatan yang buruk dan melakukan kegiatan yang baik, guna mencapai keselamatan, perdamaian, dan kesejahteraan hidup manusia (*falah*). [Ad]

Buku karya M Dawam Rahardjo: 1. Esai-esai Ekonomi Politik (1983); 2. Pembangunan Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja (1987); 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Krisis (1987); 4. Deklarasi Mekah: Esai-esai Ekonomi Islam (1987); 5. Etika bisnis dan manajemen (1990); 6. Habibiomics: Telaah pembangunan ekonomi (1995); 7. Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi (1999); 8. Paradigma Alquran: Metodologi dan Kritik Sosial (2005); 9. Nalar Politik Ekonomi Indonesia (2011); 10. Arsitektur Ekonomi Islam (2015)

MUHAMMAD DJAMHARI

Dari Muhammadiyah Untuk Ummat dan Bangsa



Misi lain dari M. Djamhari untuk membawa ajaran Muhammadiyah ke Garut yaitu karena maraknya praktek keagamaan yang dianggapnya tidak murni bahkan dianggap mengancam aqidah. M. Djamhari berniat memurnikan ajaran Islam di Garut. Bahkan selain itu, ada juga tradisi hiburan di Garut yang dianggapnya merusak moral masyarakat dan sedikit demi sedikit dikikisnya.

H. M. Djamhari.
Lahir di Garut tahun 1882,
wafat 27 Juni 1947. Salah satu
perintis berdirinya Muhammadiyah
di Jawa Barat.

Berbicara Muhammadiyah di Jawa Barat, kita akan tertuju pada sosok M. Djamhari. Pria kelahiran Garut tahun 1882 ini merupakan perintis berdirinya Muhammadiyah di Jawa Barat. Lahir dari keluarga cukup terpandang, M. Djamhari memiliki peran yang strategis di kalangan masyarakat. Sebagai putra ke-6 dari 7 bersaudara, M. Djamhari lahir dari pasangan Dasiman dan Masini. Dasiman adalah putra dari Mas Ngabehi Kudus Jawa Tengah.

M. Djamhari kecil merupakan anak yang rajin belajar. Ilmu agama ditempuhnya sejak dini. Ilmu agama didapatkan M. Djamhari dari mengaji di malam hari. Dibanding saudara-saudaranya yang lain, M. Djamhari termasuk paling tekun. Selain rajin belajar, sejak kecil

juga M. Djamhari sudah terlihat bakat lainnya yaitu berbisnis. M. Djamhari sudah belajar menjajakan barang dagangannya seperti hasil kerajinan kepada orang-orang Eropa yang datang bertamu di Garut.

Selain dari garis orang tuanya sendiri, M. Djamhari memiliki garis leluhur terpendang dari garis leluhur istrinya Siti Rukmanah. Mertua M. Djamhari selain tergolong kaya, juga memiliki pandangan lebih terbuka dan jauh ke depan. Pada masanya, orang-orang seperti itu tergolong langka. Maka tidak heran jika kemudian M. Djamhari dari mertuanya ini menjadi banyak kenalan dan bergaul dengan para pemuka agama dari berbagai kalangan dan berbagai daerah.

Bakat dagang M. Djamhari sejak muda kemudian semakin terasah dan mendapatkan peluang lebih besar dengan bekerjasama dengan mertuanya yang seorang pebisnis besar pada saat itu. Aktivitas berdagangnya tidak hanya dilakukan di Garut, tetapi juga ekspansi ke berbagai kota lain seperti Jakarta, Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan. Tempat-tempat ini lebih sering dikunjunginya terkait dengan bisnis batik yang digeluti M. Djamhari.

Kegiatan bisnis batik inilah yang mengantarkan M. Djamhari untuk berkenalan dengan Khatib Amin Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, yaitu KHA. Dahlan. Sambil berbelanja batik ke Yogyakarta, M. Djamhari senantiasa bertemu dengan KHA. Dahlan dan senantiasa mengamati gerak langkah dan peran Muhammadiyah di Yogyakarta. Di Yogyakarta ini juga M. Djamhari sering berbincang-bincang tentang Muhammadiyah dengan sahabat-sahabatnya yang turut bergabung dengan perjuangan KHA. Dahlan tersebut.

Dari situ, M. Djamhari begitu kagum dengan gerakan keagamaan ala Muhammadiyah yang benar-benar melakukan dakwah secara nyata. Salah satu yang cukup menonjol saat itu dilihat adalah lembaga pendidikan Madrasah Muhammadiyah di Suronatan. Sebenarnya M. Djamhari juga memiliki binaan lembaga pendidikan di Garut. M. Djamhari kemudian berniat

mengembangkan model pendidikan Muhammadiyah untuk diterapkan di tanah kelahirannya itu.

Misi lain dari M. Djamhari untuk membawa ajaran Muhammadiyah ke Garut yaitu karena maraknya praktek keagamaan yang dianggapnya tidak murni bahkan dianggap mengancam aqidah. M. Djamhari berniat memurnikan ajaran Islam di Garut. Bahkan selain itu, ada juga tradisi hiburan di Garut yang dianggapnya merusak moral masyarakat dan sedikit demi sedikit dikikisnya.

Perjuangan gigih M. Djamhari hingga akhirnya Muhammadiyah di Garut berdiri pada tahun 1923. Dari situ kemudian gerak langkah Muhammadiyah menjadi lebih cepat. Walaupun tidak sedikit rintangan dan fitnah yang menyertai perjalanannya, M. Djamhari terus bergerak menebar kebaikan lewat pendidikan dan amal sosial nyata bagi masyarakat.

Langkah serius M. Djamhari juga dibuktikan dengan mengarahkan anak-anaknya untuk senantiasa membantu dirinya menggelorakan dakwah Muhammadiyah. Seluruh putra dan putri M. Djamhari aktif dan turut memajukan Muhammadiyah di berbagai bidang, selain memiliki profesi dan mengembangkan perannya pada wilayah keummatan yang lebih luas. M. Djamhari telah mewakafkan tanah dan hartanya yang sangat banyak untuk ukuran zamannya. Beberapa amal usaha Muhammadiyah yang masih beroperasi sampai saat ini diantaranya adalah wakaf dari M. Djamhari. Untuk memakmurkan lembaga pendidikan dan masjid, M. Djamhari tidak segan-segan menghadirkan ulama dari jauh yang memiliki keilmuan tinggi.

Walaupun pernah berperan dalam pendirian partai Masyumi, namun M. Djamhari tetap seorang pejuang Muhammadiyah yang bergerak di wilayah kemasyarakatan. Semangat juangnya itu membuat dirinya terus bergerak maju meski sudah tua dan sakit-sakitan. Menjelang Garut menjadi Lautan Api, pada tanggal 27 Juni 1947, M. Djamhari berpulang ke rahmatullah, meninggalkan buah perjuangan dan semangatnya yang terus menggelora sampai saat ini. [Roni]



M DASRON HAMID

Berkhidmat Mengelola Muhammadiyah

Ir. H.M. Dasron Hamid, MSc.

Lahir di Yogyakarta, 29 Agustus 1940, wafat di Yogyakarta 24 April 2015. Rektor UMY 1986-1997 dan 2008-2012. Bendahara PP Muhammadiyah 1985-1990 dan 2000-2005, Ketua Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah 1990-1995, Ketua Lembaga Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah 2005-2008. Ketua Umum Perserikatan Sepakbola Indonesia Mataram (PSIM) 1981-1996, Ketua Komisaris Daerah PSSI DIY 1996-2006, Ketua Umum KONI DIY 1998-2008, Ketua Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera 1912 (2000-2005).

Kontribusi besarnya membidani kelahiran UMY. Sentuhan tangan Dasron Hamid membuat UMY mampu bersaing dengan kampus lainnya yang lebih dulu berdiri, hingga menunjukkan kejayaannya sampai saat ini. Ketekunan Dasron menangani UMY membuatnya lupa melanjutkan studi S3. Dengan segala keihklasan, ia justru banyak menciptakan jalan bagi lahirnya berpuluh-puluh doktor lulusan dalam maupun luar negeri.

Pribadi yang sederhana, jujur, profesional, ikhlas, dan rendah hati itu telah memberikan kontribusi besar kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Kontribusi yang monumental itu antara lain; pendirian, pengembangan, dan melambungkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pembangunan Sportorium UMY (sebagai ajang Muktamar satu Abad) dan persepakbolaan Muhammadiyah. Karir sebagai dosen dan aktivitas Muhammadiyah telah menggoreskan tinta emas pemikiran dan

langkah pendidikan Muhammadiyah. Dengan kepiawaian manajemen dan *networknya*, dengan langkah pasti UMY bangkit kembali menjadi kampus yang Unggul Islami, Muda Mendunia dan menjadi PTM papan atas dan termasuk PTS yang diperhitungkan.

Dasron Hamid yang dididik dan dibesarkan dalam keluarga Muhammadiyah dan didewasakan dalam kancah perjuangan Muhammadiyah mewarisi beberapa sepak terjang ayahandanya Abdul Hamid yang dalam bahasa Jawa disebut: “*nunggak semi*”. Apabila dulu Bapak Abdul Hamid pernah menjadi bendahara PP Muhammadiyah, maka Pak Dasron pun pernah menjadi bendahara Persyarikatan. Bapaknya dulu, berulang kali menjadi ketua panitia muktamar, maka Pak Dasron pun menjadi Ketua Muktamar Muhammadiyah di Solo tahun 1985 sampai Muktamar Muhammadiyah Satu Abad di UMY Yogyakarta tahun 2010. Namun satu hal yang tidak diikuti, yakni dulu Bapak Abdul Hamid pernah aktif di Partai Masyumi sebagai bentuk keterlibatan dalam politik praktis. Sedangkan Pak Dasron tidak terjun ke dunia politik praktis. Bila ayahnya dulu pernah menjabat sebagai Ketua DPRD DIY, maka Pak Dasron pernah menjadi utusan Daerah MPR RI.

Memang Pak Dasron di kala muda sering diiming-imingi jabatan politis termasuk diajak Pak Amien Rais untuk memperkuat Partai Amanat Nasional/PAN. Namun semua kesempatan dan iming-iming jabatan politik praktis itu tidak direspon. Beliau memilih pengabdian berkhidmat di Muhammadiyah terutama dalam pendidikan tinggi. Hal ini bukan berarti bahwa generasi muda Muhammadiyah tidak berpolitik, tetapi juga harus meleak politik. Namun dalam pandangannya bahwa bila ada kader Persyarikatan terjun ke dunia politik praktis hendaknya berpolitik ala Muhammadiyah. Yakni berpolitik yang santun, jujur, bahkan beradab, tidak memanfaatkan Muhammadiyah untuk kepentingan politiknya. Nanti bila telah lepas dari jabatan politik praktis, maka harus melepaskan baju politiknya bila ingin kembali ke Muhammadiyah. Bagi Pak Dasron, “pesan sakti” KH Dahlan: Hidup-hidupi Muhammadiyah, dan jangan cari penghidupan di Muhammadiyah” harus dimaknai secara cerdas.

Memang dalam sejarah pendirian UMY, beliau bukan termasuk generasi awal. Saat itu sebagai pendiri UMY awal terdiri dari tujuh orang sebagai Tim Tujuh yakni; Mustofa Kamal Pasha (Allahu Yarham), Muhadi SH (Allahu Yarham), Humam Zainal SH (Allahu Yarham), Darwin Harsono (Allahu Yarham), Fahmi Muqoddas, Abdullah Effendi, dan Alfian Darmawan.

Untuk mengenang itu, maka sampai kini masih ada satu mobil UMY bernomor polisi AB 7017, yang berarti 7 (tujuh) 0 (orang) 1 (satu) 7 (tujuan).

Namun demikian keterlibatan Pak Dasron dengan UMY sangat intens, sehingga UMY identik dengan Dasron Hamid. Beliau yang mengembangkan, mempromosikan, menyelamatkan, dan melambungkan UMY dengan mencurahkan tenaga, waktu, pemikiran, dan material secara ikhlas, Keunggulan ini didukung dengan rasionalitas, kebersamaan, kesepahaman, kepemimpinan, dan *“nguwongke liyan”*.

Pak Dasron yang menjabat Rektor UMY dua periode itu (2008 – 2010, 2010 – 2012) memang lihai dalam mempromosikan UMY antara lain selalu mengundang (*ngampirke*) orang penting yang ke Yogya untuk ceramah, dialog di UMY. Maka saat itu UMY sering disebut sebagai Universitas Menteri Yogyakarta. Beberapa langkah yang merupakan perjalanan mengembalikan citra dan melambungkan UMY dalam kinerja nyata antara lain; meningkatkan animo dan calon mahasiswa baru, peningkatan kualitas proses belajar mengajar, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat, peningkatan beasiswa & prestasi mahasiswa, kerjasama nasional dan internasional, peningkatan perpustakaan dan peran humas, serta akreditasi prodi. [Lasa Hs]

MUHAMMAD KHALIL KAMALUDININGRAT (SANGIDU)



Menjadi HoofdPenghulu yang Mengayomi

Kyai Sangidu telah memberikan hikmah, sebuah makna tentang jabatan yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya ummat Islam. Sebagai kyai penghulu, dia memiliki fasilitas yang kemudian dimanfaatkannya untuk membantu Muhammadiyah dalam mengembangkan gerakan dakwahnya.

Kanjeng Kiai Penghulu Haji (KHPH) Muhammad Kamaludiningrat atau Kiai Sangidu. Hoofdpenghulu Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat 1914-1940. Pemberi usulan nama Muhammadiyah. Ayah dari Siti Umniyah, salah satu pendiri Nasyi'atul Aisyiyah -Siswa Praya Wanita. Anggota Muhammadiyah nomor 001.

KH Sangidu menjabat sebagai *Hoofdpenghulu*, menggantikan KH Muhammad Khalil Kamaludiningrat, dengan menyandang nama KH Muhammad Kamaludiningrat. Kiai Sangidu menikah dengan putri *Hoofdpenghulu* Muhammad Khalil Kamaludiningrat dan dikaruniai tiga anak yaitu KH Djalal, Siti Salmah, dan Nafiah (Ahmad Basuni, 1972). Kiai Sangidu merupakan sahabat sekaligus pendukung gerakan KH Ahmad Dahlan (khatib amin). Meskipun mertua Kiai Sangidu sangat memusuhi gerakan yang dirintis KH Ahmad Dahlan, tetapi sebaliknya dengan Kiai Sangidu, dia justru mendukung berdirinya Muhammadiyah.

Ketika istri pertama wafat, Kiai Sangidu menikah dengan Siti Djauharijah, putri KH Saleh yang merupakan kakak ipar K.H. Ahmad Dahlan. Pernikahan Kiai Sangidu dengan Djauharijah

melahirkan Siti Umniyah (salah satu pendiri Nasyi'atul Aisyiyah - Siswa Praya Wanita), Muhammad Wardan, Muhammad Darim, Muhammad Jannah, Muhammad Jundi, Burhanah dan Wari'iyah.

Pada tahun 1911, di rumah Kiai Sangidu, KH Ahmad Dahlan menetapkan nama "Muhammadiyah" sebagai nama gerakan yang akan dirintisnya. Ide nama Muhammadiyah itu lahir dari pemikiran Sangidu. Nama Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad SAW ditambah *-iyah*, yang berarti pengikut Nabi Muhammad. Dalam Stamboek Muhammadiyah 1912, nama Kiai Sangidu tercatat sebagai anggota nomor 001.

Pernah terjadi (cerita ini cukup dikenal), Khatib Amin (KHA Dahlan) memerintahkan penyelidikan penentuan hari raya/shalat id dengan metode *hisab* dan *ru'yah bil ain*. Hasil perhitungan awal bulan dengan metode hisab dan *ru'yah bil ain* tidak berbeda. Namun, hasil penentuan menurut Muhammadiyah ini berbeda dengan penentuan Kraton yang menggunakan kalender Aboge, Jawa Islam. Dengan keyakinan membawa kebenaran agama Islam, Khatib Amin memberanikan diri menghadap Sri Sultan Hamengkubuwono VII untuk menyampaikan informasi ini.

Mendengar seorang abdi dalem pamethakan mau menyampaikan persoalan perbedaan penentuan hari raya tersebut, sang Raja Yogyakarta menerima dan mendengarkan pemaparan pendapat Ketib Amin. Dan Sang Raja bersikap bijaksana dengan menyampaikan, "Berlebaranlah kamu menurut hasil hisab atau rukyat, sedang Grebeg Kraton tetap bertradisi menurut hitungan Aboge," demikian sabda Sri Sultan Hamengkubuwono VII kepada Khatib Amin KHA Dahlan.

Kisah yang masyhur di kalangan warga Muhammadiyah ini hanya sampai sebatas demikian, tidak ada kejelasan bagaimana seorang pejabat rendahan (*ketib amin*) di dalam struktur pemerintahan Kraton Yogyakarta bisa dan berani menghadap Raja, menyampaikan pendapat yang berbeda dengan adat Kerajaan.

Rupanya, Khatib Amin bisa masuk ke dalam Kraton bertemu langsung dengan Sang Raja karena adanya dukungan dari *Hoofdpenghulu*. Dan *Hoofdpenghulu* itu adalah KH Muhammad

Kamaludiningrat atau Kiai Sangidu. Khatib Amin KH Ahmad Dahlan, sebagai bawahan dari Hoofdpenghulu, diantar oleh Kiai Sangidu untuk menghadap Sang Raja untuk menyampaikan persoalan perbedaan hari raya tersebut..

Sejak Kiai Sangidu menjabat sebagai *hoofdpenghulu*, KH Ahmad Dahlan bisa leluasa bekerjasama dengan Lembaga Kepenghuluan baik Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Berbeda dengan *Hoofdpenghulu* mertuanya, *Hoofdpenghulu* Muhammad Kamaludiningrat sangat kooperatif terhadap gerakan Muhammadiyah. Karena itu, Khatib Amin bisa membuka kembali jalan permusyawaratan para ulama yang sudah hilang. *Musyawatul Ulama* di Pakualaman yang dipimpin KH Abdullah Siradj merupakan partner Muhammadiyah dalam memutuskan berbagai persoalan keagamaan.

Terhitung sejak tahun 1914, pasca peralihan jabatan *hoofdpenghulu* dari Muhammad Khalil Kamaludiningrat kepada menantunya, Muhammad Kamaludiningrat, gerakan Muhammadiyah mulai memasuki bangsal priyayi. Kantor Penghulu (*nDalem Pengulon*) dapat dipergunakan sebagai tempat beraktivitas dakwah dan tabligh Muhammadiyah, atas izin Kiai Sangidu. Sebelumnya, Bangsal Priyayi Pengulon itu adalah tempat yang tabu bagi masyarakat awam. Sejak saat itu Bangsal Priyayi menjadi tempat penggemblengan kader-kader muballigh Muhammadiyah. Tidak hanya itu, Kyai Sangidu, melalui putrinya Siti Umniyah, juga menyediakan rumahnya, Ndalem Pengulon, dipakai untuk tempat Frobel atau sekolah anak-anak, yang merupakan rintisan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal.

Kyai Sangidu atau Kyai Muhammad Kamaludingrat telah memberikan hikmah, sebuah makna tentang jabatan yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya ummat Islam. Sebagai kyai penghulu, dia memiliki fasilitas yang kemudian dimanfaatkannya untuk membantu Muhammadiyah dalam mengembangkan gerakan dakwahnya dan memberi manfaat bagi masyarakat dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. (*Wied*)



MOHAMMAD DJAZMAN

Menumbuhkan Benih Muslim Intelektual di PTM

Drs. H. Mohammad Djazman Al-Kindi. Lahir di Yogyakarta, 6 September 1938, wafat 15 Agustus 2000. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang pertama (1981-1992), pendiri Majelis Diktilitbang Muhammadiyah, pendiri dan penggagas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Pemimpin Umum Suara Muhammadiyah (1993-1994). Sekjen PP Muhammadiyah hasil Muktamar Muhammadiyah ke-37.

Lahirnya “Muslim Intelektual” akan menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan arah perubahan-perubahan yang kini sedang berlangsung di Indonesia. Sebab, setiap “Muslim Intelektual” senantiasa dijiwai gairah untuk mengamalkan ajaran Islam di tempat dan waktu apapun”. Konsep “Muslim Intelektual’ yang dikemukakannya ini menjadi seluruh pemikiran dan aktivitas Djazman diarahkan untuk menyiapkan dan memfasilitasi kelahirannya.

Mohammad Djazman adalah seorang kader Muhammadiyah, akademisi dan aktivis dakwah yang mencurahkan energi untuk pembinaan kaderisasi di Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk memahami percik pemikiran kependidikannya dapat dilihat dari bagaimana pandangan agama, pendidikan dan kader menurut Mohammad Djazman. Pandangan keagamaan Mohammad Djazman dapat digambarkan sebagai cenderung dinamis-progresif yang senafas dengan kemajuan zaman atau kemodernan. Ia mengatakan, bahwa seorang muslim selalu dituntut untuk mempelajari agamanya. Meskipun se-zarrah debu ilmu yang

dimiliki, agama menuntut kerja keras seorang muslim untuk mengamalkan. Sebaliknya, Islam juga menuntut seorang muslim untuk melaksanakan amalnya dengan bimbingan ilmu. Islam menegakkan prinsip amal ilmiah dan ilmu amaliah. Dunia modern adalah ladang sebagai amanat Allah yang harus diolah untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Lahirnya “Muslim Intelektual” akan menjadi salah satu faktor yang ikut menentukan arah perubahan-perubahan yang kini sedang berlangsung di Indonesia. Sebab, setiap “Muslim Intelektual” senantiasa dijiwai gairah untuk mengamalkan ajaran Islam di tempat dan waktu apapun”.

Konsep “Muslim Intelektual” yang dikemukakannya menjadi seluruh pemikiran dan aktivitas Djazman diarahkan untuk menyiapkan dan memfasilitasi kelahirannya. Mulai dari pengembangan UMS, perintisan pondok Shobron, pendirian Majelis Dikti, dan kegigihannya dalam berkiprah di dunia perkaderan, semua terarah untuk menghasilkan generasi Muslim Intelektual. Menurut Djazman, Muslim Intelektual hanya bisa dihasilkan dari *rahim* perguruan tinggi. Oleh karena itu, dia begitu gigih mengembangkan PTM sebagai ibu kandung yang akan melahirkan sosok Muslim Intelektual itu. Hal inilah yang mendorong Djazman untuk menggagas berdirinya Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lembaga perguruan tinggi inilah yang menjadi tempat untuk pusat aktivitas perkaderan dan pendidikan Muhammadiyah dalam rangka melahirkan generasi Muslim Intelektual tersebut.

Menurut Djazman, apa yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Dahlan tidak sekedar mendirikan satuan pendidikan saja. Yang dilakukannya, dan kemudian menjadi dasar amal usaha Muhammadiyah, adalah meliputi seluruh lapangan kehidupan manusia dan masyarakat. Yang dikembangkan K.H. Ahmad Dahlan bukanlah *sistem*, tetapi “*etos kerja*” berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam di dalam al-Quran.

Manusia dengan etos kerja Islam, menurut Djazman, adalah manusia yang cerdas yang mampu bekerja sama, mampu mengambil keputusan secara cepat, mampu mengamalkan

ilmunya untuk kepentingan orang lain, dinamik dan kreatif, mampu berpikir bebas dan mandiri, ikhlas dan bersih

Konsep yang sangat populer dari Mohamad Djazman adalah kemandirian. Kemandirian bukan berarti harus berdiri sendiri tapi juga bekerja sama yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat mandiri. Karena perguruan tinggi swasta, sehingga harus bersifat mandiri.

Wawasan keilmuan yang sangat luas serta pandangan yang sangat jauh bahkan melampaui zamannya, membuat Mohammad Djazman menjadi salah seorang kader sekaligus seorang akademisi yang menginspirasi.

Sosok Mohammad Djazman adalah tipe orang yang pekerja keras dan sangat sungguh-sungguh. Kerja keras dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan sebuah cita-cita yang melampaui zamannya.

Mohammad Djazman memandang bahwa setiap orang memiliki kemampuan dan kelebihan. Namun demikian, setiap kelebihan pasti mempunyai kekurangan. Kelebihan ini perlu di-*support* agar bisa terus mengembangkan kreativitas yang menjadi kelebihannya. Ia sangat pandai memahami kelebihan yang dimiliki seseorang. Dengan melihat kelebihan tersebut, ia memberikan jabatan kepada orang yang dianggapnya mampu untuk diberi amanah tersebut.

Muhammad Djazman adalah seorang kader Muhammadiyah dan seorang akademisi yang cakap. Beliau adalah rektor yang memiliki jangkauan masa depan untuk mewujudkan sebuah gerak melebur antara pendidikan dan perkaderan di dalam wadah organisasi Muhammadiyah dengan menjadikan Islam sebagai pondasinya. Islam yang berkemajuan.

Mohammad Djazman adalah salah seorang sosok yang menjadi salah satu contoh teladan di dalam penerapan pendidikan yang mencerahkan. Baik saat dia sebagai seorang guru dan saat beliau sebagai seorang pemimpin sebuah lembaga pendidikan. Menurut Djazman, pendidikan itu harus terintegrasi antara agama dan ilmu umum, tidak boleh dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri. Dan

kita memiliki tugas untuk membuktikan tentang hal itu. Kita tidak boleh berhenti dan tak kenal lelah untuk mewujudkan sebuah lembaga pendidikan yang terintegrasi. Kita harus mampu bekerjasama dan bersungguh-sungguh untuk meraih cita-cita itu.

Mohammad Djazman adalah termasuk orang yang mampu bekerjasama dengan baik dan sangat disegani oleh para kolega maupun rekan-rekannya. Disegani bukan karena takut melainkan karena hormat dan kagum kepada kiprahnya. Pendidikan yang menggembirakan itulah yang dijalankan oleh Mohammad Djazman, dimana semua orang merasa bahagia apabila berada dekat dengan beliau dan merasa dihargai. Pendidikan yang ditanamkan kepada kader-kader beliau adalah pendidikan yang memberikan peran dan tanggung jawab.

Saat Djazman mendirikan Pondok Hjjah Nuriyah Shobron, aturan yang diterapkan beliau adalah “tidak ada aturan”. Karena mahasiswa dirasa sudah dewasa mereka mampu mengambil sikap masing-masing dan sikap yang diambil selalu diiringi dengan tanggung jawab. Mahasiswa itu jangan dibatasi, mereka itu masih muda, masih berkembang sehingga perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya. Mohammad Djazman juga orang yang sangat menghargai guru-gurunya. Beliau selalu membawakan tas gurunya sebagai bukti dan dedikasi terhadap orang yang memberikan jalan ilmu kepadanya.

Pendidikan yang mencerahkan atau “*pendidikan progresif religius*” menurut Mohammad Djazaman adalah pendidikan yang cerdas, kaya akan penguasaan ilmu pengetahuan, menyampaikan kabar gembira, tidak boleh membuat sedih, memberikan peran, dan setiap peran selalu diiringi dengan tanggung jawab. Bagi Mohammad Djazman, sikap kritis adalah suatu hal yang wajib ada di dalam diri seorang individu. Tetapi kritis yang dimaksud adalah kritis yang memunculkan pemikiran baru, berbeda serta solutif dengan keadaan yang tepat guna. Wawasan kritis bersumber dari banyaknya ilmu sebagai indikasi dari banyaknya membaca. Membaca buku, membaca al-Quran dan membaca lingkungan.
[Ad]

M. HASBI ASH SHIDDIEQY

Memelopori Fiqh Indonesia Autentik



Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy.
Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904,
wafat di Jakarta, 9 Desember 1975.
Penyusun Kitab Tafsir Al-Bayaan.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 1960-1972.

Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dikenal sebagai ulama yang multidisiplin. Segudang karyanya dalam Al Quran, hadis, tafsir, fikih telah menghiasi toko buku dan perpustakaan. Beliau adalah keturunan ke-37 dari Khalifah Abu Bakar Ashiddiqy. Maka nama Ashiddiqy melekat pada nama akhir putra pasangan Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husien ibn Muhammad Su'ud dan Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz.

Tokoh dengan integritas tinggi dan visioner ini dikenal disiplin dan suka bergaul, tidak suka melihat orang yang malas membaca, menunda pekerjaan, dan memindah buku yang dibacanya. Sosok ulama ini memang peduli pada pendidikan. Beliau pernah menjadi guru pada HIS dan MULO Muhammadiyah dan mengajar di Jadam Muntasik tahun 1937. Bahkan beliau mendirikan madrasah Darul 'Irfan (1440), dan mengajar di Ma'had Imanul Mukhlis/ Darul Mu'allimin.

Kehadirannya di Yogyakarta tahun 1951 mulai membentuk nuansa keilmuan tersendiri. Beliau pindah ke Kota Pelajar ini bersama keluarganya sekitar 8 bulan sebelum PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) berdiri, (kemudian menjadi Institut Agama Islam Negeri dan menjadi UIN) Sunan Kalijaga. Kontribusi

beliau dalam dunia pendidikan antara lain ditunjukkan dengan aktivitas di beberapa lembaga pendidikan seperti Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN, kini MAN I Yogyakarta), Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, IAIN Yogyakarta, UII Yogyakarta, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1960-1972), Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Aceh (1960-1962), Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang (1967-1975), Rektor Universitas Al Irsyad dan Universitas Cokroaminoto Surakarta.

Percik Pemikiran

Hasbi Ash Shiddieqy menawarkan gagasan ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) oleh berbagai kalangan, ulama dan ilmuwan muslim lain, seperti ekonom, dokter, budayawan, dan politikus, yang memiliki visi dan wawasan terhadap permasalahan umat Islam. Melalui ijtihad kolektif ini, umat Islam dapat merumuskan sendiri fikih yang sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia. Rumusan fikih ini tidak harus terikat pada salah satu mazhab, tetapi merupakan penggabungan pendapat. Menurut Hasbi, hukum yang baik adalah yang mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat-istiadat, dan kecenderungan masyarakat yang bersangkutan. Dalam sejarahnya, banyak kitab fikih yang ditulis oleh ulama yang mengacu kepada adat-istiadat (*urf*) suatu daerah. Contohnya, pendapat Imam asy-Syafi'i ketika masih di Irak (*qaul qadim*/pendapat lama) sering berubah ketika ia berada di Mesir (*qaul jadid*/pendapat baru) karena perbedaan lingkungan dan adat-istiadat kedua daerah.

Dalam masalah zakat, pemikiran ijtihad Hasbi tergolong maju. Ia sependapat dengan *jumhur* ulama yang mengatakan bahwa objek zakat adalah harta, bukan orang. Karena itu, harta anak kecil yang belum mukalaf yang telah sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya oleh walinya. Zakat adalah ibadah sosial yang bertujuan untuk menjembatani jurang antara yang kaya dan yang miskin. Ia berpendapat bahwa zakat dapat dipungut dari non muslim (kafir *kitabiy*) untuk diserahkan kembali demi kepentingan mereka sendiri. Ia mendasarkan pendapatnya pada keputusan Umar ibn

al-Khatthab (581-644 M.), untuk memberikan zakat kepada kaum *zimmi* atau *ahluz zimmah* (orang-orang non muslim yang bertempat tinggal di wilayah negara Islam) yang sudah tua dan miskin. Pendapat ini dilandasi oleh prinsip pembinaan kesejahteraan bersama dalam suatu negara, tanpa memandang agama dan golongannya.

Hasbi Ash Shiddieqy sangat produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul), selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum. [Lasa-Ad]

Buku karya Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy antara lain;

- 1) *Beberapa Rangkaian Ayat* (1952), 2) *Sejarah dan Pengantar Tafsir* (1954), 3) *Tafsir Al Quran Al Majid al Nur 30 juz* (1956), 4) *Tafsir Al Bayan* (1966), 5) *Mu'jizat Al Quran* (1966), 6) *Beberapa Rangkuman Hadis* (1952), 7) *Sejarah dan Pengantar Hadis* (1954); 8) *Mutiara Hadis, 8 jilid* (1954-1980); 8) *Pokok-Pokok Dirayah Hadis, 2 jilid* (1958); 9) *Problema Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam* (1964); 10) *Koleksi Hadis-Hadis Hukum, 11 volume* (1970-1976); 11) *Rijalul Hadis* (1970); 12) *Sejarah Perkembangan Hadis* (1973); 13) *Sejarah Peradilan Islam* (1950); 14) *Tuntunan Qurban* (1950); 15) *Pedoman Sholat* (1953); 16) *Hukum-Hukum Fikih Islam* (1953); 17) *Pengantar Hukum Islam* (1953); 18) *Pedoman Zakat* (1953); 19) *al Ahkam (Pedoman Muslimin)* (1953); 20) *Pedoman Puasa*; 21) *Kuliah Ibadah*; 22) *Pemindahan Darah (Blood Transfusion); Dipandang dari Sudut Hukum Islam*; 23) *Ikhtisar Tuntunan Zakat dan Fitrah* (1958); 24) *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman* (1961); 25) *Peradilan dan Hukum Acara Islam*; 26) *Poligami Menurut Syariat Islam*; 27) *Pengantar Ilmu Fikih* (1967); 28) *Baitul Mal* (1968); 29) *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera* (1969); 30) *Azas-azas Hukum Tatanegara Menurut Syariat Islam* (1969); 31) *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam* (1971); 32) *Hukum Antar Golongan dalam Fikih Islam*; 33) *Perbedaan Mathla' Tidak Mengharuskan Kita Berlainan pada Mulai Puasa* (1971); 34) *Ushul Fikih*; 35) *Ilmu Kenegaraan dalam Hukum Islam* (1971); 36) *Beberapa Problematika Hukum Islam* (1972); 37) *Kumpulan Soal Jawab* (1973); 38) *Pidana Mati dalam Syariat Islam*; 39) *Sebab-Sebab Perbedaan Faham Para Ulama dalam Menetapkan Hukum Islam*; 40) *Pokok-Pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*; 41) *Pangantar Fikih Mu'amalah*; 42) *Fakta-fakta Keagungan Syariat Islam* (1974); 43) *Falsafah Hukum Islam* (1975); 44) *Fikih Islam Punya Daya Elastism Lengkap, Bulat dan Tuntas* (1975); 45) *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab* (1975); 46) *Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama dalam Membina Hukum Islam* (1975); 47) *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (1976); 48) *Pedoman Haji*.



Muchlas Abror

Menjadi Muballigh dan Sekaligus Wartawan Muhammadiyah

Muhammad Muchlas Abror.

Lahir di Wonosobo, 11 September 1941.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY 1978-1990.

Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah 1990-1994.

Sekretaris PP Muhammadiyah 1995-2000. Ketua

PP Muhammadiyah 2000-2010. Penasehat

PP Muhammadiyah (2010-sekarang).

Nama lengkapnya Muhammad Muchlas Abror. Pak Muchlas, begitu biasa dia dipanggil adalah sosok yang bersahaja, penuh pengabdian, dan tidak kenal lelah dalam berkiprah dan berjuang khususnya di Muhammadiyah. Tidak heran jika beberapa periode Pak Muchlas masuk dalam jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Disela-sela kesibukannya, dia selalu menuliskan pikiran-pikirannya, yang dipublikasikan di majalah Suara Muhammadiyah, di mana dia ikut terlibat di dalamnya.

Dalam sebuah tulisannya, dia mengatakan bahwa organisasi itu penting. Mengapa penting? Karena dalam organisasi itu ada sekelompok orang yang bekerjasama, di dalamnya ada yang memimpin dan ada pula yang dipimpin, satu dengan yang lain saling berhubungan. Disamping itu, ada pembagian kerja, ada keterikatan terhadap aturan dan tata tertib yang harus ditaati. Kemudian berusaha bersama-sama dengan kesadaran dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Tidak demikian halnya jika tanpa organisasi. Tentu masing-masing jalan sendiri, tidak ada kerapian, ketertiban, dan keteraturan. Karena itu tidak ada yang tidak memerlukan organisasi. Organisasi diperlukan bagi kelompok orang yang

berkehendak baik, juga bagi mereka yang berkehendak buruk. Dengan organisasi kehendak yang baik atau yang buruk akan mudah tercapai. Ada kaitan dengan pentingnya organisasi. Ali bin Abi Thalib pernah menegaskan, “*Al-haqqu bilaa nizhaam yaghlibuhul-baathilu bi nizhaam*” (kebenaran yang tidak terorganisasi akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi secara rapi).

Pak Muchlas mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah wadah bagi kelompok umat yang mendapat amanah Allah untuk senantiasa berdakwah dan beramar makruf nahi munkar, menebarkan dan mempertahankan kebaikan, kedamaian, dan kebenaran dalam kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Semua itu dilakukan untuk membawa dan menjadi *rahmatan lil'alam*. Kebenaran itu harus diamalkan dan diperjuangkan dalam tatanan yang rapi dan teratur, dengan perencanaan yang matang, dengan tahapan-tahapan pelaksanaan dan skala prioritas yang jelas, pimpinan yang amanah dan didukung oleh SDM berkualitas, serta pengorganisasian yang kuat.

Sekarang sedang terjadi perseteruan yang kuat antara kebenaran dan kebatilan. Muhammadiyah tentu tidak boleh tinggal diam. Konsolidasi mutlak harus dilakukan agar Muhammadiyah sebagai organisasi tetap solid, baik ke dalam maupun ke luar. Sehingga, Muhammadiyah tetap tegar tidak mudah goyah dan panik ketika berhadapan dengan berbagai kesulitan dan kesukaran. Di samping mampu berdiri tegak ketika berhadapan dengan pihak lain, juga memiliki kepercayaan diri dan harga diri sehingga tidak mudah diintervensi, dikendalikan, dan diobok-obok pihak lain. Tampilan Muhammadiyah sebagai organisasi tetap memiliki kewibawaan, disegani, dan dihormati. Muhammadiyah sebagai organisasi memang bukan tujuan, tapi merupakan alat, sarana, dan wadah perjuangan yang sangat penting dan kita perlukan.

Sebagai orang yang sejak muda sudah aktif di Muhammadiyah, Muchlas Abror tahu betul seluk beluk yang ada di Muhammadiyah. Karena itu, dia selalu mengingatkan bahwa sebagai anggota Muhammadiyah, kita harus menyadari bahwa kita telah menyerahkan sebagian kebebasan pribadi atau hak azasi

kita kepada Muhammadiyah untuk mengatur kita. Karena itu, kita memiliki keterikatan kepada Muhammadiyah. Keterikatan kepada: asas, maksud dan tujuan; keyakinan dan cita-cita hidup; serta usaha untuk mewujudkan maksud dan tujuan Muhammadiyah. Di samping itu tentu bersedia untuk menyesuaikan sikap, pendirian, pandangan, perilaku sesuai dengan asas, maksud dan tujuan Muhammadiyah yang kita sepakati.

Kita yang menjadi anggota Muhammadiyah harus menyadari bahwa kita adalah anggota sebuah organisasi yang menamakan diri sebagai Gerakan Islam yang maksud geraknya dakwah amar makruf nahi munkar. Sebagai anggota Gerakan Islam, kita mestilah aktif menjadi subyek, fa'il, atau pelaku yang membawa perubahan positif di tengah masyarakat. Di samping mengikuti perkembangan yang dinamis di masyarakat, kita juga harus menyibukkan diri pada masalah yang mendatangkan manfaat. Dalam menyibukkan diri ini pun, kita harus senantiasa ingat kepada Allah.

Setiap anggota Muhammadiyah, ujar Muchlas Abror, bertanggungjawab dalam setiap kata yang diucapkannya serta dalam setiap langkah dan perbuatannya. Karena itu berpikir lebih dahulu sebelum melangkah dan berbuat. Dalam hal ini kehati-hatian dan kearifan sangat diperlukan. Agar tidak sesal dahulu pendapatan dan sesal kemudian tidak berguna.

Setiap anggota Muhammadiyah, kita memiliki sejumlah keterikatan kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah yang berbasas Islam adalah Gerakan Islam, maka kita pun memiliki keterikatan kepada Agama Islam. Keterikatan kita kepada Muhammadiyah, sebagai organisasi, adalah menaati segala peraturan, ketentuan, dan keputusan musyawarah, serta garis kebijakan Pimpinan Persyarikatan. Sedangkan keterikatan kita kepada Islam, sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah, diantaranya adalah mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang di dalamnya ada perintah, larangan, dan petunjuk, serta kewajiban mendakwahkan Islam. Kita memiliki keterikatan menyibukkan diri pada masalah-masalah yang bermanfaat dan maslahat bagi masyarakat luas.

Sejumlah keterikatan tersebut merupakan ujian bagi kita. Dalam rangka introspeksi dan evaluasi, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkan kita benar-benar menjadi anggota Muhammadiyah yang memiliki kesetiaan atau belum, bahkan mungkin sebaliknya? Pada abad kedua yang mulai dimasuki, Muhammadiyah sangat memerlukan anggota yang memiliki kesetiaan. Sebab, dengan kesetiaan anggota, Muhammadiyah pada abad keduanya akan dapat berbuat banyak dalam multi bidang kehidupan yang lebih meningkat, berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, umat dan kemanusiaan. Sebagaimana secara umum telah dicontohkan oleh kesetiaan anggota pada abad pertama dari kelahirannya, Muhammadiyah telah memberi kontribusi nyata di negeri ini. Jadilah anggota Muhammadiyah yang setia! Kesetiaan anggota merupakan salah satu kunci keberhasilan Muhammadiyah masa lalu, kini dan masa depan.

Untuk itu, ujar Muchlas Abror yang pernah menjadi Ketua PWM DIY ini, Muhammadiyah tidak boleh merasa cepat puas terhadap segala apa yang telah diraih. Keberhasilan itu memang harus disyukuri, jangan sebaliknya. Sambil melakukan introspeksi dan evaluasi untuk mengetahui peta letak kekurangan dan kelemahan. Berikutnya mendekatkan diri kepada Allah mengharap hidayah dan pertolongan-Nya. Selain itu dengan cerdas, berwawasan luas terus bekerja keras dan ikhlas melakukan berbagai terobosan. Usaha-usaha kreatif, inovatif, produktif, dan positif harus berlanjut, tidak boleh mandeg atau berhenti.

Muhammadiyah tidak boleh berhenti, bahkan harus meningkatkan dakwah *bil hal*-nya yang bersifat membebaskan, memberdayakan, dan memajukan mustadh'afin. Atau dakwah pencerahan untuk mustadh'afin. Sehingga di era globalisasi, Muhammadiyah memiliki kemampuan menjawab tantangan zaman.

Gagasan dan Pemikiran Pak Muchlas Abror yang dicetuskan dalam bentuk tulisan selama ini, telah dikumpulkan dalam bentuk buku, yaitu: *Muhammadiyah: Persamaan dan Kebersamaan (2010)*, sebuah buku biografi berjudul: *Muchlas Abror, Hidup Untuk Mengabdikan (2011)* dan *Muhammadiyah Mencerahkan Umat (2015)*.(IM)

M. RASJIDI

Islam Menentang Komunisme

Dalam bukunya berjudul *Islam Menentang Komunisme* (1970, edisi pertama November 1965), Prof. Dr. H. M. Rasjidi, membahas perkembangan pemikiran tentang individu dan masyarakat sebelum pemikir utama Marxisme, Karl Marx, lahir dan berkarya. Beliau menjelaskan pandangan-pandangan utama para filsuf Barat, mulai dari Platon (400 SM) sampai Proudhon (w. 1865), terutama soal keadilan dan kekuasaan.

Dua persoalan ini, keadilan dan kekuasaan, muncul akibat pemikiran Barat itu dibangun dari dua pengandaian yang bertentangan. Di satu sisi, berdasarkan ajaran Kristen dan spekulasi para filsufnya, Barat meyakini bahwa hakikat manusia adalah setara dan bersaudara. Sementara, di sisi lain, mereka juga meyakini pembagian kelompok manusia berdasarkan kepemilikan satu terhadap lainnya, yakni majikan (tuan) di atas buruh (hamba, budak). Dalam praktik sejarah, pembagian ini sering memunculkan praktik tak adil sehingga mengundang pemikiran untuk merenungkan kembali hakikat dari keadilan tersebut. Ternyata, jawabannya bisa beragam, tetapi dibatasi oleh dua ujung; mulai dari penyerahan total kedaulatan kepada pasar-bebas di satu ujung, dan penolakan total terhadap kedaulatan negara atas nama anarkisme di ujung lainnya. Di masa inilah Karl Marx merenung dan menuangkan gagasan-gagasannya.

Rasjidi menggambarkan dua aliran filsafat Barat di atas secara tepat ketika membicarakan ihwal wujud. Pertama, Idealisme, yakni pemikiran bahwa realitas di luar diri manusia hanyalah bentukan akal sehingga semuanya dinilai wujud sejauh korelat dengan akal.



Prof. Dr. H. M. Rasjidi.

Lahir di Kotagede, Yogyakarta, 20 Mei 1915, wafat 30 Januari 2001. Menteri Agama Republik Indonesia pertama, diangkat pada 3 Januari 1946.

Kedua, Materialisme (atau Realisme) yang meyakini bahwa realitas di luar diri manusia adalah wujud yang tidak terikat oleh akal, sehingga tetap wujud ketika tidak ada manusia sama sekali di dunia. Karl Marx berada di posisi kedua. Dari sini, Marx membangun pemikiran-pemikirannya tentang ekonomi, politik, dan agama. Penolakan terhadap unsur-unsur di luar materi menjadikan mereka ateis. Rasjidi memandang, Islam tidak bermasalah dengan dua pandangan itu, sebab selain keimanan kepada yang ghaib, apa yang tampak sebagai dunia juga diakui oleh Islam.

Dengan keyakinan materialis yang “serba-benda”, Karl Marx meyakini bahwa praktik ekonomi adalah praktik pertama di dalam peradaban manusia. Ia kemudian melancarkan kritiknya yang paling radikal terhadap praktik ekonomi di Eropa saat itu, di mana tenaga kaum proletar yang tak mempunyai alat produksi diperas oleh kaum borjuis yang memiliki alat produksi, untuk memperkaya diri dan rekanan mereka sendiri, sebab upah yang diberikan kepada kaum proletar itu tidak seberapa dibanding keuntungan yang diraih. Keuntungan tersebut terus diakumulasi sebagai modal (kapital) kegiatan produksi selanjutnya, begitu seterusnya. Secara deterministik, Marx meyakini bahwa pada puncak dialektika itu, kaum proletar akan merebut alat-alat produksi dan mewujudkan revolusi terhadap keadaan negara yang sebelumnya menjadi penyokong praktik Kapitalisme.

Warisan pemikiran Marx, juga rekan setianya, Freidrich Engels, mendapat momentum perwujudan saat Lenin mengutarakan strategi Komunisme Internasional di Kongres Internasionale III sebagai tafsir utama atas pemikiran Marx. Sejak saat itu, kaum komunis di banyak negara, termasuk di Indonesia, menerapkan strategi tersebut untuk, pertama-tama, berkoalisi dengan unsur politik lain dalam menghadapi kolonialisme, namun kemudian menjalankan revolusi dengan menumpas unsur politik lain itu apabila mereka tidak bersetuju.

Selanjutnya, Rasjidi mengemukakan kritik Islam terhadap komunisme. Para filsuf yang disebutkan di dalam bukunya itu, termasuk Marx, adalah orang-orang yang tidak mengenal cahaya

Islam. Saat membahas materialisme historis, Rasjidi menggugat pandangan deterministiknya dengan mengajukan fakta lain, bahwa beberapa bangsa yang hidup dalam keadaan produksi yang sama telah melahirkan peradaban yang berbeda. Perbedaan justru terjadi di Barat sendiri.

Namun demikian, Rasjidi memberi sedikit penghargaan pada upaya Marx menganalisis keadaan masyarakat. Bagi Rasjidi, Marx(isme) mengingatkan pada keberadaan orang-orang yang mencintai dunia dan tergila-gila pada kekuasaan. Selain itu, tindakan sebagian “kaum agamawan” namun cinta terhadap jabatan dan kekayaan justru menjadikan kritik Marx menjadi relevan. Rasjidi kemudian menegaskan, bahwa keadaan tersebut bukan sesuatu yang mutlak yang membentuk watak manusia secara wajar. Dalam Islam, hal tersebut justru adalah penyakit yang harus disembuhkan. Cara penyembuhan itu bukan melalui praktik komunisme, sampai ke dalam bentuknya yang terjauh, yakni revolusi, melainkan dengan pengajaran dan pengamalan Islam. Kapitalisme dan Komunisme, dalam simpulan Rasjidi, adalah pemikiran sekular yang tak mendapat ruang di dalam Islam. Sebaliknya, konsep-konsep Islam tentang individu, masyarakat, keadilan, kekuasaan, dan ekonomi, tidak berada di dalam salah satu dari kedua pemikiran sekular itu. [Ad]

Karya-karya Prof. Dr. H.M. Rasyidi antara lain:

1. Islam dan Sosialisme (1966);
2. Islam dan Kebatinan (1967);
3. Islam dan Indonesia di Zaman Modern (1968);
4. Mengapa Aku Tetap Memeluk Agama Islam (1968);
5. Islam Menentang Komunisme (1970);
6. Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi (1974);
7. Filsafat Agama (1965, 1975);
8. Koreksi terhadap Dr. Harun Nasution tentang Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (kritikan terhadap buku Harun Nasution: Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya) (1977);
9. Koreksi terhadap Drs. Nurcholish Madjid tentang Sekularisme (1972, 1977).
10. Bibel, Quran dan Sains Modern (1978);
11. Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional (1980);
12. Janji-Janji Islam (terjemahan *Promesses de Islam*, Roger Garaudy) (1983);
13. Persoalan-Persoalan Filsafat (terjemahan *Living Issues in Philosophy*, Harold H. Titus, Marilyn S. Smith) (1984);
14. Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat (1984);
15. Apa Itu Syiah (1984);
16. Humanisme dalam Islam (terjemahan *l'Humanisme de l'Islam*, Marcel A. Boisard) (1985);
17. Hendak Dibawa Kemana Umat Ini? (1988);



WARDAN DIPONINGRAT

Wujud al-Hilal **untuk Menentukan** **Bulan Baru Kamariah**

**Kiai Kanjeng Raden Penghulu
M. Wardan Diponegoro.**

Lahir di Yogyakarta 19 Mei 1911, wafat di Yogyakarta 3 Februari 1991.

Anggota Bidang Markas Ulama Angkatan Perang Sabil (APS),

Anggota Dewan Kurator IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1973-1991.

Penghulu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat 1956-1991. Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah 1963-1985.

*“Metode Hisab Wujud al-Hilal
Pergeseran Argumentasi
Normatif Muhammad Wardan
menjadi Ideologi Hisab
Muhammadiyah”*

Pengalaman keilmuan yang dijalankannya serta minat yang dimilikinya menjadikan Muhammad Wardan sangat tertarik dengan ilmu falak. Karena kepiawaiannya di bidang ilmu Falak, sejak tahun 1973 hingga wafatnya dipercaya sebagai anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI. Muhammad Wardan merupakan salah satu tokoh penggagas teori *wujudul hilal* yang hingga kini masih digunakan oleh persyarikatan Muhammadiyah.

Pada tahun 1938, Muhammadiyah mulai menggunakan teori hisab *wujûd al-hilâl*, walaupun baru ditetapkan dalam keputusan tarjih, baru pada Munas Tarjih XXV tahun 2000 di Jakarta. Kriteria ini dikembangkan oleh KH. Mohammad Wardan. Teori ini muncul karena kegelisahan Wardan terhadap model penentuan awal bulan Qamariyah yang berlaku saat itu. Dalam hisab hakiki *wujûd al-hilâl*, awal bulan Qamariyah dimulai jika terpenuhi 3 syarat yang bersifat kumulatif, yaitu: telah terjadi konjungsi; *ijtima'* terjadi sebelum *gurub*; dan pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk *mar'i* (bulan baru telah wujud).

Kriteria ini menjadi jalan tengah untuk menjembatani antara kriteria *imkân ar-ru'yah* dengan kriteria *ijtima' qabla al-gurûb*. Kriteria ini diterapkan pada seluruh wilayah Indonesia dengan prinsip *wilayâh hukmi*.

Muhammad Wardan dikenal sebagai seorang yang ahli ilmu fikih dan ilmu falak. Dalam bidang ilmu falak, kepiawaiannya sulit dicari bandingannya pada masa itu. Secara runtut, murid KHA Dahlan yang menjadi penerus pemikiran dalam ilmu falak adalah Siradj Dahlan. Siradj Dahlan mengikat pemikiran ilmu falaknya dalam buku berjudul *Ilmoë Falak (Cosmographie)*. Buku Pemikiran Siradj Dahlan ini sangat mempengaruhi pemikiran Muhammad Wardan, selain juga karya beberapa ulama ahli falak lain, seperti Syekh Husain Zaid, Abdul Lathif Abul Wafa, Sayid Hibatuddin Syahrostani, Syekh Ahmad Musa Zarqowi, dan beberapa risalah karangan K.H. Dahlan Semarang dan Kiai Muhammad Hasan Asy'ari. Selain itu, Muhammad Wardan merupakan seorang yang tekun belajar secara otodidak.

Muhammad Wardan aktif menjadi anggota Majelis Tarjih sejak tahun 1960, dan sejak 1963 (Muktamar Muhammadiyah ke-32) beliau menjadi Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah sampai tahun 1985 (Muktamar ke-41).

Pada tanggal 28 Januari 1956 (15 Jumadil Akhir tahun Dal 1887) Muhammad Wardan diangkat menjadi Penghulu Keraton Ngayogyakarta dengan gelar Kiai Kanjeng Raden Penghulu Muhammad Wardan Diponegoro, dengan tugas utama dalam masalah keagamaan, yaitu: 1) *Ngampil Bengat Dalem* (menerima bai'at Sultan); 2) *Dongani Sugengan Dalem* (mendoakan keselamatan Sultan); 3) *Nampi Hajat Dalem Pareden* (melaksanakan acara hajatan); 4) *Nampi Fitrah Dalem* (menerima zakat fitrah); 5) *Nampi Korban Dalem* (menerima hewan qurban Sultan); 6) *Slawatan*; 7) *Ningkahaken* (menikahkan); 8) *Ngimami Shalat* (menjadi imam salat); 9) *Ngunjuaken Kawuningan*; 10) *Nyalataken Layon* (mensalatkan jenazah); 11) *Karerehanipun*; 12) *Angawat-awati*; 13) *Pedangon Dalem utawi para Bendoro bab mawaris* (mengurus soal waris); 14) *Ngabakten* (kebaktian); 15) *Amimpin*; 16) *Nampi Kintunan Dalem*.

Tugas-tugas tersebut tidak dilaksanakan setiap hari, tapi secara temporal. Sementara tugas sehari-harinya adalah mengelola dan mengawasi Masjid Ageng Kauman, dan beberapa keperluan Keraton, lainnya. Semua aktivitas tersebut dikerjakan di kantor yang juga sekaligus sebagai rumah tinggal di Pengulon Kauman. Posisi Muhammad Wardan sebagai penghulu ini cukup menguntungkan Muhammadiyah karena dia bisa memberikan fasilitas kepada Majelis Tarjih yang dipimpinnya untuk menjalankan aktivitasnya di nDalem Pengulon.

Diantara karya-karya yang pernah ditulis Muhammad Wardan antara lain adalah: 1) *Kitab Perail* (t.t), membahas pelajaran ilmu hukum Islam (fikih), ilmu mawaris; 2) *Kitab Fikih Nikah-Talak-Rujuk* (1953); 3) *Kitab Ilmu Tata Berunding* (t.t), membahas *Adab al-Bahsi wa Al-Mundarah* (ilmu pengetahuan tata cara dan tata tertib berunding); 4) *Kitab Risalah Maulid Nabi Muhammad SAW*. (t.t). berisi sejarah Nabi Muhammad Saw. Sejak masa kelahirannya sampai wafatnya, ditulis dalam bahasa Jawa; 5) *Kitab Umdatul Hasib* (Pedoman Hisab), dalam bahasa arab setebal 88 halaman, terdiri atas 12 pasal, meliputi arah kiblat, awal bulan qamariyah, dan gerhana matahari dan bulan; 6) *Kitab Hisab dan Falak* (t.t). menjelaskan bola langit, tentang teori-teori astronomi yang berkaitan dengan persoalan hisab, dan praktek perhitungan; 7) *Kitab Hisab 'Urfi dan Hakiki* (t.t), disusun sebagai kelanjutan dari *Kitab Ilmu Hisab dan Falak*, berisi penjelasan tentang hisab hitungan untuk menentukan tanggal baru.

Selain kitab-kitab tersebut Muhammad Wardan juga menulis artikel tentang falak, yaitu "*Persoalan Hisab dan Rukyat dalam Menentukan Permulaan Bulan dan Ilmu Hisab (Falak)*", dan *Gambaran Umum Kitab Ilmu Falak dan Hisab. (Wied)*



M. YUNUS ANIS

Imam Tentara Membina Rohani TNI

Letkol K.H. R. Muhammad Yunus Anis Lahir di Yogyakarta, 3 Mei 1903, wafat 1979.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah (1942-1959)
Ketua Umum PP Muhammadiyah (1959-1962).
Kepala Pusat Rohani TNI Angkatan Darat (1953-1959).
Kepala Missi PRIAD ke luar negeri (1958).

“Sabar yang dituntunkan dalam agama Islam bukanlah sekedar menahan diri dari emosi atau menahan marah. Tetapi dimaksudkan juga dalam kebaikan daripada kejelekan, melepaskan nafsu dari yang terlarang (haram), tidak mendekati kejahatan (kebathilan). Sabar juga mengandung pengertian tetap teguh, tidak putus-putus, dalam kemauan bekerja mencari yang benar dan meninggalkan yang bathil, dengan menahan sekuat-kuatnya.”

H.M. Yunus Anis, putra Haji Muhammad Anis, seorang abdi dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejak kecil telah didik oleh orang tua dan kakeknya, dalam hal membaca Al-Qur'an dan pendidikan akhlak. Pendidikan formalnya dimulai di Sekolah Rakyat Muhammadiyah Yogyakarta, dilanjutkan di Sekolah Al-Atas dan Sekolah Al-Irsyad, di Batavia (Jakarta) dibawah bimbingan Syekh Ahmad Syurkati, seorang tokoh pendiri Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah dan kawan karib K.H. Ahmad Dahlan. Hasil pendidikan itu membawanya tampil menjadi muballigh Muhammadiyah yang tangguh, ditugaskan oleh Pimpinan Pusat ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, menjadi penasehat Panglima Besar Jendral Soedirman dan Imam Tentara TNI Angkatan Darat.

Pemikiran, sikap dan pandangan Yunus Anis mengarah kepada upaya kemajuan Islam. Keyakinan agama dan pribadinya sangat kuat. Ia berprinsip bahwa isi Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber kebenaran. Perhatiannya terhadap kegiatan sosial sangat besar, terutama kepada anak yatim piatu dan fakir miskin. Umat Islam harus berperan aktif dalam segala bidang, termasuk dalam pemerintahan. Hal yang bertentangan dengan kebenaran Islam ditolaknya dengan tegas. Orang Islam diharapkan hidupnya berguna untuk nusa, bangsa, negara dan agama. Karena itu, harta benda yang dimilikinya harus berfungsi sosial. Orang Islam agar tidak menjadikan dirinya hina dan tercela dalam masyarakat.

Menurut H.M. Yunus Anis, ajaran tentang sabar yang dituntunkan dalam agama Islam bukanlah sekedar menahan diri dari emosi atau menahan marah. Tetapi dimaksudkan juga dalam kebaikan daripada kejelekan, melepaskan nafsu dari yang terlarang (haram), tidak mendekati kejahatan (kebathilan). Sabar juga mengandung pengertian tetap teguh, tidak putus-putus, dalam kemauan bekerja mencari yang benar dan meninggalkan yang bathil, dengan menahan sekuat-kuatnya.. Al-Qur'an telah menerangkan bahwa sabar menunjukkan keteguhan hati, seperti yang dilakukan para rasul.

Dalam bidang ekonomi, H.M. Yunus Anis memiliki prinsip dan wawasan yang berlandaskan konsepsi Islam. Ekonomi bagi suatu bangsa sangat diperlukan. Karena hal itu akan menjamin dan menentukan keteguhan serta kesejahteraan suatu bangsa. Konsepsi ekonomi dalam Islam telah tegas dasarnya, yaitu adanya keseimbangan antara yang mampu dengan si miskin; keseimbangan antara yang kuat dengan si lemah. Dengan demikian ekonomi merupakan nilai dasar yang kuat untuk membentuk kesejahteraan dan kedamaian hidup bersama. Konsepsi perekonomian menurut ajaran Islam membuat orang tidak kikir, hidup sederhana tidak berlebih-lebihan dan hemat. Keharmonisan dan keseimbangan antara hidup dunia dan akherat telah tersirat dan tersurat secara jelas di dalam ajaran Islam itu.

Islam, dalam pemahaman H.M. Yunus Anis, mengajarkan supaya orang tidak boros dan pandai-pandai dalam membelanjakan

hartanya, dan tidak membeli segala sesuatu yang kurang bermanfaat dalam kehidupannya. Orang tidak boleh hidup boros, karena hal tersebut akan menyebabkan terjerumus dalam kehinaan. Orang Islam diajarkan jangan menjadi orang yang pelit, dan supaya menyadari bahwa harta kekayaan yang diperoleh sifatnya tidak langgeng, karena setiap saat dapat habis atau lenyap. Rezeki yang diperoleh dari hasil usaha seseorang itu berfungsi juga dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah SwT. Oleh karena itu rezeki itu disamping untuk memenuhi keperluan hidup sendiri juga untuk kesejahteraan bersama. Dalam Islam diajarkan supaya manusia mengumpulkan rezeki atau harta sebanyak mungkin. Namun, tidak lupa bahwa harta kekayaan yang diperoleh itu supaya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya.

Meskipun Muhammadiyah bukan organisasi politik praktis dalam gerak perjuangannya, tetapi tidaklah menutup pintu bagi anggotanya yang ingin berjuang melalui partai politik. Dalam hal ini, H.M. Yunus Anis mengatakan bahwa umat Islam perlu memiliki partai politik. Partai politik itu bisa dijadikan wadah untuk memperjuangkan aspirasi Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu partai politik itu juga dapat dijadikan benteng bagi organisasi-organisasi Islam lainnya yang tidak berpolitik. Duduknya perwakilan umat Islam dalam pemerintahan menurut H.M. Yunus Anis, perlu mendapat perhatian sebaik-baiknya. Dengan jalan ini wakil-wakil umat Islam dapat menyumbangkan pemikirannya supaya pelaksanaan pemerintahan tidak merugikan dan bahkan bertentangan dengan tuntunan Islam.*(im)



Letkol M. Junus Anies
Kepala Missi PRIAD
ke luar negeri 1958



RUSYDI HAMKA

Teladan Dunia Pers Peduli Nasib Bangsa

Drs. H. Rusydi Hamka.

Lahir di Padangpanjang, 7 September 1935, wafat di Jakarta 18 September 2014. Pemimpin Redaksi Majalah Panji Masyarakat. Anggota MPR RI 1992-1997. Anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan 1999-2004. Anggota Badan Pembina YPI Al Azhar. Anggota PP Muhammadiyah 1985-1995. Ketua PP Muhammadiyah 1995-2000

Sebagai aktivis Islam (khususnya Muhammadiyah), Rusydi Hamka juga senantiasa mengingatkan tentang arti penting kemanfaatan diri bagi orang lain. Hal yang begitu dikenal oleh putra-putranya dari seorang Rusydi Hamka adalah bahwa selalu harus meningkatkan etos kerja, dan keimanan yang harus dilengkapi dengan keilmuan. Kemudian keimanan dan ilmu itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti ayahnya, Buya Hamka, Rusydi Hamka juga dikenal banyak kalangan sebagai sosok yang multitalenta. Rusydi Hamka selain dikenal sebagai wartawan, juga dikenal sebagai ulama, pendidik, penulis dan politisi. Bahkan sebelum wafatnya pada 18 September 2014, Rusydi Hamka telah meninggalkan buah fikirannya dalam bentuk karya tulis yang cukup banyak.

Sejak tahun 1963 Rusydi Hamka sudah aktif di Pemuda Muhammadiyah tingkat Pusat bersama dengan Lukman Harun. Sebelum terkena aturan tidak boleh merangkap menjadi pengurus Muhammadiyah karena aktif di Partai Politik, Rusydi

Hamka pernah selama tiga periode masuk jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu hasil Muktamar 41 di Surakarta (tahun 1985), Muktamar 42 di Yogyakarta (1990) dan Muktamar 43 di Banda Aceh (1995).

Rusydi Hamka pernah menjadi anggota MPR RI sejak pada 1992-1997 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selanjutnya, karena menjadi Ketua PPP DKI Jakarta, maka Rusydi Hamka pun menjadi anggota DPRD DKI Jakarta pada tahun 1997. Pasca reformasi, Rusydi Hamka kemudian menduduki kembali kursi Anggota DPR RI untuk periode 1999-2004.

Rusydi Hamka pernah menjadi Ketua Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Yayasan ini membawahi lembaga pendidikan yang menyebar di berbagai kota dari mulai tingkat Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Bahkan Rusydi Hamka juga pernah menjadi anggota Lembaga Sensor Film.

Di antara sekian banyak aktifitasnya, Rusydi Hamka sesungguhnya adalah seorang jurnalis. Dengan dasar pendidikannya dari Publisistik (kini Jurnalistik), Rusydi Hamka adalah seorang wartawan yang memiliki corak dan warna yang khas. Sejak muda, Rusydi Hamka sudah menjadi wartawan di majalah yang dipimpin langsung oleh ayahnya yaitu Hamka. Majalah *Panji Masyarakat*, sebagai majalah yang sangat populer, terkemuka dan berkualitas saat itu menjadi tempat pembelajaran Rusydi Hamka yang sangat berharga.

Belum lama Rusydi Hamka bergabung, Majalah Panji Masyarakat keburu dibredel oleh penguasa Orde Lama saat itu karena mengkritik kebijakannya. Termasuk Panji Masyarakat saat itu memuat tulisan Muhammad Hatta yang berjudul “Demokrasi Kita” yang sangat kritis.

Setelah itu Rusydi Hamka kembali terjun ke dunia media dengan bergabung ke Harian *Mercu Suar* dengan posisi sebagai Wakil Pimpinan Redaksi pada tahun 1965. Tidak lama di *Mercu Suar*, Rusydi Hamka kembali menerbitkan Majalah *Panji Masyarakat* setelah mendapatkan izin terbit kembali pada tahun 1966. Majalah ini berada dalam asuhannya sampai tahun 1994.

Selain di Majalah, Rusydi Hamka juga menggawangi penerbitan yaitu *Pustaka Panjimas*, sebagai bagian dari perusahaan ini yang mengurus tentang penerbitan buku. Banyak karya yang telah lahir dari penerbit ini. Namun yang paling fenomenal tentulah karya Hamka yaitu Tafsir Al-Azhar.

Walaupun Rusydi Hamka merupakan putra dari ulama besar yaitu Hamka dan cucu dari Haji Rasul, namun Rusydi Hamka sangat *tawadhu*. Ketika masih hidup, Rusydi Hamka seringkali menyampaikan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat. Yusron Rusydi misalnya, putra Rusydi Hamka mengenang bagaimana ayahnya sering mengingatkan agar anak-anaknya senantiasa meneladani Rasulullah.

Sebagai pendidik dan ulama, Rusydi Hamka selalu memotivasi anak-anaknya untuk senantiasa belajar tanpa henti. Bahkan sebagai aktivis Islam (khususnya aktif di Muhammadiyah), Rusydi Hamka juga senantiasa mengingatkan tentang arti penting kemanfaatan diri bagi orang lain. Hal yang begitu dikenal oleh putra-putranya dari seorang Rusydi Hamka adalah bahwa selalu harus meningkatkan etos kerja, dan keimanan yang harus dilengkapi dengan keilmuan. Kemudian keimanan dan ilmu itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selebihnya bahwa kita semua khususnya seorang ayah harus menjadi contoh yang baik bagi keluarga dan masyarakatnya.

Rusydi Hamka merupakan sosok yang begitu peduli dengan kehidupan ummat Islam baik di dalam negeri maupun luar negeri. Khusus untuk Palestina, Rusydi Hamka menyimpan kepedulian sangat besar. Selain ketika berbicara di dalam negeri, ketika kunjungan di beberapa negara berpenduduk Muslim, Rusydi Hamka selalu memberikan dukungan kepada generasi muda agar mereka senantiasa peduli terhadap Muslim Palestina.[Roni]

Di antara buku Karya Rusydi Hamka:

Generasi Terakhir Keluarga Paderi (1963), *Pribadi dan Martabat Buya Hamka* (1982), *Etos, Iman, Amal* (1986), *Ummat Terbaik Di Antara Manusia, Kampanye PPP di Ranah Minang* (1992).

SAID TUHULELEY

Selama Rakyat Masih Menderita, Tak Ada Kata Istirahat



Dr. Said Tuhuleley, M.M.

Lahir di Saparua, Maluku, wafat di Yogyakarta pada 9 Juni 2015. Wakil Rektor III UMY 1996-1999. Sekretaris Majelis Tabligh PP Muhammadiyah 1985-1990. Badan Pendidikan Kader dan Pembina Angkatan Muda Muhammadiyah (BPK P-AMM) 1990-2000, PP Muhammadiyah, tahun 1995-2000. Sekretaris Majelis Dikti PP Muhammadiyah 2000-2005. Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah 2005-2015.

*Seorang mujahid dakwah yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk dakwah bagi pemberdayaan dan pemajuan masyarakat, serta seorang kader handal Muhammadiyah yang mampu bekerja maksimal di manapun ditempatkan dan diberi amanat.
(Prof. Dr. Din Syamsuddin)*

Dr. (Hc) Drs. H. Said Tuhuleley, MM., amanah jabatan terakhir, adalah sebagai Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 2 periode 2005-2015. Hajriyanto Y. Thohari menyebutnya sebagai “aktivis sejati yang sangat autentik”. Memahami “sejarah” pemikiran dan aktivisme Nyong Ambon ini, kiranya, dapat dibaca dalam beberapa fase; Aktivis HMI, muballigh-kader Muhammadiyah, LP3 UMY-kemahasiswaan-PTM, dan pemberdayaan masyarakat. Sepanjang hidupnya adalah kepedulian sosial dan dedikasi untuk keadilan, pengembangan pendidikan serta keberpihakan kepada kaum

lemah (dhuafa) dengan prinsip *sepi ing pamrih ramai ing gawe* yang jauh dari pretensi politik, pencitraan maupun publikasi.

Dr. Said Tuhuleley MM. seorang konseptor, inisiator dan pejuang kepentingan rakyat kecil. Kesungguhannya dalam mengembangkan pola-pola pembinaan, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat adalah warisan berharga darinya yang tidak akan pernah dilupakan. Kepiawaiannya dalam pendidikan dibuktikan ketika menjadi Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Banyak program dan pola pendidikan yang dikembangkannya diadopsi oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pak Said adalah sosok sederhana dan bersahaja, berpendirian teguh, dengan motto hidupnya yang kemudian fenomenal: “SELAMA RAKYAT MENDERITA TIDAK ADA KATA ISTIRAHAT”.

Pak Said bukan hanya seorang pekerja (*man of action*), tetapi juga sekaligus intelektual (*man of reflection*). Di dalam dirinya tercermin aktivisme sekaligus intelektualisme. dia bisa memadukan keduanya dengan sangat baik dan serasi. Seluruh program pemberdayaan masyarakat yang dilakukannya didasarkan dan ditopang dengan ilmu pengetahuan yang secara konseptual memadai sehingga selalu memiliki nilai-nilai strategis yang tinggi.

Sebagai intelektual praktisi, Pak Said menulis banyak buku, antara lain: *Masa Depan Kemanusiaan* (2003); *Pendidikan: Kemerdekaan Diri, dan Hak Si Miskin untuk Bersekolah* (2005); *Permasalahan Abad XXI: Sebuah Agenda* (1993); *Profil Anggota Muhammadiyah*, dan menulis banyak artikel ilmiah tentang pemberdayaan masyarakat.

Benang merah pemikiran Said Tuhuleley, sebagaimana tampak dari tulisan-tulisannya tersebut, adalah bahwa dalam masyarakat yang pluralistik tak ada kemungkinan untuk mengembangkan sebuah etos kemanusiaan bersama kecuali atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Cita-cita humanistik tersebut tidak menjauhkan dari ketuhanan, meskipun dari sejarah humanisme, kita tahu bahwa humanisme memang dipergunakan

untuk menjauhkan manusia dari agama. Tetapi baginya, tidak ada alasan mengapa kemanusiaan dilepaskan oleh orang-orang beragama kepada orang-orang tidak beragama. Baginya kerja kemanusiaan adalah bagian integral dari kerja keagamaan.

Bagi Pak Said, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan merupakan implementasi dari apa yang dikenal dengan *Teologi Al-Ma'un*, dari ajaran KH Ahmad Dahlan, atau gagasan *Tauhid Sosial* Prof Dr Amien Rais, dan *Islam Berkemadjoean* KH Ahmad Dahlan. Dalam konteks dan perspektif ini tidak berlebihan jika dinyatakan dengan tegas bahwa Pak Said Tuhuleley adalah kekuatan operasional dari gagasan-gagasan *Teologi al-Ma'un*, *Tauhid Sosial*, dan *Islam Berkemajoean* itu.

Berkat pemikiran-pemikirannya yang mendalam (reflektif) dan membumi (praksis), serta aktifitas nyata yang total melalui MPM PP Muhammadiyah itu, Said Tuhuleley dianugerahi penghargaan *Doctor Honoris Causa* (H.C.) dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Dia berhasil secara gemilang mendorong dan menggerakkan Muhammadiyah untuk mulai merambah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dhuafa yang memerlukan bantuan dan sentuhan perhatian. [Ad]

SITI AISYAH HILAL

Meletakkan Dasar Kaderisasi Aisyiyah

*“...Bukan Muhammadiyah jang
menghadjatkan kepada kita,
tetapi kitalah jang
menghadjatkan akan hidup
suburnja Muhammadiyah...”*



Siti Aisyah Hilal.

Lahir di Kauman pada 1905, wafat pada 10 Agustus 1968. Redaktur pertama Majalah Suara Aisyiyah (1926). Ketua Aisyiyah 7 periode, sejak 1931-1940. Salah satu putri KHA Dahlan.

Siti Aisyah Hilal adalah putri KHA Dahlan dengan Siti Walidah yang sudah dipersiapkan oleh orangtuanya menjadi salah satu pemimpin di Muhammadiyah. Proses kaderisasi menjadi dikedepankan oleh KHA Dahlan meskipun pemilihan Siti Aisyah benar-benar karena kapabilitasnya bukan karena hubungan kekeluargaan dengannya. Siti 'Aisyah merupakan generasi kedua yang mengikuti anjuran K.H. Ahmad Dahlan untuk belajar di Neutral Meisjes School bersama dengan Siti Zaenab, Siti Dauchah, Siti Dalalah, Siti Busyro, Siti Hayinah, dan Siti Badilah. Siti Aisyah juga dikenal sebagai redaksi Suara Aisyiyah generasi awal yang turut membangun dan mengembangkan Suara Aisyiyah sebagai corong organisasi. Sebagai putri pendiri Muhammadiyah,

Siti Aisyiyah memiliki pemikiran bahwa sebenarnya kitalah yang membutuhkan Muhammadiyah dan bukan Muhammadiyah yang membutuhkan kita. Kita punya kepentingan yang kuat untuk membuat Muhammadiyah semakin berkembang di bumi nusantara ini. Pemikiran ini seiring dengan pesan ayahnya “Hidup-hiduplah Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah”. Disinilah kekuatan pemikiran

keberlangsungan yang dikemukakan Siti Aisyah Hilal. Muhammadiyah akan terus ada selama orang-orang yang menggerakkannya juga masih ada dan tetap berkiprah di Muhammadiyah. Siti Aisyah yang memimpin Aisyiyah selama 10 tahun atau tujuh periode setelah kepemimpinan ibunya menunjukkan bahwa Siti Aisyiyah memang memiliki kemampuan yang lebih dibanding rekan-rekannya dalam hal kepemimpinan.

Pemikiran keberlangsungan hidup Muhammadiyah itulah yang mendorong Siti Aisyah Hilal untuk memperjuangkan Sapa Tresna Wanita berubah menjadi sayap organisasi Muhammadiyah untuk wadah perempuan muda dengan nama Nasyyatul Aisyiyah. Dengan mengusung semboyan “Yang patah tumbuh, yang hilang berganti”, Siti Aisyah Hilal ingin mengatakan bahwa kaderisasi sangat penting bagi Muhammadiyah untuk tetap menjamin keberlangsungannya.

Dengan mengusung nama Nasyyatul Aisyiyah maka sayap organisasi Muhammadiyah yang menampung anak-anak muda perempuan ini memang disiapkan agar dapat hidup subur sebelum Aisyiyah patah, dan siap sedia sebagai penerus sebelum yang tua hilang menghadap Allah. Ini adalah konsep perkaderan yang khas dalam Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah sehingga dalam Muhammadiyah tidak dikenal dengan istilah senioritas karena estafeta kepemimpinan adalah satu hal yang sudah dipersiapkan secara matang dalam persyarikatan ini. Khusus untuk Aisyiyah, Siti Aisyah Hilal meningkatkan status Sapa Tresna Wanita dengan menjadikannya Nasyyatul Aisyiyah yang bermakna tunas Aisyiyah yang berarti adalah kader Aisyiyah. Pemikiran ini kemudian diterjemahkan dalam fungsi Aisyiyah yang menjadi pembina kader perempuan Muhammadiyah.

Siti Aisyah Hilal juga menjadi pencetus diadakannya Lomba Bayi Sehat di Aisyiyah yang dikenal dengan nama “*Baby Show*” pada tahun 1934. *Baby Show* ini menjadi awal dari komitmen Aisyiyah dalam menangani kesehatan ibu dan anak. Pada tahun-tahun tersebut unjuk kekuasaan dengan mengedepankan anak-anak memang belum banyak dilakukan, maka *Baby Show* ini melengkapi komitmen Aisyiyah dalam mengusung tema

pendidikan usia dini setelah pada tahun 1919 mendirikan Frobel atau Taman Kanak-Kanak Bustanul Athfal yang kebetulan juga dibidani oleh kader Sapa Tresna Wanita, Siti Umniyah.

Konsistensi Aisyiyah dalam melakukan perlindungan terhadap ibu dan anak tidak dapat dilepaskan dari jasa seorang Siti Aisyah Hilal, sosok perempuan yang memiliki kemampuan orasi hebat namun juga memiliki ide dan keberanian untuk mengembangkan Aisyiyah. [Wied]



Baby Show. Kongres Bayi atau populer juga dengan istilah Baby Show diselenggarakan oleh Aisyiyah sebagai bukti kepedulian terhadap isu kesehatan anak. Baby Show ini sudah diselenggarakan pada saat Kongres Muhammadiyah Bagian 'Aisijjah di Minangkabau tahun 1930, KM Bg. Aisyiyah di Makassar tahun 1932, di Yogyakarta tahun 1937 dan di Medan pada tahun 1939, sebagaimana nampak dalam gambar di atas. Dalam Kongres Bayi itu diadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bayi dengan bekerjasama dengan para dokter Bumiputera, Tionghoa maupun dokter Belanda.

SITI BAROROH BARIED

Hidup Saya Harus Menuntut ilmu



Menuntut ilmu itu harus dilakukan oleh perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya.

Prof. Dra. Siti Baroroh Baried.

Lahir di Kauman Yogyakarta 23 Mei 1923, wafat di Yogyakarta 9 Mei 1999. Guru besar Fakultas Sastra UGM (usia 39 tahun, guru besar perempuan pertama). Pemimpin Umum Majalah Suara Aisyiah. Ketua PP Aisyiah 1965-1990.

Siti Baroroh adalah seorang guru besar dan sebuah fenomena langka di Muhammadiyah pada masa itu. Putri dari Haji Tamim bin Dja'far, H Tamim adalah keponakan Nyai Ahmad Dahlan. Siti Baroroh menikah dengan dr. Baried Ishom, cucu KHA Dahlan dengan Nyai Ahmad Dahlan. Selain sebagai profesor perempuan pertama di Indonesia, Siti Baroroh Baried juga perempuan pertama yang menjadi anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada jaman K.H. Junus Anis. Siti Baroroh yang mengawali pemikiran tentang perlunya perempuan masuk dalam jajaran pimpinan Muhammadiyah

Semangatnya menuntut ilmu membuat Siti Baroroh memiliki wawasan yang sangat luas. Siti Baroroh Baried menjadi Ketua Pimpinan Pusat 'Aisyiah selama 5 periode (1965 sampai 1985) atau selama 20 tahun menjadi nahkoda organisasi perempuan Muhammadiyah. Kemampuan serta keilmuannya ini membawa pengaruh yang sangat positif bagi 'Aisyiah. Internasionalisasi Aisyiah sudah dimulai sejak kepemimpinan Siti Baroroh Baried. Dengan modal ilmu yang dimiliki, Siti Baroroh sering diundang ke berbagai konferensi internasional. Disinilah Siti Baroroh mengenalkan 'Aisyiah ke dunia internasional melalui aktivitasnya. Siti Baroroh selalu membawa nama 'Aisyiah ke

forum-forum global sekaligus menjalin relasi dengan badan-badan internasional macam UNICEF, UNESCO, WHO, The Asia Foundation, World Conference of Religion and Peace, UNFPA, UNDP, World Bank, dan masih banyak yang lainnya.

Sebelum menjadi Ketua Umum Aisyiyah, ia pernah menjabat sebagai Ketua Biro Hubungan Luar Negeri PP 'Aisyiyah sehingga memungkinkannya mensinergikan posisi akademiknya dengan kepentingan internasionalisasi 'Aisyiyah. Sebagai lulusan Universitas Al Azhar Mesir, Siti Baroroh memiliki jaringan yang luas. Ia kerap diundang ke berbagai acara internasional, yang menjadi ajang efektif untuk memperkenalkan 'Aisyiyah. Dalam sebuah seminar di Harvard University, Amerika Serikat, Siti Baroroh menyampaikan presentasi berjudul "*Aisyiyah and The Social Change Woman of The Indonesian*". Hal ini membawa dampak positif bagi 'Aisyiyah karena 'Aisyiyah dan gerakannya mulai dikenal di dunia internasional. Disinilah peran seorang Siti Baroroh sangat besar.

Keputusan Siti Baroroh Baried kuliah di Universitas Al Azhar Mesir, setelah lulus dari Fakultas Sastra UGM dan Universitas Indonesia (UI) pada 1952, tentunya bukan tanpa alasan. Ini adalah wujud perjuangan sekaligus pembuktiannya dalam kesetaraan mendapatkan hak pendidikan. Untuk diketahui, saat itu sangat langka perempuan bisa sekolah di luar negeri, dan Siti Baroroh ternyata sanggup membuktikannya. Kemauan kuatnya ini mengantarkan Siti Baroroh menjadi profesor perempuan pertama di Indonesia.

Ketika menjadi Ketua 'Aisyiyah, perhatian dan perjuangan Siti Baroroh Baried tidak jauh-jauh dari persoalan hak-hak perempuan. Selain gigih memperjuangkan hak-hak perempuan, ia juga mencurahkan perhatian untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui pendidikan sejak usia sedini mungkin. Prinsip Siti Baroroh, bahwa menuntut ilmu itu harus dilakukan oleh perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Selama masa kepemimpinannya di 'Aisyiyah, Siti Baroroh banyak melakukan pengembangan pendidikan pra sekolah yaitu Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal (TK

ABA) maupun sekolah-sekolah kejuruan kebidanan dan keperawatan. Berkat rintisan Siti Baroroh dan para pendahulunya, 'Aisyiyah saat ini telah memiliki berbagai amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, juga pemberdayaan masyarakat. Di sektor pendidikan, 'Aisyiyah kini mengelola lebih dari 5 ribu amal usaha, mulai dari kelompok bermain, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, tempat penitipan anak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah kejuruan, sampai perguruan tinggi.

Meskipun Siti Baroroh sangat konsen terhadap pendidikan kaum perempuan, dia tidak pernah menyetujui konsep emansipasi berlebihan, yang bertentangan dengan norma agama dan budaya. Sebenarnya inilah yang menjadi pemikiran tentang emansipasi di 'Aisyiyah sejak awal berdirinya. Bagi Siti Baroroh, seorang perempuan bisa diterima untuk memiliki karier di luar rumah. Hanya saja, pada saat yang sama ia juga harus tetap memperhatikan tertib perilaku yang selama ini diasosiasikan dengan kodrat dasar perempuan, khususnya sebagai istri yang menangani urusan internal rumah tangga. Perempuan yang bekerja di luar rumah perlu batasan-batasan tertentu sehingga tidak keluar dari kodratnya sebagai perempuan dan posisinya sebagai istri, seperti antara lain harus seizin suami, tidak sampai menelantarkan pendidikan dan perhatian untuk anak-anaknya, dan lain sebagainya. Maka, setinggi dan sebesar apapun pencapaian yang diraih Siti Baroroh dalam karier, ia tetap menjalani peran sebagai istri dan ibu dengan sebaik-baiknya. Melalui 'Aisyiyah, ia terus mengkampanyekan edukasi tentang emansipasi wanita yang terkadang kerap dianggap kebablasan.

Siti Baroroh Baried tetap berteguh bersama 'Aisyiyah hingga akhir hayat. Saat masih menjabat sebagai penasihat PP 'Aisyiyah sekaligus Pemimpin Umum Majalah *Suara 'Aisyiyah*, perempuan langka yang lahir dari rahim Muhammadiyah ini wafat pada 9 Mei 1999 dalam usia 74. Siti Baroroh Baried, perempuan yang mendapat gelar profesor pertama di Indonesia ini telah memberikan landasan yang kuat terhadap internasionalisasi 'Aisyiyah yang kemudian dikembangkan di masa-masa selanjutnya. [Wied].



SITI BARIYAH

Muhammadiyah Mengajarkan Agama Islam Melalui Sekolah

Siti Bariyah (lahir 1907)
Ketua Alsiyah pertama (1917-
1920). Artikelnya berjudul "*Tafsir
Maksoed Moehammadijah*"
dimuat di majalah Suara
Muhammadiyah edisi no 9 th. Ke
4 September 1923, didalamnya
telah ditemukan gugus pemikiran
ideologis jauh sebelum Mas
Mansur melahirkan buah
pemikiran Tafsir Langkah
Muhammadiyah.

*"Hadjat perserikatan itoe:
a. Memadjoekan dan
menggembirakan pengadjaran
dan peladjaran agama Islam di
seloeroeh Hindia-Nederland."*

(Siti Bariyah, *Tafsir Maksoed
Moehammadijah*, 1923)

Siti Bariyah adalah gadis Kauman, lahir tahun 1325 H (1907 M). Siti Bariyah adalah putri KH Hasyim dan sudah terlihat menonjol sejak usia remaja. Bersama Siti Wadingah dan Siti Dawimah, Siti Bariyah diminta oleh KHA Dahlan untuk bersekolah di *Neutraal Meisjes School*, sebuah sekolah Belanda yang tidak umum dimasuki oleh anak-anak pribumi apalagi perempuan. Namun, KHA Dahlan punya lompatan besar dalam hal pendidikan bagi anak perempuan, sehingga beliau memerintahkan tiga gadis Kauman ini untuk bersekolah di sana.

Pendidikan di sekolahan inilah yang membuat Siti Bariyah memiliki kemampuan berbahasa asing yang lebih ketimbang teman-temannya. Bahasa Melayu dan Belanda dikuasai oleh Siti Bariyah. Selain itu, dia sangat mahir menterjemahkan Al Qur'an dalam berbagai bahasa. Kemampuan inilah yang membuat Siti Bariyah sering diajak berkeliling oleh KHA Dahlan untuk berdakwah.

Ketika KHA Dahlan mendirikan 'Aisyiyah, Siti Bariyah saat itu baru memasuki usia 10 tahun. Usia yang masih sangat muda untuk memimpin sebuah organisasi. Namun KHA Dahlan tetap memilih Siti Bariyah menjadi ketua 'Aisyiyah karena intelektualitasnya. Organisasi baru ini harus dibangun oleh orang dengan intelektual yang matang untuk meletakkan dasar-dasarnya. Itulah pertimbangan yang sangat luar biasa dari seorang Ahmad Dahlan. Padahal dalam forum tersebut hadir pula Siti Walidah (istrinya), Siti Dawimah dan Siti Wadingah (teman Siti Badiyah di Neutraal), dan Siti Busyro, Siti Dalalah dan Siti Badilah (aktivis Sopo Tresno). Disinilah 'Aisyiyah didirikan atas dasar pertimbangan profesionalisme seorang Ahmad Dahlan yang benar-benar ingin memajukan perempuan.

Siti Bariyah adalah seorang perempuan yang luar biasa kecerdasan intelektualnya. Setelah KHA Dahlan meninggal dan tampuk pimpinan dipegang oleh KH Ibrahim, Siti Bariyah diberi mandat penuh untuk membuat Tafsir Muhammadiyah yang diterbitkan dalam *Soewara Moehammadijah* nomor edisi 9 tahun ke-4 bulan September 1923 pada artikel "*Tafsir Maksoed Moehammadijah*". Pemikiran inilah yang kemudian diurai oleh Mas Mansur dalam Tafsir Langkah Muhammadiyah. Dalam tulisan tersebut Siti Bariyah mencermati pendidikan pada jaman itu yang dilakukan oleh orang Islam seringkali masih meninggalkan jejak ketertinggalan. Disinilah Siti Bariyah menegaskan pentingnya pendidikan Islam memakai cara-cara yang modern (dalam hal ini Siti Bariyah membandingkan dengan sistem pesantren pada saat itu). Hal ini tentunya tidak lepas dari latar belakang Siti Bariyah yang mengenyam pendidikan model barat di Neutraal.

Menarik untuk mengupas *Tafsir Maksoed Muhammadiyah* yang ditulis Siti Bariyah di tahun 1923. Siti Bariyah menyebutkan bahwa Muhammadiyah didirikan untuk memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran Islam di seluruh Hindia Timur. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah mengajarkan agama dengan memakai cara sekolah dimana ada perpaduan antara ilmu agama dan ilmu umum, satu hal yang tidak didapatkan di pesantren.

Siti Bariyah dan Siti Wasilah (istri K.R.H. Hadjid) adalah dua murid perempuan KHA Dahlan yang sering diajak untuk berdakwah keliling. Keduanya memang memiliki kemampuan dan wawasan yang melebihi santri-santri perempuan yang lain. Siti Bariyah mahir berbahasa Belanda, juga bahasa Melayu, sedang Siti Wasilah mahir melatunkan tilawatil quran. Sebelum pengajian dimulai, KHA Dahlan menyuruh Wasilah untuk membacakan ayat-ayat suci Alqur'an sambil dilagukan dengan merdu. Bariyah mendapat giliran untuk menerjemahkan ayat-ayat Alquran ke dalam bahasa Melayu dan Belanda. Konon, dengan model pengajian seperti ini, banyak orang yang senang dan berlomba-lomba mengikuti pengajian. Model yang belum biasa dilakukan pada masa itu. Dan model inilah yang kemudian dikembangkan oleh Siti Bariyah setelah KHA Dahlan meninggal. Selain pemikirannya tentang sistem pendidikan di Muhammadiyah, Siti Bariyah juga menerapkan metode pengajian yang berbeda dengan ulama lainnya, kemampuannya untuk menterjemahkan Al Qur'an dalam berbagai bahasa menjadikan daya tarik tersendiri di setiap dakwah yang dilakukannya. Ayat Al Qur'an yang dibaca dan kemudian diterjemahkan ternyata membuat jamaah merasa dekat dengan Al Qur'an karena memahami isinya. Itulah sebabnya Siti Bariyah banyak diundang di pengajian-pengajian yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah karena pengajiannya bersifat mengajarkan bukannya mendoktrin. Siti Bariyah juga merintis Soera 'Aisijah di tahun 1926 yang merupakan majalah resmi 'Aisyiyah sampai saat ini.

Siti Bariyah, seorang perempuan muda yang memimpin 'Aisyiyah di usia 10 tahun yaitu tahun 1917-1920 dan terpilih kembali di tahun 1927 dalam Kongres di Pekalongan. Perempuan muda yang menikah dengan kerabat dekat KHA Dahlan ini disamping sebagai pimpinan, pendakwah juga merupakan pedagang batik. Meninggal di usia muda, Siti Bariyah merupakan perempuan Kauman yang memiliki intelektual di atas rata-rata dan memiliki kemampuan pemikiran yang diakui oleh Muhammadiyah. [Wied]

SITI BADILAH ZUBER

Konsep Awal Kemitraan dalam Rumah Tangga



“Tanamkan kembali dan hayatilah betul-betul nilai-nilai pengabdian, dan kita mulai dari kalangan Muhammadiyah sendiri.”

Siti Badilah Zuber. Lahir di Yogyakarta tahun 1904. Termasuk salah satu dari enam murid perempuan KH Ahmad Dahlan yang disiapkan sebagai kader-kader pimpinan perempuan Islam.

“Orang-orang Muhammadiyah tidak hanya merelakan harta benda dan waktunya untuk Muhammadiyah, tetapi dirinya juga direlakan. Seorang bapak seluruh waktunya untuk Muhammadiyah dan si ibu berjuang memenuhi keperluan hidup rumah tangga. Sebaliknya, bila ibu yang berdakwah untuk Muhammadiyah, maka si bapak yang mencukupi segala keperluan rumah tangga...”

Siti Badillah adalah salah satu dari generasi kedua perempuan Kauman yang mendapatkan pendidikan langsung dari KHA Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan bersama Siti Zaenab, Siti Aisyah, Siti Busyro, Siti Dauchah, Siti Dalalah dan Siti Hayinah. Anak-anak perempuan inilah yang menjadi penggerak Sapa Tresna yang didirikan KHA Dahlan untuk mewadahi pengajian kaum perempuan. Di samping itu Siti badillah juga mengenyam pendidikan di Neutraal School (Sekolah Belanda) serta juga mendapatkan pendidikan di MULO. Siti Badillah juga

mendapatkan pendidikan langsung dari Nyai Ahmad Dahlan bersama anak-anak perempuan lainnya.

Penggemblengan terhadap anak-anak perempuan Kauman oleh Nyai Ahmad Dahlan juga dilakukan di internaat yang didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan untuk mndidik anak-anak perempuan dalam bidang kepribadian, ketrampilan dan keagamaan. Melalui penggodogan ini Siti Badillah muncul menjadi sosok pribadi yang ‘ngeyelan’ , teguh terhadap pendapat, teliti. Siti Badillah sering ditugaskan oleh KHA Dahlan untuk mengisi pengajian-pengajian di Kweekschool dan menjadi salah satu juru dakwah andalan KHA Dahlan.

Kebiasaan Siti Badillah sebelum memberikan pengajian adalah menyiapkannya dengan teliti termasuk membaca banyak referensi baik yang berbahasa Indonesia maupun Belanda. Inilah yang menjadikan materi yang dibawakan selalu orisinal hasil pemikirannya sendiri, menarik dan selalu sesuaikan dengan kondisi jamannya. Bandingkan dengan para pendakwah yang instan yang saat ini banyak ada di masyarakat.

Salah satu pemikiran Siti Badillah yang menarik untuk dikupas adalah konsep dia dalam hal kesetaraan dalam rumah tangga antara laki-laki dan perempuan. Pemikiran ini memang lebih berkesan domestik namun sangat relevan untuk dipahami di era saat ini. Pemikiran ini juga dipandang maju di jamannya karena pada saat itu kebanyakan kaum perempuan masih terbelenggu pada tugas-tugas rumah tangga. Tidak banyak perempuan yang keluar rumah untuk beraktivitas karena masih dianggap tabu.

Siti Badillah menyebutkan dalam sebuah tulisannya “ *Orang-orang Muhammadiyah tidak hanya merelakan harta benda dan waktunya untuk Muhammadiyah, tetapi dirinya juga direlakan. Seorang bapak mengorbankan seluruh waktunya untuk Muhammadiyah dan si ibu berjuang memenuhi keperluan hidup rumah tangga. Sebaliknya, bila si ibu yang berdakwah untuk Muhammadiyah, maka si bapak yang mencukupi segala keperluan rumah tangga*”. Pandangan ini di tahun 1930-an sampai 1940-an merupakan pandangan yang berbeda. Namun pandangan

seorang Siti Badillah yang merupakan murid langsung Kyai Haji dan Nyai Ahmad Dahlan, seorang Ketua Hoofdbestuur (HB) 'Aisyiyah memberikan konsep bermuhammadiyah dalam keluarga.

Menurut Siti Badillah, dalam memperjuangkan Muhammadiyah harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, suami dan istri. sama berdakwah di Muhammadiyah. Aktif di Muhammadiyah tidak bisa dijadikan alasan untuk goyahnya rumah tangga. Itulah yang ditekankan oleh seorang Siti Badillah dan ditunjukkan sendiri olehnya dimana beliau sendiri dan suaminya sama-sama aktif di Muhammadiyah sementara anak-anaknya juga menjadi pejuang dalam berbagai bidang. Itulah yang dimaksudkan dalam tulisan beliau di atas bahwa semuanya harus dimulai dari Muhammadiyah dan dari dirinya sendiri.

Siti Badillah menjadi ketua 'Aisyiyah untuk 3 (tiga) periode kepemimpinan. Beliau juga termasuk jajaran redaksi Suara 'Aisyiyah generasi pertama. Ketekunan dan tekad kuat beliau dalam menuntut ilmu berubah menjadi semangat untuk belajar dan belajar. Kecerdasan beliau untuk memahami literatur beberapa bahasa menjadikan materi pengajian yang disampaikannya menarik. [Wied]



SITI CHAMAMAH SOERATNO

Aisyiyah Pelopori Perempuan Indonesia Mengenyam Pendidikan

Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno.

Lahir di Kauman, Yogyakarta, 24 Januari 1941.

Guru Besar Ilmu Budaya UGM (1993).

Ketua Umum Nasyiatul Aisyiyah (1965),

PP Aisyiyah sejak 1968 (sebagai bendahara,
sekretaris dan wakil Ketua). Salah satu Ketua

International Moslem Women Union (IMWU) 2007-

2010. Ketua Umum PPP Aisyiyah (2000-2010).

Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah periode 2000-2010. Sebagai seorang akademisi dan pemimpin organisasi perempuan Islam 'Aisyiyah, Bu Chamamah mempunyai perhatian terhadap persoalan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan (gender Islami). Bu Chamamah sangat mendorong perempuan agar berkemajuan dalam segala aspek kehidupan dan tidak hanya fokus pada satu ranah domestik saja. Beliau berpendapat, laki-laki dan perempuan diciptakan dengan segala kompetensi dan kemampuannya untuk dimaksimalkan agar bisa memberikan manfaat kepada umat dan lingkungan.

Pola pemikiran yang dijiwai stereotip sikap mental laki-laki yang menenpatkan kaum perempuan pada posisi kelas dua adalah ganjalan bagi kiprah perempuan dalam segala aspek kehidupan. Keadilan gender tidak bermakna persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, tetapi menempatkan fungsinya sebagai faktor yang potensial dalam masyarakat. Dengan demikian, perempuan dilihat dari segi kiprahnya sebagai sumber daya manusia yang mempunyai potensi sama penting dengan kaum laki-laki.

Dalam Islam, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, baik itu dalam aspek ekonomi, politik dan spiritual. Hal ini bermakna bahwa perempuan dapat berperan, berfungsi dan berkedudukan serta mempunyai potensi yang tidak lebih kecil atau lebih rendah dari laki-laki. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dapat dilihat di beberapa teks Al-Qur'an dan al-Hadis. Allah memberikan perintah yang ditujukan untuk laki-laki dan perempuan dalam hal ibadah, perintah untuk bekerja sama dan saling tolong menolong serta beramar makruf nahi munkar. Firman Allah juga menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, yang membedakan adalah kualitas ketakwaannya.

Al-Hadis menyebutkan, antara lain, *“Tidaklah menghormati perempuan kecuali orang yang terhormat, dan tidak pula menghinakan perempuan kecuali orang yang hina”*. *“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik terhadap istrinya”*. Ini menunjukkan secara tidak langsung akan sikap terhadap perempuan sebagai indikator dari kualitas dan keimanan seseorang.

Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah lahir di Kauman, Yogyakarta, 24 Januari 1941. Putri kedua dari pasangan K.H. Hanad Noor dan Hj. Juhariah ini mengenyam di SD Muhammadiyah Ngupasan, SMP Putri Muhammadiyah Yogyakarta, dan pendidikan SLA di SMA Agama yang didirikan ayahnya. Dari sekolah ini diperoleh kemampuan Chamamah berbahasa Arab, membaca kitab-kitab kuning, serta pemahaman integral ilmu-ilmu kehidupan.

Hasil pendidikan di SMA A ini ternyata mampu mencetak kualitas unggul para muridnya, termasuk Chamamah. Prestasi hasil ujian akhirnya menempatkan Chamamah sebagai lulusan terbaik SLA swasta dan terbaik kedua sesudah SMA Negeri 1 Yogyakarta. Karena prestasi itu, Chamamah dapat diterima di fakultas-fakultas di UGM, seperti Fakultas Hukum, Fisipol, Ekonomi, juga Fakultas Sastra dan Kebudayaan, yang akhirnya menjadi pilihan studinya.

Setelah menyelesaikan Bakalauret (1963), Chamamah diangkat menjadi asisten dosen di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM.

Tugas pertamanya menjadi asisten perkuliahan Prof. Soemadi Soemowidagdo untuk bahasa Arab dan Islamologi. Setelah menamatkan S1 tahun 1967, ia diangkat sebagai dosen tetap di Fakultas Sastra UGM. Pernah menjabat Sekretaris Jurusan Sastra Arab (1965-1975). Kemudian, Ketua Jurusan Sastra Prancis (dua periode) dan Wakil Dekan Bidang Akademik (dua periode). Selanjutnya, menjadi Dekan Fakultas Ilmu Budaya UGM.

Setelah meraih gelar kesarjanaannya, Chamamah melanjutkan menuntut ilmu ke luar negeri. Dia berhasil meraih S2 di *Ecole des Hautes Etudes en Science Sociale*, Paris, Prancis (1975). Di Prancis ini Chamamah memanfaatkan kesempatan untuk memperdalam bahasa Arab dan Prancis di Universitas Paris III, sehingga ia menguasai bahasa Inggris, Prancis, Arab, Jerman dan Belanda. Pada tahun 1988, Chamamah meraih gelar doktor Ilmu Sastra dari UGM, dengan disertasi: *Hikayat Iskandar Zulkarnain: Suntingan Teks dan Analisis Resepsi*, dengan predikat Cum Laude. Mengikuti pendidikan penelitian di Belanda (1983-1984, 1987-1988) dan di Inggris (1984-1988). Tahun 1993, ia ditetapkan sebagai Guru Besar Ilmu Budaya UGM.

Sebagai dosen di UGM, khususnya di Fakultas Ilmu Budaya dan Program Pascasarjana (Kajian Amerika, Timur Tengah dan ICRS) beliau mengampu mata kuliah Filologi, Ilmu dan Teori Sastra, Ekranisasi, Resepsi, Budaya Sastra, Teori Teks, Teori Interpretasi, Feminisme, dan Metode Penelitian Ilmiah. Selain mengajar di UGM, ia juga mengajar di UIN Sunan Kalijaga, UNY, IAIN Walisongo Semarang, dan lain-lain. Selain itu, beliau ditunjuk sebagai *external examiner* untuk calon doktor dalam Ilmu Budaya di Universitas Malaya dan calon Guru Besar di Universitas Kebangsaan, Malaysia.

Satu pengalaman yang cukup mengesankan bagi Bu Chamamah adalah kepergiannya ke Bangladesh dan bertemu Mohammad Junus pendiri Grameen Bank dan peraih hadiah Nobel. Sewaktu menjadi Sekretaris MWA UGM (2006) Chamamah diundang untuk menyampaikan presentasi di sidang PBB tentang pelaksanaan program pendidikan di Indonesia terkait dengan program MDGs, yaitu *Education for All*.

Chamamah sudah menjadi Ketua Umum Nasyyiatul Aisyiyah sejak usia remaja (1965). Tahun 1968, ia masuk jajaran Pimpinan Pusat Aisyiyah. Jabatan yang pernah dipegangnya di Aisyiyah adalah bendahara, sekretaris dan wakil Ketua. Puncaknya, selama dua periode (2000-2010), Chamamah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah.

Bu Chamamah tercatat sebagai anggota organisasi baik nasional maupun internasional, seperti *World Conference on Religion and Peace* (WCRP) dan *International Conference on Religion and Peace* (ICRP). Pada organisasi Perempuan Islam Internasional, seperti *International Moslem Women Union* (IMWU) periode 2007-2010, sebagai salah satu ketuanya.

Selaku Ketua PP Aisyiyah, Chamamah telah mengunjungi daerah-daerah dari NAD sampai Papua, untuk berbagi pengalaman dalam bidang pendidikan, sosial-keagamaan dan keperempuanan. Ia pernah menjadi anggota Dewan Pakar ICMI Yogyakarta (1994), Ketua Divisi Kebudayaan ICMI (1994-1999). Chamamah pernah menjadi Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan majalah Suara Aisyiyah (1966-sekarang). Bersama karibnya, Prof. Dra. Hj. Siti Baroroh Baried, Chamamah Soeratno termasuk dari 7 orang profesor yang berasal dari Kauman.

Chamamah menikah dengan Drs. M. Soeratno, pada 25 Januari 1966. Sehingga namanya lebih akrab dengan panggilan Chamamah Soeratno. Dikarunia dua orang anak yaitu Ir Ahmad Syauqi, M.M. dan dr. Nurul Chusna, MPH.

Berbagai karya beliau hasil diantaranya: *Kharisma Tokoh Indonesia Lama dan Masalah-Masalahnya* (1981), *Pengantar Teori Filologi* (1985), *Hikayat Iskandar Zulkarnain: Analisis Resepsi* (1991), *Variasi Sebagai Bentuk Kreativitas Pengarang Kedua dalam Dunia Sastra Melayu Hikayat Banjar* (1994), *Khasanah Budaya Kraton Yogyakarta II* (2001), *Kraton Jogja: The History and Cukture Heritage* (2004), *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Seni dan Budaya: Suatu Warisan Intelektual Yang Terlupakan* (2009). Selain itu ada banyak penelitian dan artikel yang telah ditulis oleh beliau. [Im-Ad]



ELYDA DJAZMAN

Kritis dan Proaktif Membangun Kesetaraan

Dra. Hj. Elyda Djazman.

Lahir di di Medan, 11 Juli 1940. Penerima UMM Award untuk Tokoh usia lebih 70 tahun tetap berkhidmat dan berjuang untuk umat dan bangsa. Badko HMI Jawa Tengah (1963-1964). Dewan Pimpinan Pusat IMM (1964-1968). Pimpinan Pusat NA (1967-1975). Ketua PP Aisyiyah tiga periode (1985-2000).

Pidato-pidatonya menampakkan kepekaan dalam memikirkan perempuan, seperti menanggapi masalah TKW, wanita-wanita yang dieksploitir, perempuan marginal, dan lain sebagainya.

Kiprah Bu Elyda dapat dilihat dalam peta gerakan perempuan di Indonesia dapat dilihat terutama ketika beliau menjadi Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah selama tiga periode (1985-2000). Selama di Aisyiyah, Bu Elyda dikenal sebagai tokoh wanita yang kritis dan proaktif. Ia sering membawa Aisyiyah agar peka terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan kemanusiaan.

Menurut Bu Elyda,, Aisyiyah harus mampu menyesuaikan diri dan tanggap terhadap perubahan. Sebagai aktivis, beliau melihat adanya perubahan-perubahan sosial dan budaya, merasa prihatin dan berusaha bagaimana caranya Aisyiyah menanggapi perubahan tersebut. Ada dua tipe perubahan, yang positif, misalnya dalam soal kesetaraan gender, berapa perempuan lulus pendidikan sampai doktor di Indonesia setiap tahun. Sebaliknya, perubahan negatif, sekian banyak perempuan mengalami kepingangan dalam pengertian tidak sesuai dengan keyakinan yang kita anut. Perubahan negatif ini disikapi sebagai suatu tantangan.

Hj. Elyda Djazman memiliki nama asli Elyda. Setelah menikah dengan Drs. M. Djazman Alkindi, dikenal sebagai Elyda Djazman. Lahir di Medan, 11 Juli 1940, anak kedua dari tujuh bersaudara pasangan H.M. Bustami Ibrahim dan Rohana, asal Bukittinggi Sumatera Barat. H.M. Bustami Ibrahim pernah menjadi Ketua Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, termasuk pendiri Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan pernah menjabat sebagai Rektor UMSU.

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah sampai Sekolah Guru Atas dijalani Elyda di perguruan Muhammadiyah di Medan. Selanjutnya, kuliah di IKIP Muhammadiyah Surakarta dalam tiga tahap, 1960-1962, dilanjutkan 1963-1964 berhasil mencapai Sarjana Muda (BA). Berhenti sementara, karena pulang dan mengajar di Medan. Baru pada tahun 1966-1967 menyempurnakan studinya di IKIP Muhammadiyah Surakarta tersebut. Pendidikan non formal diperoleh dengan mengikuti berbagai kursus dan pelatihan lewat organisasi HMI, IMM dan Nasyiatul Aisyiyah.

Elyda memulai karier kerjanya dengan menjadi guru SD Muhammadiyah di Medan (1958-1960), mengajar di PGA Aisyiyah Medan (1962-1963). Setelah memperoleh Sarjana Muda di IKIP Muhammadiyah Solo, Elyda mengajar kembali di Medan di Sekolah Guru Taman Kanak-kanak (1964-1966) sebagai guru negeri diperbantukan. Tahun 1967, Elyda kembali merantau ke Solo untuk melanjutkan kuliahnya. Setelah tamat, beliau mengajar di SPG Aisyiyah Solo sampai tahun 1984. Selanjutnya, Elyda mengajar di SPG Muhammadiyah Yogyakarta (1984-1999).

12 Juli 1967 Elyda menikah dengan Drs. M. Djazman Alkindi, putera KRT. Wardan Diponegoro, seorang penghulu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Saat menikah, Elyda waktu itu adalah aktivis Nasyiah dan Djazman Alkindi adalah aktivis Pemuda Muhammadiyah serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Ketika mewakili Badko HMI Jawa Tengah, Elyda gigih mengusulkan rumusan Kepribadian HMI yang akan menjadi ciri khas anggota HMI. Menurut Elyda, HMI harus punya kepribadian yang bisa menonjolkan keislamannya sesuai dengan nama

organisasi yang memakai label Islam. Namun, saat itu usulannya belum bisa diterima. Aktivis HMI saat itu tidak menganggap penting untuk menonjolkan ciri keislamannya. Solidaritasnya terhadap kaum perempuan cukup tinggi. Hal itu dapat disimak antara lain pada pidato-pidatonya yang menampakkan kepekaan dalam memikirkan perempuan, seperti menanggapi masalah TKW, perempuan yang dieksploitar, perempuan marginal, dan lain-lain.

Sekalipun menjadi pimpinan Aisyiyah, Elyda juga dikenal sebagai seorang tokoh yang sering memberi otokritik kepada Aisyiyah. Menurutny, Aisyiyah kurang menanggapi masalah-masalah aktual di sekitarnya, khususnya masalah politik. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan aktivis Aisyiyah yang terjebak dalam aktivisme, sekadar mengerjakan kegiatan sesuai program dan keputusan Muktamar.

Elyda mulai menjadi pengurus Nasyyatul Aisyiyah ketika masih duduk di kelas II SPG, menjabat Wakil Ketua NA Cabang Medan. Elyda terus aktif di Nasyyah Medan sampai tahun 1960. Ketika studi di IKIP Muhammadiyah Surakarta, tahun 1963-1964, Elyda terpilih menjadi anggota Badko HMI Jawa Tengah. Di HMI dia juga pernah duduk di Departemen Kader. Selain aktif di HMI, Elyda ditarik oleh PP Nasyyatul Aisyiyah menjadi Ketua Bagian Pembinaan Kader (1964).

Tahun 1964-1966, kembali ke Medan, Elyda aktif lagi menjadi pengurus Nasyyah di Medan. Namun, tidak lama kemudian, pada pertengahan 1966 Elyda melanjutkan kuliahnya di Solo. Pada tahun 1967-1975, Elyda aktif di Pimpinan Pusat Nasyyatul Aisyiyah. Dari sinilah Elyda mulai berkenalan dengan ibu-ibu Pimpinan Pusat Aisyiyah, antara lain Profesor Siti Baroroh Baried.

Pada Muktamar Aisyiyah ke-40 tahun 1978, Elyda resmi mulai masuk dalam kepengurusan Pimpinan Pusat Aisyiyah sebagai bendahara. Saat itu Bu Elyda mulai keliling ke daerah, berpidato di berbagai kesempatan. Pada Muktamar Aisyiyah ke-41 tahun 1985, Bu Elyda terpilih menjadi Ketua PP Aisyiyah untuk periode 1985-1990. Pada Muktamar Aisyiyah ke-42 tahun 1990, Bu Elyda terpilih kembali sebagai Ketua PP Aisyiyah periode 1990-1995. Kemudian pada Muktamar Aisyiyah ke-43 tahun 1995 di Banda

Aceh, Bu Elyda terpilih lagi sebagai Ketua PP Aisyiyah periode 1995-2000. Selama menjabat Ketua PP Aisyiyah, Bu Elyda membangun kerjasama yang baik di kalangan internal PP Aisyiyah. Berkat kerjasama yang baik inilah kepemimpinan Aisyiyah dapat melaksanakan program-program dengan baik dan lancar.

Selama aktif memimpin organisasi maupun dalam kegiatan lain, Bu Elyda sudah beberapa kali mengunjungi negara-negara di Asia maupun Eropa. Sebagai Ketua PP Aisyiyah, Bu Elyda pernah mewakili Aisyiyah kunjungan ke Saudi Arabia. Kepergiannya bersama beberapa anggota PP Aisyiyah atas undangan Menteri Agama RI. Kemudian, bersama organisasi PKK, atas undangan WHO, Bu Elyda mengadakan lawatan ke berbagai negara untuk meninjau aktivitas dan perkembangan perempuan di India. Dalam rangka studi banding, dari Badan Pengembangan Pendidikan Nasional, Bu Elyda mengikuti lawatan ke Malaysia, Singapura dan Bangkok. Kunjungan bersama suami, karena tugas, diikutinya pula seperti ke Turki, Belanda, dan lain-lain. [Ad]



Bu Elida Djazman menerima silaturrahi dan napak tilas sejarah Immawati dari Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman (2016). foto: suaramuhammadiyah.id



SITI HAYINAH MAWARDI

Dari Aisyiyah untuk Pergerakan Perempuan Indonesia

Siti Hayinah Mawardi. Lahir di Kauman Yogyakarta tahun 1906. Ketua Redaksi Majalah Suara Aisyiyah tahun 1938, 1941, 1942, 1952. Ketua Umum PP Aisyiyah lima periode, tahun 1946-1949, 1953-1965.

“Marilah Soeara ‘Aisjijah ini kita hidupi betul-betul ... kalau tidak, baiklah kita bunuh saja mati-mati dan kita tanam dalam-dalam”

(Siti Hayinah Mawardi, Kepentingan Lectuur Perempuan, Pidato di Konggres ‘Aisyiyah ke-21 di Makassar tahun 1932)

Siti Hajinah mengusulkan untuk mendirikan perpustakaan bagi perempuan dan mengusulkan terbitnya surat kabar atau majalah dan kitab bagi kaum ibu.

Adalah Aisyiyah melalui kedua tokohnya yakni Siti Munjiyah dan Hajinah Mawardi, menjadi pemrakarsa dan mensponsori terbentuknya federasi organisasi-organisasi wanita yang diikuti dengan penyelenggaraan Kongres Wanita Pertama tahun 1928, diselenggarakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 bertempat di Dalem Joyodipuran Yogyakarta.

Siti Hayinah Mawardi adalah salah satu diantara para tokoh perempuan yang didaulat untuk berpidato dalam Konggres Perempuan Pertama Tahun 1928 tersebut. Dengan mengangkat tema Persatuan Manusia, Siti Hayinah ingin mengatakan pada dunia bahwa persatuan adalah hal yang penting yang harus ada untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Pemikiran Siti Hayinah pada saat itu tentu saja sangat maju. Bahkan dia mengatakan bahwa karena persatuanlah maka Muhammadiyah berhasil mendirikan banyak sekolah dan diterima dengan baik oleh semua pihak. Siti Hayinah adalah gadis Kauman yang lahir di tahun 1906 M, memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang tulis-menulis. Inilah yang menjadikan Siti Hayinah dipercaya menjadi sekretaris dalam kepemimpinan 'Aisyiyah.

Kemampuan jurnalistik Siti Hayinah tidak hanya diakui oleh kalangan 'Aisyiyah saja. Namun di kalangan luar 'Aisyiyah kemampuannya juga diakui dengan dilibatkannya Siti Hayinah dalam penerbitan media (surat kabar) bernama *Isteri*, milik Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). Saat itu 'Aisyiyah, dengan pengalaman menerbitkan majalah Suara Aisyiyah, mengusulkan kepada PPI agar menerbitkan sebuah media sebagai corong penyebarluasan ide-ide PPI untuk kemajuan perempuan Indonesia. Siti Hayinah memiliki pengalaman sebagai redaksi Suara 'Aisyiyah, sehingga tidak ada kesulitan sedikitpun dalam mengelola surat kabar PPI tersebut. Kemampuan jurnalis Siti Hayinah inilah yang menjadikan beliau sangat profesional dalam mengelola Suara 'Aisyiyah. Siti Hayinah sangat menyadari pentingnya surat kabar sebagai alat yang memberi suluh kepada pembacanya, pengikat dan propaganda organisasi. Inilah yang menyebabkan Siti Hayinah mengeluarkan ultimatum dalam Kongres 'Aisyiyah ke-21 ketika Suara 'Aisyiyah berada dalam keadaan kritis.

Siti Hayinah juga sangat peduli terhadap pendidikan bagi perempuan. Dia bahkan berpendapat bahwa seseorang dikatakan sangat jahat dan durhaka apabila ia menghalangi perempuan untuk belajar dan melarang kaum istri untuk bisa baca tulis. Inilah cetusan literasi untuk kaum perempuan yang secara eksplisit

disampaikan oleh seorang pemimpin organisasi kaum perempuan. Siti Hayinah juga mengusulkan kepada Kongres untuk mendirikan bibliothek, gedung buku atau perpustakaan bagi perempuan. Siti Hayinah juga menyarankan untuk kaum perempuan agar senang membaca dan membuat karangan (tulisan). Memperbanyak terbitan tentang perempuan juga merupakan keinginan Siti Hayinah.

Pemikiran seorang Hayinah terhadap kemampuan literasi bagi perempuan menguatkan budaya literasi yang sudah ditanamkan KHA Dahlan di awal berdirinya Muhammadiyah. Siti Hayinah adalah seorang yang sangat cerdas, suka membaca, dan memiliki wawasan yang luas terhadap tulisan-tulisan tentang/oleh perempuan. Tulisan-tulisan Siti Hayinah masih bisa dilihat pada terbitan Suara 'Aisyiyah yang hampir kesemuanya mengungkapkan pemikirannya tentang kaum perempuan.

Siti Hayinah juga sangat peduli terhadap dinamika emansipasi perempuan, dimana dalam pemikiran seorang Hayinah, emansipasi harus tetap berakar pada budaya bangsa. Inilah sebabnya Siti Hayinah mengkritik para perempuan yang menerapkan emansipasi secara kebablasan. Bagi Siti Hayinah, emansipasi tetap harus memperhatikan budayanya dan bukan hanya mengadopsi budaya barat yang dipandanginya tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Siti Hayinah Mawardi, seorang pencetus literasi bagi kaum perempuan, yang memimpin 'Aisyiyah selama 5 periode, meletakkan dasar Suara 'Aisyiyah, dan aktif di beberapa organisasi, merupakan salah satu murid KHA Dahlan yang mengalami secara langsung reformasi pendidikan bagi kaum perempuan yang dilakukan KHA Dahlan. [Wied]

SITI MUNJIYAH

Menggagas Perubahan Pandangan tentang Kaum Perempuan



Siti Munjijah.

Lahir di Yogyakarta 1896, wafat 1955. Wakil Aisyiyah dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama di Mataram, Yogyakarta, 22-25 Desember 1928, menyampaikan pidato di Kongres itu berjudul "Derajat Perempuan". Ketua Aisyiyah 1932-1936.

"Perempuan dan lelaki Islam itu masing-masing berhak berkemajuan dan berkesempurnaan, dan bahwasannya yang dikata kemajuan dan kesempurnaan ialah menurut hak batas-batasnya sendiri-sendiri."

"Mereka kaoem perempoean itoe berpikir, bahwa jang menjebakkan haknja hina dina itoe lantaran dari bodoh. Baiklah sekarang kami bergerak madjoe mentjahari pengetahoean dengan bersekolah dan bahwasanja perempoean itoe sama sadja dengan haknja lelaki. Dengan keadaan jang demikian itoe maka tertjapailah maksoednja menoentoet pengetahoean itoe dan soenggoeh benar perempoean zaman sekarang banjak jang pandai-pandai lantaran dari beladjar di sekolah-sekolah. Hanja sajang sekali bahwa mereika ini tak dapat menggoenakan kepandaiannya itoe dengan sepertinja, malah kelebihan dari batasnja. Boleh djadi hal ini tersebut dari kepajahan-kepajahan hidoepnja, lantas dapat sendjata oentoek mendjadi penawar.

Tidak sadja demikian kemadjoenja tapi sekarang ada jang model baroe ja'ni potong ramboet precies seperti orang lelaki, djoega pakaiannya soedah merata banjak jang memakai tjara pakaian orang lelaki, dengan singkat maka

kemadjoean perempoean pada galibnja tidak soekalah dengan lelaki, baik sebarang apa sadja sehingga sifat keperempoean-nja tidak lagi tertampak!".[5]

(Siti Munjijah, pidato dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama, 22-25 Desember 1928, Yogyakarta)

Ketika Konggres Perempuan Pertama berlangsung di Yogyakarta pada tahun 1928, Siti Munjijah mewakili 'Aisyiyah' duduk sebagai wakil ketua. Namun selain menjadi wakil ketua Siti Munjijah juga menyampaikan sebuah pidato yang "berbeda", yang sempat memunculkan protes atau interupsi dari peserta.

Siti Munjijah menyampaikan pemikirannya tentang derajat perempuan. Siti Munjijah bahkan membandingkan konsep feminisme atau emansipasi antara Islam dan barat. Persoalan poligami yang sebelumnya tabu untuk dibicarakan di area publik juga dikupas oleh Siti Munjijah. Adik Fakhroedin dan murid langsung KHA Dahlan ini memang memiliki pengalaman yang luar biasa. Sering diajak kakaknya dan Kyai ke beberapa pertemuan seperti Boedi Oetomo dan Sarekat Islam, menampa Siti Munjijah menjadi sosok yang memiliki kemampuan berorasi lebih dari teman sebayanya. Inilah sebabnya Kyai Dahlan sangat sering mengajak Siti Munjijah dalam berbagai kesempatan ketika beliau berdakwah.

Dalam Konggres Perempuan tersebut, Siti Munjijah menyampaikan sebuah orasi yang mengangkat tentang konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan terutama dalam melakukan kebaikan. Secara tegas Siti Munjijah mengatakan bahwa kebebasan yang didapatkan perempuan itu bukannya tanpa batasan. Kesetaraan derajat yang diusung Siti Munjijah tetap berlandaskan pada ketentuan agama Islam dan budaya yang dianutnya.

"Kemadjoean perempoean pada achir2 ini soedah melebihi dari kodratnya, ta'akan tertemoe dengan sifat keperempoeannja, sebagian dari kemadjoemannja itoe

maka merika lantas bekerdja ada di fabriek, mendjalankan spoor, motor terbang d.l.l. malah ada jang mendjadi kampioen geloet, gontokan hingga menjeberang laoetan akan mentjari tandingnja. Dengan begitoe maka soedah barang tentoe badannja kentara keras-keras dan ototnja poen melotot dengan sendirinja. Dalam pada ia mentjari tanding itoe maksoednja mentjari oeang semata-mata”.

Kalimat itu menegaskan pemikiran Siti Munjiyah akan kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan yang tetap dibatasi oleh-oleh aturan agama dan norma budaya. Tentu saja pemikiran seperti ini bukan hanya sesuatu yang baru di tahun 1928-an dimana perempuan masih dipandang sebagai warga negara kelas 2. Namun kerasnya Siti Munjiyah mengkritik aktifitas dan pekerjaan para perempuan yang dianggapnya meninggalkan kodrat perempuannya, bahkan secara tegas Siti Munjiyah mengatakan bahwa hanya uang sajalah alasannya. Ketika Siti Munjiyah mengungkapkan tentang poligami dan talak, disitulah terlihat kekuatan pemahaman Siti Munjiyah terhadap hukum Islam yang dipadukan dengan nilai-nilai budaya yang dianutnya.

Keseimbangan pemikiran dan pemahaman inilah yang menjadi kekuatan Siti Munjiyah sehingga dia sangat sering diundang di forum-forum lintas agama. Kekuatan pemahaman inilah yang menjadikan Siti Munjiyah sangat enteng menjawab pertanyaan tentang pakaiannya yang pada saat itu hanya lazim dipakai oleh orang yang sudah naik haji.

“Saya ini bukan orang haji, tetapi saya memakai pakaian cara haji perempuan. Saya juga tidak malu berpakaian seperti orang haji, karena ini merupakan perintah agama Islam”.

Kekuatannya sebagai seorang pendakwah sangat terlihat ketika dia menyampaikan pidatonya di arena Konggres Perempuan tahun 1928 di Yogyakarta. Itulah Siti Munjiyah, orator ulung perempuan yang dimiliki Muhammadiyah yang memimpin ‘Aisyiyah setelah era Siti Walidah. (*Wied*)



SITI NOORDJANNAH DJOHANTINI

Aisyiyah Berfikir dan Berhikmat Darmabakti untuk Bangsa

Dra. Siti Noordjannah Djohantini, M.M., M.Si.

Lahir di Yogyakarta, 15 Agustus 1958. Ketua Bidang Ipmawati Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1983-1986. Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah 1990-1995. Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Aisyiyah 2000-2005. Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Republik Indonesia (2003-2008). Ketua Umum PP Aisyiyah, 2010-2020.

Siti Noordjannah Djohantini adalah Ketua Pimpinan Pusat 'Aisyiyah saat ini (2015-2020), juga Ketua BPH Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Beliau berhasil mengantarkan terwujudnya Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), perguruan tinggi perempuan pertama di Indonesia. Noordjannah mengatakan keberhasilan pengembangan Universitas Aisyiyah, mampu diraih berkat ikhtiar yang kuat dan doa yang tak kunjung padam. Selain itu, ia menjelaskan keberhasilan Aisyiyah mampu diwujudkan lewat sinergi, dengan banyak pihak seluas mungkin.

Sejarah metamorfosa lembaga pendidikan 'Aisyiyah ini diawali dari berdirinya Sekolah Bidan 'Aisyiyah RS PKU Muhammadiyah Tipe C pada tahun 1963. Sejak tahun 1963 berkembang bermetamorfosa hingga menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) 'Aisyiyah pada tahun 2003. Berkembang pesat hingga pada tahun 2016 berubah menjadi universitas dengan nama Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya program studi baru berbagai bidang yaitu di Fakultas Sains dan Teknologi (FST) dan Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora (FEISHum). Inilah bukti nyata Unisa

berkembang bersinergi bersama memajukan Bangsa dan mensejahterakan Ummat.

Dalam sebuah kesempatan di hadapan peserta dari 25 propinsi pada Pelatihan Paralegal untuk Pendampingan dan Penyelesaian Persoalan Hukum pada Perempuan dan Anak, oleh Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah, di Gedung Senat Rektorat UMM tahun 2016, Siti Noerdjannah Djohantini menyampaikan, “sebagai gerakan dakwah, Aisyiyah telah banyak mendarmabaktikan diri untuk bangsa dengan berbagai macam aksi yang manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat luas”. Kemudian, Noordjannah menyanyikan satu bait Mars Aisyiyah, “Wahai warga Aisyiyah sejati/sadarlah akan kewajiban suci/membina harkat kaum wanita/menjadi tiang utama negara.” Menurut Noordjannah, kutipan mars Aisyiyah itu untuk mengingatkan bahwa betapa hebatnya Aisyiyah. “Sejak mars itu dilantunkan belum pernah Aisyiyah sedikit pun berfikir hanya untuk kepentingannya. Tetapi Aisyiyah berhikmat untuk bangsa,” ujar Noordjannah sambil mengingatkan bahwa sebagai pimpinan Aisyiyah, harus bisa berperan sebagai *solutor* bagi problematika masyarakat.

Noordjannah menambahkan, syair Mars ‘Aisyiyah itu mengandung makna yang amat dalam. Semangat dari lagu mars yang menunjukkan bahwa Aisyiyah memiliki karakter berkemajuan dan memiliki visi pembangunan sumber daya manusia secara universal. “Untuk itu dalam setiap acara Aisyiyah, mars itu wajib dilantunkan sebagai spirit perjuangan,” pesannya sambil mengutip surat An-Nahl ayat 97, yang artinya, “Siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dan apa yang telah mereka kerjakan.”

Noordjannah berharap agar semua kader Aisyiyah tetap konsisten atau istiqamah membela mereka yang terpinggirkan dan terlemahkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kita akan terus gelorakan tiap ajaran KH Ahmad Dahlan kepada para murid. Miskin itu tak sekedar miskin harta. Ada miskin ilmu, miskin akhlak, miskin kebutuhan hidup. Kita

tentu saja akan teruskan model dakwahnya. Islam yang berkemajuan itu adalah ciri gerakan Aisyiyah itu akan mengalir melakukan pencerahan bangsa”.

Siti Noordjannah Djohantini, lahir di Yogyakarta, 15 Agustus 1958, dari keluarga religius pasangan Ardani Zaenal dan Siti Juariyah. Ketua Bidang Ipmawati Pmpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1983-1986. Salah seorang pendiri Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), pelopor LSM perempuan di Indonesia 1982. Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah 1990-1995. Koordinator Program Pendidikan Politik bagi Perempuan dalam Pemilu 1999. Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Aisyiyah 2000-2005. Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Republik Indonesia (2003-2008). Ketua Umum PP Aisyiyah, 2010-2020.

Siti Noordjannah Djohantini menikah dengan Haedar Nashir, seorang kader dan kini menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015-2020). Dari perkawinannya dengan Haedar Nashir, Noordjannah dikaruniai dua anak, yaitu dokter Hilma Nadhifa Mujahidah dan dokter Nuha Aulia Rahman.

Pendidikan formal yang ditempuh Noordjannah dimulai dari Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian SMP Muhammadiyah Godean, dan selanjutnya SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Setelah itu, Noordjannah kuliah program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional (UPN Veteran) Yogyakarta, mengambil program magister (S2) Manajemen Keuangan di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, juga mengambil program Human Resource Management di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

Ketika sekolah hingga kuliah, Noordjannah sudah aktif di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah untuk kalangan pelajar. Di organisasi ini, ia sampai menjabat Ketua Bidang Ipmawati Pimpinan Pusat IPM (1983-1986).

Bersama teman-temannya pengurus PP IPM, Noordjannah menerbitkan buku Pedoman Seragam khusus bagi pelajar putri

Muhammadiyah yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Buku pedoman ini memberi panduan tentang berbusana Muslimah yang sesuai tuntunan ajaran Islam.

Setelah “ber-IPM”, Noordjannah kemudian aktif di organisasi Nasyiatul Aisyiyah (Nasyiah) yang juga merupakan salah satu ortom Muhammadiyah untuk kalangan remaja putri. Di organisasi ini, Noordjannah pernah menjadi Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah (1990-1995), hasil Muktamar Nasyi’atul ‘Aisyiyah, di Yogyakarta tahun 1990.

Setelah menuntaskan amanah di Nasyiatul Aisyiyah, Noordjannah Djohantini kemudian mulai masuk sebagai pengurus Aisyiyah. Pada periode 2000-2005, ia diserahi amanah sebagai Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan (LPP) Pimpinan Pusat Aisyiyah, kemudian menjadi salah satu Ketua PP Aisyiyah, hingga akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PP Aisyiyah, periode 2010-2015, menggantikan Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno yang sudah dua periode menjabat Ketua Umum PP Aisyiyah. Kini, Noordjannah melakoni periode kedua amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (2015-2020), sambil juga memegang jabatan sebagai Ketua BPH Universitas Aisyiyah Yogyakarta (2017-2021), sejak Unisa masih sebagai STIKES Aisyiyah (2013).

Universitas Aisyiyah Yogyakarta merupakan sebuah universitas bagi kaum perempuan yang sudah dilontarkan pemikiran pendiriannya oleh Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir pada tahun 1962 dalam forum Muktamar Kerja Aisyiyah. Rencana Perguruan Tinggi untuk perempuan ini berhasil diwujudkan setengah abad kemudian dalam kepemimpinan Aisyiyah oleh Dra. Siti Noordjannah Djohantini, M.M., M.Si., yang beliau sebutkan sebagai hasil sinergi Aisyiyah dengan banyak pihak. [Lina]



SITI UMNIYAH

Mempelopori Pelebagaan Pendidikan Anak Usia Dini

Siti Umniyah. Lahir di Kauman tahun 1905. Ketua Siswa Praja Wanita (SPW) 1919-1929. Murid-pertama Madrasah Diniyah Ibtidaiyah di rumah KHA Dahlan bersama Siti Munjiyah.

"Di dalam pimpinannya St. Oemnijah, SPW makin lama makin bertambah maju sehingga mempunyai tambahan gerakan, ialah Tholabussa'adah, Tajmilul Achlaq, dan Dirasatul Banat, kemudian dapat mendirikan pula sekolahan Bustanul Athfal"

(Taman Nasjiah, No. 3/Th II, Sept. 1940)

Siti Umniyah adalah putri KH Sangidu atau Kyai Penghulu Muhammad Kamaludiningrat, sahabat seperjuangan KHA Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Sebagai putri sahabat KHA Dahlan, Siti Umniyah merupakan salah satu perempuan Kauman yang mendapatkan pendidikan langsung oleh KHA Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan. Siti Umniyah juga didorong oleh KHA Dahlan untuk menempuh pendidikan di Sekolah Pawiyatan dan Al Qismul Arqa. Kaderisasi yang dilakukan oleh KHA Dahlan terhadap Siti Umniyah dapat terlihat dalam kiprahnya di Siswa Praja Wanita yang merupakan embrio Nasyiatul Aisyiyah. Dalam SWP inilah Siti Umniyah dan teman-temannya berhasil mewujudkan Sekolah Taman Kanak-Kanak Bustanul Athfal yang merupakan implementasi dari konsep pendidikan usia dini. Bukan hanya sekedar mendirikan, Siti Umniyah melalui ayahandanya yaitu Kyai Penghulu Muhammad Kamaludiningrat juga memmberikan rumahnya untuk tempat pendidikan ini.

Siti Umniyah dengan pemikirannya yang maju ini memandang bahwa dalam pendidikan perempuan usia muda harus dipisahkan sesuai dengan usianya untuk efektifitasnya. Untuk itulah SWP mulai menerapkan *Tholabussaa'adah* (untuk usia 15-18 tahun), *Tajmilul Akhlaq* (usia 10-15 tahun), *Jamiatul Athfal* (usia 7-10 tahun) dan *Dirasatul Banat* (usia TK sampai masuk SD). Siti Umniyah dan SWP berhasil mendirikan Taman Kanak-Kanak Bustanul Athfal, mendirikan Musholla 'Aisyiyah. Siti Umniyah beranggapan bahwa pembagian usia akan lebih memfokuskan pembelajaran. Ini bisa terlihat dari fokus masing-masing kelompok yang berbeda termasuk metode pembelajarannya. Tentu saja pemikiran Siti Umniyah ini sangat didukung oleh semua pengurus di SWP yang kesemuanya adalah kader-kader pilihan dan memang sudah dipersiapkan baik oleh KHA Dahlan maupun generasi awal pendidikan Muhammadiyah.

Huis bezoek merupakan konsep dakwah yang dikembangkan oleh Siti Umniyah di tahun 1940 an, yang merupakan dakwah dari rumah ke rumah. Pemikiran ini berdasarkan kesenangan Siti Umniyah dalam menjalin silaturahmi, baik terhadap teman sebaya, saudara, orang yang dituakan bahkan dengan murid-muridnya. Siti Umniyah melakukan kebiasaan silaturahmi dari rumah ke rumah ini dengan berjalan kaki (apabila lokasinya masih memungkinkan untuk dijangkau). Sembari berjalan ke tempat tujuan itulah dia sembari melakukan dakwah. Semangat silaturahmi ini merupakan kekuatan Siti Umniyah. Siti Umniyah memiliki semangat berdakwah yang sangat besar sehingga meskipun sudah tidak menjadi pimpinan di Aisyiyah beliau tetap mengedepankan silaturahmi dalam mengembangkan dakwah Muhammadiyah. Sentuhan secara personal dianggap efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah.

Siti Umniyah adalah seorang penulis yang tekun menuliskan apa saja yang terjadi didalam kehidupannya. Mulai dari kelahiran anaknya, perkembangan anaknya, hal-hal yang berkaitan dengan anak-anaknya, permasalahannya dan cara penyelesaiannya. Semuanya dicatat dengan rapi di buku hariannya sehingga dia paham kapan anaknya lahir, kenapa ia diberi nama seperti itu,

benar umur berapa anaknya merangkak, kenapa anaknya panas, kenapa anaknya nakal, masuk sekolah. Semua permasalahan dicatat dengan rapi meski tidak sempat dibuat sebagai buku namun itu menjadi catatan yang cukup penting dalam kehidupan keluarga Umniyah.

Kebiasaan mencatat ini memang menjadi kelebihan sendiri seorang Umniyah. Siti Umniyah telah memulai sebuah proses penulisan apa yang dilakukan yang seharusnya dilakukan oleh organisasi sebesar Muhammadiyah. Kebiasaan menulis Siti Umniyah ini juga dibuktikan dengan korespondensinya dengan Kahar Muzakir dan KHA Bakir dalam bahasa Arab. Kepiawaiannya dalam Bahasa Arab memang diakui oleh banyak pihak. Bahkan Siti Umniyah juga pernah diminta secara khusus menulis lagu dalam Bahasa Arab untuk kepentingan Muallimin.

Siti Umniyah, pelopor pelebagaan pendidikan usia dini melalui Taman Kanak-Kanak Bustanul Athfal. [Wied]

SITI WALIDAH

(Nyai Ahmad Dahlan)

Pelopop Gerakan Perempuan

“Saya titipkan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah kepadamu sebagaimana KHA Dahlan menitipkannya. Menitipkan berarti melanjutkan perjuangan umat Islam Indonesia ke arah perbaikan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan cita-cita luhur mencapai kemerdekaan”
(Nyai Ahmad Dahlan)

“Pendidikan seorang anak akan berhasil jika dia berada dalam lingkaran Catur Pusat yang merupakan perpaduan antara Keluarga, Sekolah, Masyarakat, dan Lingkungan Ibadah”

Siti Walidah adalah puteri Kyai Haji Muhammad Fadli, Penghulu Hakim Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Siti Walidah tumbuh dalam tradisi yang tidak memungkinkan kaum perempuan mengenyam pendidikan sebagaimana kaum laki-laki. Namun, budaya itu ternyata tidak menghalangi keinginan belajarnya. Sebagai anak seorang ulama yang disegani oleh masyarakat, ia menjadi puteri *‘pingitan’*. Pergaulannya terbatas dan belajarnya tidak di sekolah formal. Mengaji Alquran dan belajar ilmu agama dipandang cukup. Hampir tiap hari, sebagaimana penduduk Kampung Kauman, Siti Walidah belajar Alquran dan kitab-kitab



Siti Walidah. Lahir di Kauman, Yogyakarta, 3 Januari 1872, wafat di Kauman, Yogyakarta, 31 Mei 1946. Tokoh Emansipasi Perempuan, istri KHA Dahlan pendiri Muhammadiyah. Pahlawan Nasional Indonesia.

agama berbahasa Arab Jawa (pegon). Walidah sangat giat menuntut ilmu. Siti Walidah seorang yang cerdas, didukung ayahnya yang menerapkan tradisi belajar di keluarganya. Itulah makanya Siti Walidah memiliki kemampuan keilmuan diatas teman-temannya.

Dahaga ilmu agama Walidah seolah terpuaskan setelah ia menikah dengan Muhammadi Darwis (KHA Dahlan). Ia mengikuti segala hal yang diajarkan oleh suaminya. Siti Walidah menjadi teman diskusi ketika KHA Dahlan membuat pembaharuan dengan mendirikan Muhammadiyah. Bahkan, ia kemudian mengikuti jejak suaminya ikut menggerakkan Muhammadiyah. Bagi KHA Dahlan, Siti Walidah bukan hanya seorang istri namun juga rekan seperjuangan, penyemangat dalam mengembangkan Muhammadiyah. Meskipun pendidikannya informal di lingkungan keluarga, Siti Walidah mempunyai pandangan luas. Pergaulannya dengan para tokoh, baik tokoh-tokoh Muhammadiyah maupun tokoh pemimpin bangsa lainnya, yang kebanyakan adalah teman seperjuangan suaminya. Mereka antara lain adalah Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Bung Karno, Kyai Haji Mas Mansyur, dan lainnya. Pada berbagai kesempatan, ia selalu menyampaikan nasihat-nasihat yang sangat bernilai. Meskipun beliau adalah seorang yang tidak pandai baca tulis latin namun beliau seorang yang sangat mahir dalam bahasa dan tulisan Arab Pegon.

Keterlibatannya di Muhammadiyah dimulai saat ia turut merintis kelompok pengajian wanita *Sopo Tresno*, yang artinya ‘siapa cinta’ pada tahun 1914. Kegiatan *Sopo Tresno* berupa pengkajian agama yang disampaikan secara bergantian oleh Kyai Dahlan dan Nyai Dahlan. Dalam pengajian itu, diterangkan ayat-ayat Alquran dan hadis yang mengupas tentang hak dan kewajiban perempuan. Dengan kegiatan seperti itu diharapkan akan timbul suatu kesadaran bagi kaum wanita tentang kewajibannya sebagai manusia, isteri, hamba Allah, serta sebagai warga negara.

Keperdulian Siti Walidah atau Nyai Dahlan pada dunia pendidikan terutama bagi anak perempuan tampaknya tidak berhenti sampai berdirinya Aisyiyah. Beliau merumuskan konsep “*catur pusat*”.

Sebuah formula pendidikan yang menyatukan empat komponen yaitu *keluarga, sekolah, masyarakat*, dan *lingkungan ibadah*. Disinilah hebatnya konsep ini karena memasukkan komponen lingkungan ibadah sebagai faktor keberhasilan pendidikan. Konsep ini kemudian diwujudkan dalam bentuk perpaduan antara asrama dan pendidikan. Pada tahun 1918 dengan didukung oleh suaminya, beliau berinisiatif membangun sebuah asrama untuk para siswi yang ingin menyempurnakan pendidikan formal mereka. Pondok pertama ini berlokasi di rumahnya sendiri. Pondok ini diberi nama *internaat*. Konsep ini mengoperasional konsep *catur pusat* dalam pendidikan seorang anak. Di asrama ini Nyai Dahlan menerima siswi-siswai dari luar kota yang bersekolah di Jogja untuk dididik ketrampilan setelah mereka sekolah. Di tempat ini pula, Nyai Ahmad Dahlan memberikan pelajaran agama, keterampilan keputrian, dan berpidato. Di tempat inilah Nyai Dahlan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada seorang perempuan, budi pekerti, ketrampilan keputrian. Nyai Dahlan ingin menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk menyiapkan seorang perempuan agar bisa menjadi seorang istri yang baik sekaligus memiliki peran publik yang handal. Pemikiran yang melampaui zamannya.

Tak gampang membesarkan organisasi wanita pada zaman itu. Nyai Dahlan dan pengurus Aisyiyah berjuang membuang kepercayaan kolot yang menyebut sepak terjangnya sebagai ‘melanggar kesusilaan wanita’. Di sisi lain, ia menanamkan ide baru bahwa wanita bisa berdaya dan sepadan perannya dengan laki-laki. Nyai Dahlan memilih ‘mengajari’ masyarakat dengan karya nyata. Ia membuka asrama dan sekolah-sekolah puteri dan mengadakan kursus-kursus pelajaran Islam dan pemberantasan buta huruf bagi kaum perempuan. Selain itu, ia juga mendirikan rumah-rumah miskin dan anak yatim perempuan serta menerbitkan majalah bagi kaum wanita. Ia bersama-sama dengan pengurus Aisyiyah, sering mengadakan perjalanan ke luar daerah sampai ke pelosok desa untuk menyebarluaskan ide-idenya. Ia pun kerap mendatangi cabang-cabang Aisyiyah seperti Boyolali, Purwokerto, Pasuruan, Malang, Kepanjen, Ponorogo, Madiun, dan sebagainya. Karenanya, meski tidak duduk dalam pengurus

Aisyiyah, organisasi itu menganggap Nyai A Dahlan adalah Ibu Aisyiyah dan juga Ibu Muhammadiyah.

Tahun 1926 saat Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya, Nyai Dahlan membuat catatan sejarah. Dialah wanita pertama yang tampil memimpin Kongres itu. Saat itu, dalam sidang 'Aisyiyah yang dipandunya, duduk puluhan pria di samping mimbar. Mereka adalah wakil pemerintah, perwakilan organisasi yang belum mempunyai bagian kewanitaan, dan wartawan. Seluruh pembicara dalam sidang itu adalah kaum perempuan, hal yang tidak 'lumrah' pada masa itu. Koran *Pewart* Surabaya dan *Sin Tit Po* menulis besar-besar di halaman depan mengenai tampilnya wanita memimpin kongres anak organisasi Muhammadiyah tersebut. Media menuliskan, "Munculnya para istri turut serta dan memimpin bagian 'Aisyiyah", "Perkumpulan yang mulai tampak dan merata di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa saja". Keberhasilan Nyai Ahmad Dahlan menggerakkan Aisyiyah hingga saat ini berkembang dengan sangat pesat merupakan bukti bahwa dia adalah pelopor gerakan perempuan bukan sekedar pelopor kesetaraan perempuan.

Nyai Ahmad Dahlan berpulang ke Rahmatullah, pada tanggal 31 Mei 1946. Tidak hanya kaum Muhammadiyah dan Aisyiyah saja yang berkabung, tapi hampir seluruh kaum Muslimin di Indonesia. Dia dimakamkan di pemakaman kompleks Masjid Besar Kauman Yogyakarta. Menteri Sekretaris Negara, Mr. AG Pringgodigdo, mewakili pemerintah memberikan penghormatan terakhir. Atas jasa-jasanya, pada Hari Pahlawan 10 Nopember 1971 bertempat di Istana Negara Jakarta, presiden menyerahkan secara resmi SK pengukuhanannya sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Penghargaan itu diterima salah seorang cucunya, Ny M. Wardan, isteri KH. M. Wardan, salah seorang Ketua PP Muhammadiyah pada waktu itu. [Wied]

SOEDIRMAN

Jihad Mempertahankan Kemerdekaan RI

Bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhannya ribuan jiwa, harta, benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga.



Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman.
Lahir di Purbalingga 24 Januari 1916.
Wafat 1950.

Sejak kecil Soedirman tergolong anak yang sangat rajin. Belajar agama menjadi kebiasaannya setiap hari, baik di siang maupun malam hari setelah magrib. Soedirman sekolah di HIS Gubernemen. Ketika sekolah Soedirman sudah terlihat kemampuannya, selain rajin, juga anaknya sangat disiplin. Setelah sekolah di HIS, Soedirman melanjutkan ke sekolah Taman Siswa bagian Taman Dewasa. Sekolah tersebut kemudian bubar karena minim dana dan tekanan Belanda, Soedirman pun terputus sekolahnya.

Tidak sampai disana, Soedirman kemudian melanjutkan pendidikannya di MULO (SLTP) Wiworo Tomo. Di sekolah ini, Soedirman mengikuti berbagai kegiatan yang sangat membentuk dirinya. Di sana Soedirman belajar berorganisasi sekaligus mendalami lagi ilmu agamanya. Karena kemampuan agama Soedirman yang cukup bagus, Soedirman seringkali disuruh membantuk guru agamanya. Selain di sekolah formal, Soedirman juga sering mengikuti kegiatan non formal seperti acara

keagamaan atau pengajian. Di antara kegiatan yang diikutinya seringkali diisi oleh tokoh dan mubaligh dari Muhammadiyah.

Ketika di MULO itulah Soedirman kemudian mengenal Muhammadiyah. Bahkan masih remaja, Soedirman pun sudah aktif di Pemuda Muhammadiyah. Karena begitu menonjol, Soedirman menempati posisi pimpinan Pemuda Muhammadiyah dan menduduki jabatan Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah (WMPM) wilayah Banyuman. Karena kemampuan dan ketokohnya di atas rata-rata, maka Soedirman pun dipercaya menduduki jabatan lebih tinggi yaitu WMPM Jawa Tengah.

Tidak cukup sampai disitu, Soedirman yang senang berorganisasi juga aktif di Hizboel Wathan (HW). Inilah organisasi kepanduan yang berada di bawah Ormas Keagamaan Muhammadiyah, dengan semangat dan nilai-nilai keagamaan yang sangat kental. Seorang pemuda dalam pandangan Soedirman tidak hanya harus kuat secara fisik, tetapi juga mental. HW menyantuni dua hal itu, sehingga kegiatannya tidak hanya untuk kekuaan fisik, tetapi juga spiritual dan karakter.

Di HW, Soedirman mengembangkan tiga hal yang sangat bermanfaat dan mewarnai jiwa dan pikirannya. Pertama, kegiatan yang bersifat fisik. Di ini HW selalu menempa para anggotanya dengan olah raga, baris berbaris, kegiatan berkemas, keterampilan tali temali, mencari jejak, dan aktivitas lapangan lainnya. Tidak lupa juga di sini HW belajar tentang bela negara. Kedua, kegiatan rohani. Kegiatan ini berupa kegiatan dakwah dan pendalaman ilmu agama. Diadakan kegiatan kajian dan ceramah rutin bagi para anggotanya. Ketiga, kegiatan kemasyarakatan. Di sini HW selalu menekankan akan pentingnya membantu sesama dan memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan.

Namun demikian, Soedirman adalah seorang guru dan mubaligh. Sebagai seorang guru, Soedirman dikenal sangat dikagumi karena pemahaman keagamaan maupun pembawaannya. Termasuk ketika jadi mubaligh, Soedirman sangat dihormati banyak orang. Bedanya dengan yang lain, ketika berdakwah kepada generasi muda, Soedirman selain memberikan materi-materi keagamaan,

juga dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan yang lain, sehingga cakrawalanya menjadi luas.

Dalam beberapa kesempatan juga Soedirman sering menyampaikan pentingnya berjihad membela negara. Ini adalah seruan yang serius karena baginya ini merupakan ladang amal yang sangat penting dan bagian dari ajaran Muhammadiyah yaitu amar ma'ruf nahyi munkar.

Ketokohan Soedirman semakin terkenal. Masyarakat menghormatinya sebagai sosok yang alim, cerdas dan berwibawa. Namun demikian, Soedirman juga tetap kritis terhadap berbagai bentuk penyimpangan keagamaan seperti yang masih merebak di masyarakat khususnya Cilacap saat itu. Pelan-pelan Soedirman memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara yang baik.

Seiring berjalannya waktu, Soedirman menjadi tentara PETA dan kemudian menjadi panglima TNI. Namun, Soedirman tetaplah seorang kader Muhammadiyah dengan pemahaman keagamaan yang dalam. Di Yogyakarta bahkan Soedirman merupakan peserta/santri Pengajian Malam Selasa yang rutin diadakan oleh PP Muhammadiyah di Kauman.

Di masa revolusi, Soedirman selalu menggelorakan pentingnya mempertahankan kemerdekaan RI. Konsep yang diusung Soedirman adalah hijrah. Konsep ini diambil dari hijrahnya Rasulullah dan dipraktekkan di dunia TNI saat itu untuk mengobati kekecewaan atas ditariknya TNI dari kantong-kantong pertahanan di belakang garis Van Mook menuju wilayah RI sesuai dengan hasil Perjanjian Renville.

Konsep jihad terus digelorakan Soedirman untuk membakar semangat para prajuritnya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan RI. Sedangkan hijrah merupakan konsep mundur dan berpindah sejenak untuk kemudian menyusun kembali kekuatan dan strategi untuk memenangkan sebuah peperangan.
[Roni]



Dr. (Hc.) Ir. H. Ahmad Soekarno.
Nama lahir: Koesno
Sosrodihardjo. Lahir di Surabaya,
6 Juni 1901, wafat di Jakarta, 21
Juni 1970. Presiden pertama
Republik Indonesia (1945–1967).
Ketua Majelis Pengajaran Konsul
Muhammadiyah Bengkulu.

SOEKARNO

Islam itu Kemajuan

“Saya tidak tahu, akan diberi hidup oleh Tuhan sampai umur berapa. Tetapi permohonanku kepadaNya ialah, supaya hidupku itu hidup yang manfaat. Manfaat bagi Tanah Air dan Bangsa, manfaat bagi sesama manusia. Permohonanku ini saya panjatkan pada tiap-tiap sembahyang. Sebab Dialah Asal segala Asal, Dialah “Purwaning Dumadi” (Bung Karno)

Soekarno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Orang tua Soekarno termasuk orang biasa-biasa saja. Soekarno putra dari R. Soekemi Sosrodiharjo seorang muslim yang bekerja sebagai guru sekolah di kota Singaraja di Pulau Bali, sedangkan Ibunya Idayu Nyoman Rai, putri seorang Brahmana, bertugas di sebuah kuil Hindu berasal dari Bali.

Agar bisa menikah dengan Soekemi, calon istri ini harus masuk agama Islam terlebih dahulu. Padahal hal itu sangat ditentang keras oleh orang tuanya. Jalan keluarnya hanya satu – kawin lari. Setelah perkawinannya, Soekemi merasa tidak nyaman berada di Bali. Kemudian Soekemi mengajukan permohonan pindah ke Jawa. Akhirnya Soekemi mendapatkan jabatan baru di Surabaya, sebagai kepala sekolah. Di Surabaya Soekemi beserta istri hidup bahagia dengan tempat dan pekerjaan barunya tersebut.

Di Surabaya pula mereka kemudian mendapatkan buah cintanya yang kelak menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia dan dikenal dunia. Sukarno kecil pada dasarnya tidak beda dengan anak-anak pada umumnya. Menurut kesaksian orang tua pada waktu itu, Sukarno kecil suka sekali bertelanjang dan berlari-lari dengan kawan-kawan sebayanya di Desa Kepatihan dan Desa Bago. Ia suka mandi disungai dan menunggangi kerbau. Namun yang berbeda ialah ketika Soekarno kecil ketika melihat bakat kepemimpinannya. Sejak kecil anak-anak lain di desa sangat tunduk dan nurut sama Sukarno. Bukan karena galak, tetapi sejak kecil memang Sukarno sudah memiliki perangai berwibawa. Termasuk Soekarno menciptakan permainan dan anak-anak yang lainnya juga mengikuti Soekarno.

Ketika masih bersekolah, keberanian Soekarno sudah tampak. Semangat untuk melawan penjajah senantiasa disuarakan. Ketika bersekolah di sekolah Belanda, di sela-sela acara diskusi rutinnya, Soekarno tidak segan-segan berorasi bahkan sampai naik ke atas meja dan menentang penjajahan. Soekarno mengobarkan semangat pembebasan dengan gaya orasai seperti orang dewasa. Sontak seluruh kelas heboh dan gurunya memarahi Soekarno.

Jiwa pemberaniya terus tampak dalam berbagai kesempatan. Ketika mondok di rumah Hadji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto, Soekarno senantiasa menggantikan Cokro untuk berpidato jika Cokro berhalangan. Di sana orang-orang mulai melihat bakat pidato dan kedalaman ilmu Soekarno.

Bahkan ketika ke Bandung, Soekarno mendapatkan panggung yang lebih besar. Beberapa kali Soekarno tampil di lapang terbuka. Soekarno mulai berorasi dan menyemangati generasi muda. Walaupun dirinya masih usia muda, namun keberanian Soekarno menentang imperialisme sudah dipertunjukkan secara terbuka.

Namun keberanian Soekarno bukan tanpa isi. Sejak belia Soekarno sudah melahap segudang buku dengan narasi besar dunia. Soekarno banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan ketika di pondok Cokro. Begitu pun ketika Soekarno belajar di sekolah Belanda. Ketika yang lain jajan,

Soekarno lebih memilih berdiam di perpustakaan sekolah. Soekarno sudah terbiasa dengan bacaan-bacaan filsafat, sejarah, sastra, dunia politik, dan ideologi-ideologi besar dunia.

Selain membaca buku, Soekarno juga memiliki beberapa orang guru utamanya seperti Cokroaminoto. Yang uniknya, pendalaman keagamaan Soekarno didapat ketika berada di pembuangan di Nusa Ende (Flores). Saat itu Soekarno sering berkirim surat dengan A. Hasan, seorang ulama besar di Bandung. Kepada A. Hasan, Soekarno senantiasa meminta penerangan-penerangan perihal agama. Selain itu, Soekarno juga selalu meminta dikirim buku atau kitab yang dibacanya selama dalam pengasingan.

Namun inspirasi Soekarno juga tidak hanya datang dari orang besar, tetapi juga dari orang biasa, Sarinah salah satunya. Sarinah merupakan seorang yang biasa-biasa saja, tinggal di rumahnya untuk mengasuh Soekarno. Namun selama ada di rumahnya, Sarinah tidak hanya rela tidak dibayar, tetapi juga selalu memberikan pesan-pesan inspirasi kepada Soekarno. Banyak hal yang Soekarno pelajari dari Sarinah. Akhirnya nama Sarinah dijadikan judul buku yang berbicara tentang masa depan perempuan Indonesia. Termasuk Sarinah juga oleh Soekarno dijadikan nama mall pertama di Indonesia.

Ada juga petani miskin yaitu Marhaen. Marhaen merupakan simbol kesengsaraan orang pribumi, di tengah melimpahnya Sumber Daya Alam yang dimilikinya. Maka Marhaen kemudian dijadikan sebuah ideologi yang dapat mewakili inti pemikirannya. Yaitu sebuah ideologi perlawanan terhadap penjajah atas sikap semena-mena terhadap masyarakat pribumi.

Selain pernah jadi guru di sekolah Muhammadiyah dan pernah menjadi pengurus Dikdasmen Muhammadiyah di Bengkulu, Soekarno juga pernah membuat media massa ketika berada di Bandung yaitu "*Fikiran Ra'jat*". Lewat media inilah Soekarno selalu menyuarakan sikap kritisnya, selain lewat tulisan di media-media lain dan mimbar bebas. Walaupun beberapa kali dibui, Soekarno tetap kritis hingga akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia.

Pemikiran Islam Bung Karno

Menjadi muslim harus memiliki orientasi pada kemajuan. Maksudnya, memproduksi ilmu pengetahuan dan menciptakan berbagai ilmu modern. Menjadi muslim tidak hanya berasyik-masyuk dengan berbagai ritual keagamaan, tetapi sama pentingnya dalam membangun kemajuan peradaban umat manusia.

Islam harus berani mengejar zaman, bukan seratus tahun, tetapi seribu tahun Islam ketinggalan zaman. Kalau Islam tidak cukup kemampuannya buat mengejar seribu tahun itu, niscaya ia akan tetap hina dan mesum. Bukan kembali pada Islam *glory* yang dulu, bukan kembali pada 'zaman chalifah', tetapi lari ke muka, lari mengejar zaman. Itulah satu-satunya jalan buat menjadi gilang gemilang kembali. Kenapa toh kita selamanya dapat ajaran, bahwa kita harus mengkopi 'zaman chalifah' yang dulu-dulu? sekarang toh tahun 1936 dan bukan 700 atau 800 atau 900?".

Menurut Soekarno, ada beberapa sebab kemunduran umat Islam, antara lain. *Pertama*, Taklid buta, yaitu sikap patuh tanpa reserve pada guru atau kyai. Kepatuhan menjadi masalah jika mematikan kreatifitas dan akal budi manusia, yang merupakan modal pokok melakukan daya cipta. Kemajuan suatu masyarakat dan bangsa terletak pada kuatnya daya cipta itu sendiri. Taklid akan mematikan daya cipta untuk memikirkan tentang kemajuan Islam.

Kedua, mengutamakan formalitas bukan substansi Islam. Maksudnya, mengutamakan fikih tetapi tidak merujuk langsung kepada Alquran dan Sunnah yang merupakan Api Islam. Sebagian besar umat Islam, memahami Islam sebatas label, bungkus dan atribut, bukan isi substansinya. Dan pandangan ini sampai saat ini masih berkembang, bahkan semakin kuat.

Ketiga, mempercayai hadis-hadis lemah sebagai rujukan ber-Islam. Hadis merupakan sabda Nabi Muhammad yang merupakan rujukan hukum Islam kedua setelah Alquran. Hadis sendiri dikompilasi oleh para sarjana Muslim seperti Imam Bukhori dan Imam Muslim, seperti yang terdapat di dalam Shahih Bukhori dan Shahih Muslim. Menurut Bung Karno, yang mengutip para

pemburu ajaran Islam pada masanya, banyak isi hadis yang mengandung tahayul dan praktik hidup tak relevan di masa kini. Tetapi tak berarti ia tak menghargai jasa besar para kompilator hadis itu. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa, umat Islam harus bisa memilah mana yang kuat periwayatannya dan mana hadis yang lemah dalam isinya.

Keempat, penyebab lain kemunduran umat Islam adalah, kurangnya para pemuka agama mempelajari sejarah. Padahal, dengan mempelajari sejarah, kita akan memahami kekuatan-kekuatan masyarakat beserta kemajuan dan kemundurannya.

Menurut Soekarno, *Islam is progress*, Islam itu kemajuan. Progres berarti barang baru, barang baru yang lebih sempurna, lebih tinggi tingkatannya dari pada barang yang terdahulu. Progres berarti pemikiran baru, creation baru, bukan mengurangi barang yang terdahulu, bukan mengopy barang yang lama.

Demi Allah “*Islam Science*” bukan hanya pengetahuan al-Qur’an dan Hadis sahadja; “*Islam Science*” adalah pengetahuan al-Qur’an dan Hadis plus pengetahuan umum! Orang tidak akan memahami betul al-Qur’an dan Hadis, kalau tak berpengetahuan umum.
(Roni-Ad)

SUMODIRJO

Membina Gerakan Kepemudaan Muhammadiyah

"Tanpa adanya pengembangan ilmu pengetahuan pada murid-murid Muhammadiyah akan menjadi hambatan maju dan berkembangnya Muhammadiyah"

Nama Sumoharjo sangat dikenal dalam perjalanan Muhammadiyah sebagai sosok yang memiliki ide dan gagasan untuk kemajuan Muhammadiyah melalui anak didik yang sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Di awal berdirinya, beberapa sekolahan didirikan oleh Muhammadiyah dengan nama Standart School Muhammadiyah. Sekolah-sekolah itu mendidik anak-anak laki-laki dan perempuan sebagai implementasi cita-cita KHA Dahlan untuk mencersakan anak bangsa. Tekad KHA Dahlan untuk berjuang melalui Muhammadiyah dengan pendidikan menjadikan sekolah memperoleh perhatian yang tinggi, termasuk untuk mengembangkan Muhammadiyah itu sendiri.

Pada tahun 1920-an perkembangan Muhammadiyah masih belum sepesat yang diharapkan. Tentu saja ini menjadi perhatian tersendiri bagi orang-orang yang memang memiliki kepedulian dengan Muhammadiyah sebagai garis perjuangannya. Inilah yang menyebabkan seorang Sumodirjo, guru Standaard School Muhammadiyah, berpikiran untuk mengembangkan kemampuan

anak diriknya. Dia memiliki pendapat bahwa majunya Muhammadiyah akan sangat ditentukan dengan maju dan berkembangnya anak-anak yang menempuh pendidikan di sekolah Muhammadiyah.

Bagi seorang Sumodirjo, ilmu tanpa amal adalah tidak berguna. Dia beranggapan bahwa anak-anak didik Muhammadiyah dapat dioptimalkan untuk mengembangkan Muhammadiyah itu sendiri. Anak-anak muda ini memiliki energi yang lebih dan daya kreatifitas yang mungkin berbeda dengan para pendiri Muhammadiyah. Inilah yang ingin dioptimalkan oleh Sumodirjo dengan tujuan akhir adalah memajukan Muhammadiyah. Ia menekankan bahwa perjuangan Muhammadiyah akan sangat terdorong dengan adanya peningkatan mutu ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada para muridnya, baik dalam bidang spiritual, intelektual, maupun jasmaninya.

Sumodirjo menyampaikan ide ini kepada KHA Dahlan untuk bisa mengorganisasi anak-anak didik sekolah Muhammadiyah untuk berkegiatan di luar waktu sekolah. Gagasan Somodirdjo ini digulirkan dalam bentuk menambah pelajaran praktek kepada para muridnya, dan diwadahi dalam kegiatan bersama. Dengan bantuan Hadjid, seorang kepala guru agama di Standart School Muhammadiyah, maka pada tahun 1919 Somodirdjo berhasil mendirikan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putra-putri siswa Standart School Muhammadiyah. Perkumpulan tersebut diberi nama Siswa Praja (SP). Tujuan dibentuknya Siswa Praja adalah menanamkan rasa persatuan, memperbaiki akhlak, dan memperdalam agama.

Pada awalnya, Siswa Praja mempunyai ranting-ranting di sekolah Muhammadiyah yang ada, yaitu di Suronatan, Karangjajen, Bausasran, dan Kotagede. Seminggu sekali anggota Siswa Praja Pusat memberi tuntunan ke ranting-ranting. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Siswa Praja ini tidak lepas dari peningkatan kualitas diri, kepemimpinan atau leadership, kemampuan orasi disamping ketrampilan lainnya yang berkaitan dengan kemampuan pengembangan organisasi. Pada remaja yang tergabung dalam Siswa Praja ini memang diharapkan akan dapat

memajukan Muhammadiyah di masa depannya. Dalam istilah sekarang adalah perkumpulan kader. Ide tentang perkumpulan kader ini merupakan pemikiran seorang Sumodirjo yang memiliki pemikiran bahwa ke depan estafeta kepemimpinan di Muhammadiyah harus dipersiapkan secara matang sejak dini.

Siswa Praja tidak berumur panjang karena hanya selama 5 (lima) bulan perkumpulan ini menampung putra dan putri secara bersama-sama. Setelah itu Siswa Praja dipisah antara Siswa Praja Wanita (SPW) yang kemudian berkembang menjadi Nasyyatul Aisyiyah dan Padvinder Muhammadiyah yang merupakan embrio Hizbul Wathan sebelum kemudian berkembang menjadi Pemuda Muhammadiyah. Perpecahan ini lebih memfokuskan kegiatan masing-masing dan sejarah mencatat bahwa setelah pemisahan Siswa Praja untuk laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki dinamika kegiatan yang sangat pesat dan mendukung kemajuan Muhammadiyah. Dan itulah yang diinginkan oleh Sumodirjo. Melihat tunas-tunas muda ini digarap secara serius untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan di Muhammadiyah, mewarnai kegiatan Muhammadiyah dengan kegiatan-kegiatan diluar rutinitas pendidikan. Ide Sumodirjo inilah yang menjadi dasar berdirinya organisasi oronom kepemudaan di Muhammadiyah seperti Nasyyatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Hizbul Wathan, Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. [Wied]



SUSIKNAN AZHARI

Usaha Menyatukan Kalender Islam

Prof. Dr. Susiknan Azhari.

Lahir di Lamongan 11 Juni 1968. Guru besar Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Hukum Islam/Astronomi Islam. Anggota Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, anggota Islamic Crescent's Observation Project di Yordan, anggota International Sidewalk Astronomy Night (ISAN). Ketua Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah 2005-2020.

“Perbedaan metode tidak menghalangi tujuan utama untuk menyatukan kalender Islam”.

Hampir setiap saat penentuan dan peringatan hari-hari Islam, selalu berulang terjadi perdebatan tentang penetapan waktunya. Misalnya, waktu memulai puasa, waktu mengerjakan sholat ‘id, waktu sholat wajib, ataupun kegiatan lainnya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara dan wilayah lain, bahkan juga terjadi pada masyarakat muslim dimanapun berada.

Problematika antara hisab dan rukyat seakan tak pernah surut mengikuti wacana dalam menentukan perhitungan waktu, utamanya bulan Qomariyah. Tidak hanya antar para ulama, para akademisi, non akademisi, lembaga pemerintah-non pemerintah, bahkan sampai masyarakat awam ikut memperbincangkan sesuai kapasitas masing-masing, utamanya dalam upaya meminimalisir perbedaan. Hal ini seolah menjadi salah satu titik kelemahan umat

Islam di mata pihak lain, seakan terjadi perpecahan dan perbedaan dalam ber-Islam. Bagi para ahli, keadaan ini tentu menjadikan pemikiran tersendiri untuk dicari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Salah satunya adalah dengan penyeragaman atau penyatuan kalender Islam.

Pemikiran inilah yang terus diperjuangkan dan didambakan oleh para ahli di bidang ilmu falak agar keseragaman dan kesatuan itu dapat terwujud, salah satunya adalah Prof. Dr. Susiknan Azhari. Guru besar di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini menampakkkan dedikasinya melalui karya-karya dan kegiatannya yang mayoritas berkaitan dengan bidang astronomi dan konsistensi pemikiran-pemikiran ke arah penyatuan kalender Hijriyah Internasional.

Gagasan penyatuan kalender Hijriyah ini disebut *mutakammilul hilal* yaitu usaha bersama untuk mencari formulasi atau membangun teori *rukyatul hilal*. Pemikiran ini tentunya harus diawali dengan pengintegrasian pihak-pihak yang berkaitan dengan pertanggalan Islam. Lebih penting lagi gagasan ini utamanya adalah untuk memberikan solusi bagi umat Islam Indonesia, pemerintah, dan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, dan PERSIS. Solusi ini diberikan untuk mengurangi rasa “ketidakpastian” keyakinan dan kenyamanan beribadah masyarakat.

Ditegaskan oleh Susiknan Azhari bahwa *mutakammilul hilal* bukanlah dimaksudkan untuk tujuan penyeragaman penentuan awal bulan Qomariyah tetapi lebih kepada arah pengembangan teoretis untuk mencari solusi dalam upaya menyatukan kalender Hijriyah secara nasional dan ke depannya secara internasional. Dalam prakteknya diperlukan kerelaan dan semangat bersama tanpa harus menyelisih ketentuan agama.

Semangat penyatuan kalender Islam ini dimulai dari skala nasional Indonesia. Namun demikian, Susiknan berharap tidak hanya tingkat nasional saja, tetapi juga terwujudnya kalender Islam internasional. Karena itu pula, selain dalam skala lokal-nasional berbagai pemikiran, tulisan, juga seminar-seminar internasional

diikutinya. Untuk mendukung aktivitasnya, Susiknan juga mendirikan Museum Astronomi Islam dengan visi “Berbagi Maklumat untuk Memajukan Umat”.

Sebuah penelitian dilakukan di UIN Walisongo Semarang untuk mengkaji konsep pemikiran Susiknan Azhari tentang unifikasi kalender Hijriah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya unifikasi kalender Hijriah di Indonesia, Susiknan Azhari mengintegrasikan dua ormas besar yaitu Muhammadiyah dan NU, melalui konsep *mutakammilul hilal* sebagai metode kompromi antara teori *wujudul hilal* Muhammadiyah dan visibilitas hilal NU yang mana keduanya sama-sama termasuk dalam golongan *hisab*.

Sistem unifikasi kalender Hijriah ini diterapkan untuk seluruh bulan dari Muharam sampai Zulhijjah. Dalam aplikasinya, konsep ini mensyaratkan dua hal, yaitu Ijtimak terjadi sebelum *ghurub* (*ijtima' qabla al-ghurub*) dan pada saat terbenam Matahari piringan atas hilal berada diatas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain praktek *rukyyatul hilal* dilakukan secara konsisten untuk membangun teori, bukan sebagai acuan penentu awal bulan Kamariah. Bersamaan dengan itu, dengan adanya para tokoh NU maupun Muhammadiyah yang mendukung upaya penyatuan kalender Islam dan pernyataan untuk melakukan kajian ulang terhadap kriteria *imkanur rukyat* dengan teori yang berbasis riset yang memadukan aspek syar'i dan sains serta dengan mengintegrasikan hisab dan rukyat menunjukkan upaya unifikasi kalender Hijriah Susiknan Azhari melalui konsep *mutakammilul hilal* memberikan prospek yang cukup besar dalam unifikasi kalender Hijriah di Indonesia. [ries-Ad]



USMAN YATIM

Uji Kompetensi Wartawan untuk Membangun Kualitas dan Idealisme

Dr. H. Usman Yatim, M.Pd., M.Sc.
Lahir di Tanjungpura Sumut 7 Juli
1958, Wafat di Jakarta, 10 Maret
2018. Wakil Ketua (Bidang
Jurnalistik) MPI PP
Muhammadiyah 2015-2020.
Direktur UKW (Uji Kompetensi
Wartawan) PWI (Persatuan
Wartawan Indonesia) Pusat.

“Wartawan kompeten, harus punya sikap, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai yang ada pada Kode Etik Jurnalistik, seperti independensi, beritanya akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Pengetahuan artinya insan pers harus update terhadap informasi, banyak belajar karena dia adalah pekerja intelektual. Soal trampil, paling utama adalah kemampuannya dalam menulis, sajian produk jurnalistik harus handal.”

Ketika lulus dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah di IKIP Negeri Jakarta tahun 1982, Usman Yatim ingin mendaftar sebagai guru PNS, namun sambil menunggu waktu dan panggilan, sementara dirinya menjadi wartawan dulu untuk mengisi waktu. Nasib berkata lain, Usman merasa nyaman di dunia jurnalistik. Usman merasa nyaman ketika menjadi wartawan. Di dunia seperti ini Usman merasa ada peran besar dalam rangka memberikan penerangan kepada masyarakat.

Namun, jiwa pendidiknya tetap hadir. Sambil menjadi wartawan, Usman Yatim pernah menjadi guru di SMA Muhammadiyah Kemayoran. Bakat mengajarnya tetap tersimpan, hingga akhirnya pernah menjadi dosen di UHAMKA selama tiga semester. Yang

lebih lama, hingga akhir hayatnya Usman Yatim tercatat sebagai dosen di Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta.

Ketika menjadi wartawan, Usman Yatim lama meliput di Departemen Penarangan. Beberapa periode Menteri Penerangan dilaluinya, mulai dari Ali Moertopo, Harmoko, Hartono, sampai Yunus Yosfiah. Dengan demikian, Usman Yatim tahu betul bagaimana cara Orde Baru menyampaikan pesan-pesan pembangunannya kepada masyarakat. Harmoko adalah orang yang paling berkesan, baginya Harmoko memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Sebab lama ngepos di tempat ini membuat Usman semakin paham tentang penerangan dan Pancasila.

Tempat lain yang cukup lama menjadi objek liputannya adalah Departemen Agama (1982-2005) dan BP-7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Di tempat ini Usman Yatim sering meliput kegiatan haji, bahkan beberapa kali diberangkatkan haji secara gratis.

Di Suara Karya, Usman Yatim belajar banyak bagaimana pentingnya fungsi penerangan dalam proses pembangunan. Setiap kebijakan pemerintah harus dikomunikasikan kepada masyarakat secara baik. Di sana juga ada fungsi media yang dapat memberikan informasi secara objektif kepada masyarakat. Karenanya Usman Yatim merasa dirinya begitu puas dengan memberitakan hal baik tentang pembangunan pemerintah. Bagi Usman Yatim fungsi media seperti ini sangat penting dan harus dilakukan.

Selain menjadi wartawan di media lain, Usman Yatim juga sempat dua kali merintis media sendiri yaitu Politisa (tidak lama) dan Surat Kabar Madina. Di media ini Usman Yatim mencoba membangun bentuk jurnalismenya secara mandiri. Beserta teman-temannya, Usman Yatim juga memasukkan pesan-pesan dakwah dalam medianya.

Secara umum, Usman Yatim selalu resah dengan keberadaan wartawan terutama di daerah-daerah. Maka posisi sebagai Ketua Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menjadi salah satu sarana untuk

membangun kualitas dan idealime bagi Usman Yatim. Menurutnya, dengan UKW, lambat laun dunia jurnalisme di tanah air semakin membaik. Ke depan, Usman Yatim berharap tidak ada wartawan yang tidak tersertifikasi. Jika semua wartawan sudah tersertifikasi, maka kualitas wartawan tidak usah dipertanyakan lagi. Sebab dengan UKW, Usman Yatim yakin kualitas wartawan akan semakin baik.

Di Muhammadiyah, Usman Yatim dikenal sebagai jurnalis senior. Dua periode duduk di Majelis Pustaka dan Informasi (MPI), Usman Yatim diamanahi untuk mengembangkan dunia jurnalistik. Dengan MPI, Usman Yatim selalu menyampaikan obsesi-obsesinya yang sangat tinggi. Beliau berharap Muhammadiyah menjadi pelopor dunia informasi yang berkualitas. Selain Muhammadiyah selalu memenangkan pertarungan wacana di media massa, juga kualitas informasi Muhammadiyah semakin baik.

Untuk meningkatkan SDM Jurnalis di kalangan Muhammadiyah, Usman Yatim selalu mengadakan pelatihan jurnalistik bagi kader-kader Muda Muhammadiyah di berbagai wilayah di Indonesia. Sedangkan untuk media di internal Muhammadiyah, Usman Yatim sejak awal selalu mengapresiasi seluruh kader dan pimpinan Muhammadiyah di mana saja yang secara kreatif dan mandiri membuat media berbasis nilai-nilai Muhammadiyah, baik nama medianya langsung menggunakan Muhammadiyah maupun tidak. Yang penting bagi Usman Yatim bagaimana media-media itu dapat menjaga etika serta menyebarkan nilai-nilai Muhammadiyah.

Di TV kebanggaan Muhammadiyah yaitu TVMU, Usman Yatim dikenal sebagai pembawa acara untuk program Indonesia Journalist Forum (IJF). Acara ini sangat identik dengan Usman Yatim. Acara ini selalu membahas isu-isu aktual dan menghadirkan berbagai pimpinan media nasional. Dengan IJF, Usman Yatim berharap bahwa Muhammadiyah akan selalu aktif menyuarakan dan menanggapi berbagai isu aktual, sehingga TV Muhammadiyah ini semakin digemari oleh pemirsanya. [Ronil]



KH R ZAINUDDIN FANANIE

Meletakkan Dasar Pendidikan Pesantren Modern

KH R Zainuddin Fananie.

Lahir di Gontor, 23 Desember 1908, wafat di Jakarta, 21 Juli 1967. Alumni Tabligh School (Madrasah Muballighin III) Yogyakarta (1930). Konsul Pengurus Besar Muhammadiyah Sumatera Selatan (1930-1942). Trimuti Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo

“Setiap masyarakat harus merancang masa depannya sendiri untuk menciptakan kemakmuran dan harga diri di tengah-tengah bangsa lain. Tanggung jawab ini tidak bisa dilakukan bila anggota masyarakat belum terdidik”

Pada tahun 1934 KH. R. Zainuddin Fananie menulis buku berjudul Pedoman Pendidikan Modern. Buku ini memuat beberapa gagasan pokok, yaitu: *Pertama*, posisi sentral fungsi pendidikan bagi penyadaran warga bangsa atas segala kewajibannya untuk berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain; *Kedua*, tujuan pendidikan dimaksudkan untuk menunjukkan jalan kebaikan bagi siswa; *Ketiga*, modern bermakna ‘berada dalam kemajuan’ bukan berarti penggunaan rasionalitas yang menegasikan agama; *Keempat*, pendidikan modern berarti bahwa seluruh proses pendidikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepribadian; dan *Kelima*, pendidikan adalah menciptakan kemajuan di tengah persaingan antarbangsa dalam menata kehidupan dunia.

Secara umum, buku Pedoman Pendidikan Modern itu menggagas konsep pemikiran pendidikan yang cukup visioner. Buku ini telah mengembangkan konsep pendidikan karakter sejak tahun 1930-an. KH R Zainuddin Fananie membagi ranah pendidikan menjadi dua: pendidikan jasmani (pendidikan kekuatan fisik) dan

pendidikan ruhani (pendidikan kesehatan mental). Pendidikan ruhani dibagi menjadi dua, pendidikan akal dan budi pekerti. Pendidikan akal bertujuan agar peserta didik menjadi pribadi yang logis, kreatif dan kritis. Sedangkan budi pekerti bertujuan menghasilkan manusia Indonesia yang berintegritas, hati yang suci dan terus bergerak dalam upaya berlomba-lomba dalam kebaikan.

KH R Z. Fananie juga mengembangkan pemikiran tentang pendidikan berbasis rumah, yang saat ini dikenal sebagai *homeschooling*. Dalam pandangan KH Zainuddin Fananie, “Jika sekolahan tidak membuat anak semakin baik, maka orang tua dapat mendidik anaknya di rumah. Dengan syarat, ada peraturan dan dipakainya sistem pendidikan sekolahan, orang tua menjadi gurunya”. Pemikiran ini mengandung konsep penting dalam pendidikan dalam kehidupan orang tua dan anak. Jika mempercayakan anak ke sekolah, maka orang tua tetap tidak boleh melepaskan tanggung jawab mendidik dan mengasuhnya. Selain itu, pendidikan di rumah (pendidikan keluarga) adalah pendidikan informal bagi anak dan sekolahan pertama bagi setiap manusia. Dan selanjutnya, sekolah harus mengajarkan pendidikan keagamaan (agama Islam) tidak hanya mendidik kecerdasan (intelektualisme semata).

Dalam konsep pendidikannya, KH R.Z. Fananie mengedepankan pentingnya memberikan *reward* and *punishment* (penghargaan dan hukuman). Apresiasi diberikan kepada peserta didik yang disiplin, meraih prestasi dan berkelakuan baik. Sebaliknya, hukuman diberikan kepada peserta didik yang melanggar aturan sehingga memberi efek jera dan tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Untuk memberi hukuman, KH Zainuddin Fananie menekankan beberapa etika: tidak mengandung kekerasan, seimbang dengan kesalahan yang diperbuatnya, tidak diskriminatif dan bersifat mendidik.

KH Zainuddin Fananie, mengembangkan konsep pendidikan integral yang berpijak pada dimensi kognitif (pengetahuan/ intelektual), afektif (emosional) dan psikomotorik (spiritual). Melalui buku ini, beliau juga mengajak kita berfikir seimbang,

tidak anti-Barat, karena modernitas itu banyak berasal dari Barat. Karena itu perlu disaring pemikiran Barat yang sesuai dengan konsep ke-Indonesiaan dan ke-Islaman.

Buku Pedoman Pendidikan Modern itu kemudian menjadi panduan dalam mendirikan sebuah pondok pesantren moderen. Bersama kakak dan adiknya, yakni KH. Ahmad Sahal dan KH. Imam Zarkasyi, yang disebut sebagai Trimurti (tiga serangkai), KH. R. Zainuddin Fananie merintis pendirian Kuliyyatul Mu'alimin al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo Jawa Timur pada tahun 1936.

Secara garis besar, pemikiran dan pergerakan KH R.Z. Fananie ini dapat dipetakan dalam tiga bagian. *Pertama*, sebagai tokoh pemikir, ide-ide dan gagasan KH.R. Zainuddin Fananie secara ekplisit tergambar dalam karya-karya beliau, seperti *Pedoman Pendidikan Modern* (1934), *Pedoman Penangkis Crisis* (1935), *Sendjata Pengandjoer dan Pemimpin Islam* (1937) dan lain-lain. *Kedua*, sebagai tokoh pendidikan, KH. R. Zainuddin Fananie telah mewujudkan penyelenggaraan sebuah lembaga pendidikan Kuliyyatul Mu'amilin al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo sehingga menjadi barometer dan model penyelenggaraan pondok pesantren modern di masa sekarang. *Ketiga*, sebagai tokoh aktivis Islam modernis, semangat juang KH. R. Zainuddin Fananie tidak perlu diragukan lagi.

Kata-kata hikmah (*quote*) KH. R. Zainuddin Fananie:

1. *Pendidikan seharusnya bertujuan untuk membuat kehidupan manusia dipenuhi kebaikan yang sebenar-benarnya.*
2. *Orang-orang yang mendapatkan pendidikan moral akan mampu bekerja dengan penuh kegirangan dan ringan hati, meskipun mendapatkan pelbagai cobaan dan godaan.*
3. *Pendidikanlah sebagai faktor yang terpenting, itulah sebabnya, maka soal pendidikan ini menjadi soal yang penting sepanjang masa, dan tiang bagi kemajuan.*
4. *Ingatlah pula, manusia yang pandai saja itu, apabila berbuat jahat lebih jahat dari orang bodoh.*
5. *Yang dimaksud dengan pendidikan tubuh yaitu: penjagaan tentang kesehatan badan, dan ajaran (didik) supaya kuat mengerjakan segala kewajibannya.*

6. Kalau kita yang hidup masa kini belum insaf akan pentingnya pendidikan dan menerima begitu saja kondisi yang sedang kita alami, berarti kita tidak mengalami kemajuan, tetapi mundur ke belakang.
7. Tujuan mengajar adalah mendidik, tetapi tujuannya mendidik bukan mengajar (mengisikan ilmu pengetahuan saja).
8. Dari yang dibimbing oleh jiwalah yang menjadi pendidik dalam dunia pergaulan sosial.
9. Ilmu disini bukan berarti ilmu pengetahuan melainkan pendidikan yang jelas artinya itu, yang mengandung ilmu pergaulan hidup yang berupa pengalaman atau evering itu.
10. Rmaha tangga yang pendidikannya tak beres, tak dapat diharapkan dapat menghasilkan individu yang dapat berperan serta dalam pergaulan bangsa secara baik.
11. Asas pendidikan dalam rumah tangga ialah kesayangan dan kecintaan. Asas hidup di dunia pergaulan umum ialah keadilan dan kebenaran.
12. Suatu bangsa yang menghendaki kesempurnaan, ketenangan dan kemakmuran membutuhkan rumah tangga yang memiliki sistem pendidikan yang teratur, rapi, serta penuh kebaikan.
13. Orang tua belum terlepas dari kewajibannya mendidik dan memelihara anaknya, dengan masuknya anak ke sekolah tetapi tambahlah kewajiban.
14. Lebih penting lagi karena sekarang ini adalah zaman beraturan, sehingga baiknya peraturan itu telah menjadi satu senjata yang amat penting dalam pergaulan dan perjuangan hidup.
15. Syahdan pancaindra anak-anak itu terus bertambah kesempurnaannya, begitu pula segala tubuhnya pengasuh atau pendidik harus memelihara (mendidik) dengan menurutkan kemajuan.
16. Kewajiban yang sangat berat itu, semuanya akan dapat dilalui dan dikerjakan hingga menghasilkan kesuksesan, apabila jiwa kita telah terdidik sebagai mana mestinya. [Ad]

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Abudien Nata. 2005. *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Adams, Cindy. 1966. Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.
- Arsana, Andi. 2007. *Batas Maritim Antarnegara*. Yogyakarta: UGM Press.
- Arsana, Andi. 2014. *Memagari Laut Nusantara*. dalam MemagariLaut Nusantara.pdf
- Bakornas PB. 2007. Bab II Konsepsi Pengurangan Risiko Bencana. Bakornas PB. diakses dari www.academia.edu/15212701/RENCANA_AKSI_NASIONAL_PENGURANGAN_RISIKO_BENCANA_2006-2009 diunduh pada tanggal 20 Mei 2013.
- Bappenas. 2012. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Bappenas. Diunduh pada tanggal 20 November 2013 dari http://www.gitews.org/tsunami-kit/id/E6/sumber_lainnya/produk_hukum_nasional/RAN-RENAS/RAN-PRB-2010-2012-BAPPENAS.pdf
- Godschalk, D. R., Beatley, T., Berke, P. R., Brower, D., & Kaiser, E. J. (1999). *Natural hazard mitigation: Recasting disaster policy and planning*. Washington, D.C.: Island Press.
- Haedar Nashir. 2010. *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Hamka. 1958. *Ajahku*, Djakarta: Widjaja.
- _____. 1951. *Kenang-kenangan Hidup*. Djakarta: Gapura.
- _____. 1974. *Muhammadiyah di Minangkabau*. Jakarta: Nurul Islam.
- _____. 1950. *Sedjarah Islam di Sumatera*. Medan: Pustaka Nasional.
- James R. Rush. 2017. *Adicerita Hamka: Visi Islam Sang Penulis Besar untuk Indonesia Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Lasa Hs., dkk. 2014. 100 Tokoh Muhammadiyah yang Menginspirasi. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah.
- Lindell, M. K., Prater, C., & Perry, R. 2006. *Fundamentals of emergency management*. Emmetsburg, MD: Federal Emergency Management Agency Emergency Management Institute. Available at training.fema.gov/EMIWeb/edu/fem.asp.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. 2017. *Tokoh dan Pimpinan Tarjih, Riwayat Hidup dan Pemikiran*. Yogyakarta: MTT PP Muhammadiyah.

- Mastuhu. 1994. *Dinamika Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Seri INIS XX. Jakarta: INIS.
- Mestika Zed. 2003. *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950*. Jakarta: LP3ES.
- Mu'arif dan Hajar NS. 2011. *Srikandi-Srikandi 'Aisyiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- M. Syoedja'. (Arief Budiman Ch. editor). tt. *Cerita tentang KHA Dahlan Catatan H.M. Syoedja'*, tidak diterbitkan. dalam versi pdf bisa diunduh di: http://mpi.muhammadiyah.or.id/muhfile/mpi/download/Cerita%20tentang%20KHA%20Dahlan%20-catatan_HM_Syoedjak.pdf
- M. Yunan Yusuf, Yusron Razak, Sudarnoto Abdul Hakim (ed). 2005. *Ensiklopedi Muhammadiyah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Notosoetarjo. 1963. *Bug Karno Mencari dan Menemukan Tuhan*. Jakarta. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. 1980. *Mengenal Muhammadiyah Sumatera Barat dalam Rangka Milad Muhammadiyah ke-70*. Padang: PWM Sumatera Barat.
- Rais, Jacub, et al. 2004. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Yogyakarta: Pradnya Paramita.
- Roni Tabroni. 2016. *Komunikasi Politik Soekarno*. Bandung: Simbiosis.
- Soufyan Ras Burhany (ed). 1981. *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat*. Padang: Islamic Center Sumatera Barat.
- Soekarno. 1964. *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid 1. Jakarta: Penerbit Panitia DBR.
- Sukrianta AR dan Abdul Munir Mulkhan (peny). 1985. *Perkembangan Pemikiran Muhammadiyah dari Masa ke Masa*, Yogyakarta: PT Dua Dimensi.
- Syafa'at R. Slamet. 2013. *HM. Djahhari: Dari Muhammadiyah Untuk Ummat dan Bangsa*. Bandung.
- Triutomo, Sugeng. 2007. *Prinsip Dasar Manajemen Bencana*. Badan Penanggulangan Bencana Nasional.
- UNISDR. 2005. *Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the resilience of nations and communities to disasters. World Conference on Disaster Reduction, 18-22 Januari, 2005, Kobe, Hyogo, Jepang*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diunduh di: https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf
- Widodo Asmowiyoto, dkk. 2013. *Ensiklopedi Pers Indonesia*. Jakarta: PP PWI.
- M. Yunan Yusuf, dkk. (ed). 2005. *Ensiklopedi Muhammadiyah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Artikel Ilmiah, makalah:

- Ahmad Syafii Maarif, Menata Ulang Posisi Muhammadiyah Sebagai Gerakan Keagamaan dan Kemasyarakatan di Tengah Dinamika Kehidupan Bangsa, *Makalah*, Disampaikan di Seminar dan Lokakarya Pra-Muktamar Muhammadiyah Satu Abad, Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, 15 Desember 2009.
- Eni Setyowati, 2008. *Muhammad Yunus Anis dan Kiprahnya (1925-1979)*, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Khusnul Arifah Ma'sum. 2017. Konsep Pemerintahan Menurut Bakri Syahid (Studi Atas Tafsir Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi), *Skripsi*, IAIN Surakarta.

Herlinda Rahmawati, Kiprah Siti Hajinah Mawardi di 'Aisyiyah Tahun 1946-1965, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Li'izza Diana Manzil, 2016. Studi Analisis Pemikiran Susiknan Azhari tentang Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang.

Mohamad Ali & Dartim Ibnu Rushd, Percikan Pemikiran Pendidikan Mohammad Djazman, dalam jurnal *Tajdid*, Vol. 15, No. 1, Juni 2017, hlmn. 21-37.

Muh. Mawangir, Soekarno dan Pemikirannya tentang Agama, Politik, dan Pendidikan Islam, dalam JIA No. 1 Th. 17 Juni 2016, hlmn. 139-145.

Rozhikan. 2006. Politik Hukum Persyarikatan Muhammadiyah Kendal tentang Reinterpretasi dan Akuntansi Zakat. *Tesis*. UM Surakarta.

Susiknan Azhari. 2007. Pak Asjuni Abdurrahman Kiprah dan Pemikirannya. *Jurnal Tarjih*. edisi ke-9 Zuhijjah 1427 H/Januari 2007. hlmn. 159-175.

Waston. 2016. Pemikiran Epistemologi Amin Abdullah dan Relevansinya bagi Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Profetika*, Vol. 17, No. 1, Juni 2016: hlmn. 80-89.

Majalah, surat kabar:

Republika, edisi Sabtu, 13 Juni 2015

Sumber online (teks):

adabydarban.blogspot.com/2009/06/riwat-singkat-ahmad-adaby-darban.html

aisyiyah.or.id/id/page/tokoh.html

alif.id/read/muarif/mengenal-siti-bariyah-ketua-aisyiyah-pertama-b209726p/

alif.id/read/muarif/siti-badilah-zubair-dari-guru-aktivis-aisyiyah-hingga-wartawati-b209722p/

alif.id/read/muarif/siti-umniyah-perintis-taman-kanak-kanak-muhammadiyah-b209719p/

anzdoc.com/rancang-bangun-ekonomi-islam-oleh-m-dawam-rahardjo-daftar-is.html

beritakbar.blogspot.com/2009/10/ahmad-adaby-darban-pahami-sejarah.html

bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/100-tahun-profdrhmrasjidi-menteri-agama-pertama

catatanharianisal.blogspot.com/2013/04/kata-kata-hikmah-kh-r-zainuddin-fanie.html

news.detik.com/berita/1761383/sejarawan-adaby-darban-berpulang-saat-berangkat-salat-id

news.detik.com/kolom/3066703/ki-bagus-hadikusumo-dan-dasar-negara-pancasila

ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/Abdul_Hadi_W_M

fananiecenter.blogspot.com/2010/11/biografi-kh-r-zainuddin-fanie.html

fpptma.or.id/2018/07/kh-farid-maruf-kiyai-yang-politikus.html

geotimes.co.id/kolom/politik/islam-bung-karno/

geotimes.co.id/kolom/agama/din-syamsuddin-dan-tantangan-perdamaian-dunia/

gesuri.id/analisis/pemikiran-bung-karno-dan-islam-b1TzxZchI
icasparamadinauniversity.wordpress.com/2012/03/19/abdul-hadi-wm-dan-sastra-sufistik-nya/
imazahra.wordpress.com/2009/02/25/mbah-dauzan-mengangkat-senjata-bernama-mabulir/
indomembaca.blogspot.com/2015/05/menyeimbangkan-pemikiran-pendidikan.html
inpasonline.com/membela-al-maun-tanpa-menjadi-marxis/
ipm.or.id/pokok-pokok-pikiran-abdul-kahar-muzakir-mengenai-pendidikan-untuk-wanita/
jendelasastra.com/wawasan/artikel/sastra-abdul-hadi-dan-fenomena-puisi-sufistik?page=2%2C1
jejakislam.net/siti-munjiyah-dan-kritik-kesetaraan-gender/
jejakislam.net/faqih-usman-dan-kemunduran-umat-islam/
jogja.tribunnews.com/2018/09/29/busyro-muqoddas-krisis-moral-dan-etika-bangsa-indonesia-masih-sulit-dikendalikan
kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah
kendal.muhammadiyah.or.id/artikel-bapelurzam-gerakan-zakat-muhammadiyah-di-kota-kecil-weleri-kendal-detail-580.html
khittah.co/biografi-kh-abdul-djabbar-ashiry-ketua-muhammadiyah-sulawesi-selatan-1971-1975/2459/
kompasiana.com/amfatwa/jangan-setengah-hati-pekuat-pancasila_550ee749813311be2cbc681a
kompasiana.com/immawan.faisal/56cac99f377b61b60e51aeef/kuntowijoyo-dan-warisan-intelektual?page=all
kmm01.blogspot.com/2012/01/sejarah-kmm.html
lazismujatim.org/?p=2066
medium.com/uui-historia/menyusuri-jejak-prof-kh-abdul-kahar-muzakkir-b6d625b0bc99
menara62.com/2018/03/10/selamat-jalan-sahabat-usman-yatim/
merdeka.com/abdul-hadi-widji-muthari/
muhammadiyah.or.id/id/artikel-menata-ulang-posisi-muhammadiyah-sebagai-gerakan-keagamaan-dan-kemasyarakatan-di-tengah-dinamika-kehidupan-bangsa-detail-2.html
muhammadiyah.or.id/id/content-169-det-prof-dr-h-m-din-syamsuddin.html
muhammadiyah.or.id/id/content-162-det-h-m-yunus-anis.html
muhammadiyahstudies.blogspot.com/2015/12/kasman-singodimedjo-pemimpin-di-masa.html
muhammadiyahstudies.blogspot.com/2010/04/sejarah-pemuda-muhammadiyah.html
myalderado.blogspot.com/2015/10/pemikiran-pendidikan-islam-oleh-abdul.html
nasional.kompas.com/amp/read/2008/06/10/1412352/abdul.hadi.wm.dalam.sastra.sufistik
nasional.news.viva.co.id/news/read/239527-ancaman-tsunami-indonesia-

[ranking-1-dunia](#). diakses pada 10 Agustus 2011.
[nasyiah.or.id/Welcome/profil/2](#)
[pahlawanindonesia.com/biografi-k-h-mas-mansur/](#)
[panjimas.com/news/2014/09/20/putra-rusydi-hamka-ayah-bukan-sosok-yang-berbangga-dengan-nama-besar-hamka/](#)
[panjimas.com/news/2014/09/19ustadz-ferry-nur-rusydi-hamka-miliki-kepedulian-besar-terhadap-muslim-falestina/](#)
[republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/07/31/nsca629-siti-bariyah-pendidikan-bekal-utama-dakwah](#)
[republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/24/nnbh04-em-innalilahi-wa-inna-ilaihi-rojiunem-pendiri-umy-dasron-hamid-wafat](#)
[sabrial.wordpress.com/teungku-muhammad-hasbi-ash-shiddiqy/](#)
[suaramuhammadiyah.id/2016/01/18/mengenal-siti-bariyah-ketua-pimpinan-pusat-aisyiyah-pertama/](#)
[suaramuhammadiyah.id/2016/08/12/siti-chamamah-soeratno-aisyiyah-pelopori-perempuan-indonesia-untuk-mengenyam-pendidikan/](#)
[suaramuhammadiyah.id/2018/03/16/mengenal-djazman-al-kindiputra-penghulu-keraton-sang-pendiri-imm/](#)
[suaramuhammadiyah.id/2016/01/24/siti-munjiyah-sang-orator-perempuan-dari-aisyiyah/2/](#)
[suaramuhammadiyah.id/2016/08/06/krh-hadjid-sang-pejuang-1/](#)
[tirto.id/m/abdoel-kahar-moezakir-tD](#)
[tirto.id/sastra-sufi-abdul-hadi-wm-kerinduan-laron-kepada-cahaya-cLyD](#)
[tirto.id/kuntowijoyo-pelopor-ilmu-sosial-profetik-yang-mahir-menulis-novel-cK6W](#)
[tirto.id/dawam-rahardjo-sang-pemikir-ekonomi-islam-cKYQ](#)
[tirto.id/siti-baroroh-baried-profesor-perempuan-pertama-cKu9](#)
[koran.humas.ugm.ac.id/index.php?page=15&hal=244&part=24](#)
[umy.ac.id/said-tuhuleley-selama-rakyat-masih-menderita-tak-ada-kata-istirahat.html](#)
[umm.ac.id/id/berita/dasron-hamid-tegas-karena-disiplin-jujur-untuk-amanah.html](#)
[umm.ac.id/id/berita/elyda-djazman-kritis-dan-proaktif-membangun-perempuan.html](#)
[umm.ac.id/id/berita/muchlas-abror-potret-pribadi-yang-arif-dan-bersahaja.html](#)
[usmanyatim.wordpress.com/2009/01/10/sumpah-pemuda-pancasila-dan-uud-1945/](#)
[wikipedia.org/wiki/Lukman_Harun](#). diakses 29 Juli 2018 pukul 04.08 WIB.
[wikipedia.org/wiki/Rusydi_Hamka](#)
[wikipedia.org/wiki/Soedirman](#). diakses 29 Juli 2018 pukul 17.20 WIB.

Sumber online (video):

[youtube.com/watch?v=vPwLnVH0d8c](#). Islam di Hati dan Pikiran Bung Karno, *Melawan Lupa Metro TV*. Published on Apr 10, 2018.